



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 91/M.PPN/HK/07/2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Proses Bisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat proses bisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Proses Utama, yaitu proses yang menghasilkan keluaran utama atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. Proses Pendukung, yaitu proses yang menghasilkan keluaran pendukung proses utama berjalan dengan baik.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Proses Utama dan Proses Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun secara bertingkat dimulai dari Level 0, Level 1, Level 2, dan peta lintas fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Proses Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian PPN/Bappenas melalui keluaran utama;
 - b. secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai visi, misi, strategi organisasi; dan
 - c. memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- KEENAM : Proses Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kebutuhan pengguna internal; dan
 - b. kebutuhan fungsi di proses utama.
- KETUJUH : Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan hubungan kerja yang efektif dan efisien serta menghasilkan kinerja keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 91/M.PPN/HK/07/2023
TANGGAL 28 JULI 2023

PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
2. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
4. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
5. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
6. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;

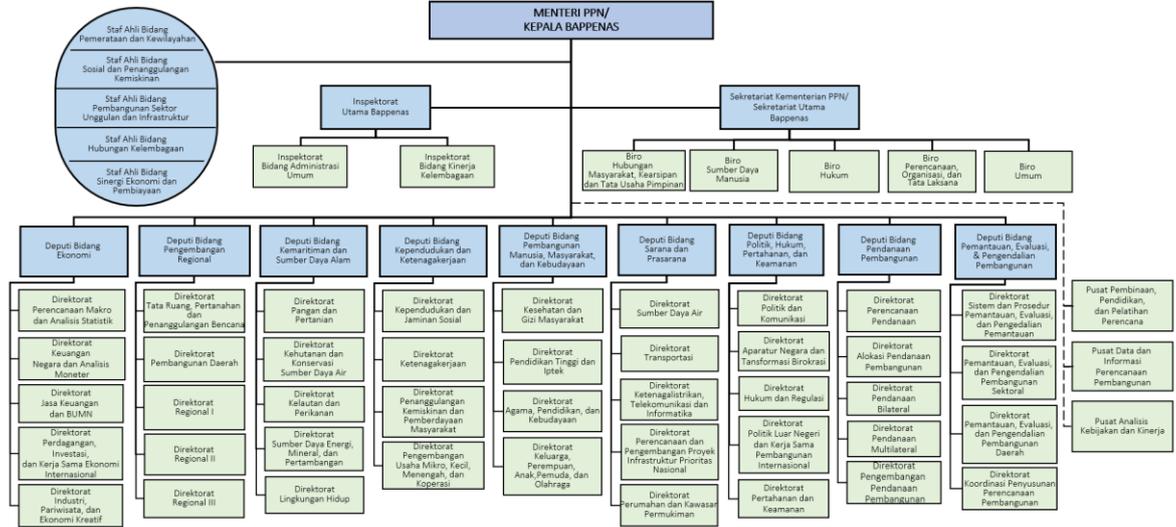
9. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
11. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
12. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
13. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Deputy Bidang Ekonomi;
3. Deputy Bidang Pengembangan Regional;
4. Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
7. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan;
10. Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
11. Inspektorat Utama;
12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
16. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
17. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
18. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
19. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Adapun Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI ESELON I DAN ESELON II
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**



Gambar: Bagan Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas

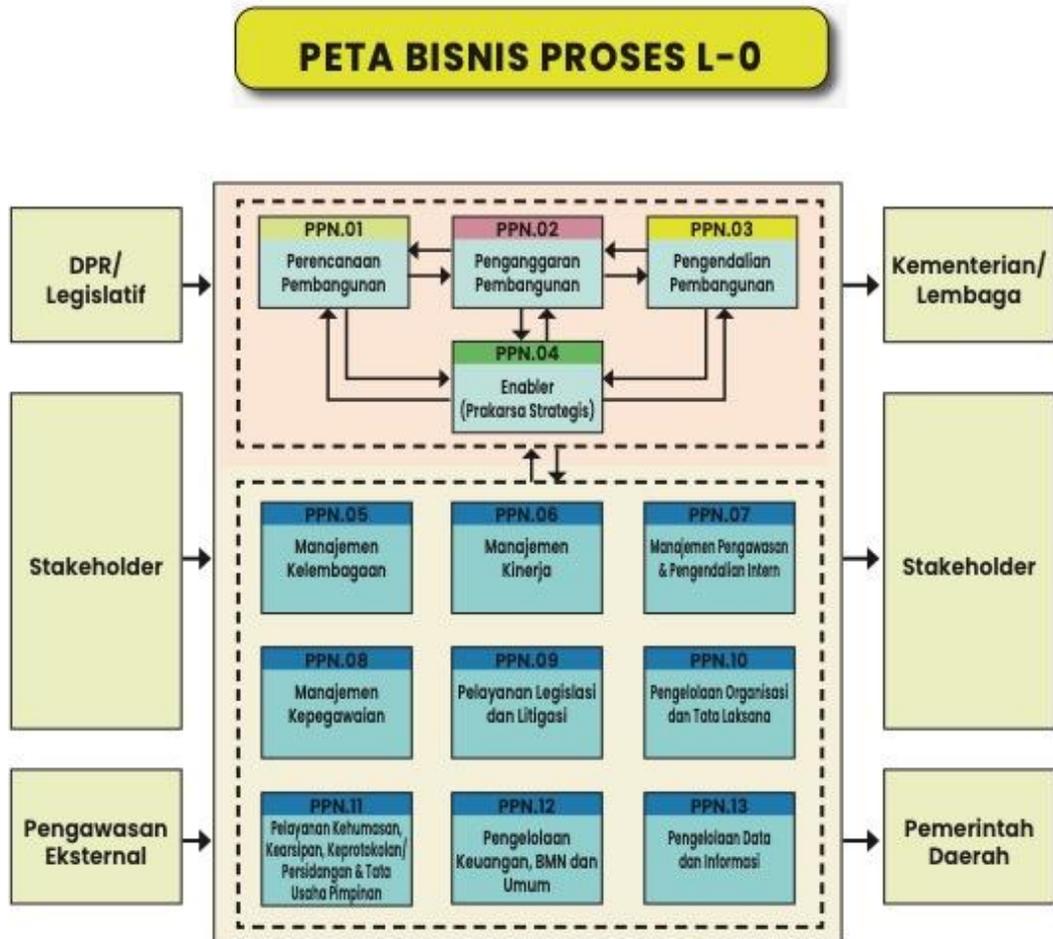
Susunan struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia;
 - c. Biro Hukum;
 - d. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
 - e. Biro Umum.
2. Susunan organisasi Deputy Bidang Ekonomi terdiri atas:
 - a. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
 - b. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
 - c. Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional;
 - e. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
3. Susunan organisasi Deputy Bidang Pengembangan Regional terdiri atas:
 - a. Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
 - b. Direktorat Pembangunan Daerah;
 - c. Direktorat Regional I;
 - d. Direktorat Regional II; dan
 - e. Direktorat Regional III.
4. Susunan organisasi Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Direktorat Pangan dan Pertanian;
 - b. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 - c. Direktorat Kelautan dan Perikanan;
 - d. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan; dan
 - e. Direktorat Lingkungan Hidup.
5. Susunan organisasi Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri atas:
- a. Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial;
 - b. Direktorat Ketenagakerjaan;
 - c. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
6. Susunan organisasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan terdiri atas:
- a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
 - b. Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - c. Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
7. Susunan organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:
- a. Direktorat Sumber Daya Air;
 - b. Direktorat Transportasi;
 - c. Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika;
 - d. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional; dan
 - e. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Susunan organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:
- a. Direktorat Politik dan Komunikasi;
 - b. Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi;
 - c. Direktorat Hukum dan Regulasi;
 - d. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; dan
 - e. Direktorat Pertahanan dan Keamanan.
9. Susunan organisasi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri atas:
- a. Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
 - b. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
 - c. Direktorat Pendanaan Bilateral;

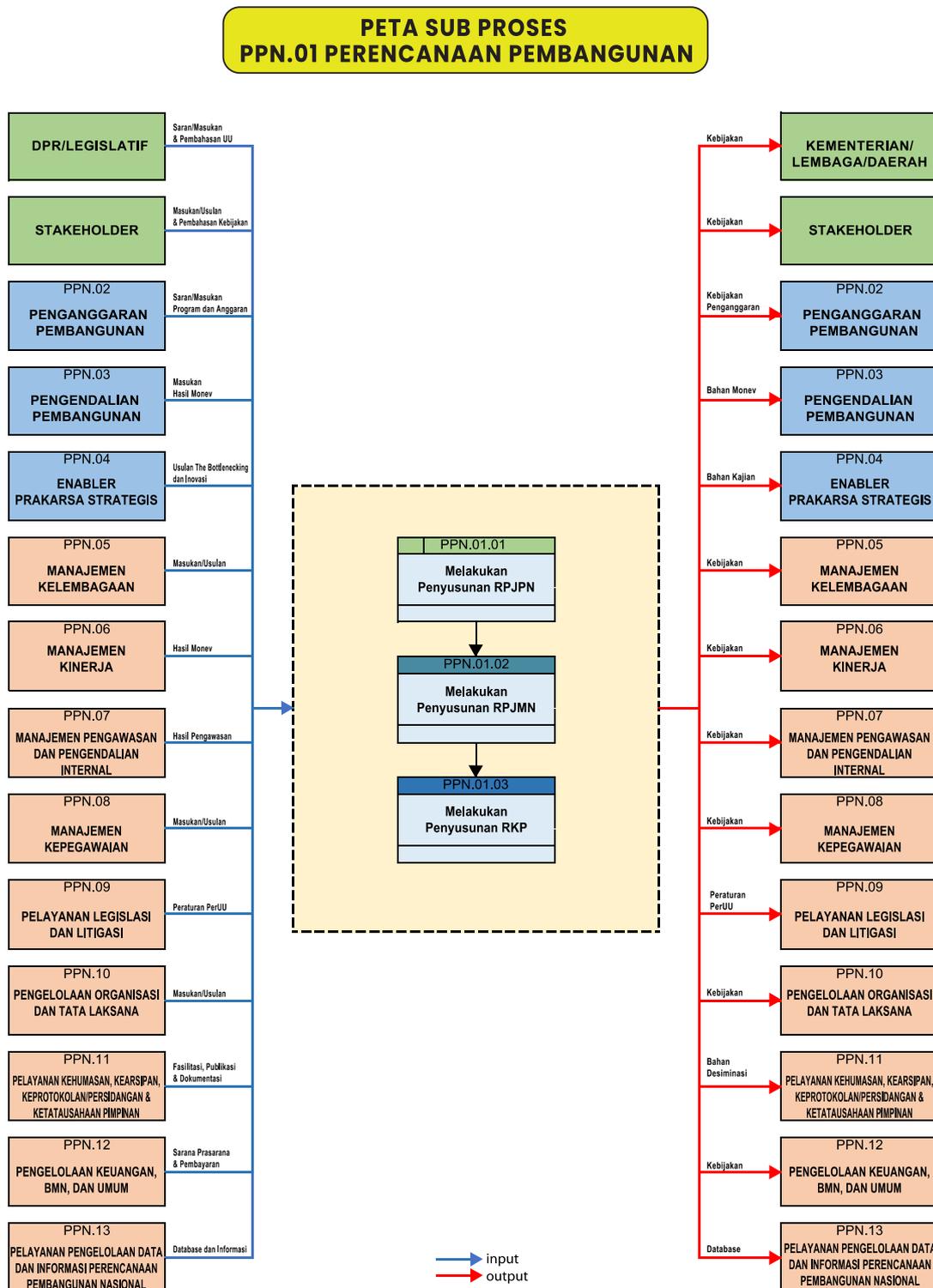
- d. Direktorat Pendanaan Multilateral; dan
 - e. Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
10. Susunan organisasi Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas:
- a. Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
 - b. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
 - c. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
 - d. Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
11. Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:
- a. Inspektorat Bidang Administrasi Umum;
 - b. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan; dan
 - c. Bagian Program dan Tata Usaha.
12. Staf Ahli terdiri atas:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
 - d. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.
13. Pusat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:
- a. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
 - b. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Peta Proses Bisnis Level 0



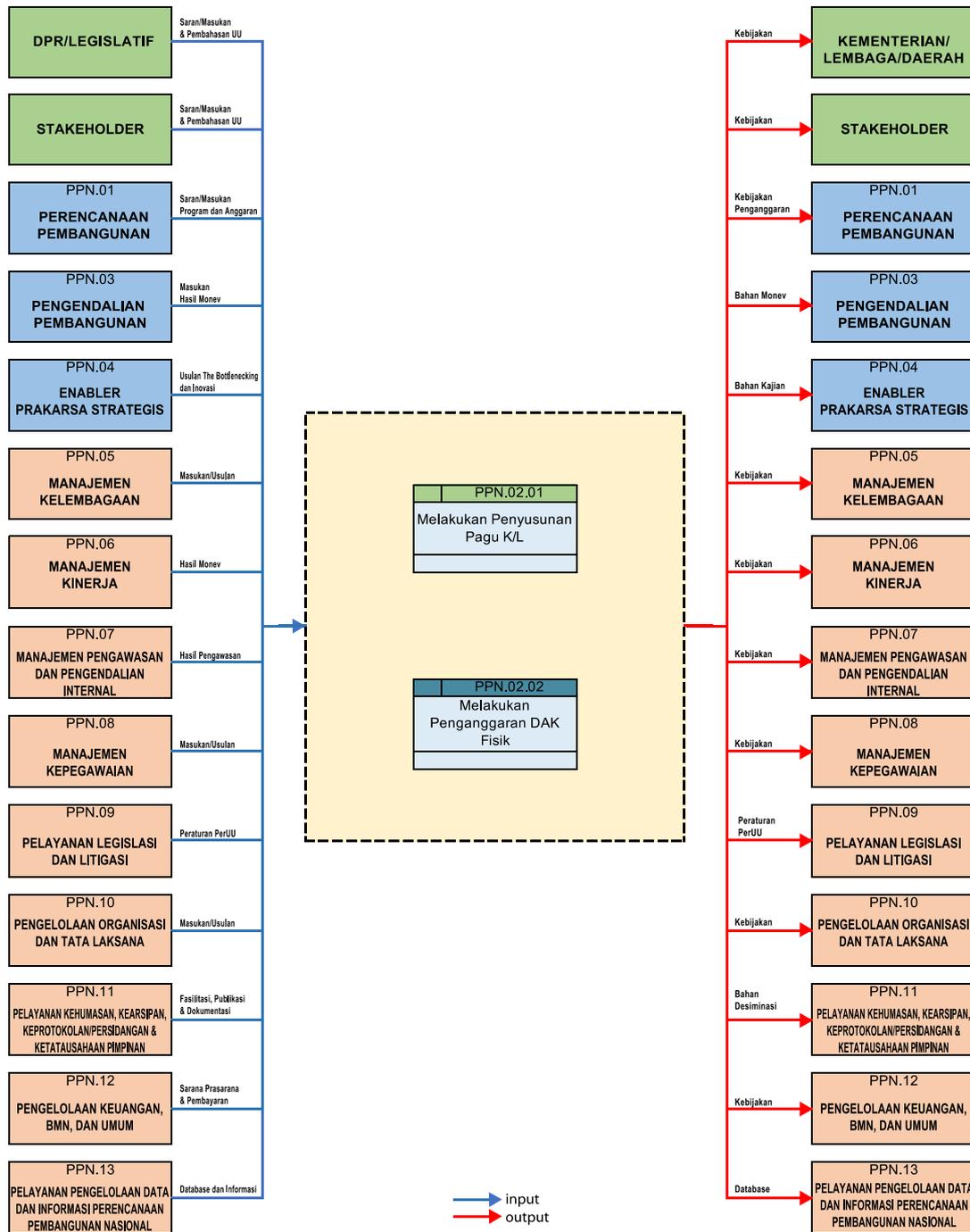
Peta Proses Bisnis Level 1

a. Peta Sub Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan



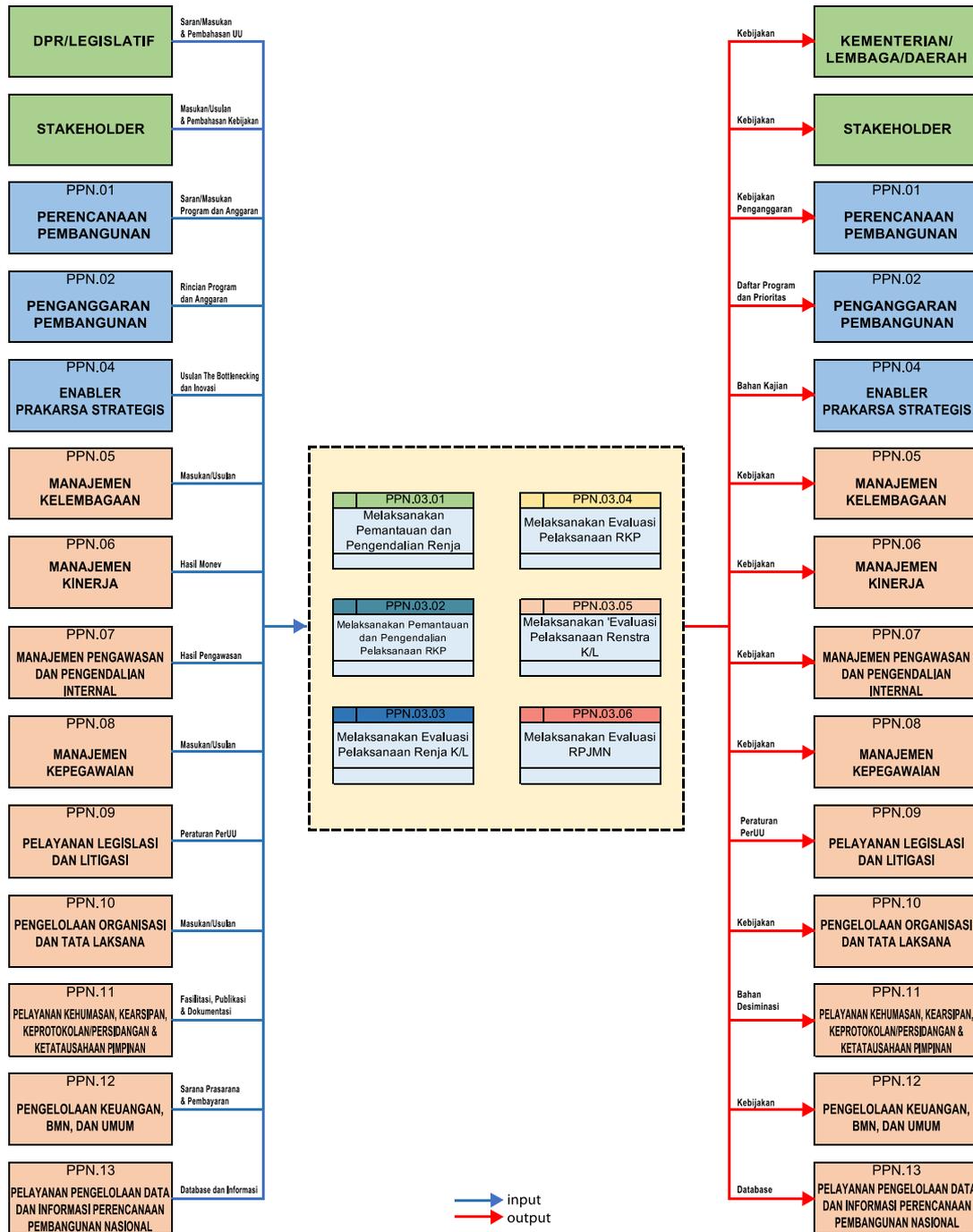
b. Peta Sub Proses Bisnis Penganggaran Pembangunan

**PETA SUB PROSES
PPN.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN**

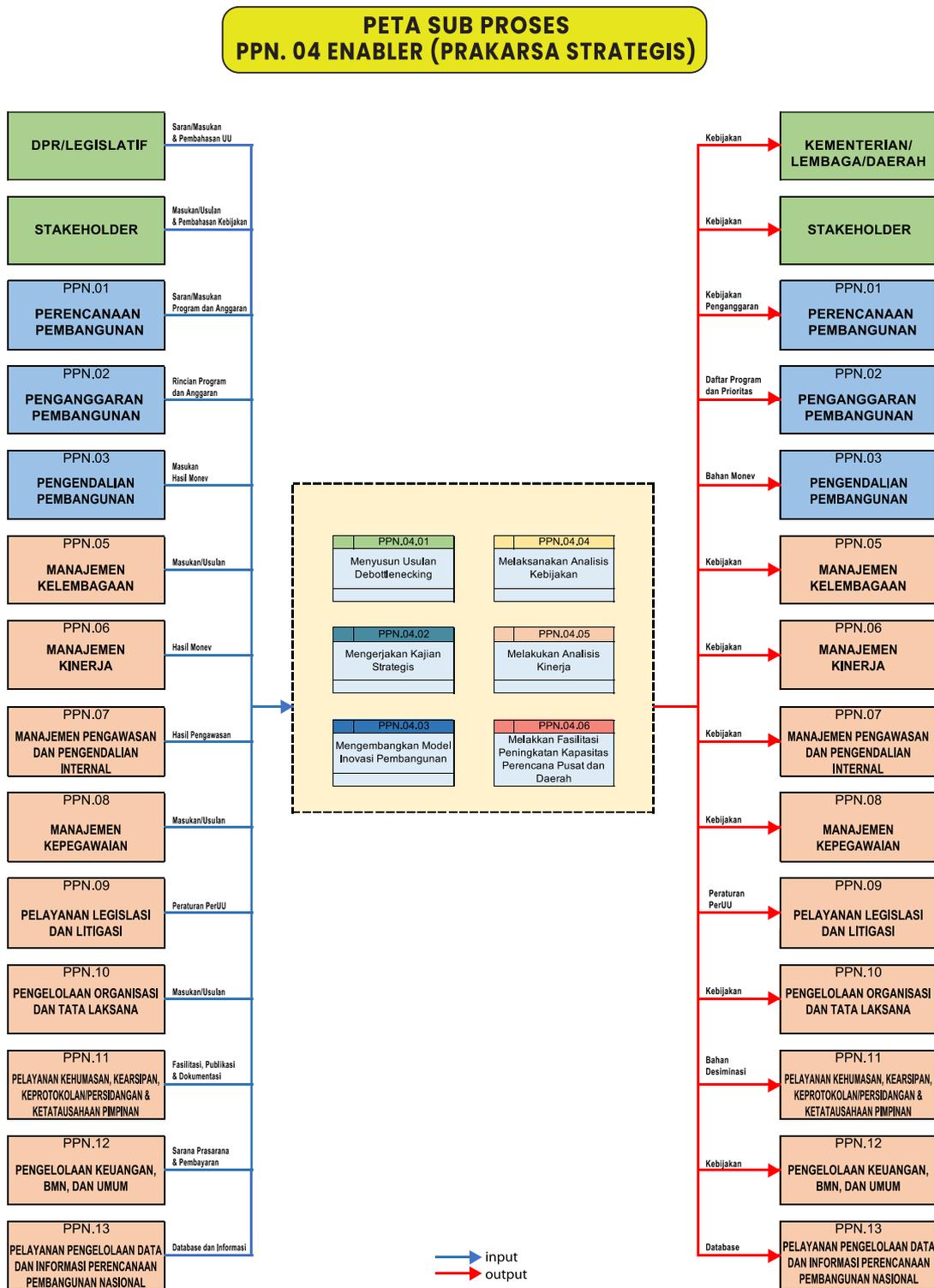


c. Peta Proses Sub Bisnis Pengendalian Pembangunan

**PETA SUB PROSES
PPN.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

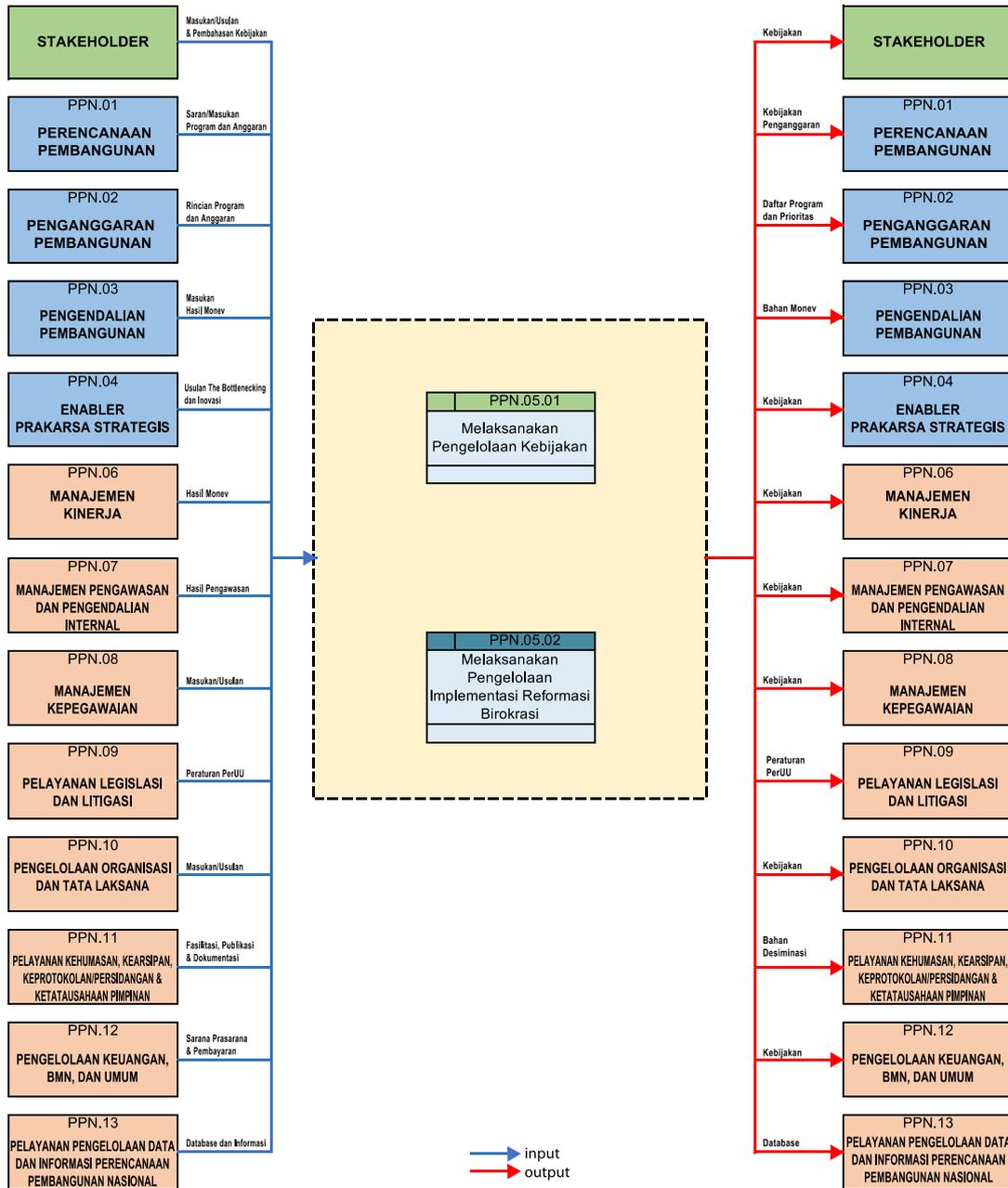


d. Peta Sub Proses Bisnis *Enabler* (Prakarsa Strategis)

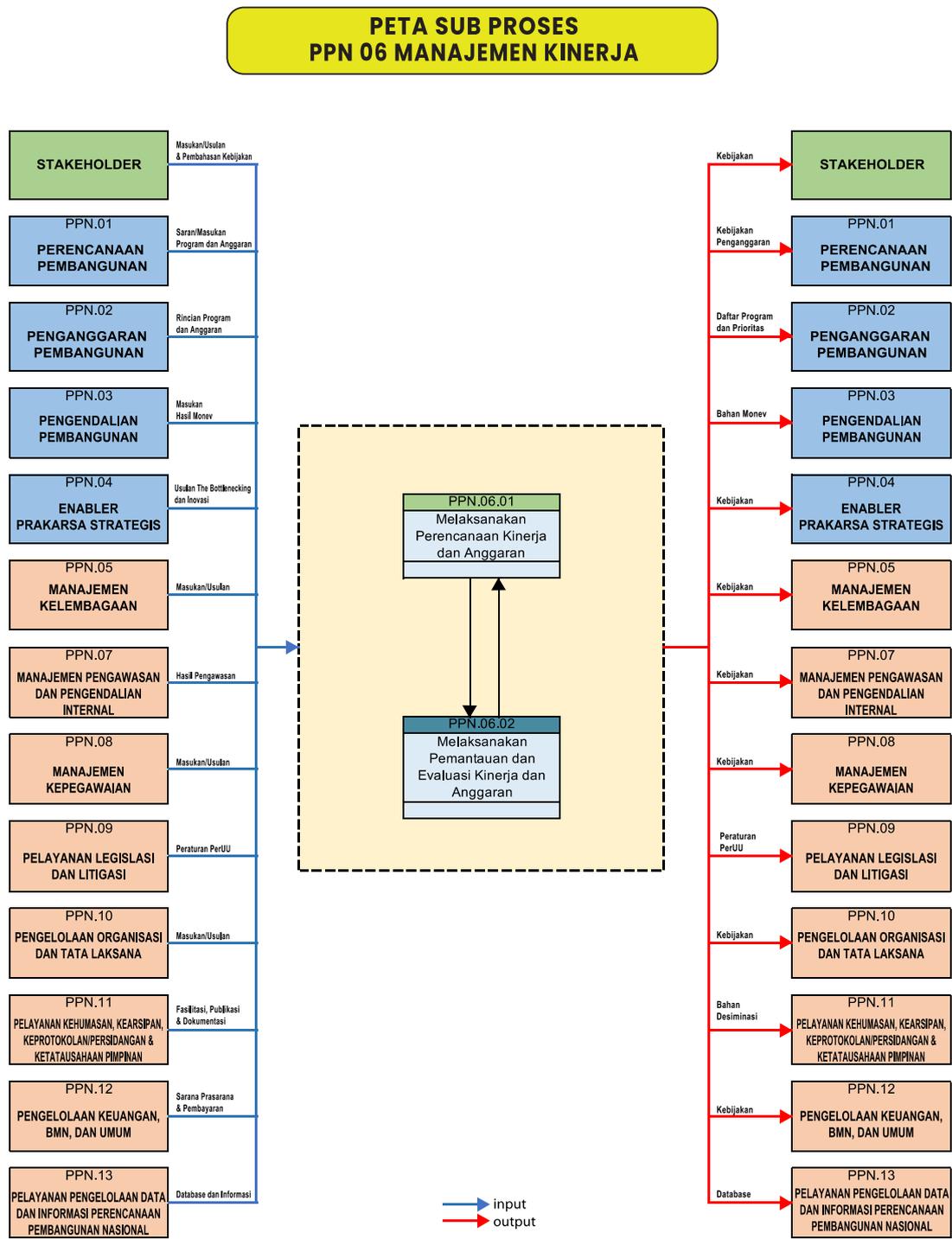


e. Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Kelembagaan

**PETA SUB PROSES
PPN 05 MANAJEMEN KELEMBAGAAN**

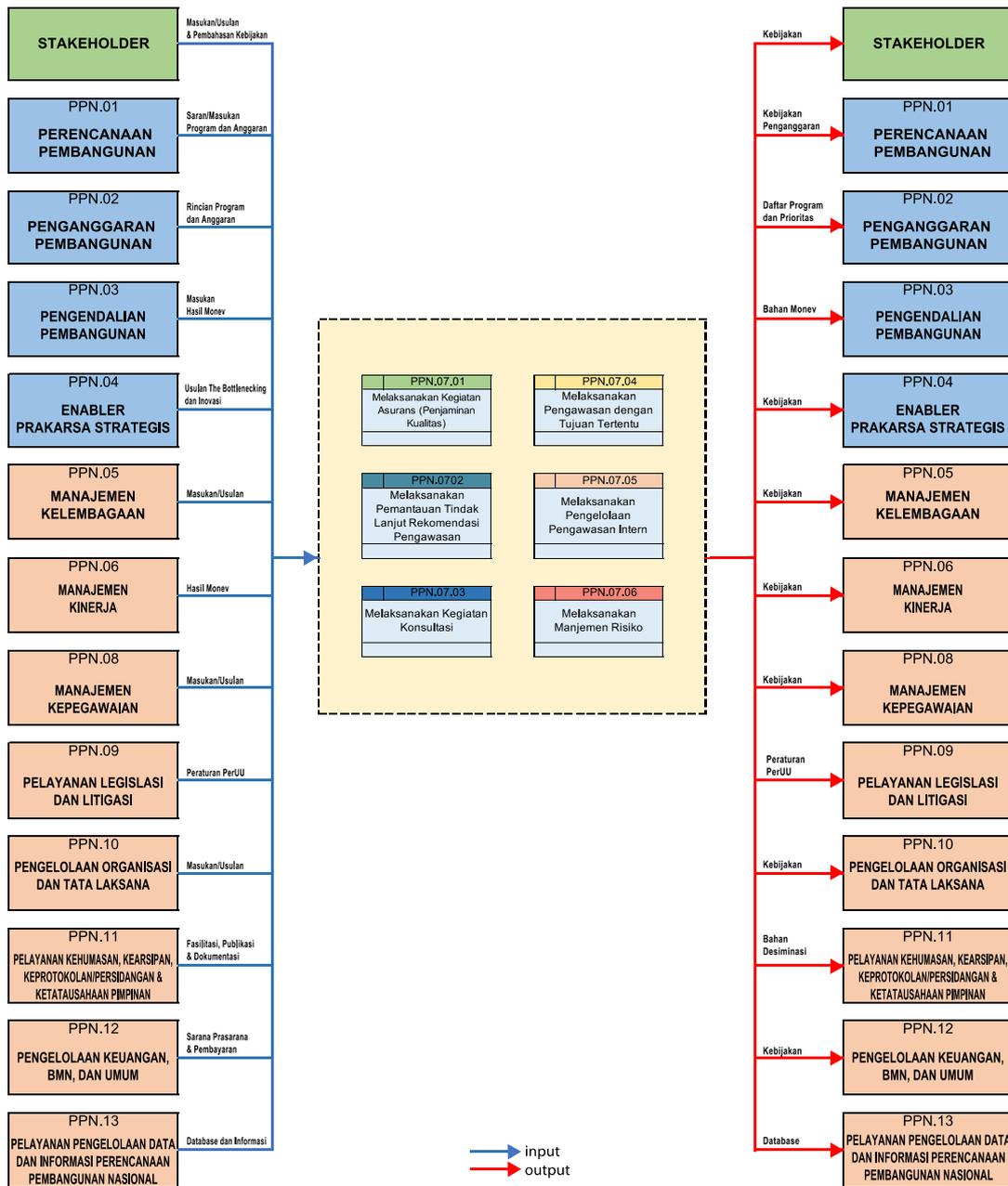


f. Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Kinerja



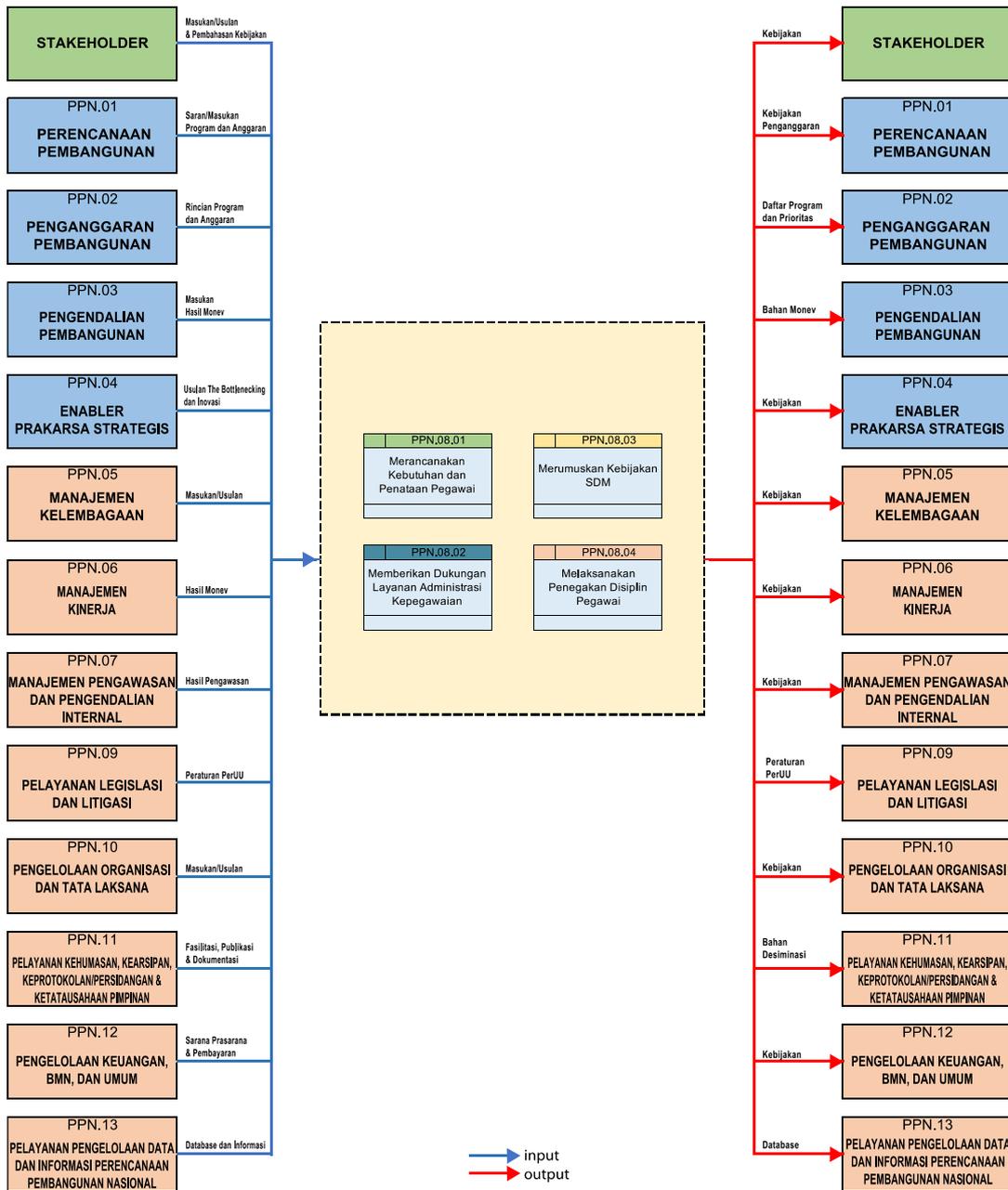
g. Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Internal

**PETA SUB PROSES
PPN 07 MANAJEMEN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN INTERNAL**



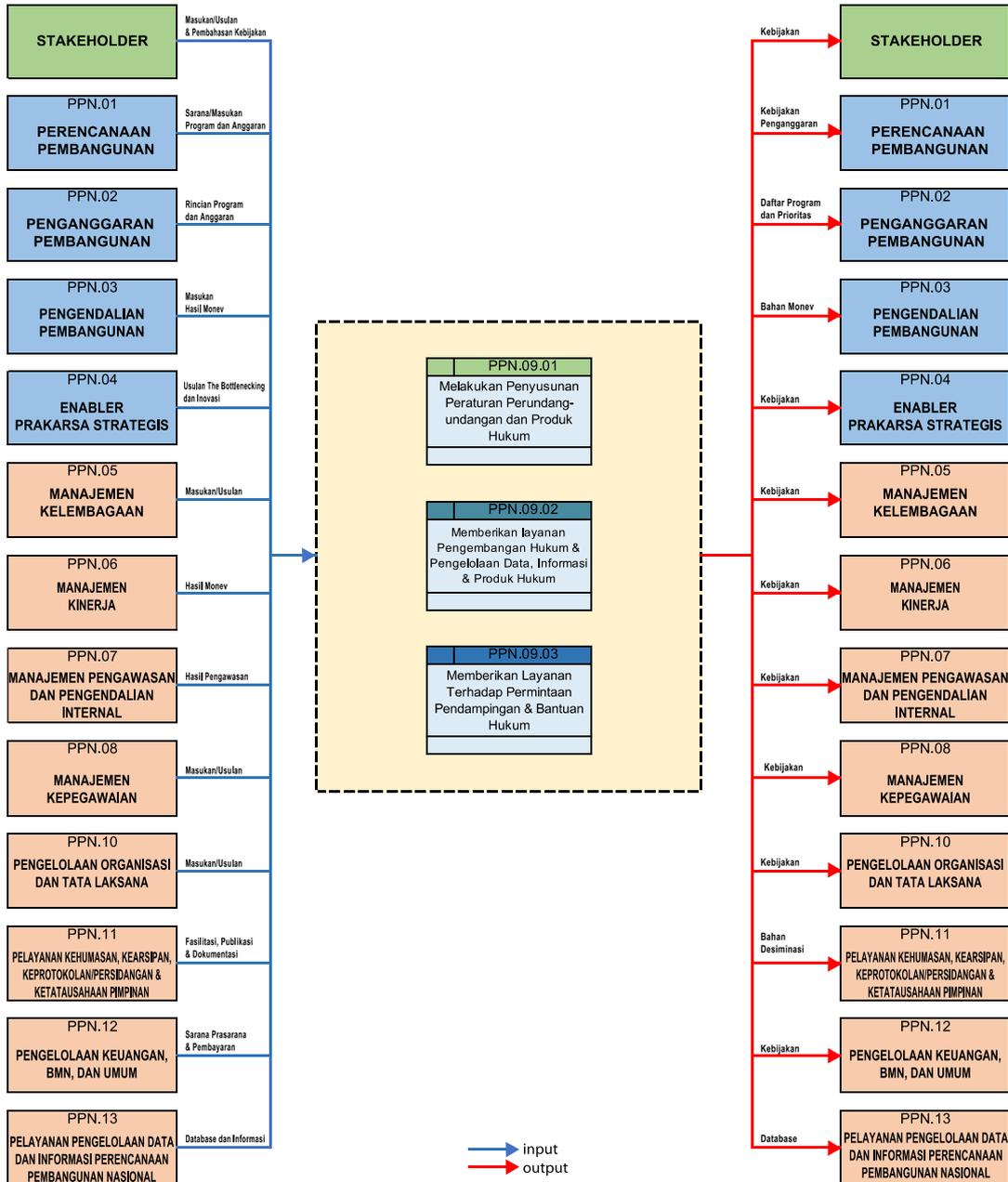
h. Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Kepegawaian

PETA SUB PROSES PPN.08 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN



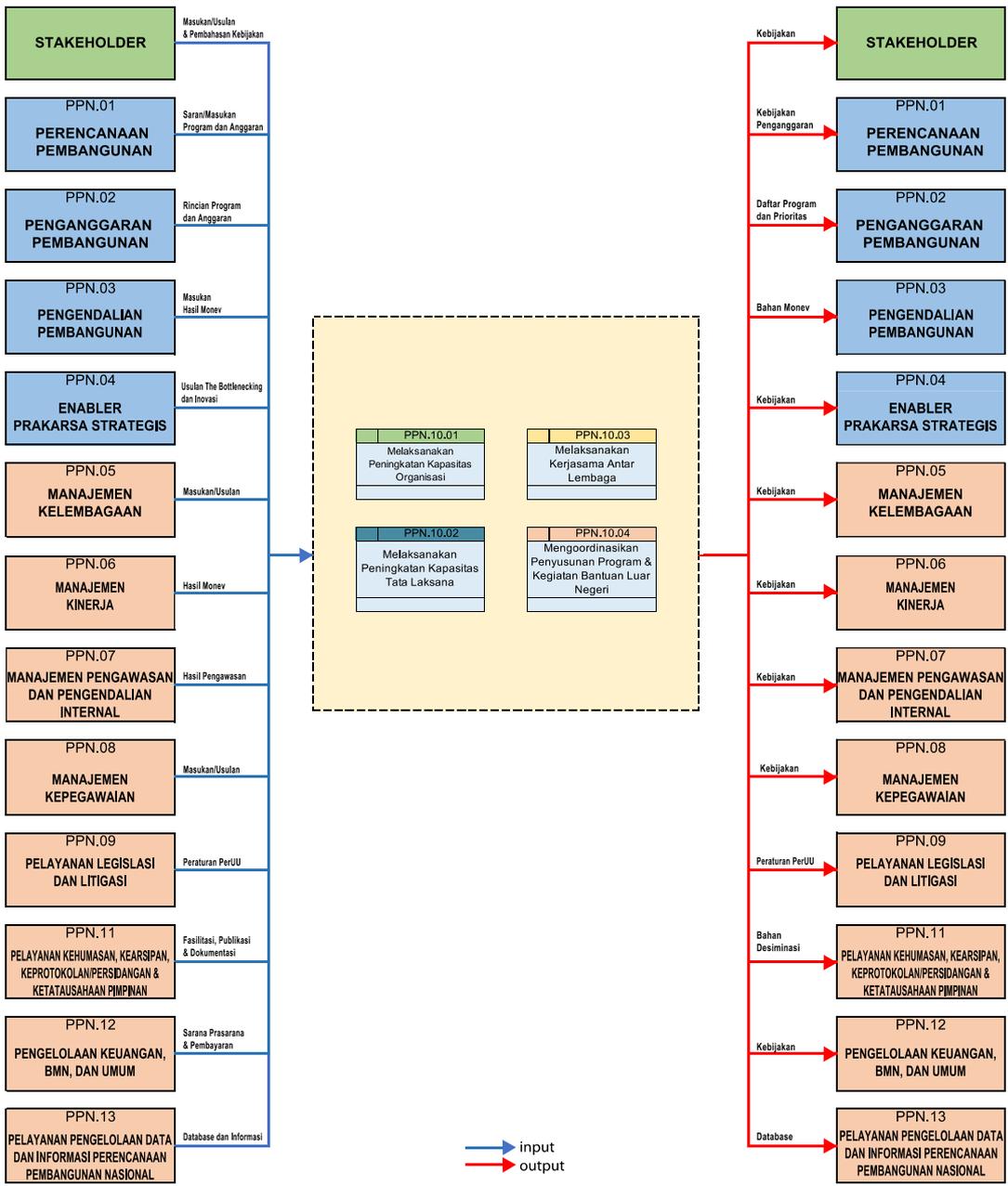
i. Peta Sub Proses Bisnis Pelayanan Legislasi dan Litigasi

**PETA SUB PROSES
PPN.09 PELAYANAN LEGISLASI DAN LITIGASI**



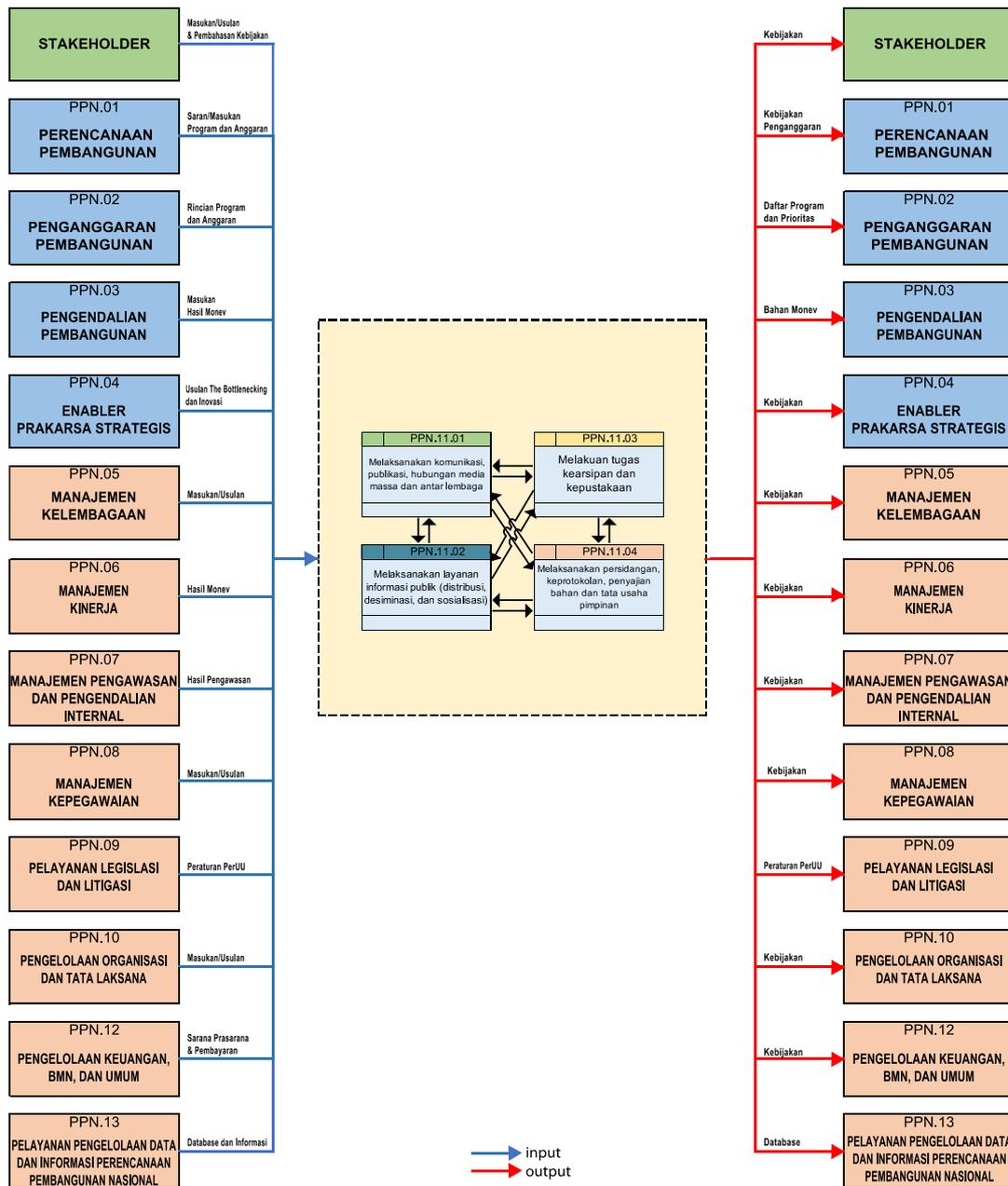
j. Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

**PETA SUB PROSES
PPN.10 PENGELOLAAN ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA**



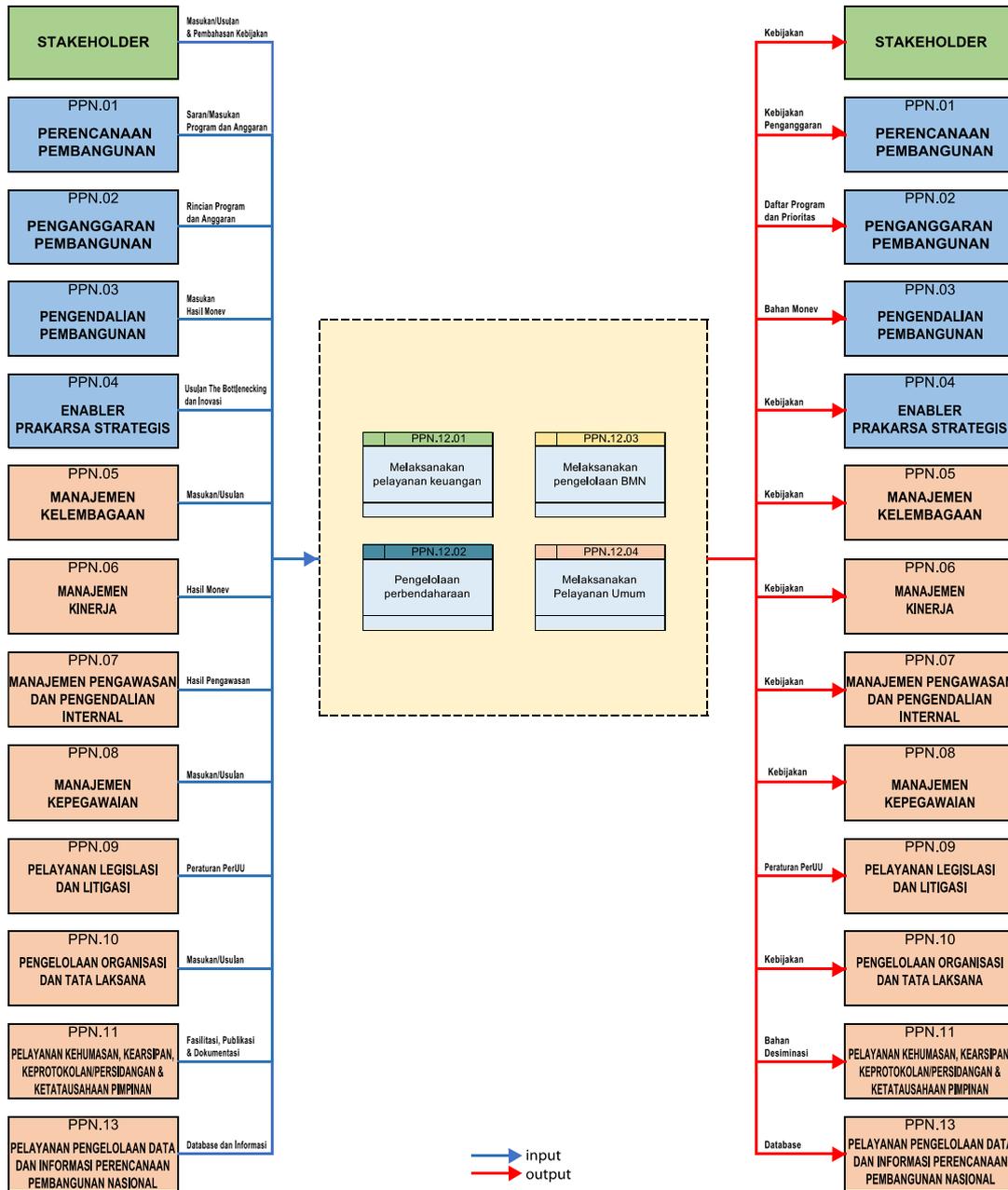
- k. Peta Sub Proses Bisnis Pelayanan Kehumasan, Kearsipan, Keprotokolan/ Persidangan dan Ketatausahaan Pimpinan

PETA SUB PROSES
PPN.11 PELAYANAN KEHUMASAN, KEARSIPAN,
KEPROTOKOLAN/ PERSIDANGAN & KETATAUSAHAAN PIMPINAN



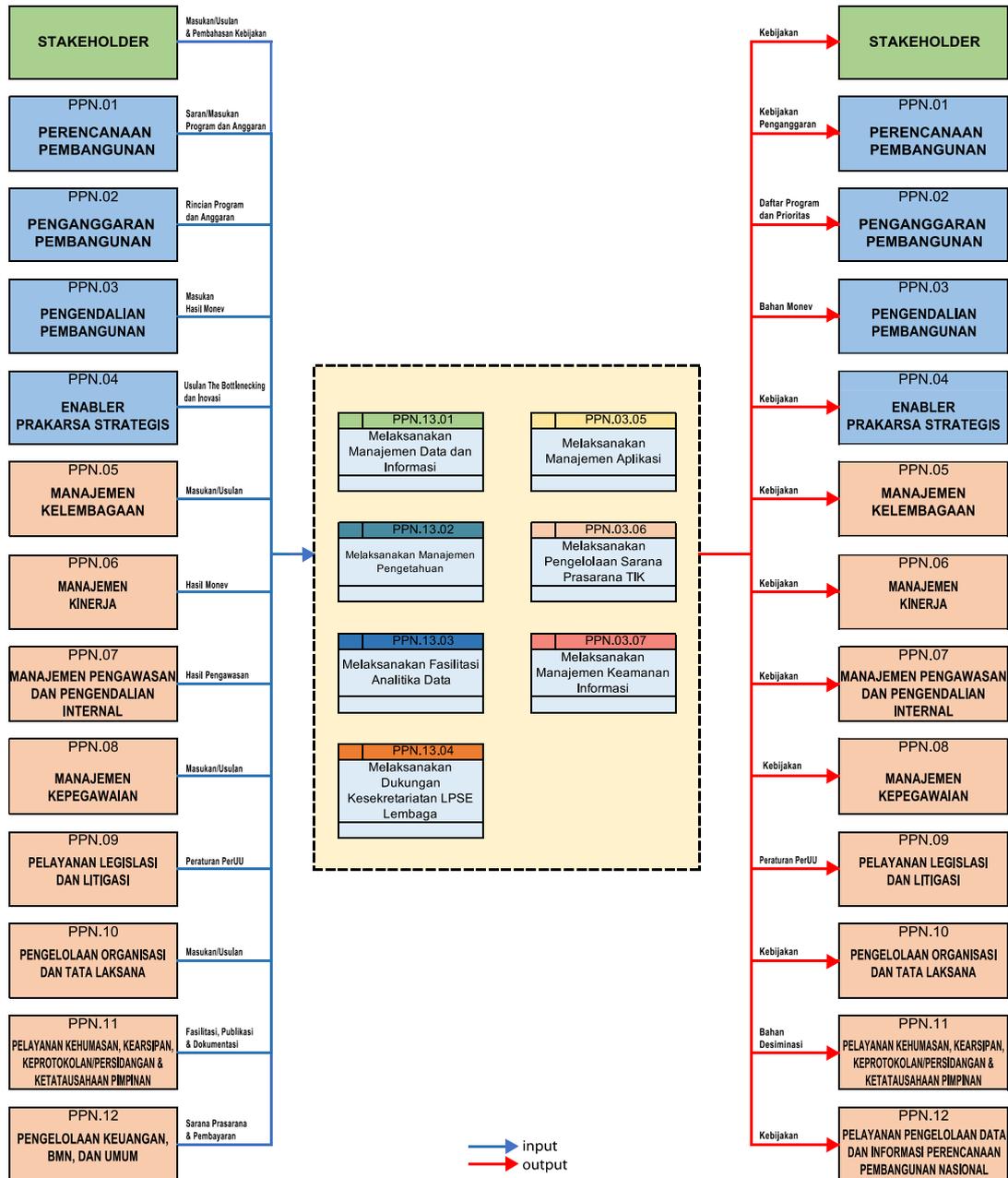
I. Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

**PETA SUB PROSES
PPN.12 PENGELOLAAN KEUANGAN,
BMN, DAN UMUM**



m. Peta Sub Proses Bisnis Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Nasional

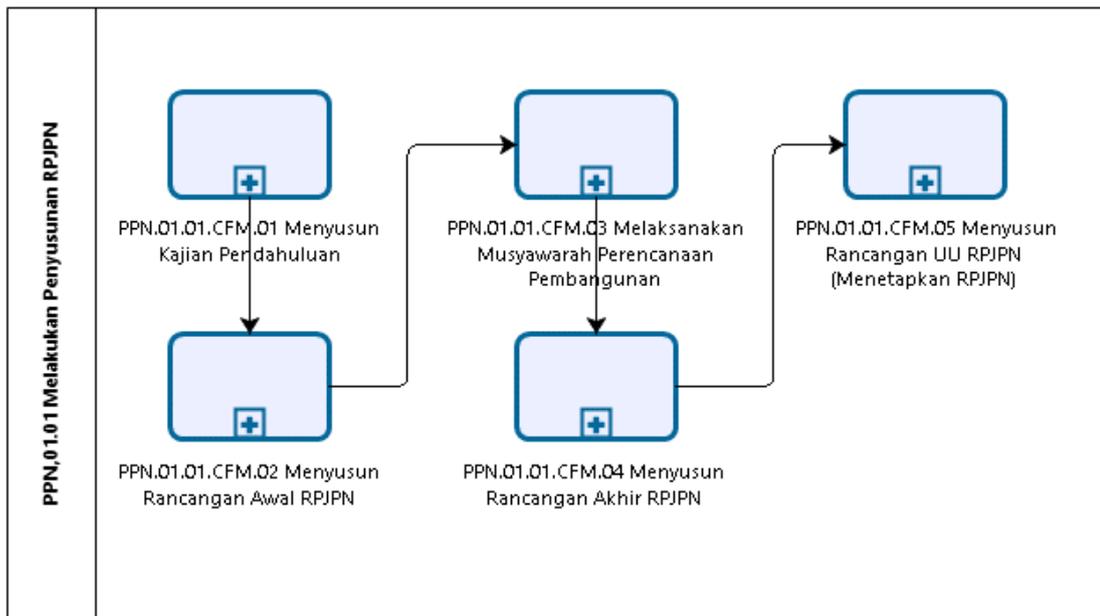
**PETA SUB PROSES
PPN. 13 PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



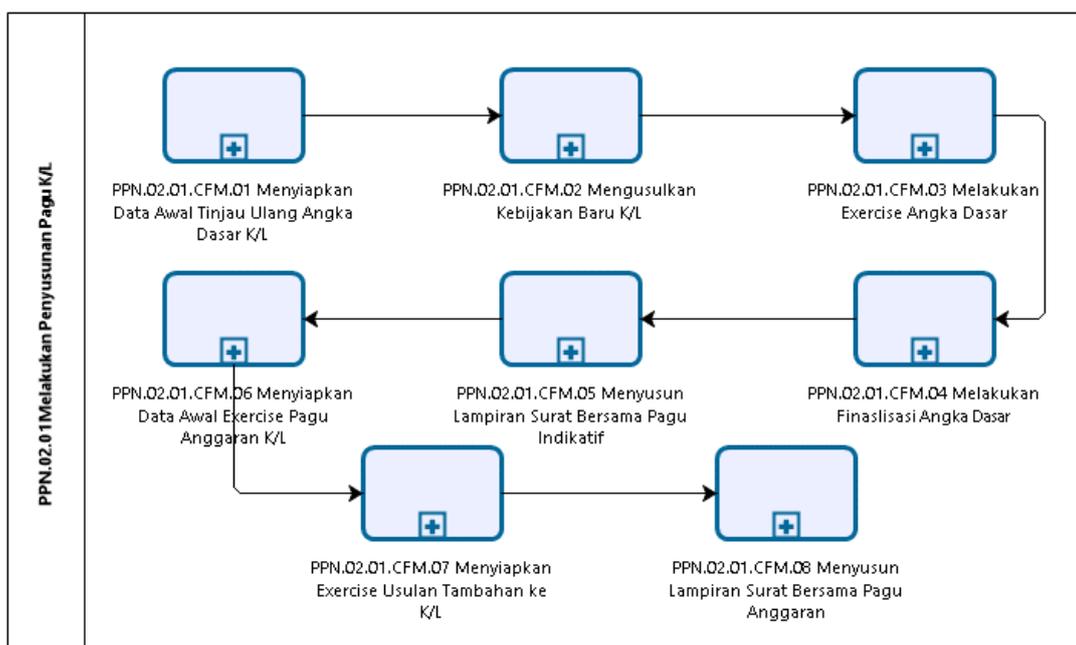
Peta Proses Bisnis Level 2

Peta Sub Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan

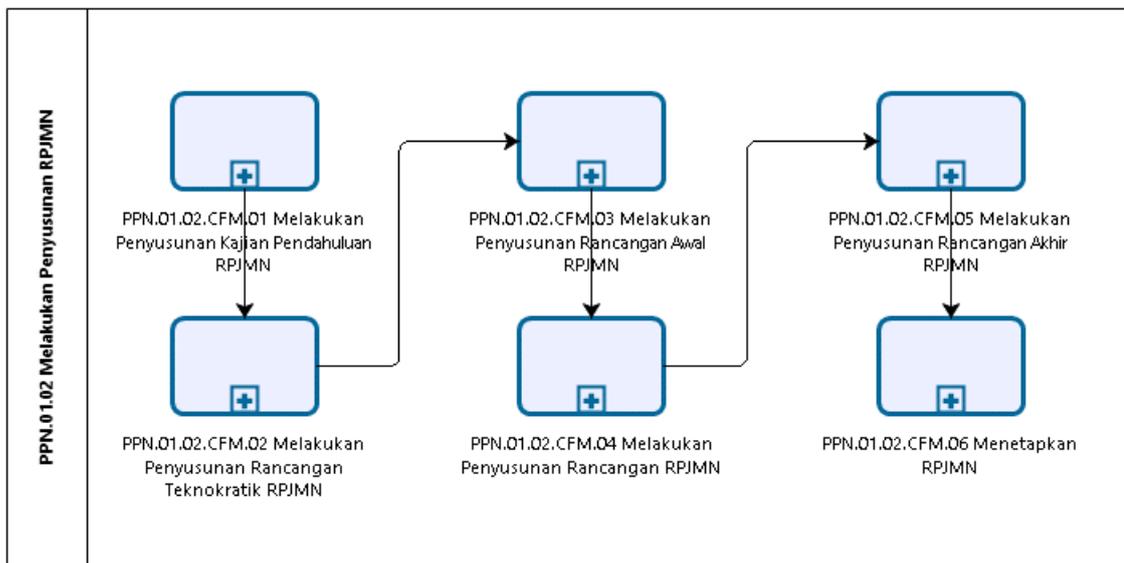
a. PPN.01.01 Melakukan Penyusunan RPJPN



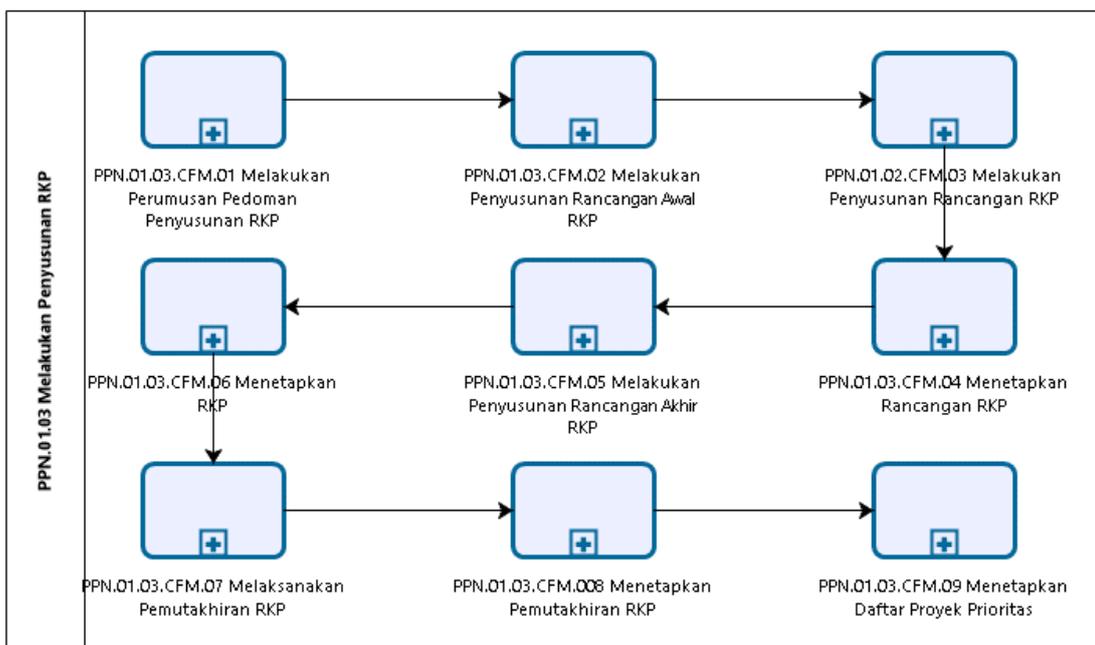
b. PPN.01.02 Melaksanakan Penyusunan Pagu K/L



c. PPN.01.02 Melakukan Penyusunan RPJMN



d. PPN.01.03 Melakukan Penyusunan RKP

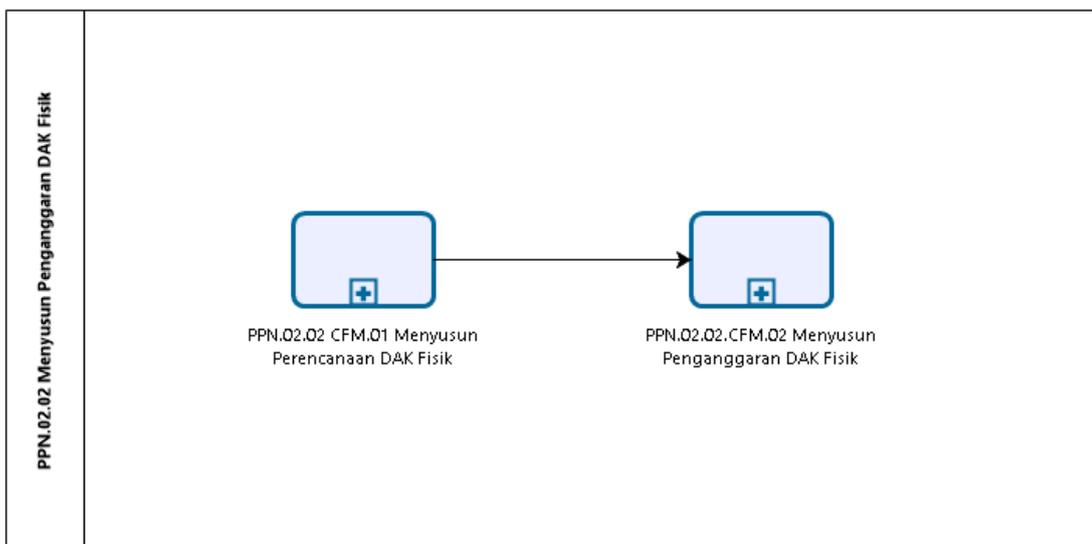


Peta Sub Proses Bisnis Penganggaran Pembangunan

- a. PPN.02.01 Melaksanakan Penyusunan Pagu K/L

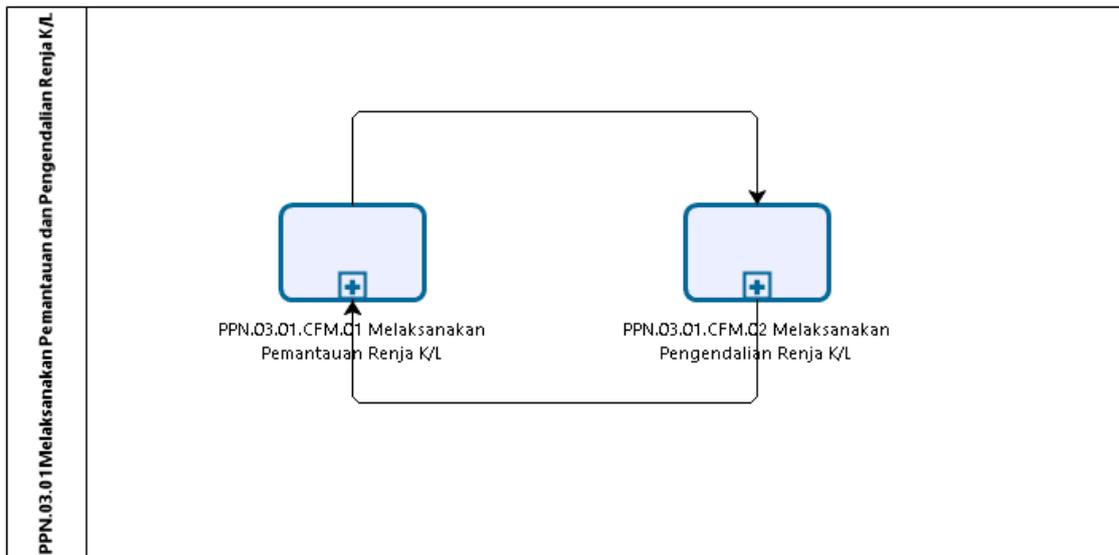


- b. PPN.02.02 Menyusun Penganggaran DAK Fisik

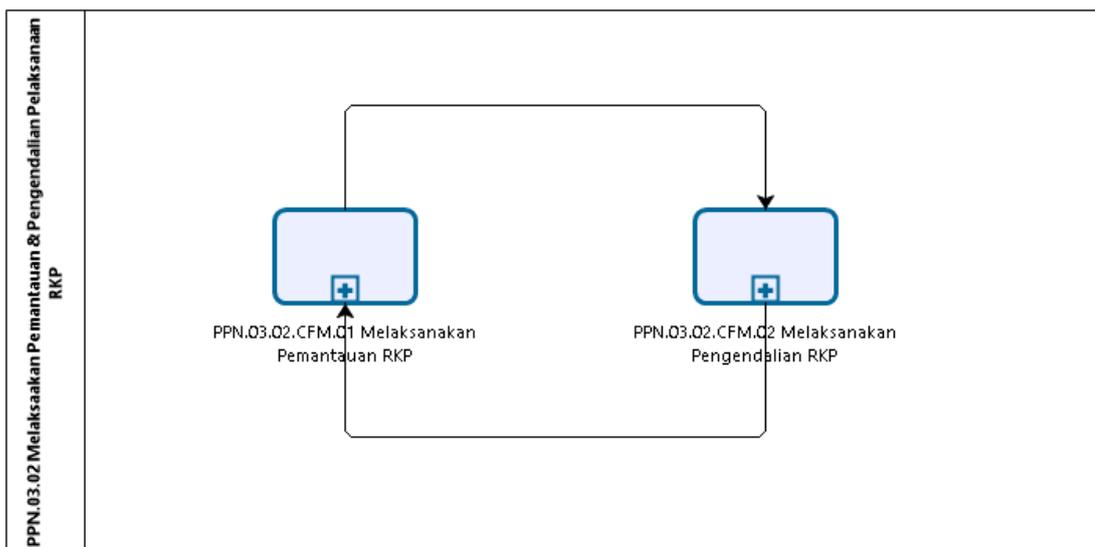


Peta Sub Proses Bisnis Pengendalian Pembangunan

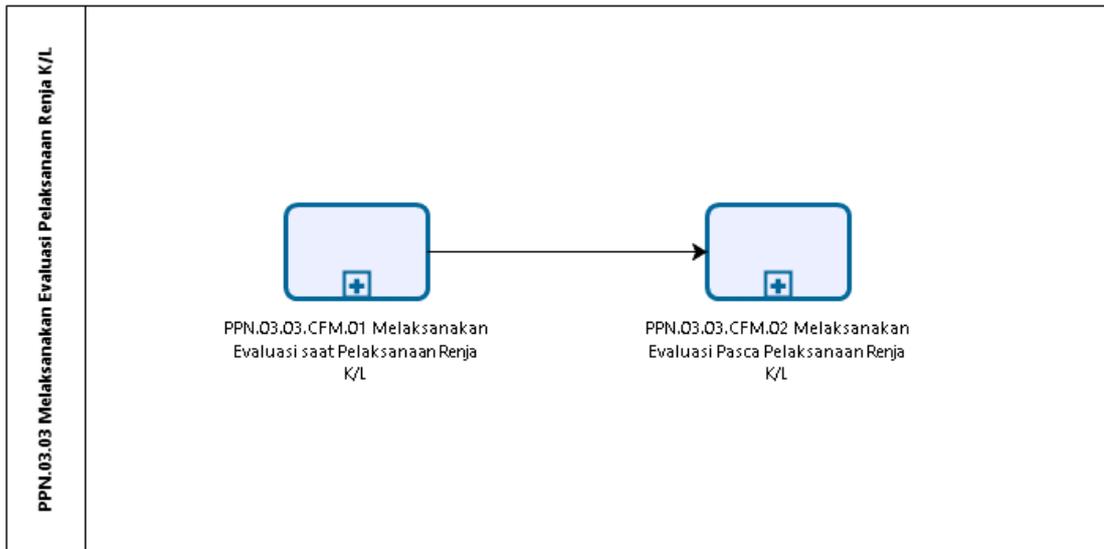
- a. PPN.03.01 Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Renja K/L



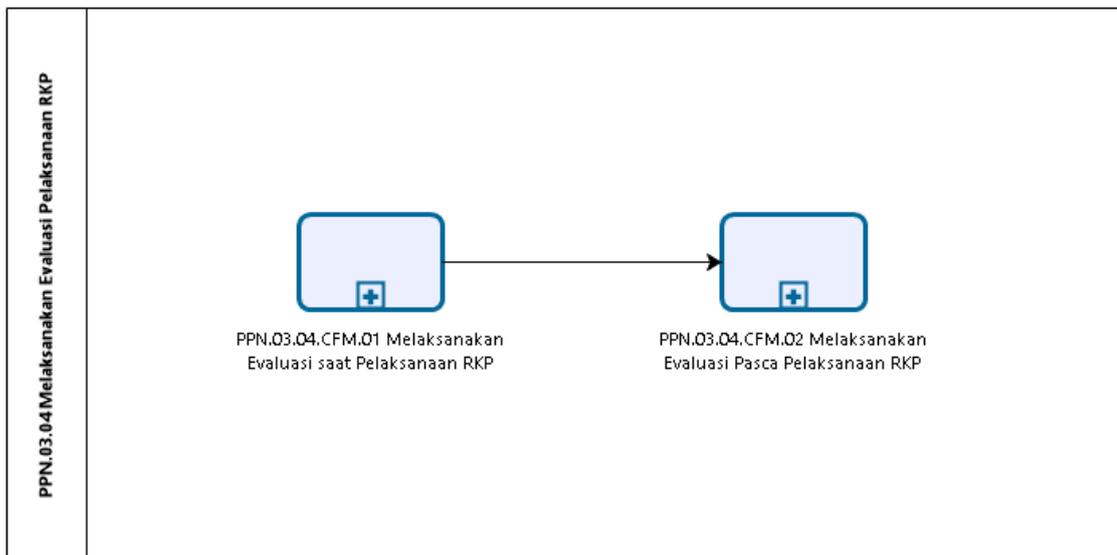
- b. PPN.03.02 Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan RKP



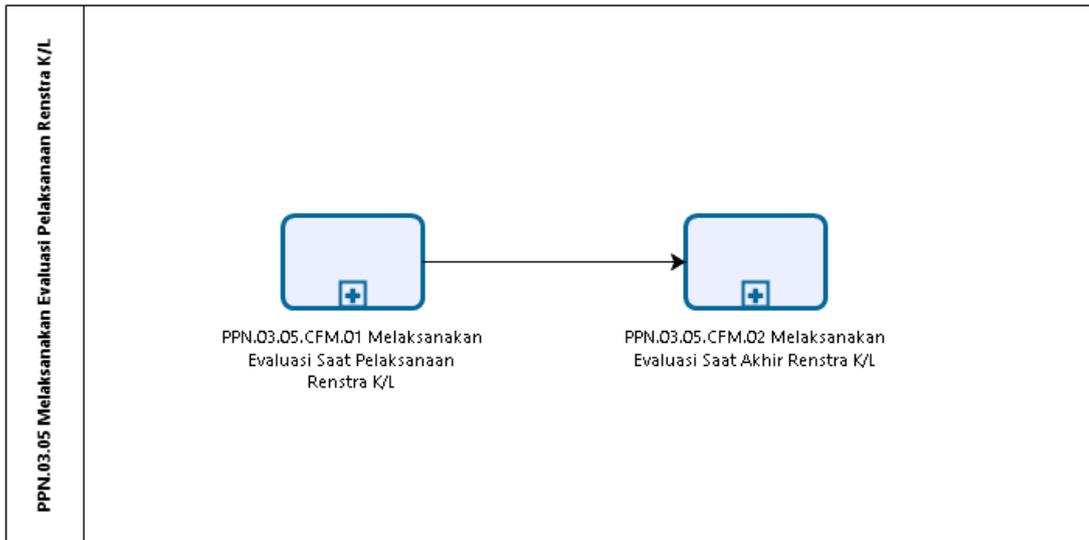
c. PPN.03.03 Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Renja K/L



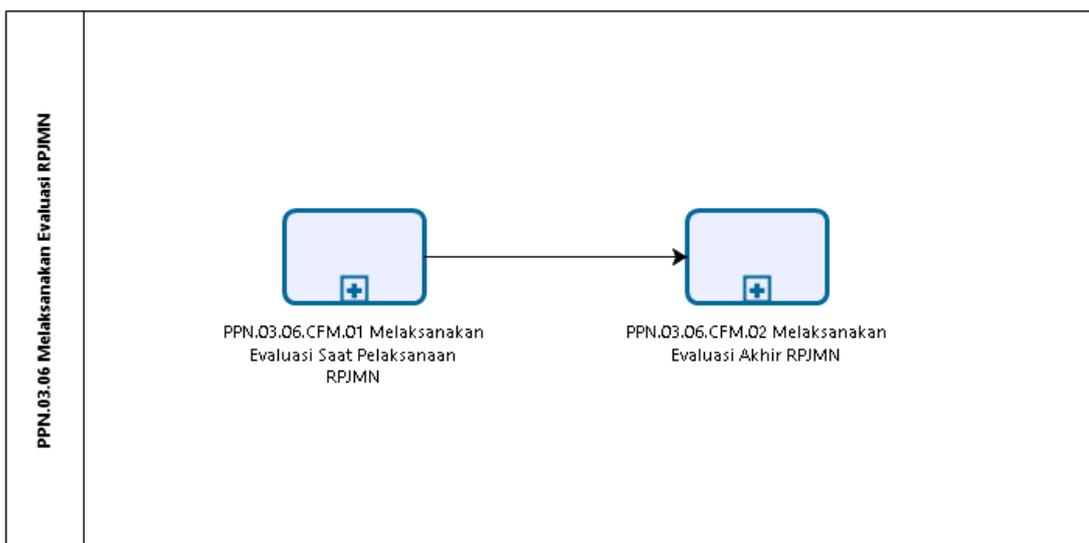
d. PPN.03.04 Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RKP



e. PPN.03.05 Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Renstra K/L

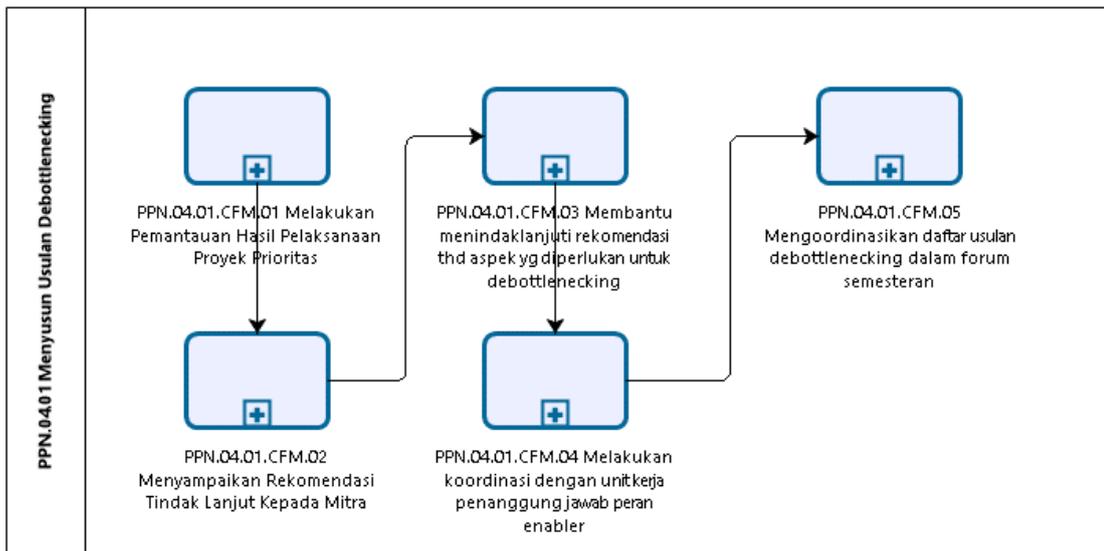


f. PPN.03.06 Melaksanakan Evaluasi RPJMN

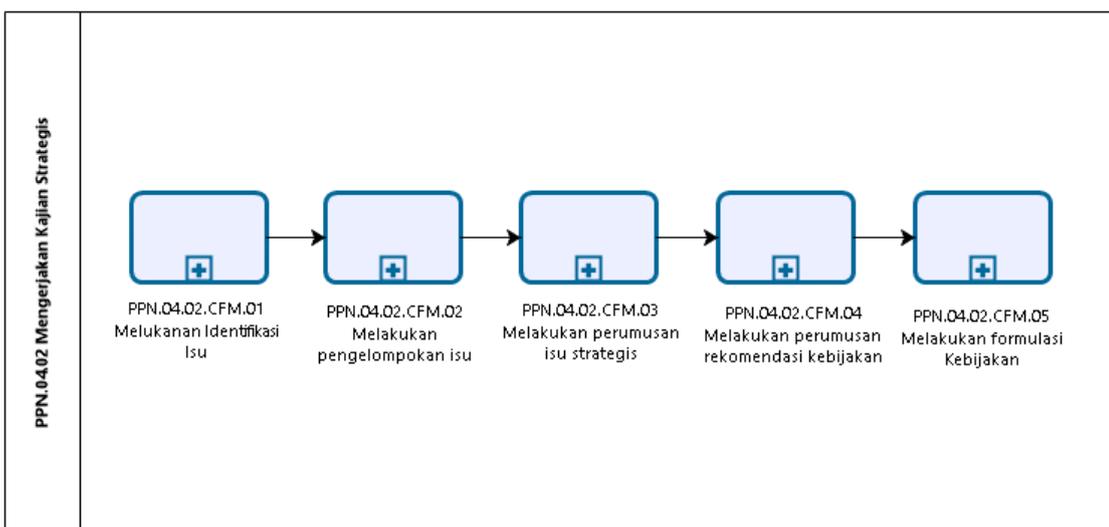


Peta Sub Proses Bisnis Enabler (Prakarsa Strategis)

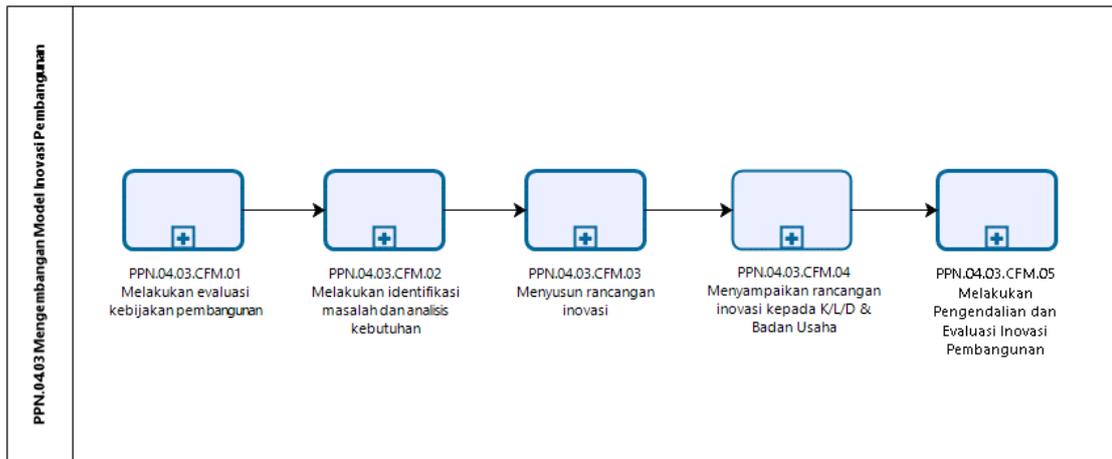
a. PPN.04.01 Menyusun Usulan Debottlenecking



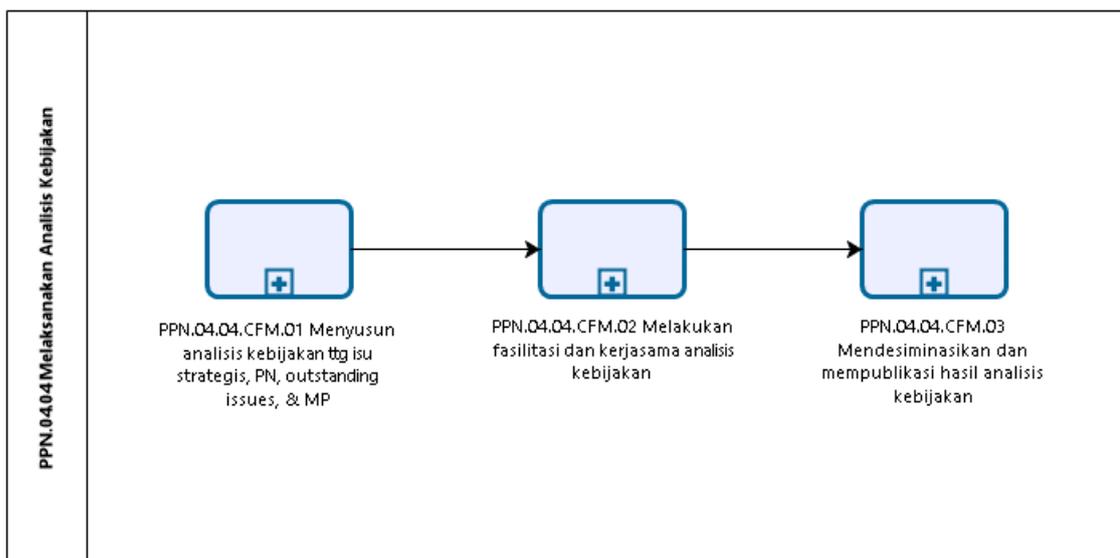
b. PPN.04.02 Mengerjakan Kajian Strategis



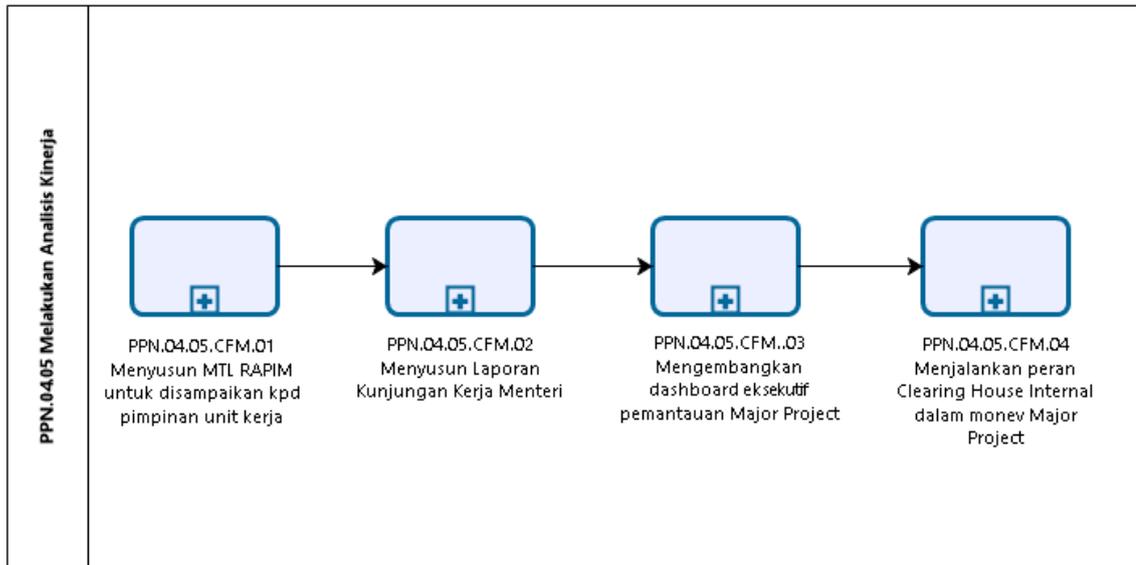
c. PPN.04.03 Mengembangkan Model Inovasi Pembangunan



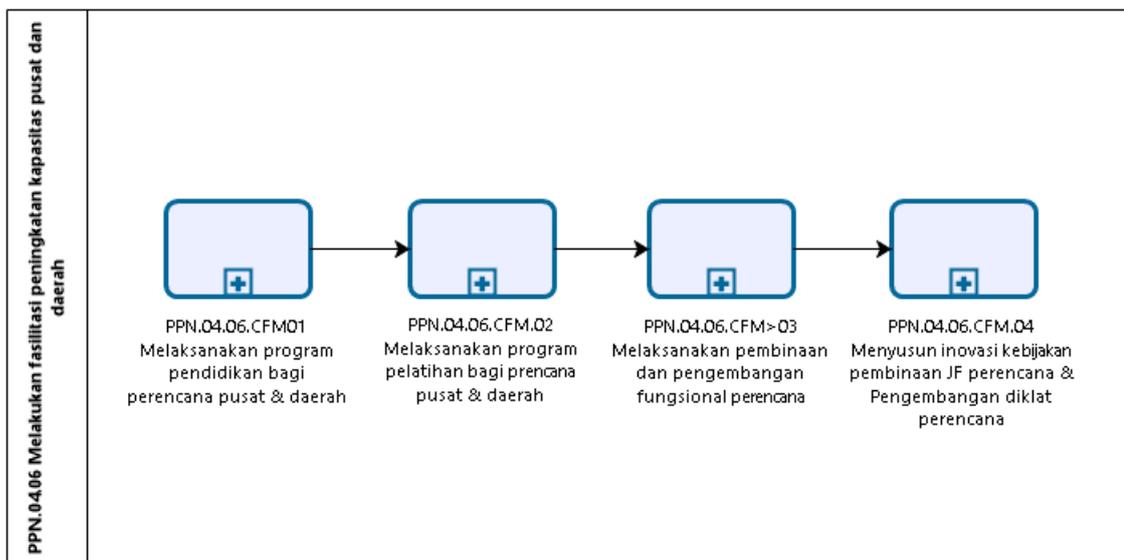
d. PPN.04.04 Melaksanakan Analisis Kebijakan



e. PPN.04.05 Melakukan Analisis Kinerja

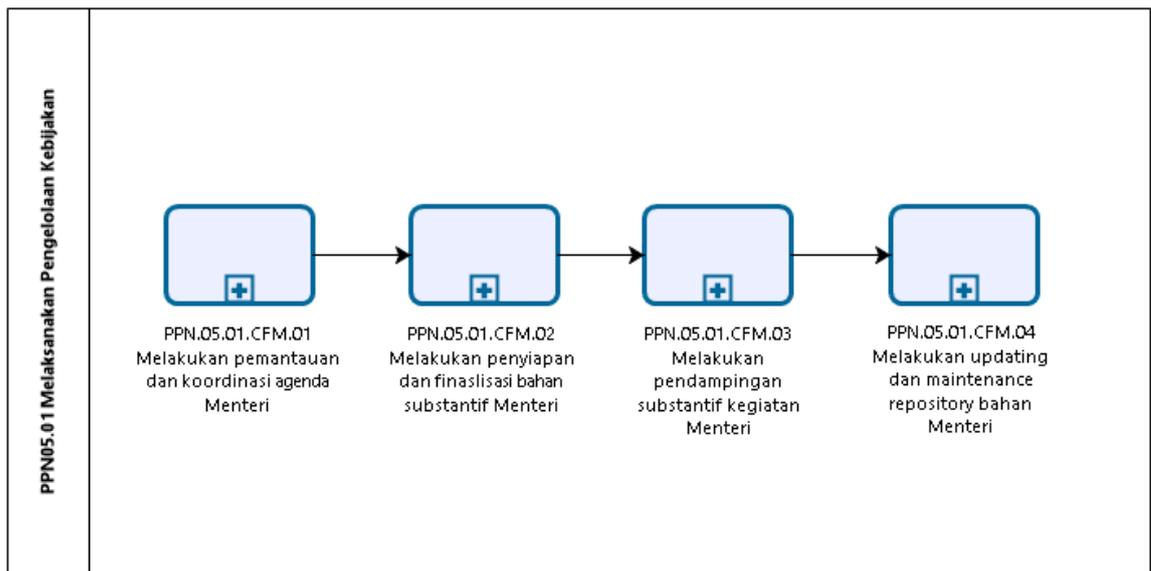


f. PPN.04.06 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perencana Pusat dan Daerah

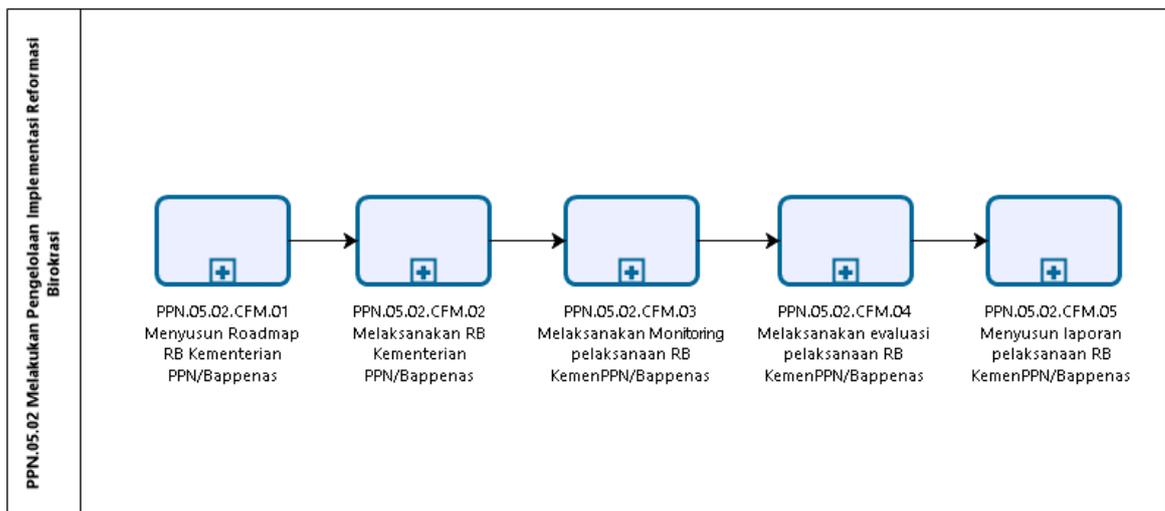


4.4.4.5 Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Kelembagaan

a. PPN.05.01 Melaksanakan Pengelolaan Kebijakan

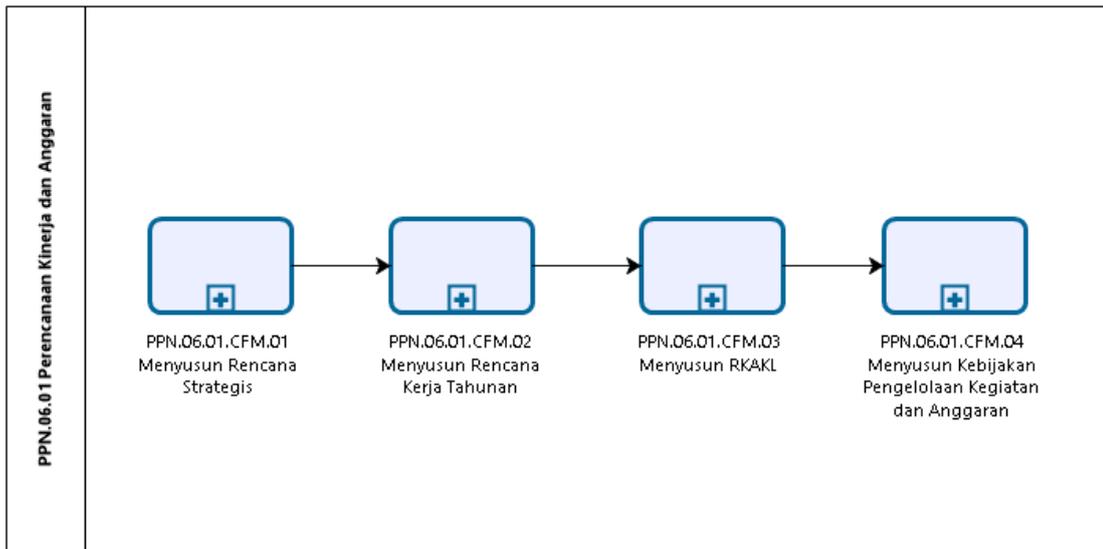


b. PPN.05.02 Melakukan Pengelolaan Implementasi Reformasi Birokrasi

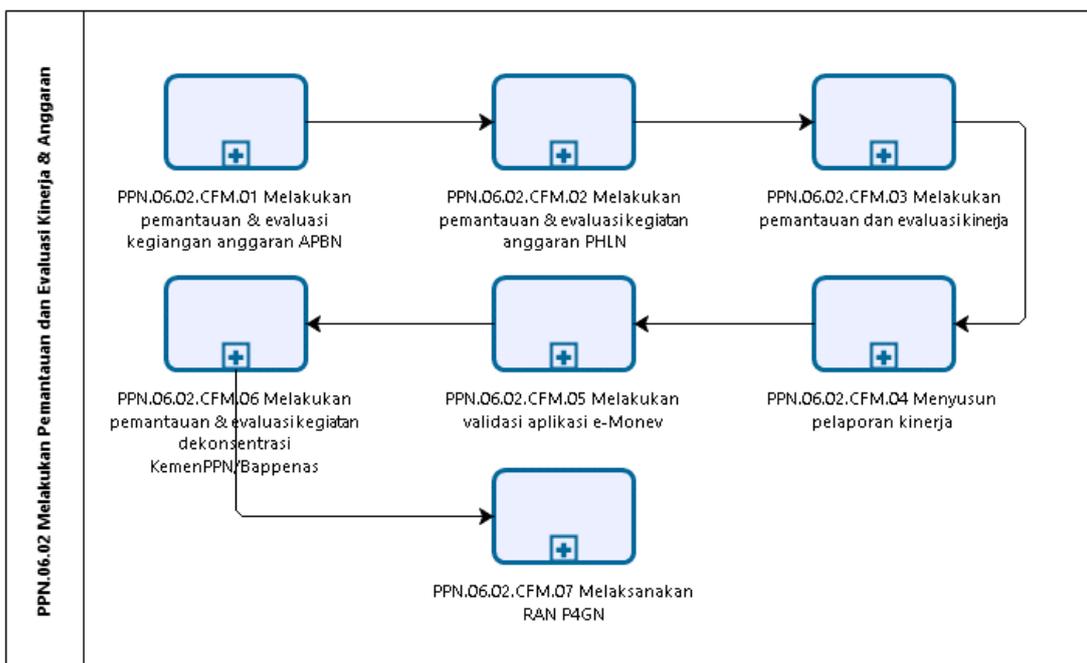


4.4.4.6 Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Kinerja

a. PPN.06.01 Melaksanakan Perencanaan Kinerja dan Anggaran

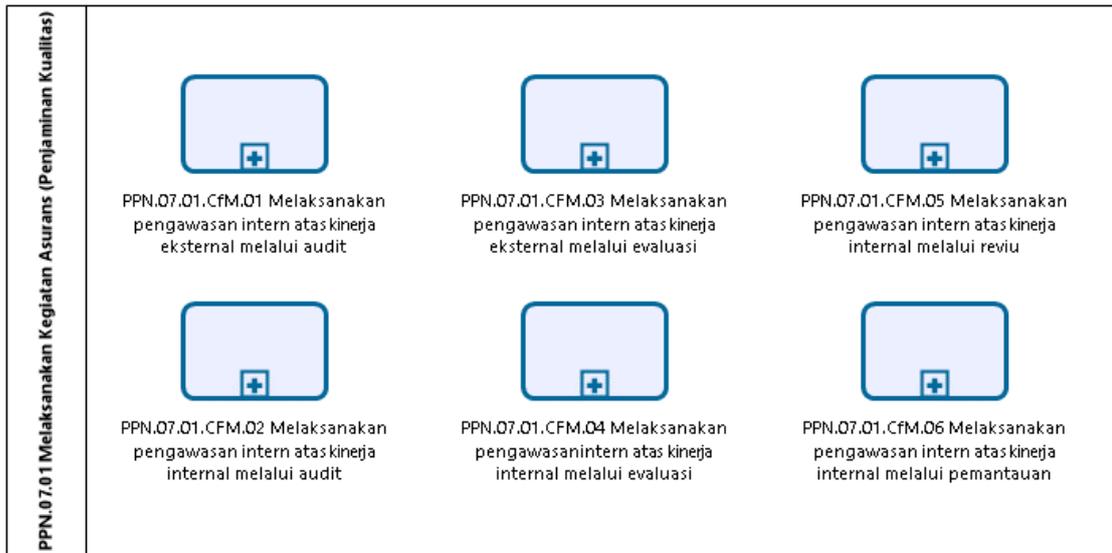


b. PPN.06.02 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran

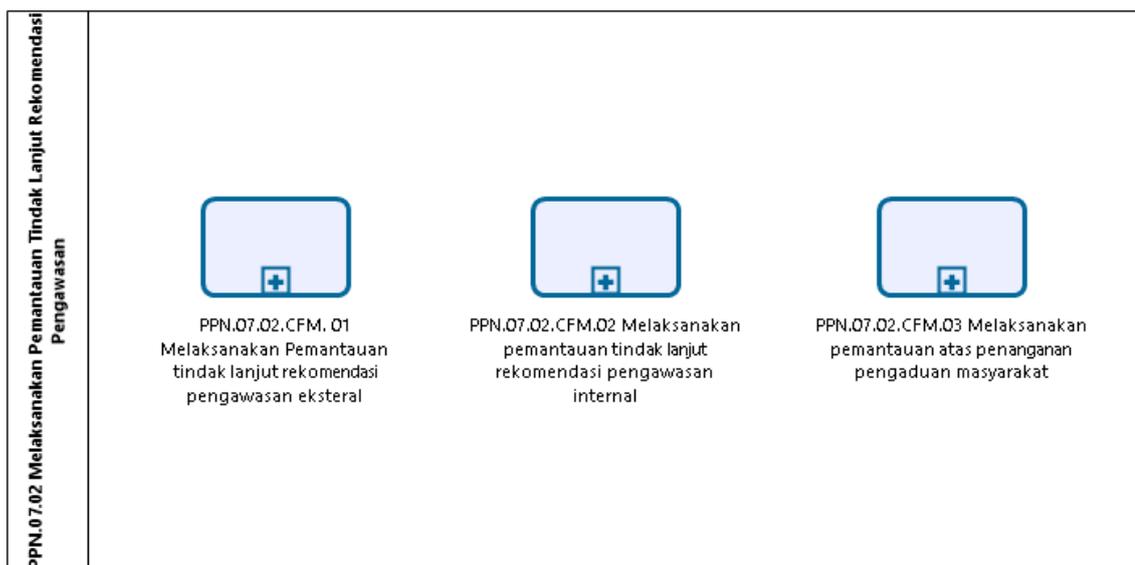


Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Intern

a. PPN.07.01 Melaksanakan Kegiatan Asurans (Penjaminan Kualitas)



b. PPN.07.02 Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan



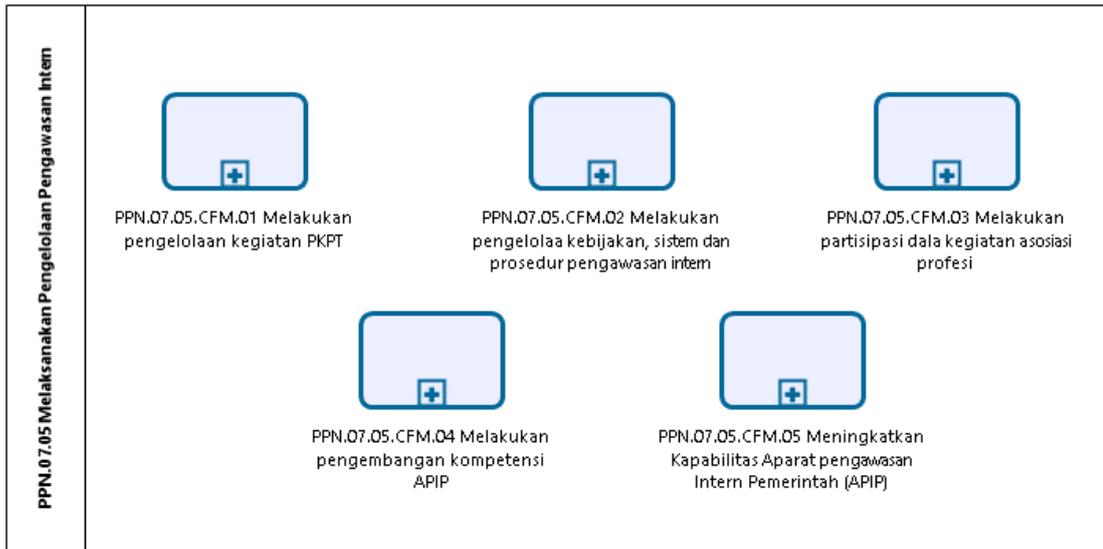
c. PPN.07.03 Melaksanakan Kegiatan Konsultasi

PPN.07.03 Melaksanakan Kegiatan Konsultasi				
	PPN.07.03.CFM.01 Melaks pengawasan intern atas kinerja eksternal mll pendampingan benaawasan ekstern	PPN.07.03.CFM.02 Melaksanakan pendampingan proses bisnis utama	PPN.07.03.CFM.03 Melaks pengawasan intern atas kinerja internal mll pendampingan pengawasan eksterna	PPN.07.03.CFM.04 Melaksanakan pendampingan pengelolaan risiko keuangan
				
	PPN.07.03.CFM.05 Melaksanakan pendampingan peningkatan kualitas tata kelola	PPN.07.03.CFM.06 Melaksanakan survei kepuasan stakeholder	PPN.07.03.CFM.07 Melaksanakan pendampingan penyelenggaraan SPIP/MR	PPN.07.03.CFM.08 Melaksanakan kegiatan konsultasi lainnya

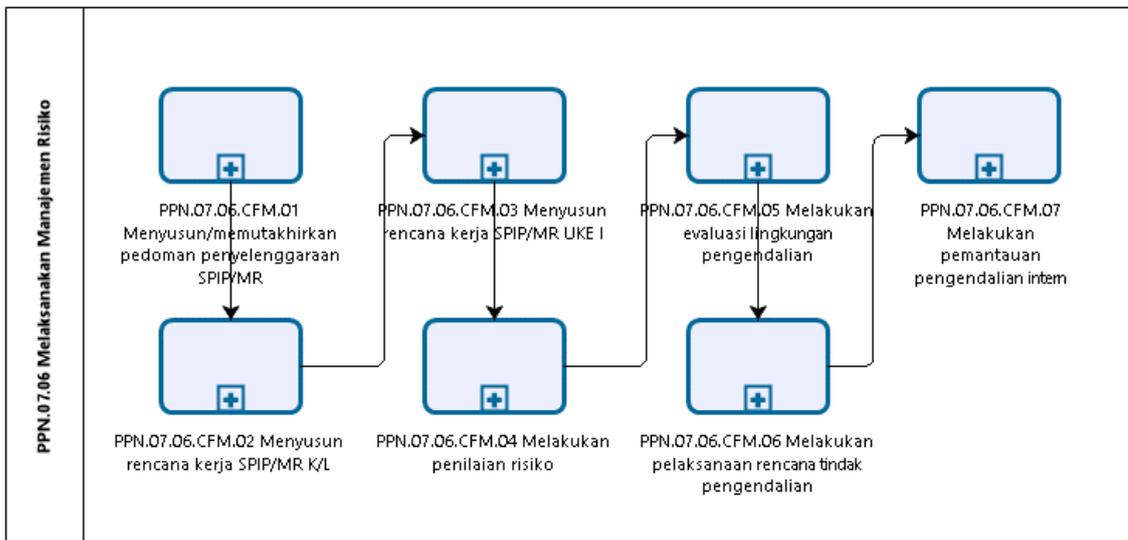
d. PPN.07.04 Melaksanakan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PPN.07.04 Melaksanakan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
	PPN.07.04.CFM.01 Melaksanakan Penelitian Pengaduan	PPN.07.04.CFM.02 Melaksanakan Audit Investigasi	PPN.07.04.CFM.03 Melaksanakan pengawasan penugasan khusus/pimpinan

e. PPN.07.05 Melaksanakan Pengelolaan Pengawasan Intern

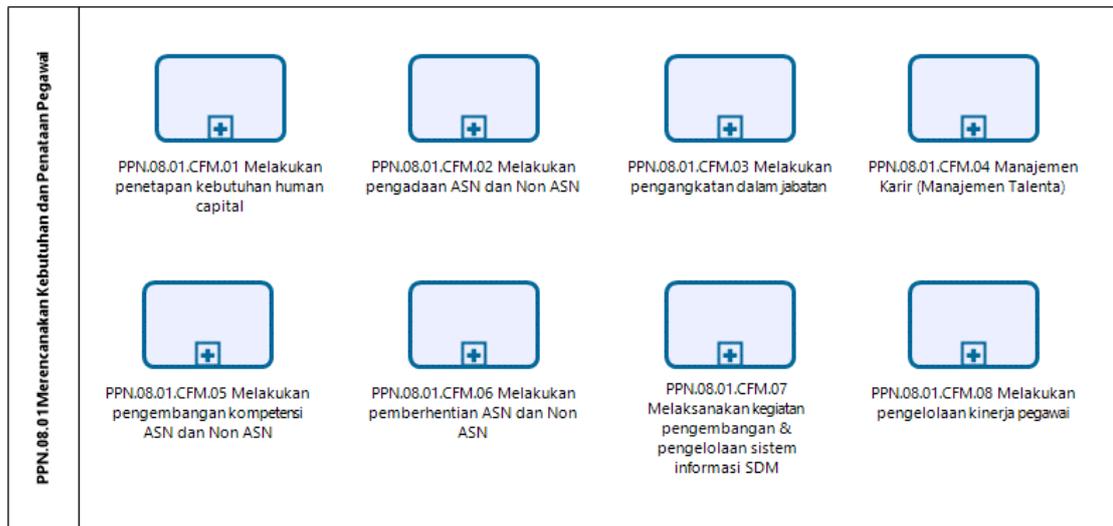


f. PPN.07.06 Melaksanakan Manajemen Risiko



Peta Sub Proses Bisnis Manajemen Kepegawaian

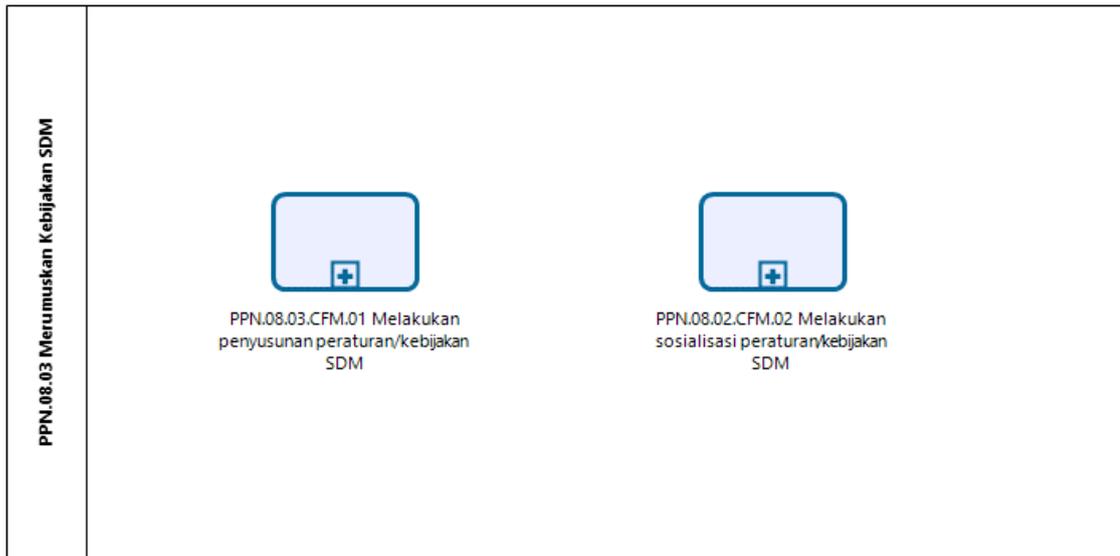
a. PPN.08.01 Merencanakan Kebutuhan dan Penataan Pegawai



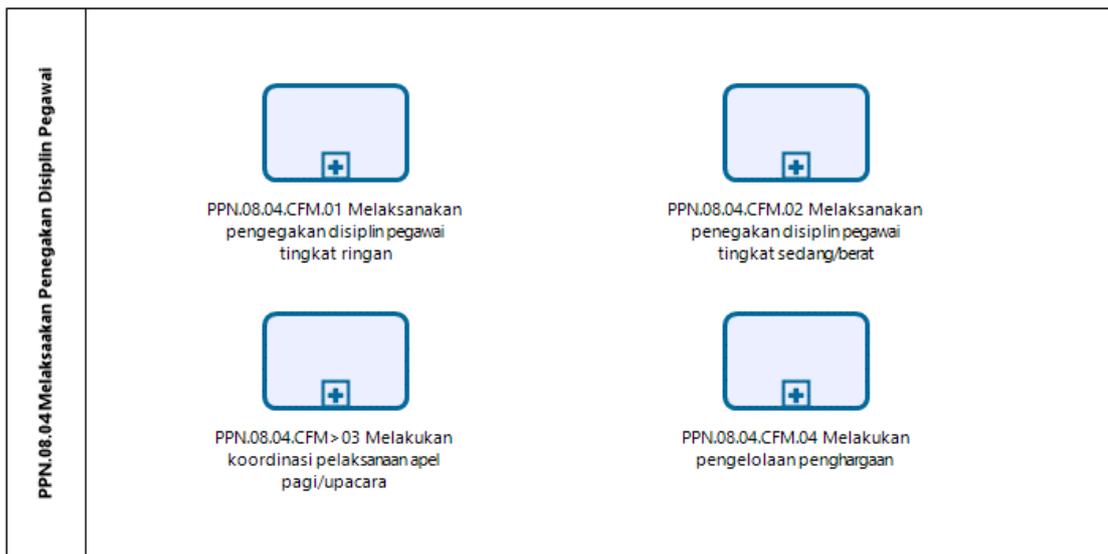
b. PPN.08.02 Memberikan Dukungan Layanan Administrasi Kepegawaian



c. PPN.08.03 Merumuskan Kebijakan SDM



d. PPN.08.04 Melaksanakan Penegakan Disiplin Pegawai



- e. PPN.08.04 Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Fungsional Perencana

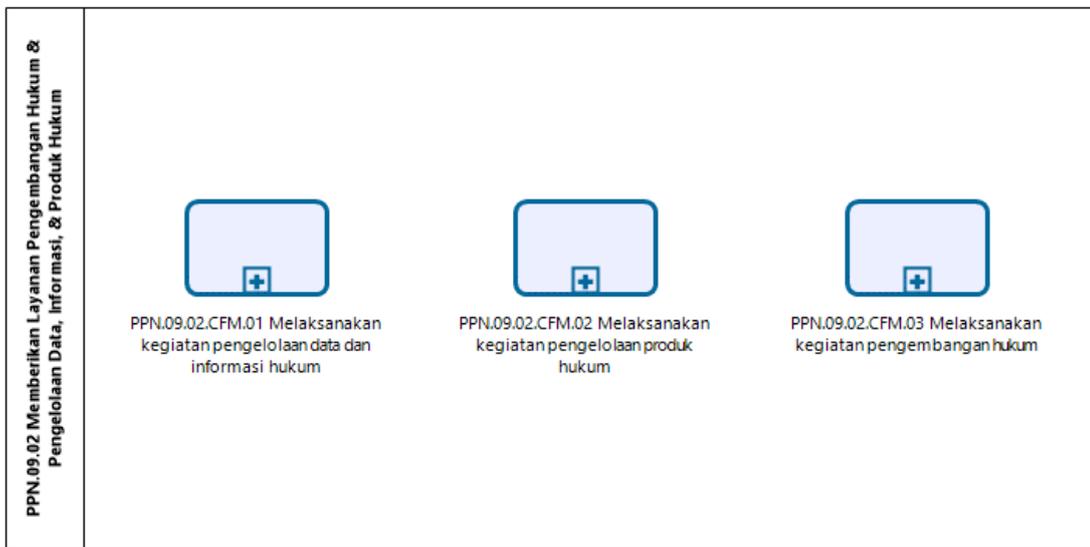


Peta Sub Proses Bisnis Melaksanakan Pelayanan Legislasi dan Litigasi

- a. PPN.09.01 Melakukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum



- b. PPN.09.02 Memberikan Layanan Pengembangan Hukum dan Pengelolaan Data, Informasi, dan Produk Hukum

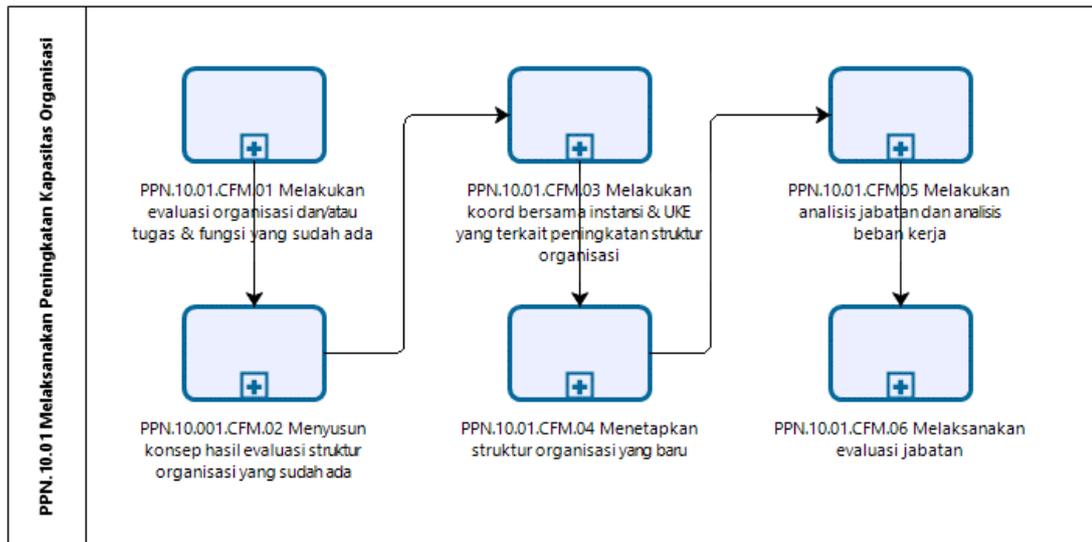


- c. PPN.09.03 Memberikan Pelayanan Terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum

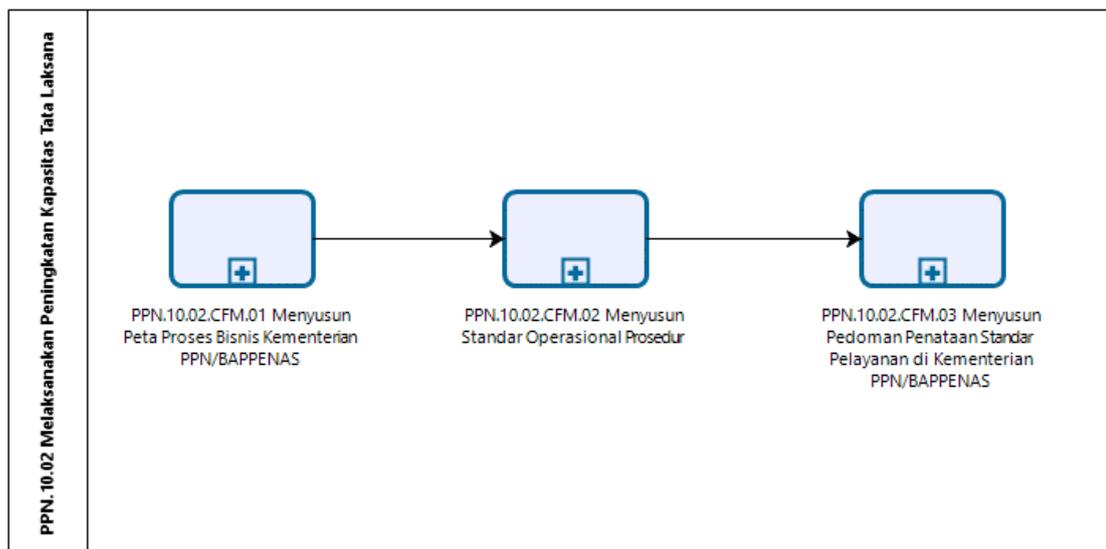


Peta Sub Proses Bisnis Melaksanakan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

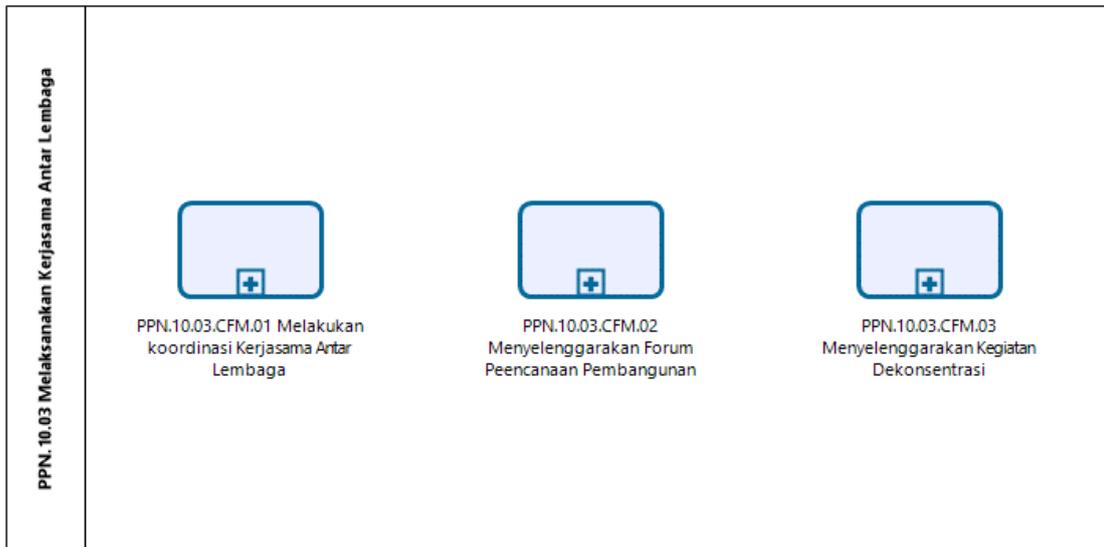
a. PPN.10.01 Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Organisasi



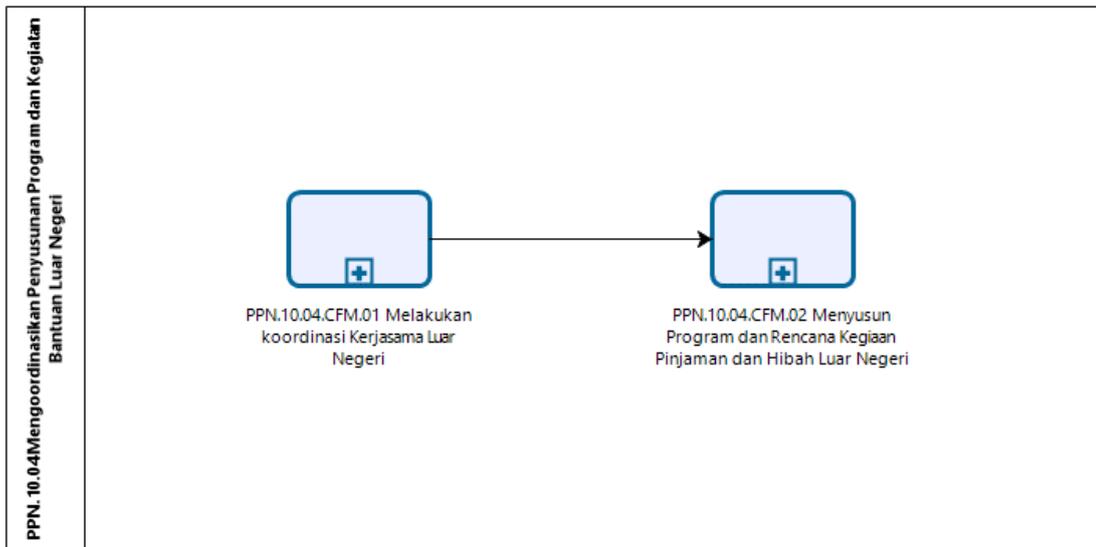
b. PPN.10.02 Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Tata Laksana



c. PPN.10.03 Melaksanakan Kerjasama Antar Lembaga

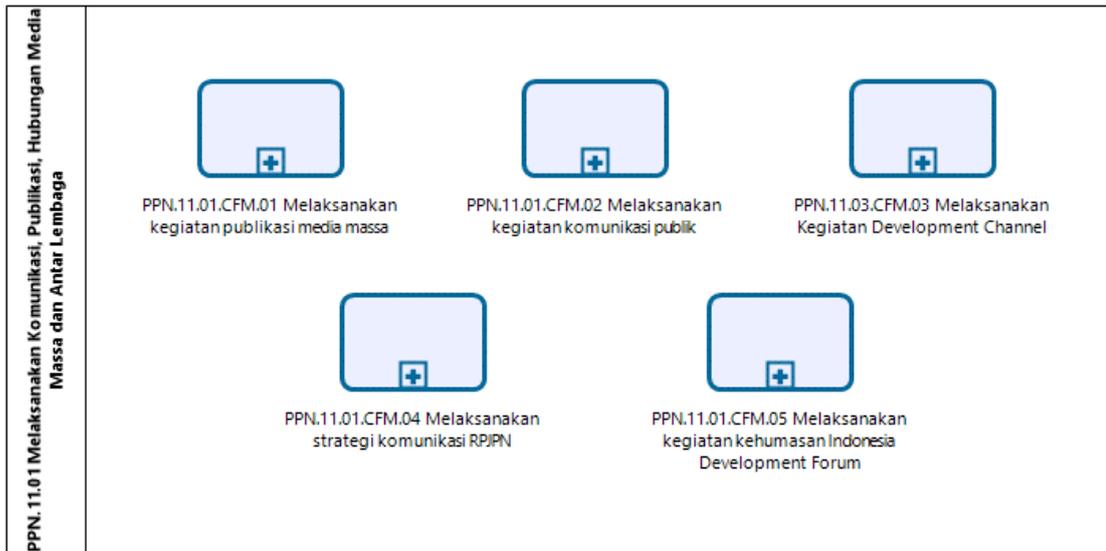


d. PPN.10.04 Mengoordinasikan Penyusunan Program dan Kegiatan Bantuan Luar Negeri

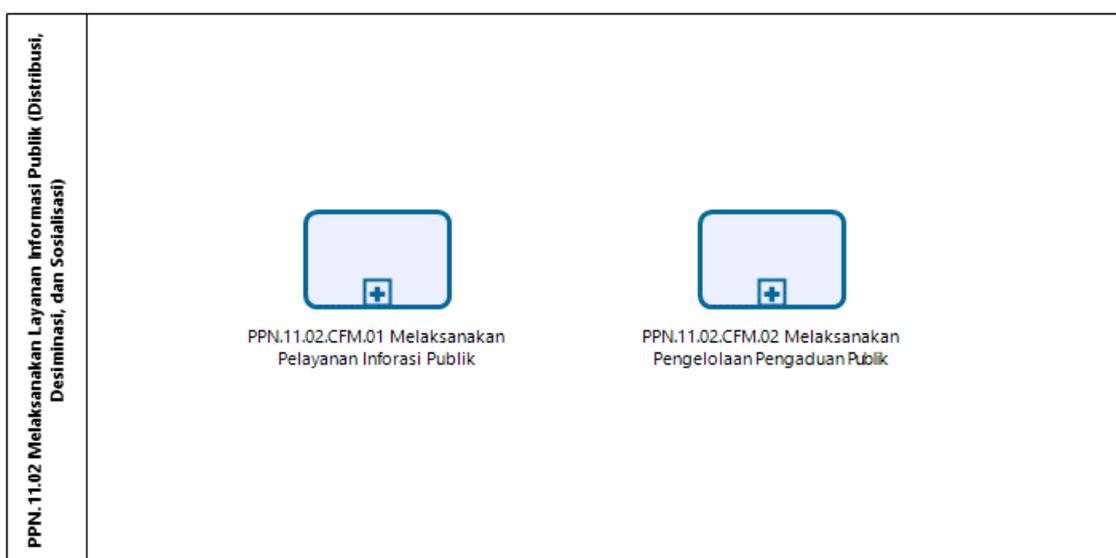


Peta Sub Proses Bisnis Melaksanakan Pelayanan Kehumasan, Kearsipan, Keprotokolan/Persidangan dan Ketatausahaan Pimpinan

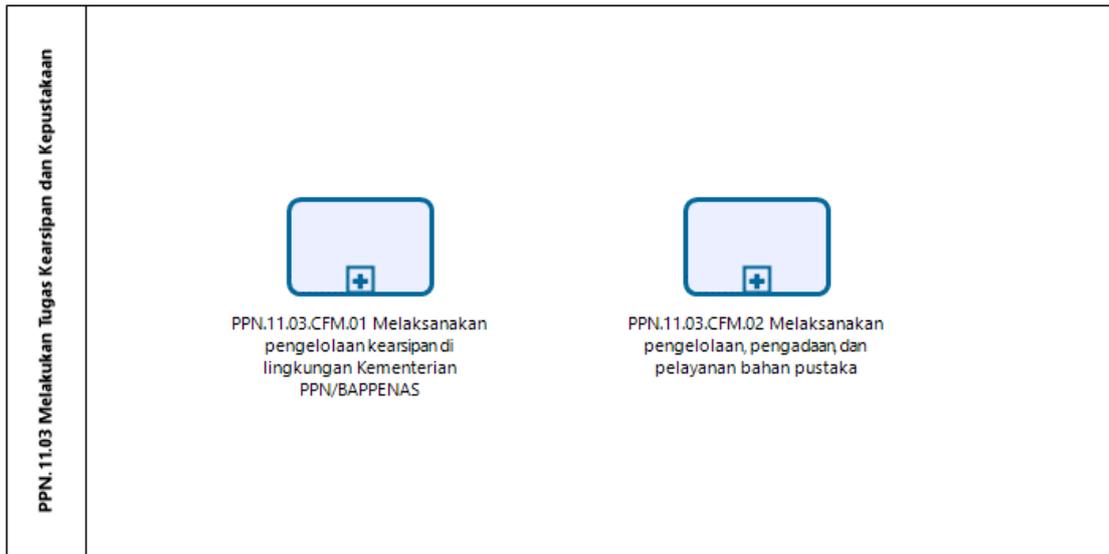
- a. PPN.11.01 Melaksanakan Komunikasi, Publikasi, Hubungan Media Massa dan Antar Lembaga



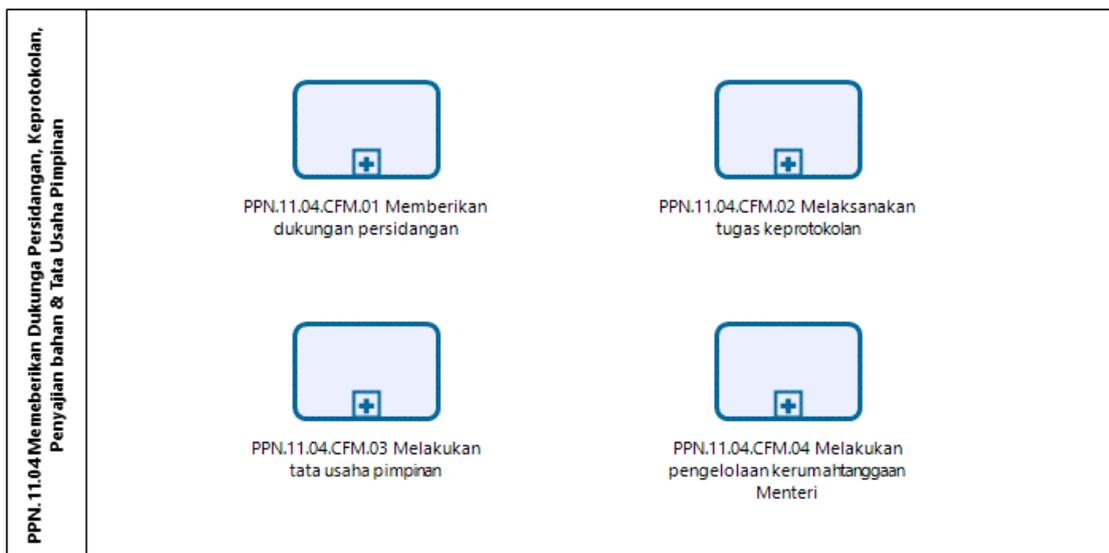
- b. PPN.11.02 Melaksanakan Layanan Informasi Publik (Distribusi, Desiminasi, dan Sosialisasi)



c. PPN.11.03 Melakukan Tugas Kearsipan dan Kepustakaan

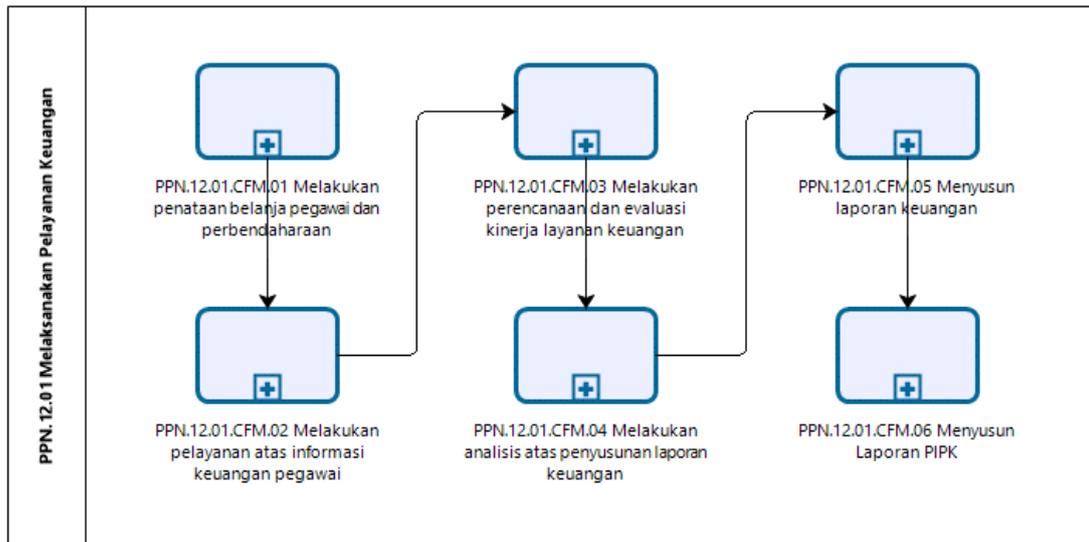


d. PPN.11.04 Memberikan Dukungan Persidangan, Keprotokolan, Penyajian Bahan dan Tata Usaha Pimpinan



Peta Sub Proses Bisnis Melaksanakan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Umum

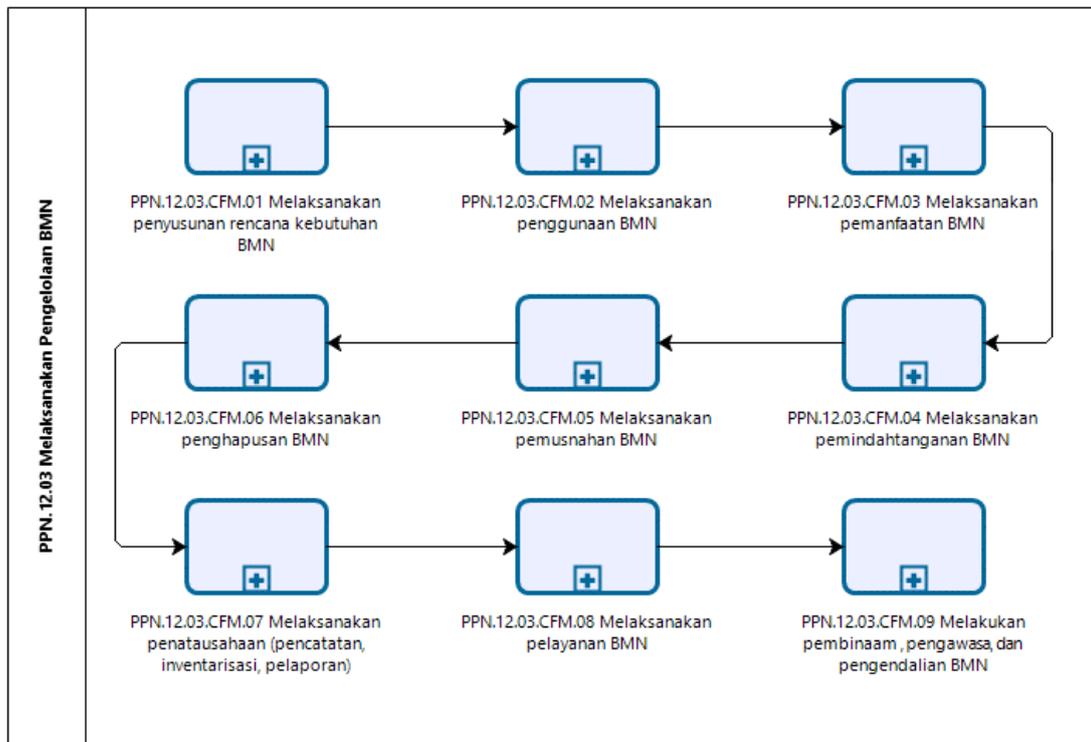
a. PPN.12.01 Melaksanakan Pelayanan Keuangan



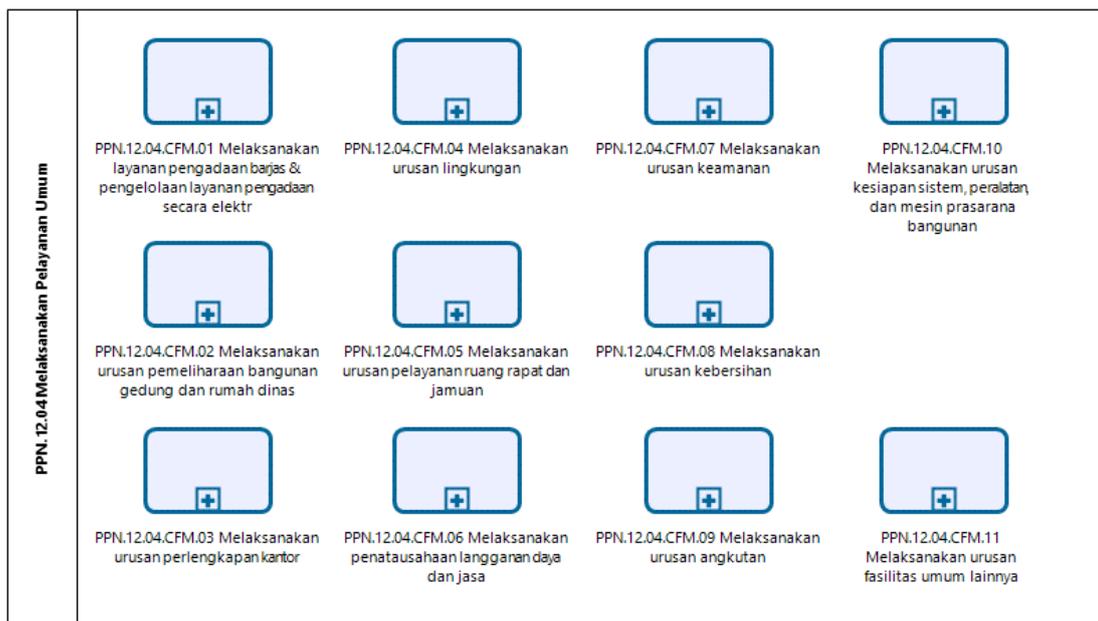
b. PPN.12.02 Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan



c. PPN.12.03 Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

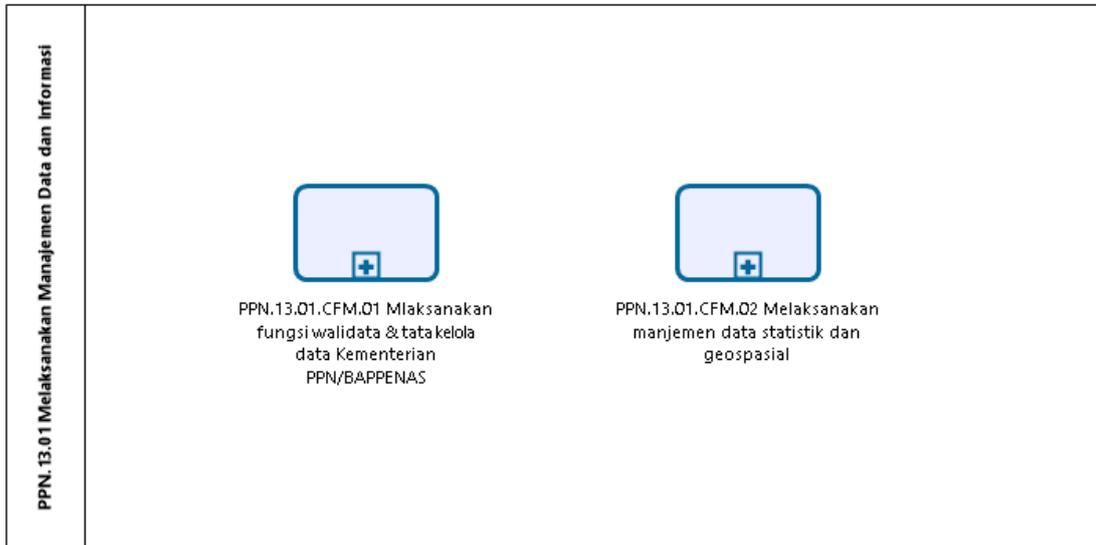


d. PPN.12.04 Melaksanakan Pelayanan Umum

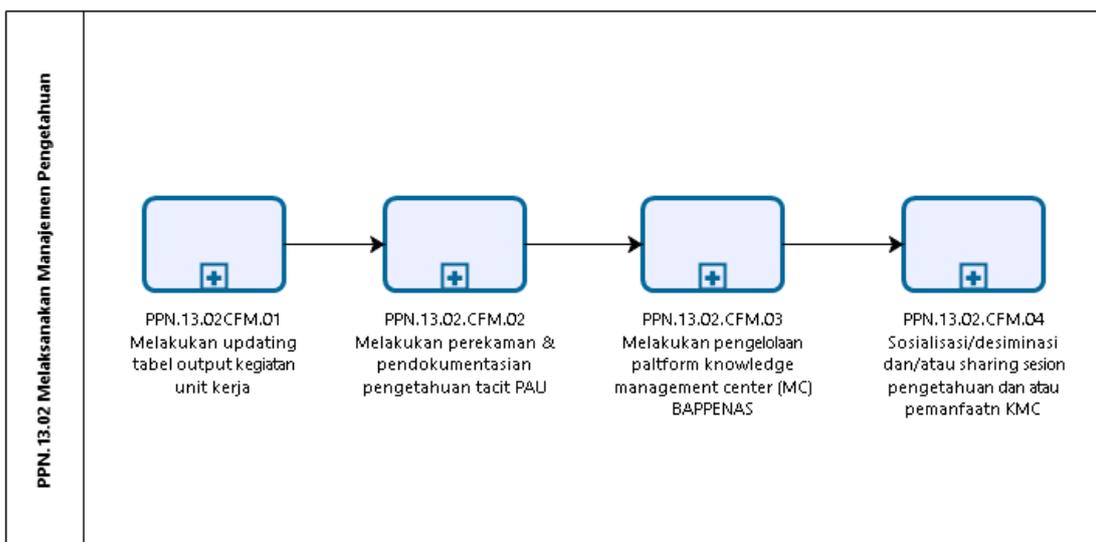


Peta Sub Proses Bisnis Melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

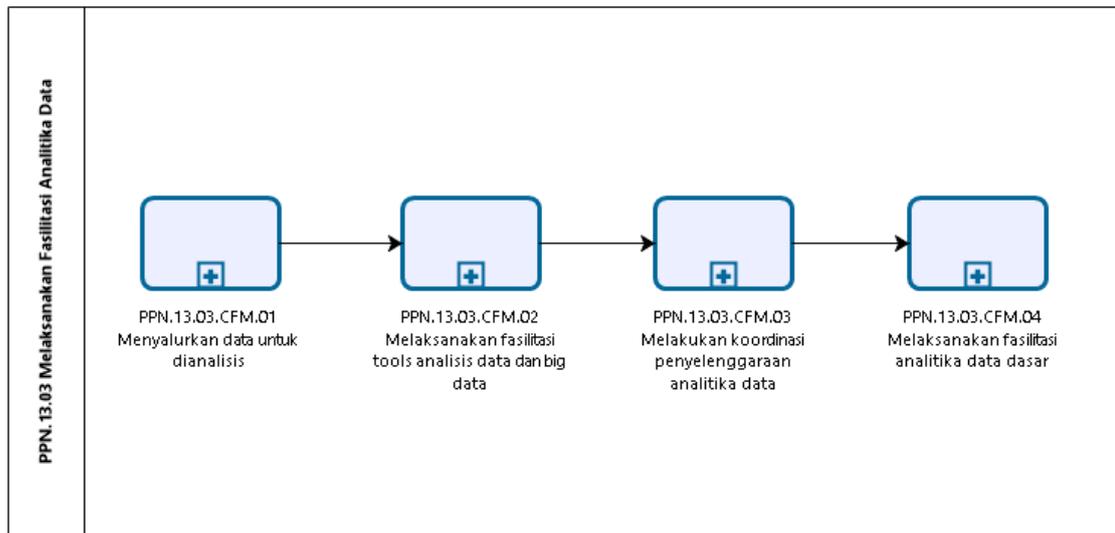
a. PPN.13.01 Melaksanakan Manajemen Data dan Informasi



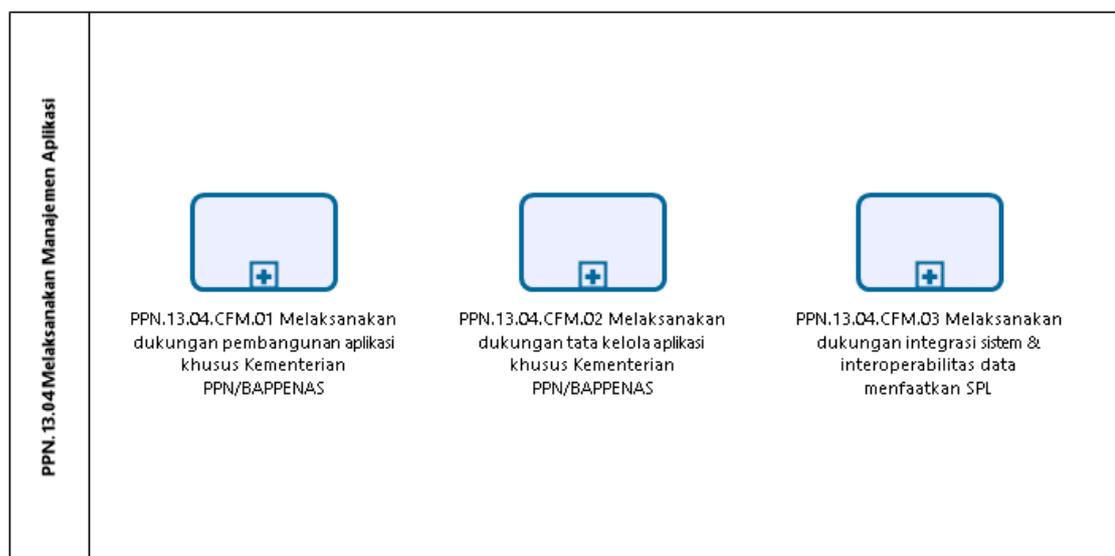
b. PPN.13.02 Melaksanakan Manajemen Pengetahuan



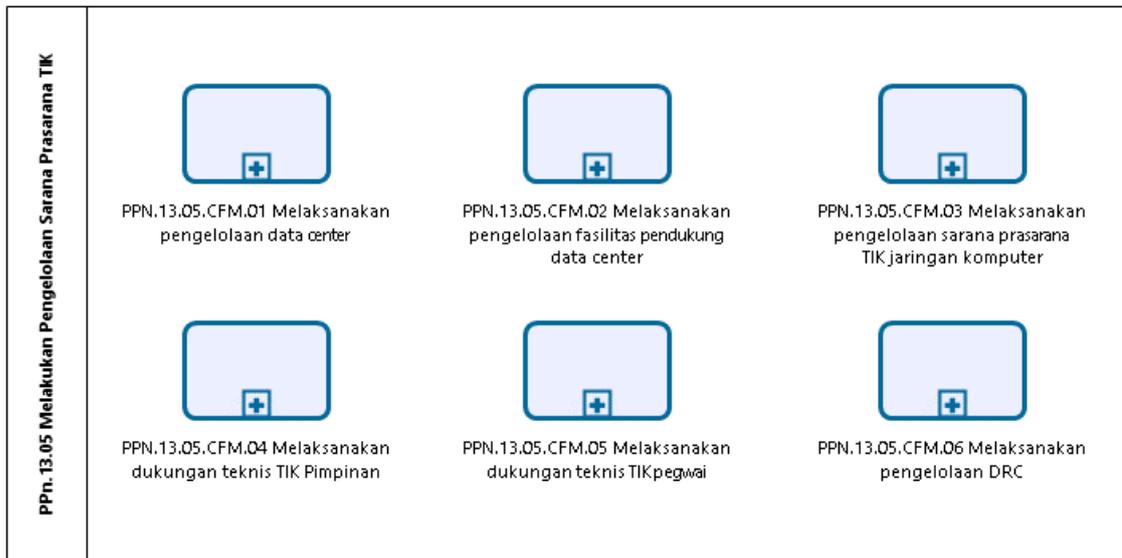
c. PPN.13.03 Melaksanakan Fasilitasi Analitika Data



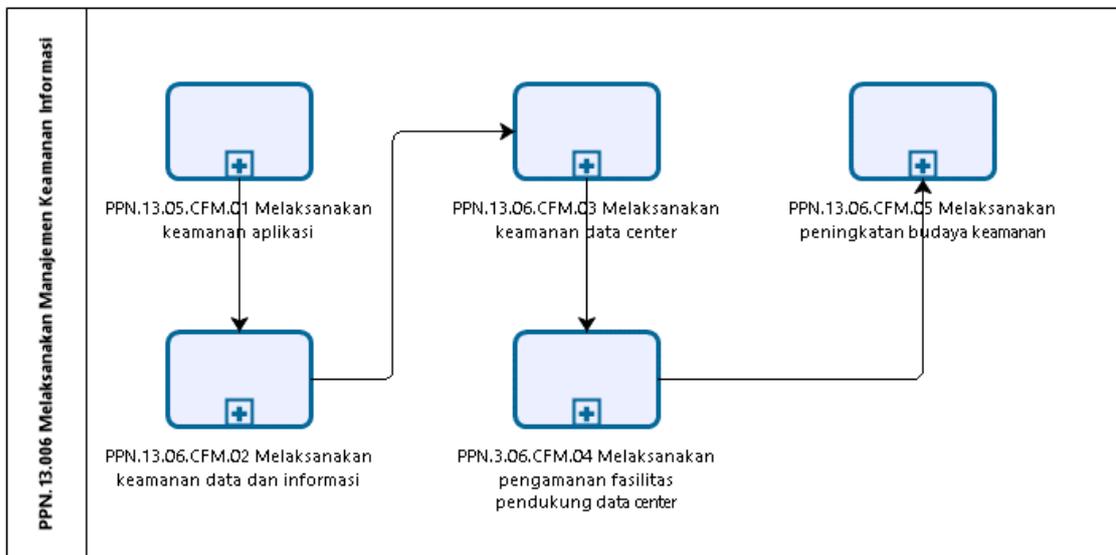
d. PPN.13.04 Melaksanakan Manajemen Aplikasi



e. PPN.13.05 Melaksanakan Pengelolaan Sarana Prasarana TIK



f. PPN.13.06 Melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi

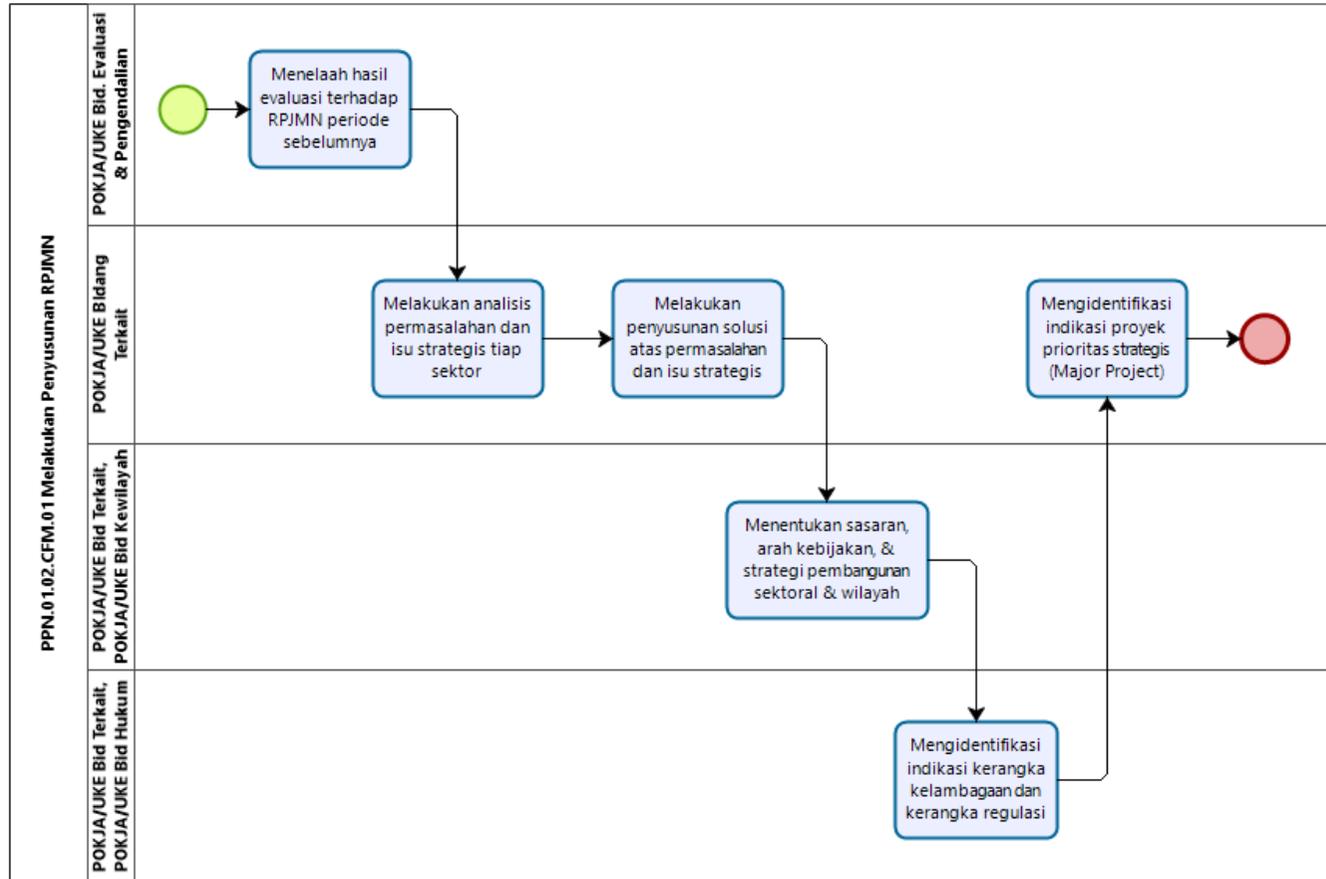


g. PPN.13.07 Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan SPBE Lembaga

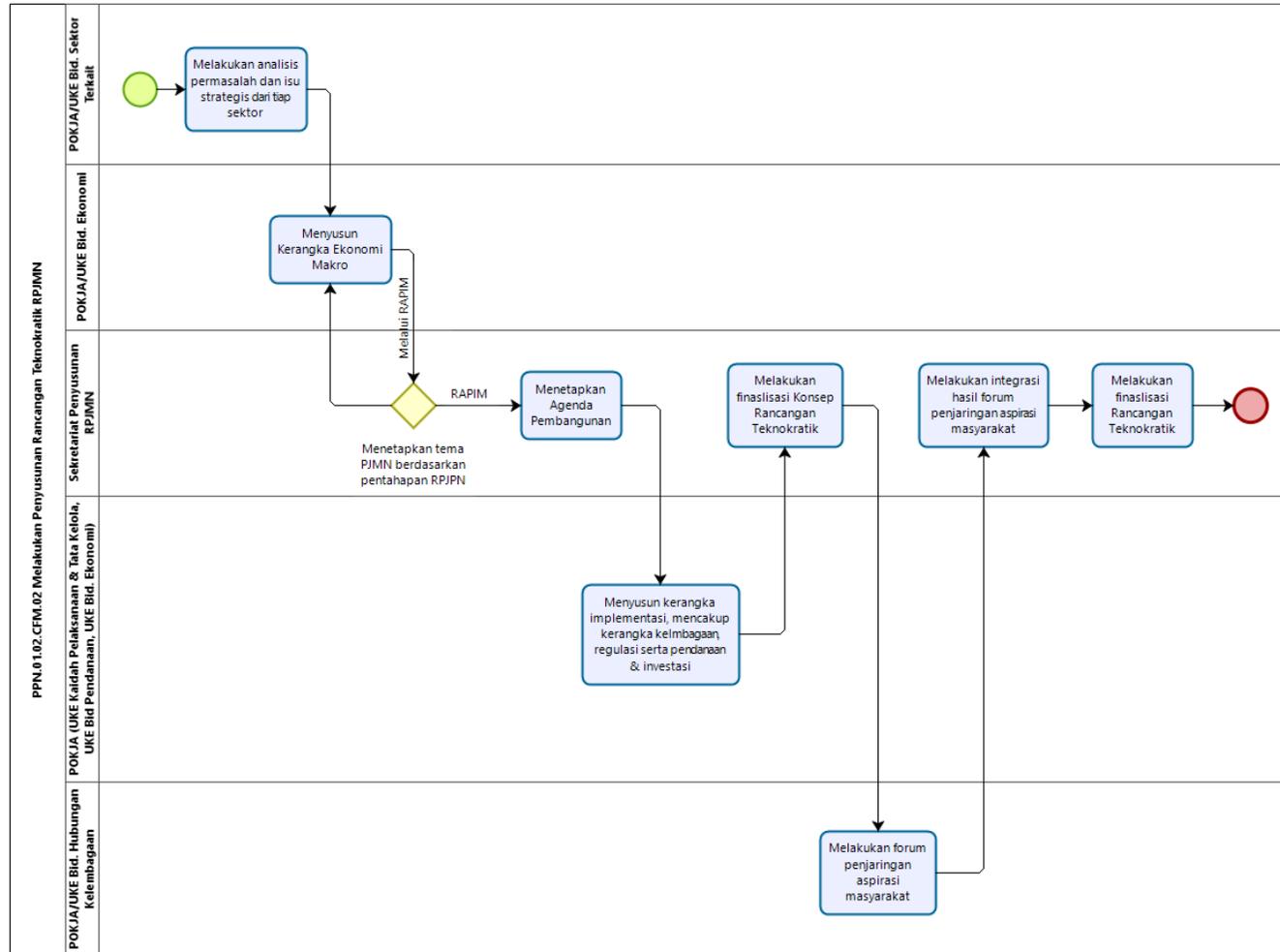
PPN.13.07 Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan SPBE Lembaga		
	PPN.13.07.CFM.01 Memberikan dukungan penyusunan kebijakan penerapan SPBE	PPN.13.07.CFM.02 Memberikan dukungan penerapan tata kelola dan manajemen SPBE
		
	PPN.13.07.CFM.03 Melakukan fasilitasi pendampingan pelaksanaan TAUVAL SPBE	PPN.13.07.CFM.04 Memberikan dukungan pelaksanaan rapat Tim Koordinasi SPBE

Peta Lintas Fungsi

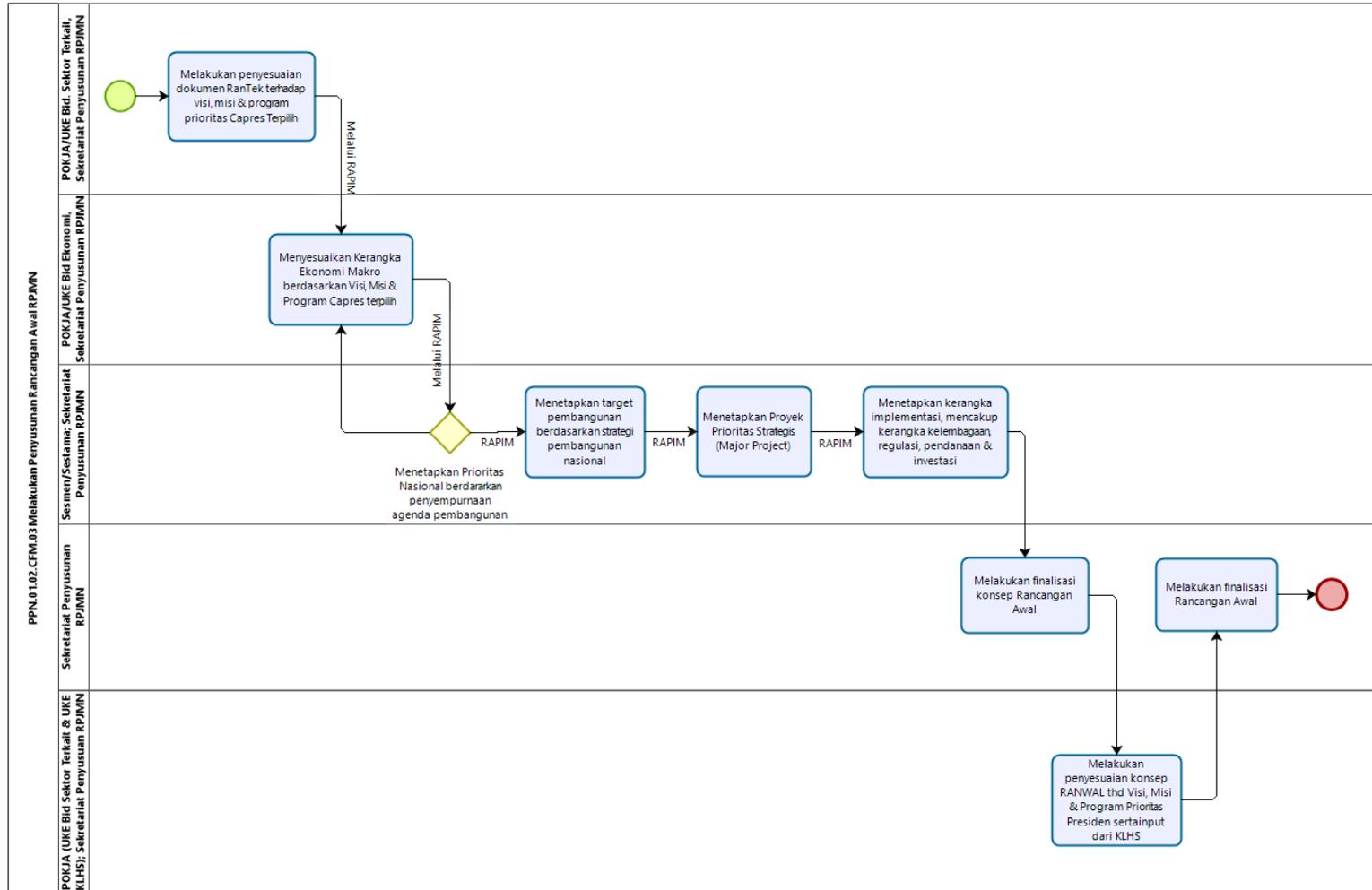
a. Peta Lintas Fungsi Melakukan **Penyusunan Kajian Pendahuluan** RPJMN



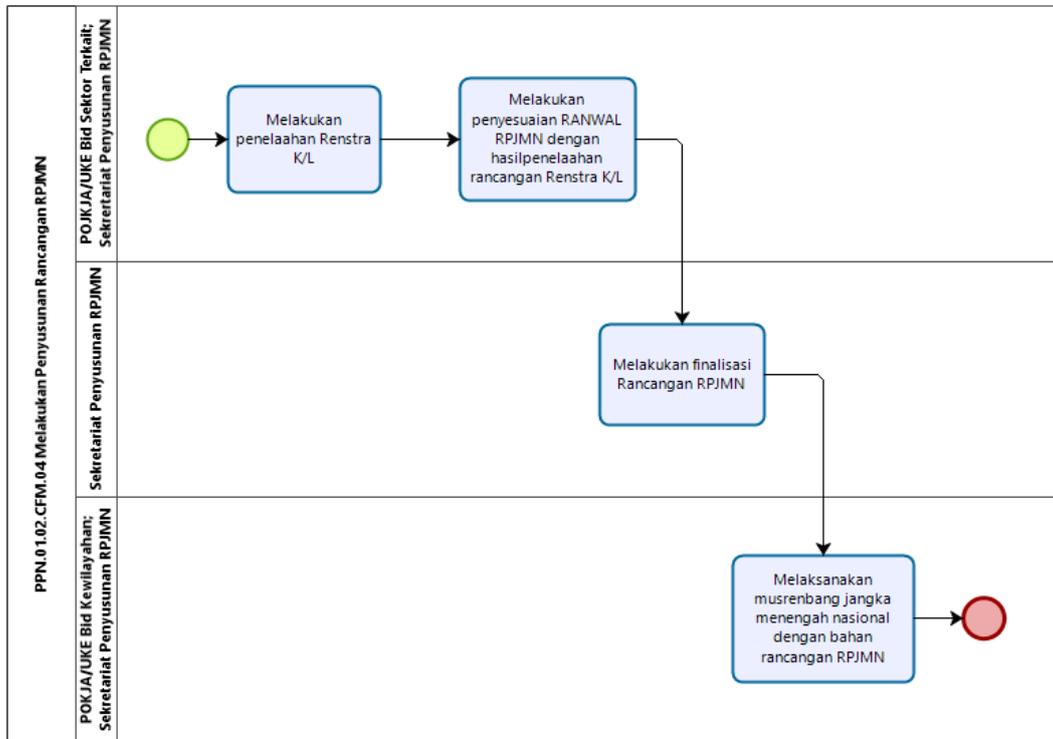
b. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN



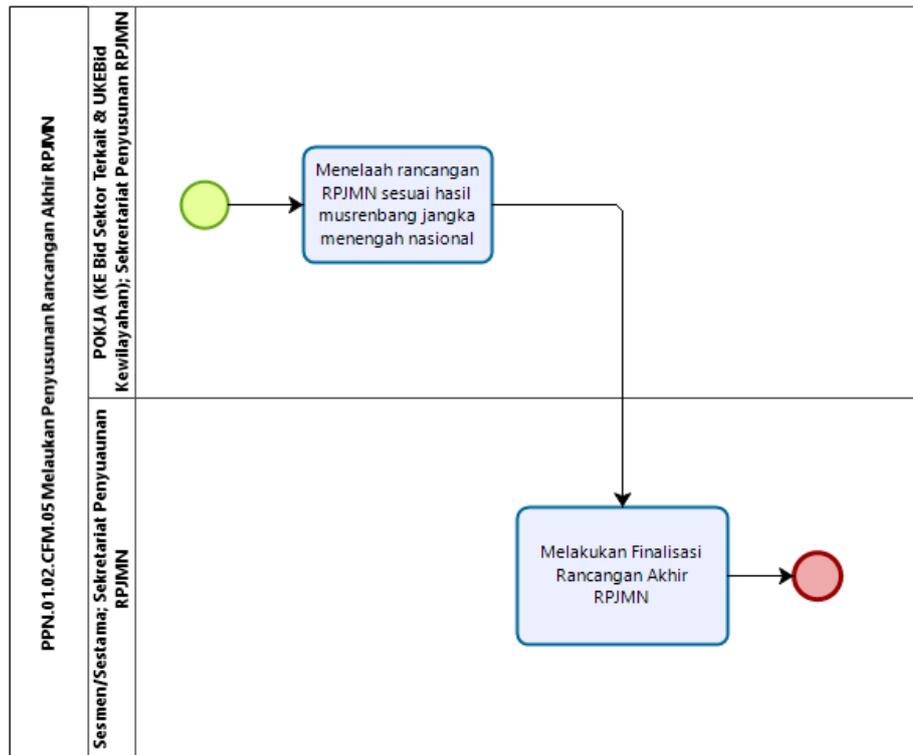
c. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN



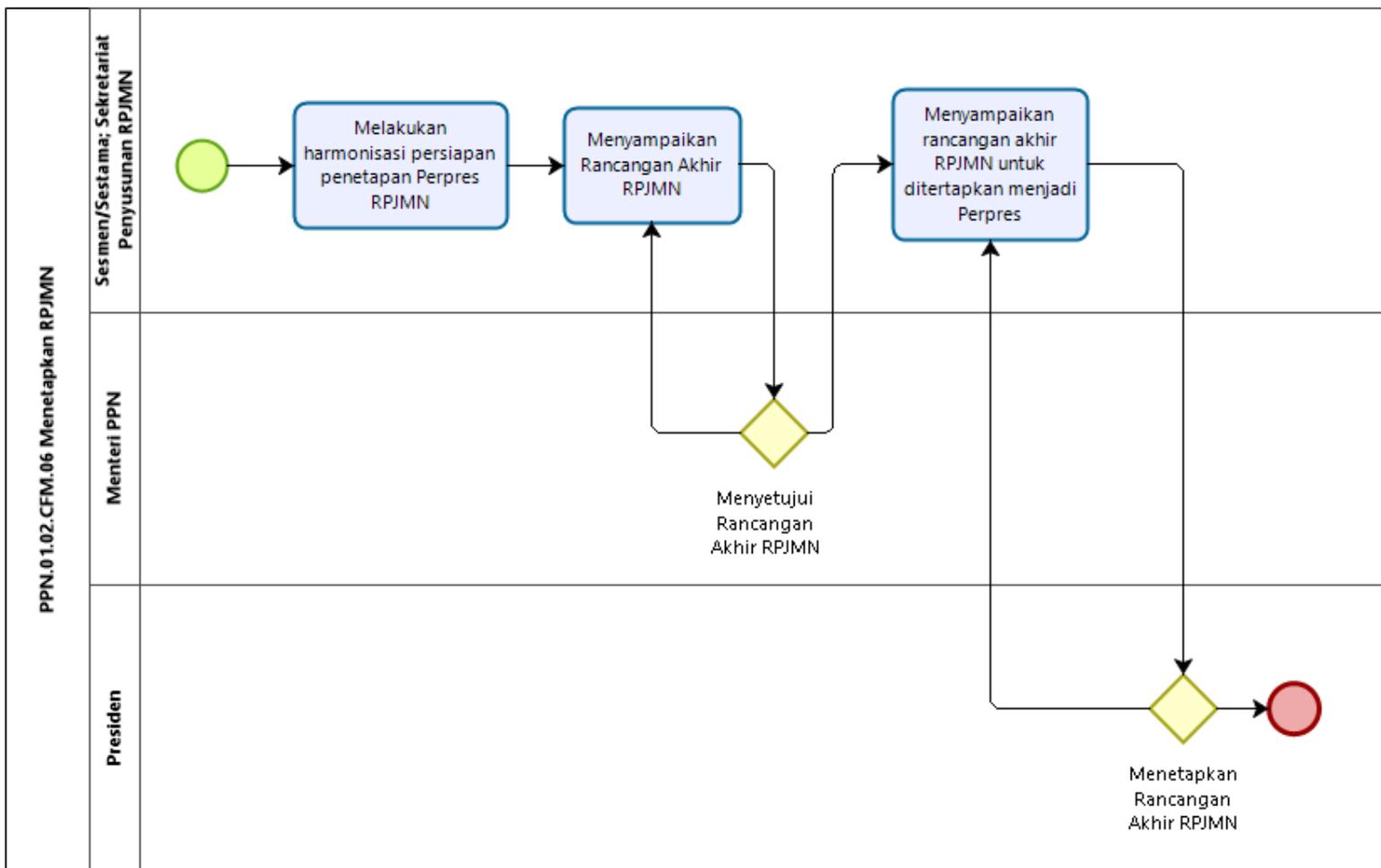
d. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Rancangan RPJMN



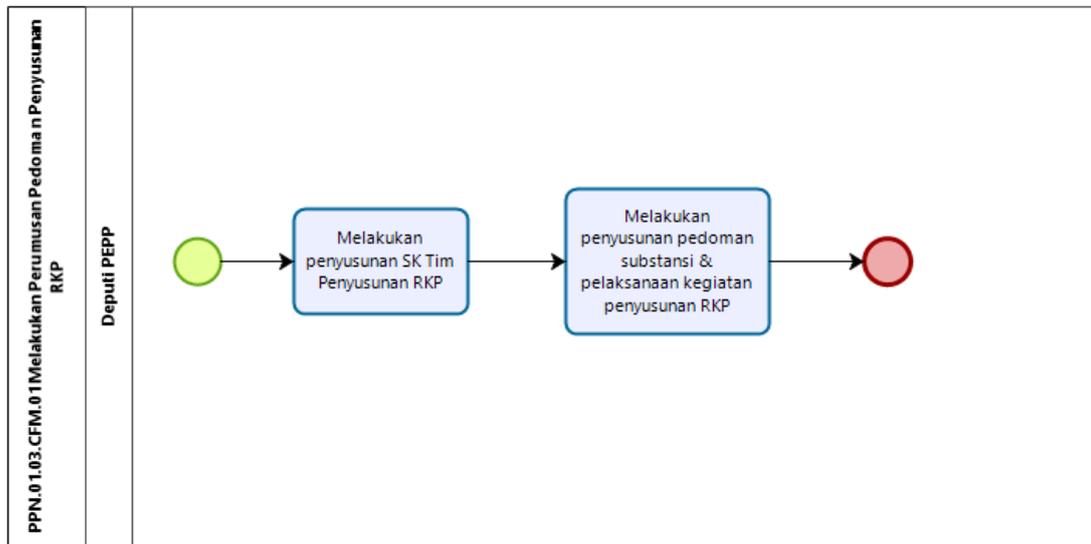
e. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN



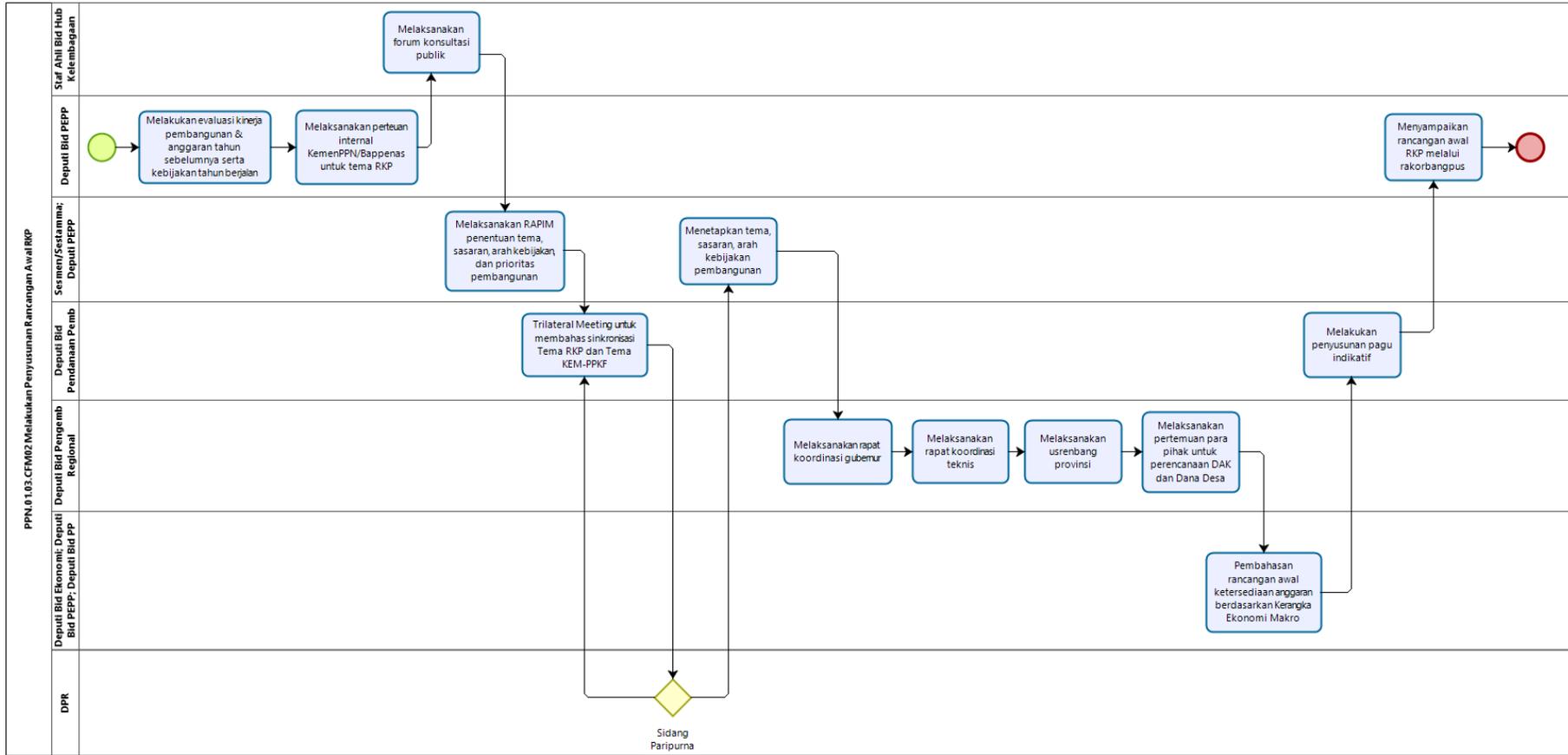
f. Peta Lintas Fungsi Menetapkan RPJMN



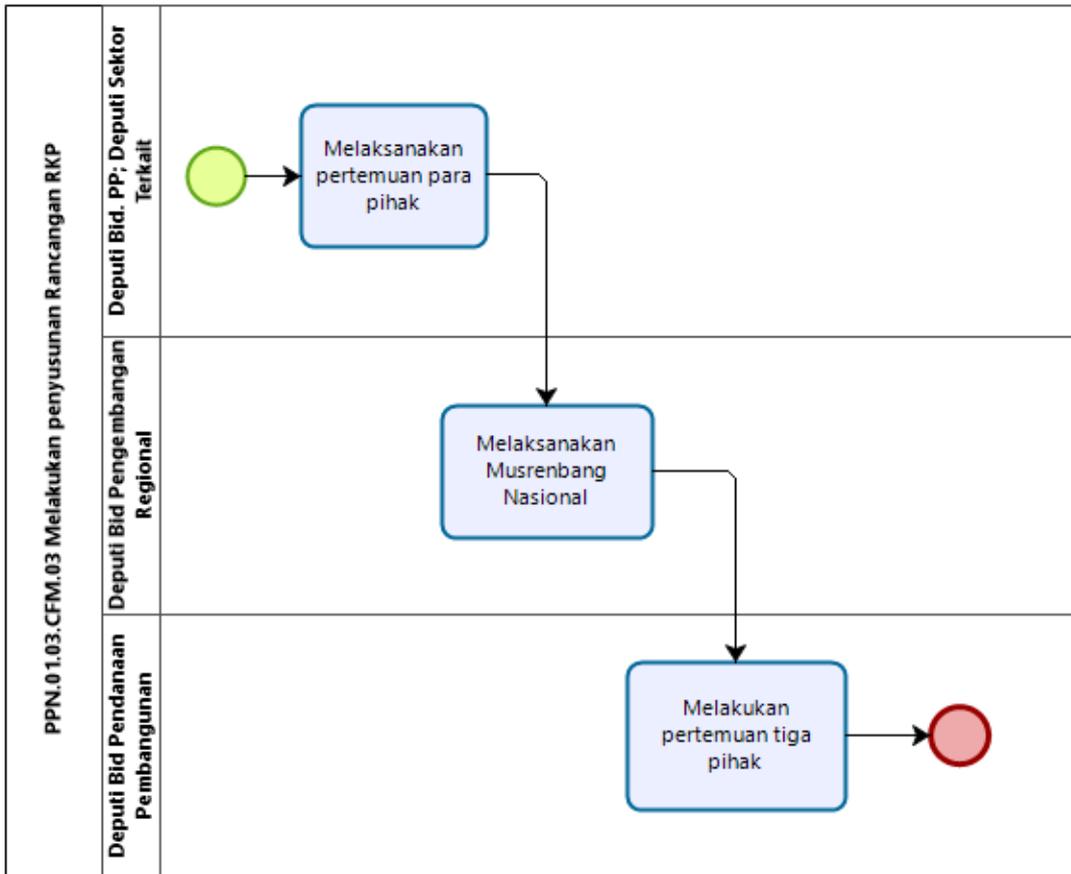
g. Peta Lintas Fungsi Melakukan Perumusan Pedoman Penyusunan RKP



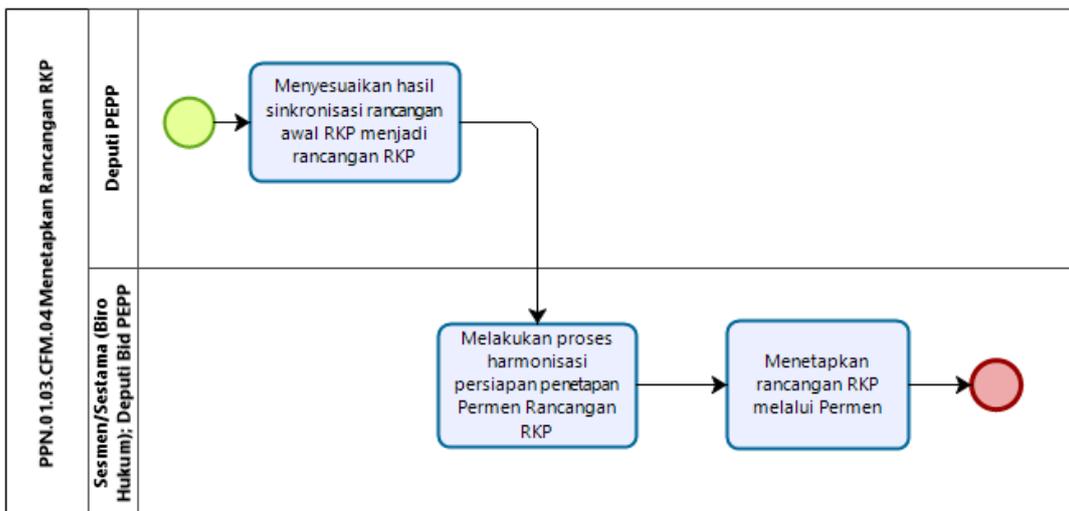
h. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RKP



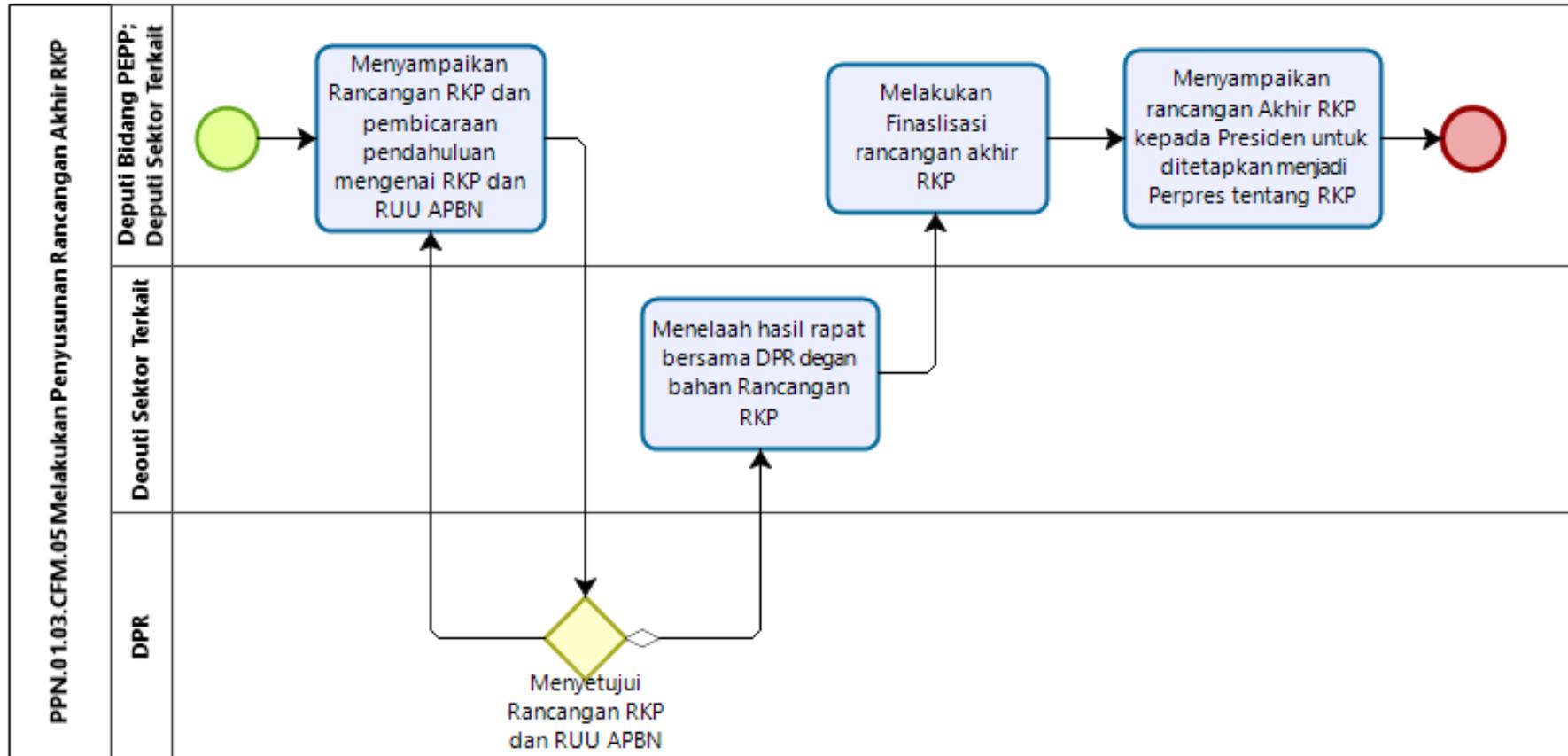
i. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Rancangan RKP



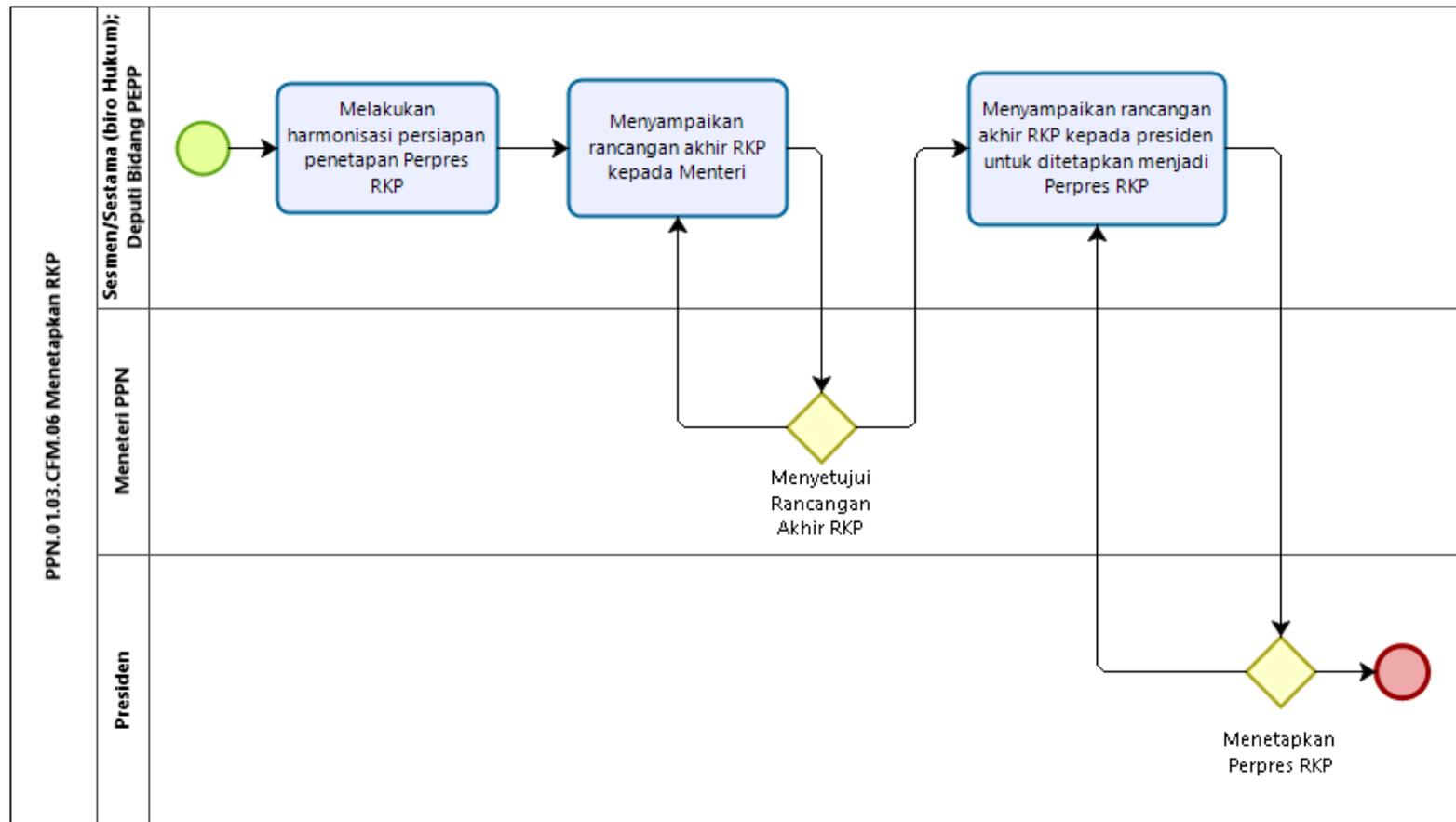
j. Peta Lintas Fungsi Menetapkan Rancangan RKP



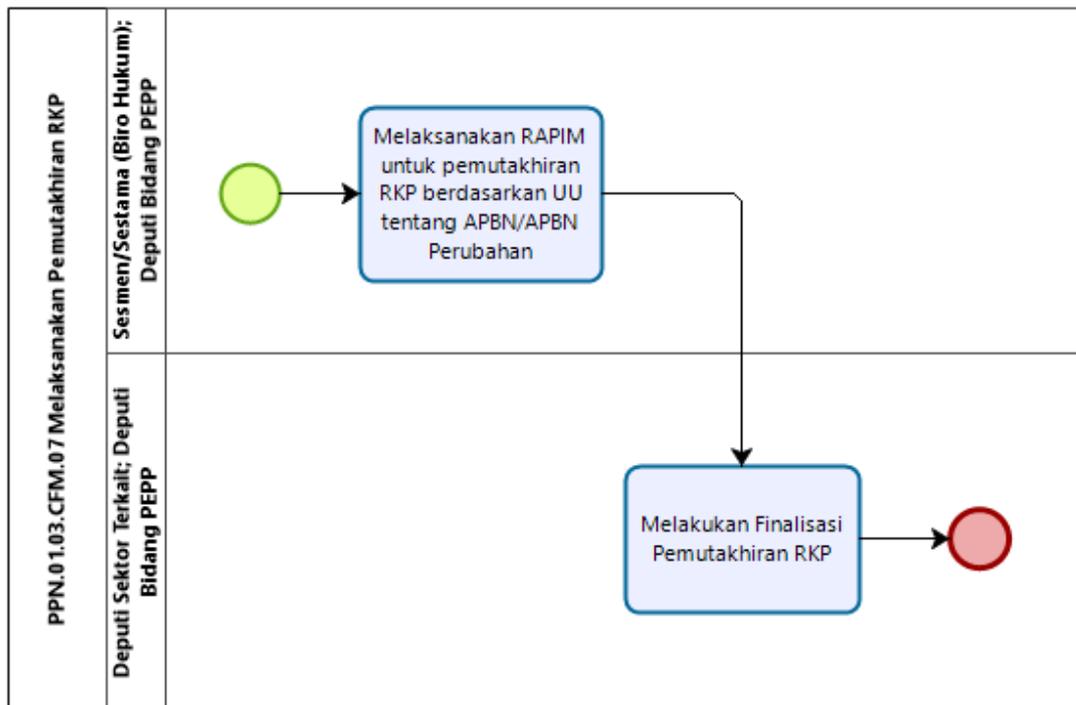
k. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Rancangan Akhir RKP



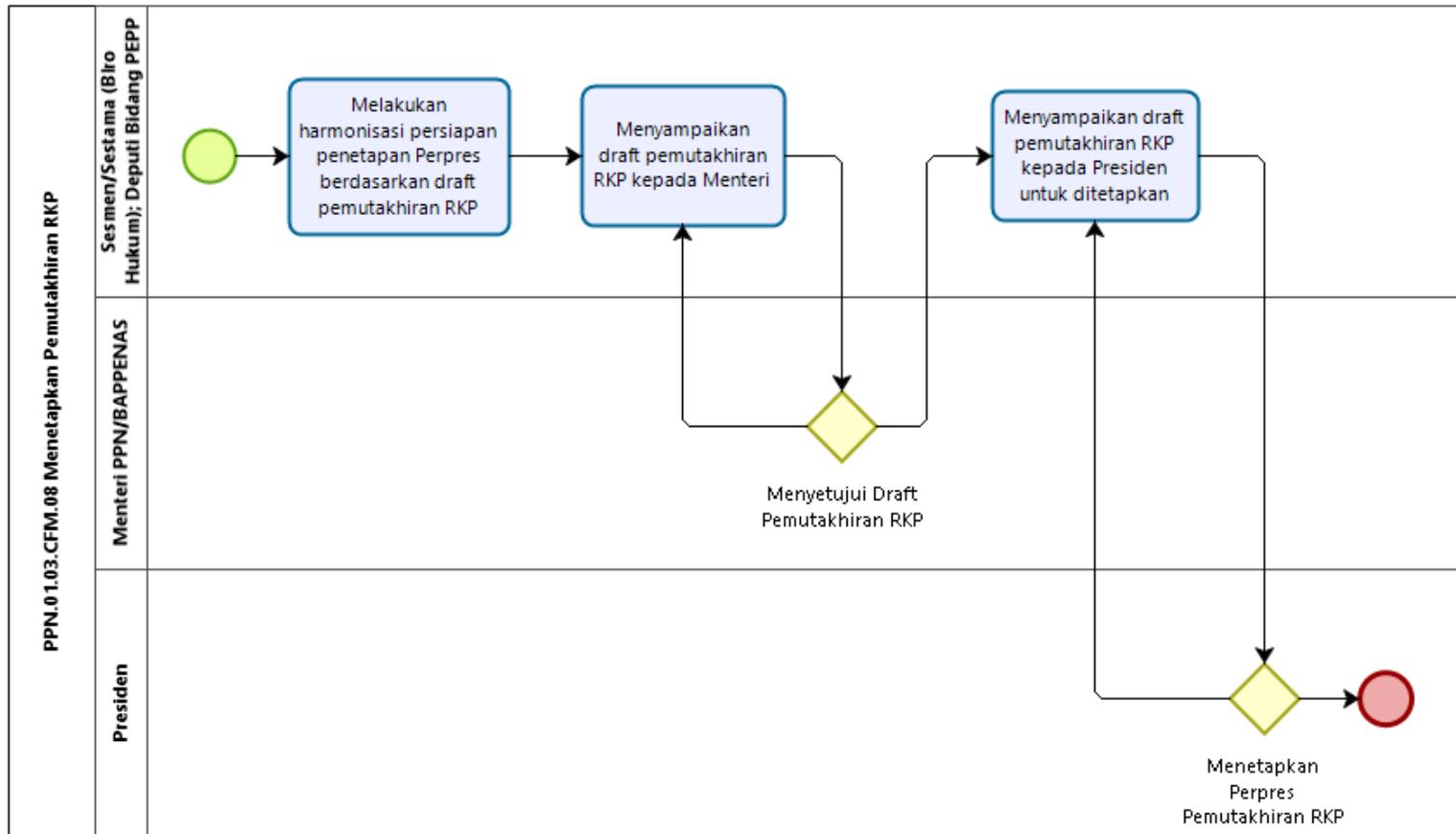
I. Peta Lintas Fungsi Menetapkan RKP



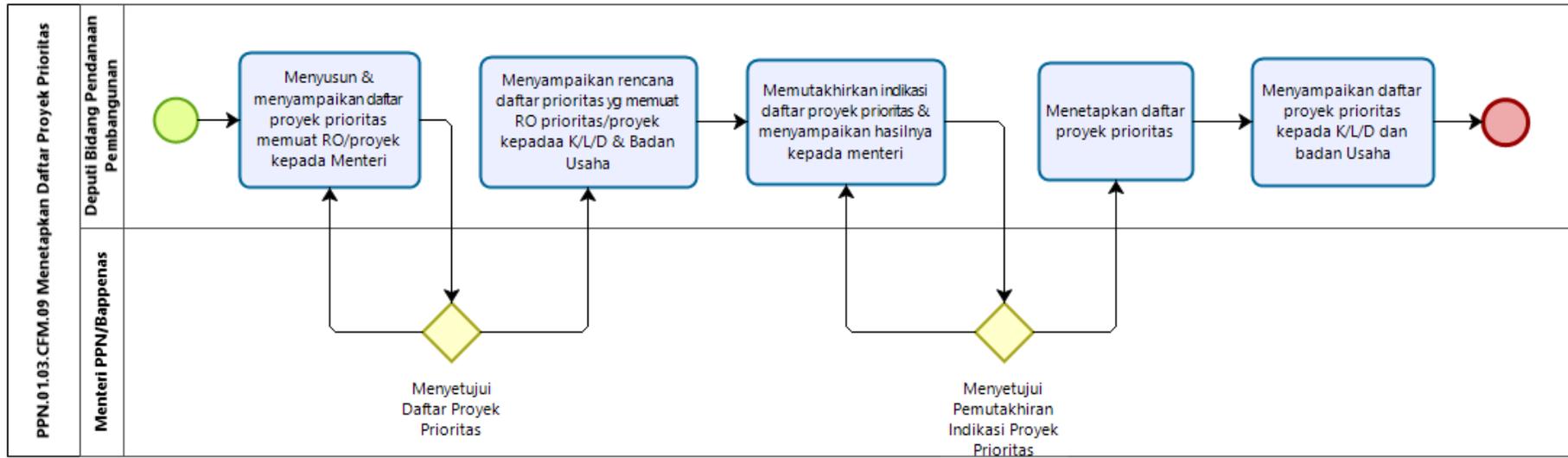
m. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pemutakhiran RKP



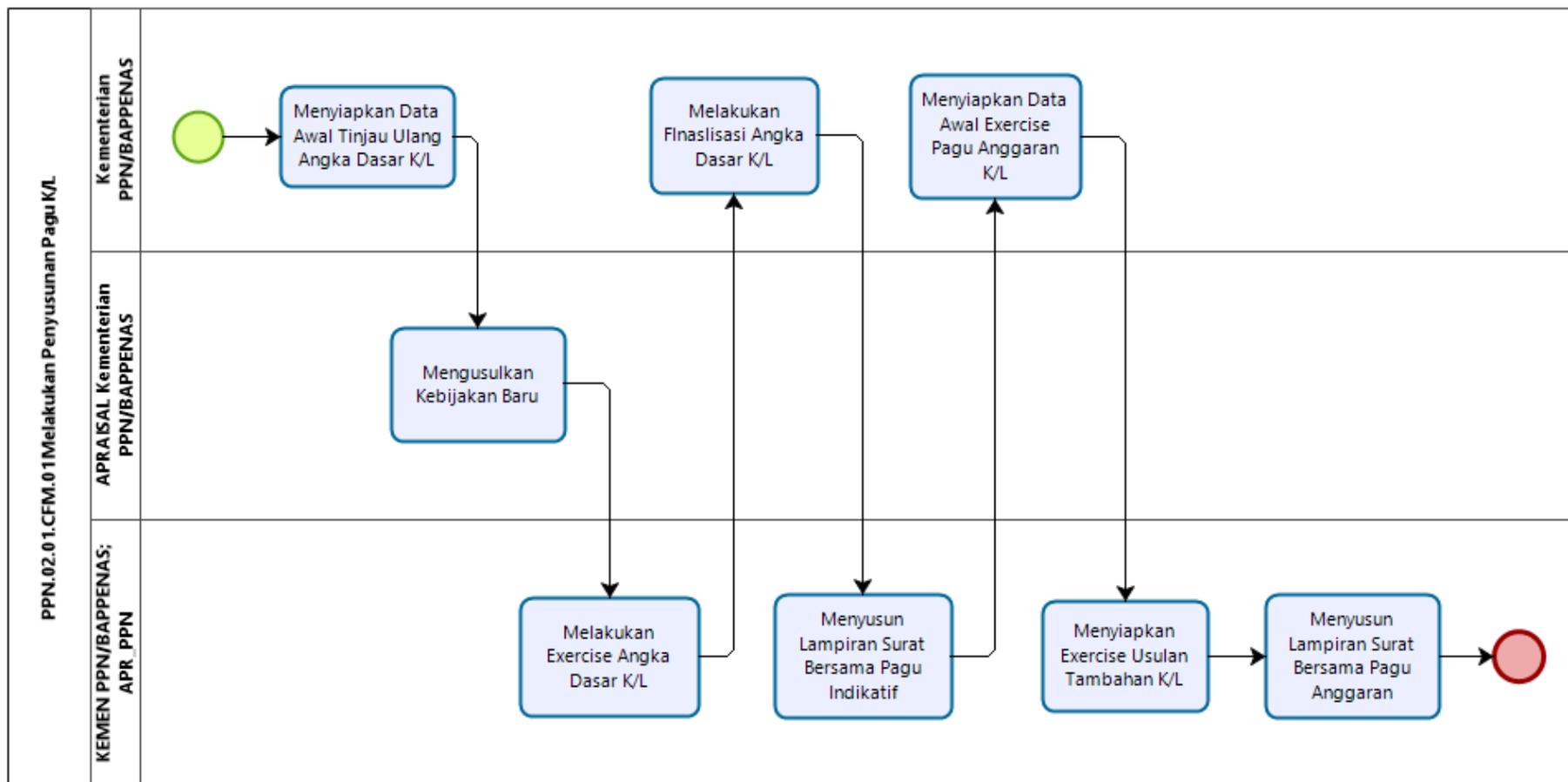
n. Peta Lintas Fungsi Menetapkan Pemutakhiran RKP



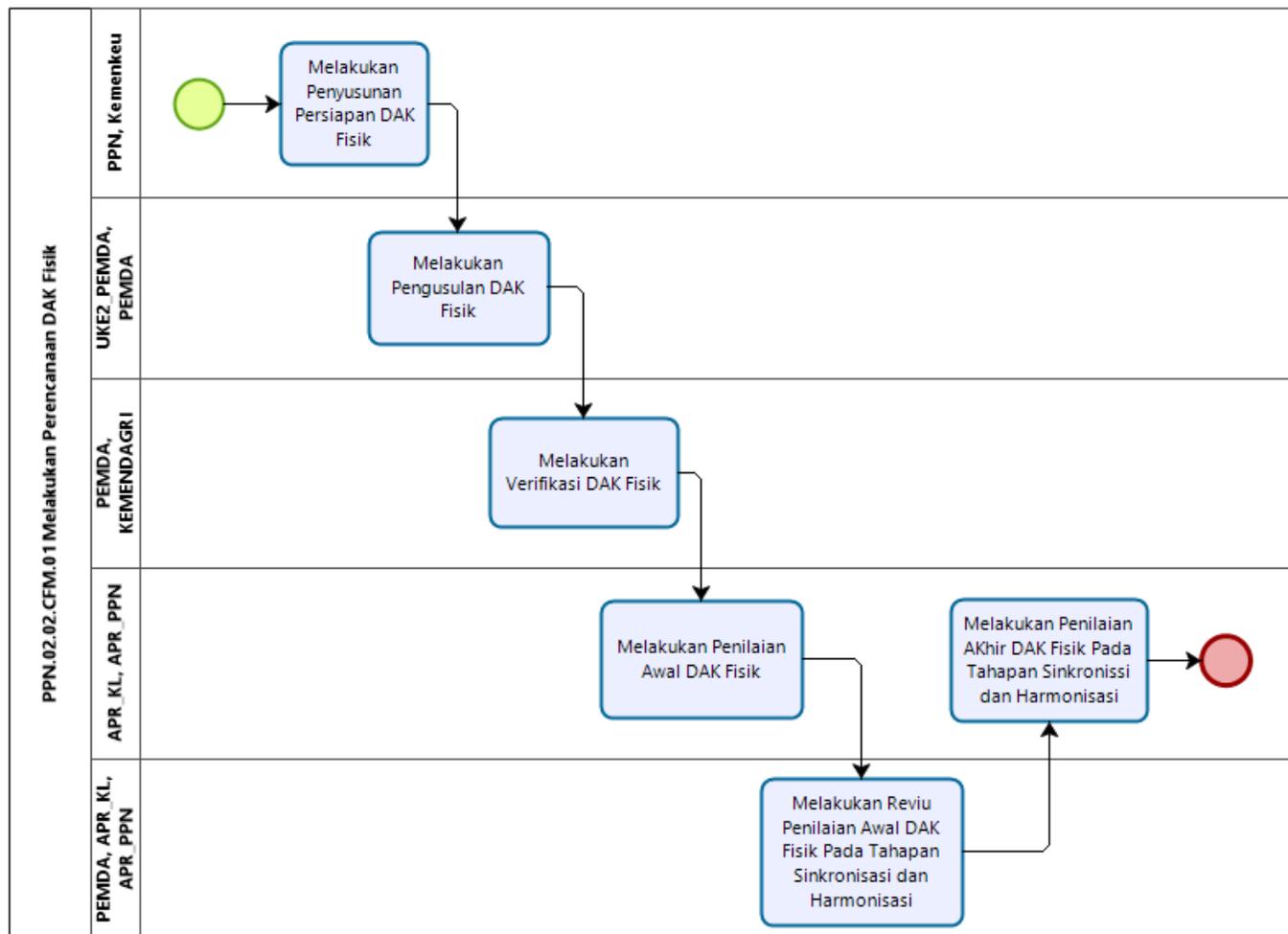
o. Peta Lintas Fungsi Menetapkan Daftar Proyek Prioritas



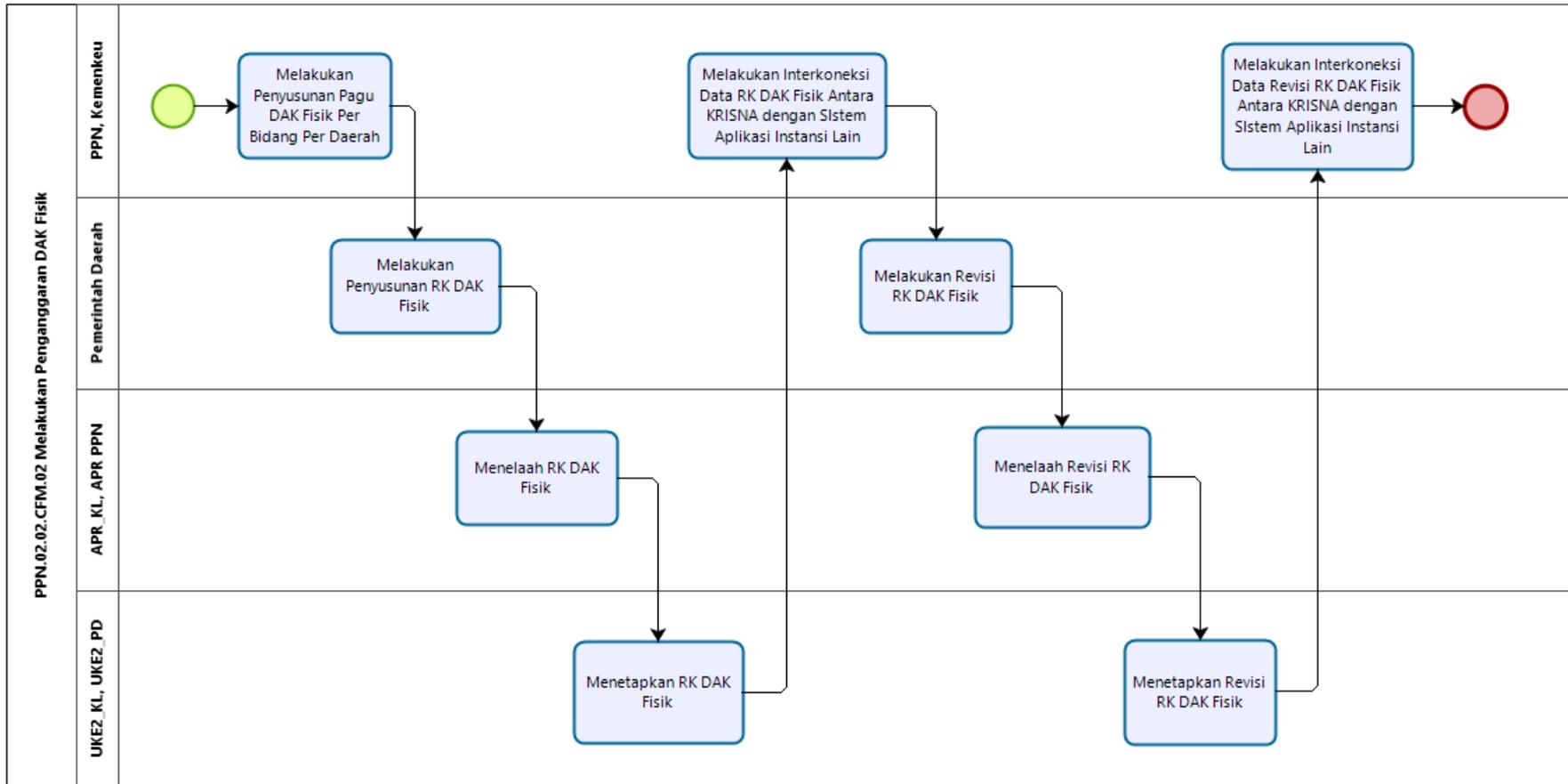
p. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyusunan Pagu K/L



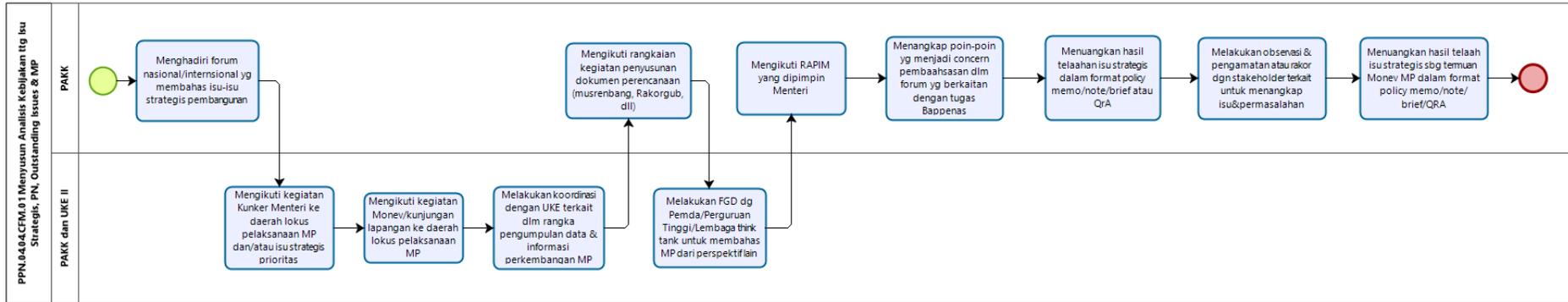
q. Peta Lintas Fungsi Melakukan Perencanaan DAK Fisik



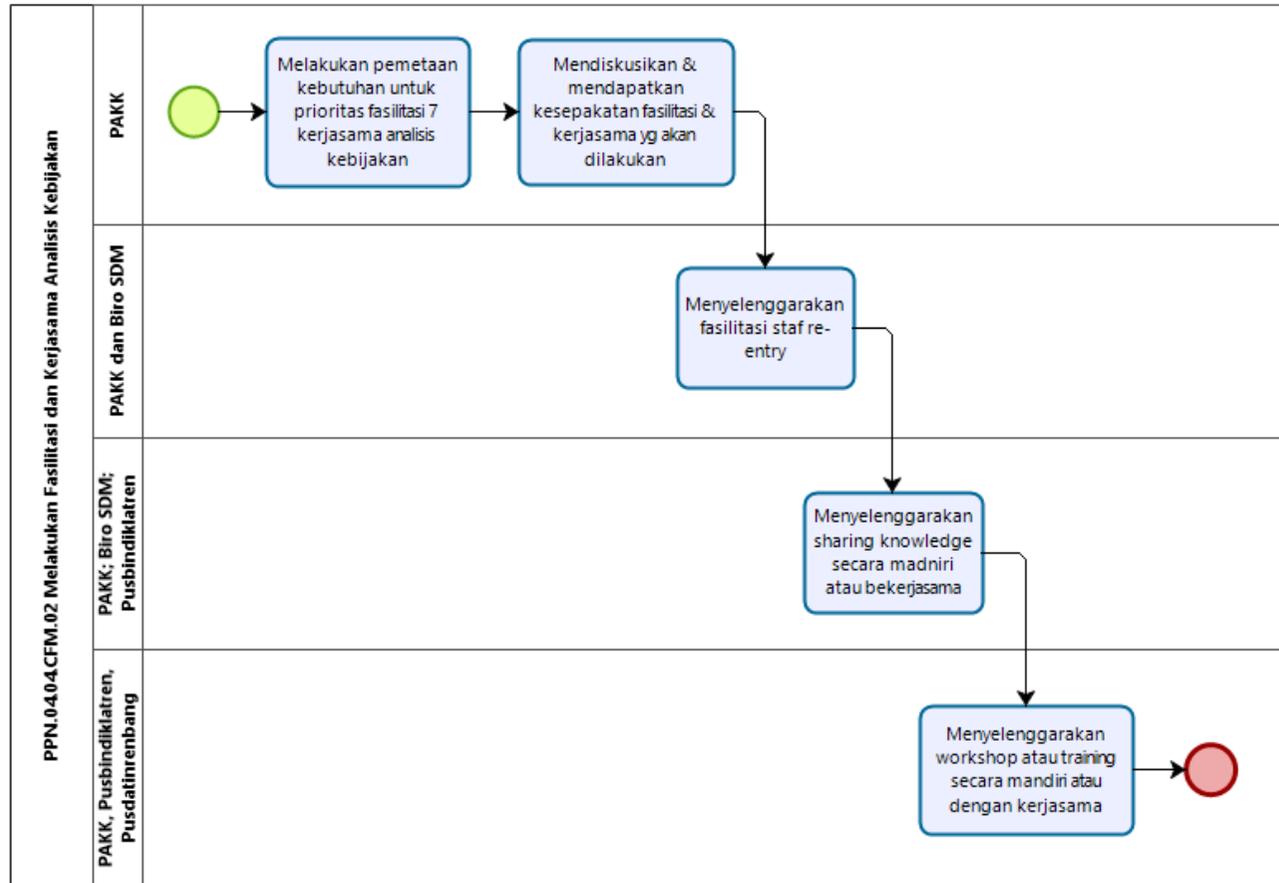
r. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penganggaran DAK Fisik



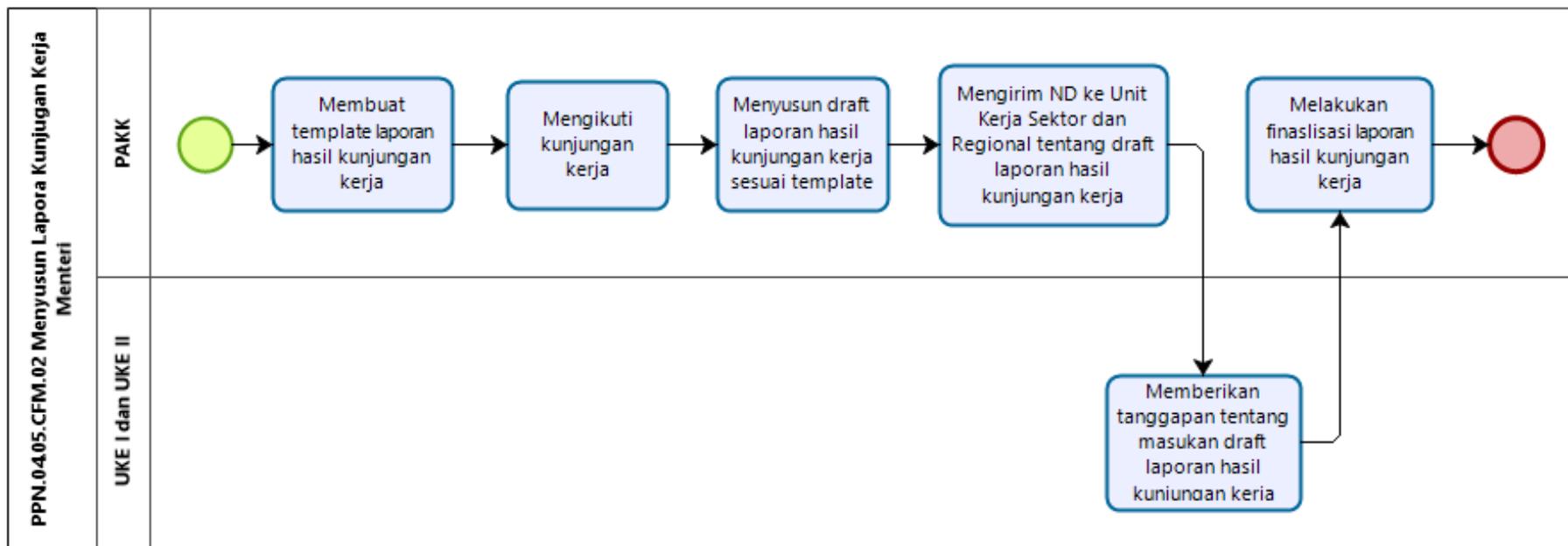
s. Peta Lintas Fungsi Menyusun Analisis Kebijakan tentang Isu Strategis, Prioritas Nasional, Outstanding Issues, dan Mayor Project



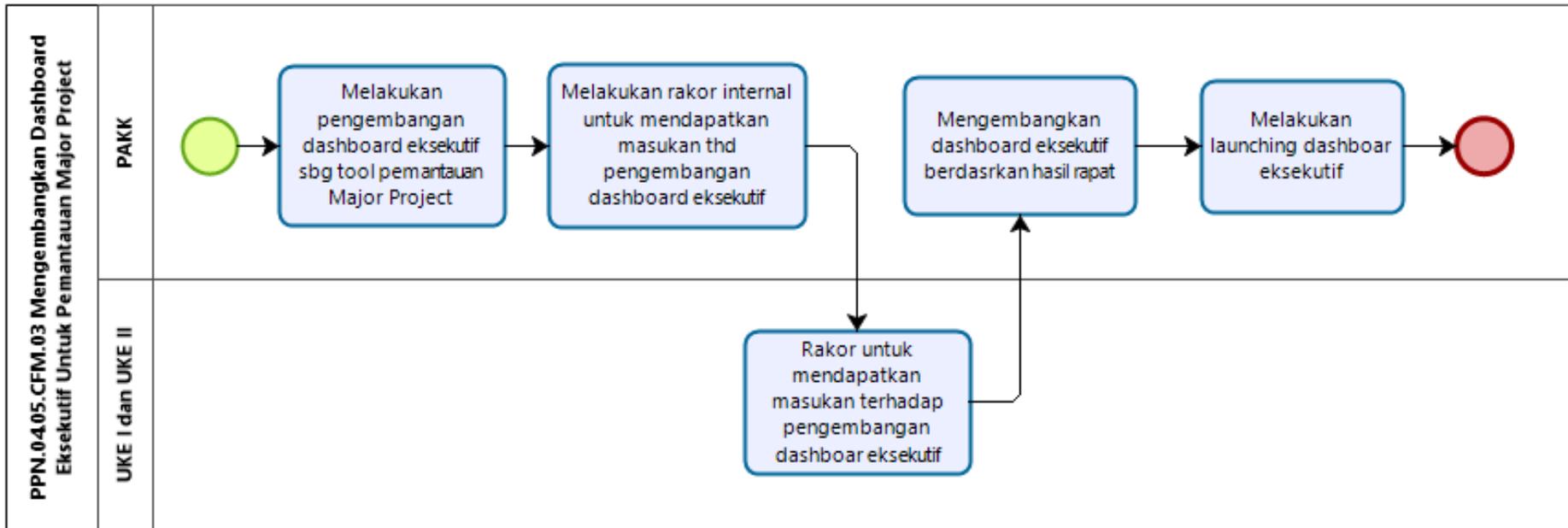
t. Peta Lintas Fungsi Melakukan Fasilitasi dan Kerjasama Analisis Kebijakan



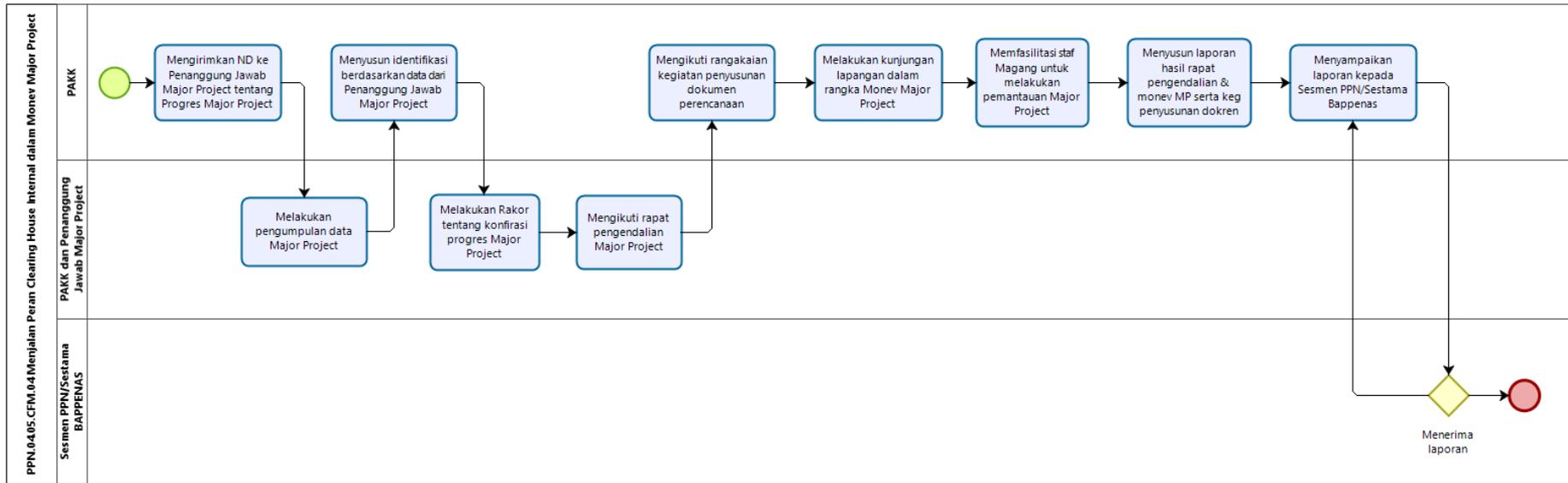
u. Peta Lintas Fungsi Menyusun Laporan Kunjungan Kerja Menteri



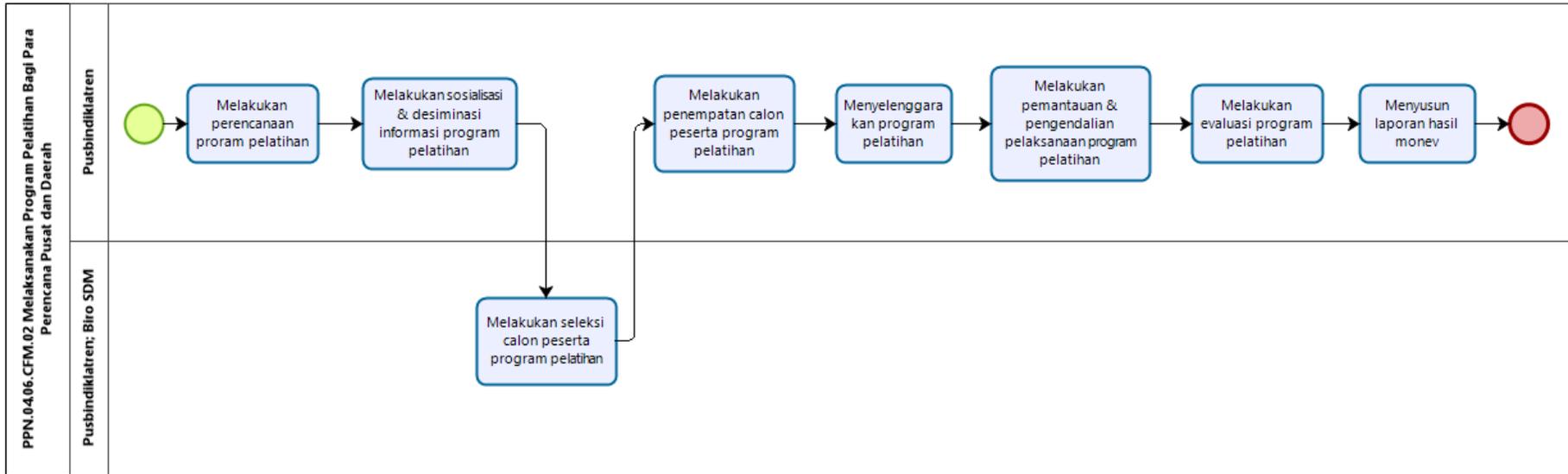
v. Peta Lintas Fungsi Mengembangkan Dashboard Eksekutif Untuk Pemantauan Major Project



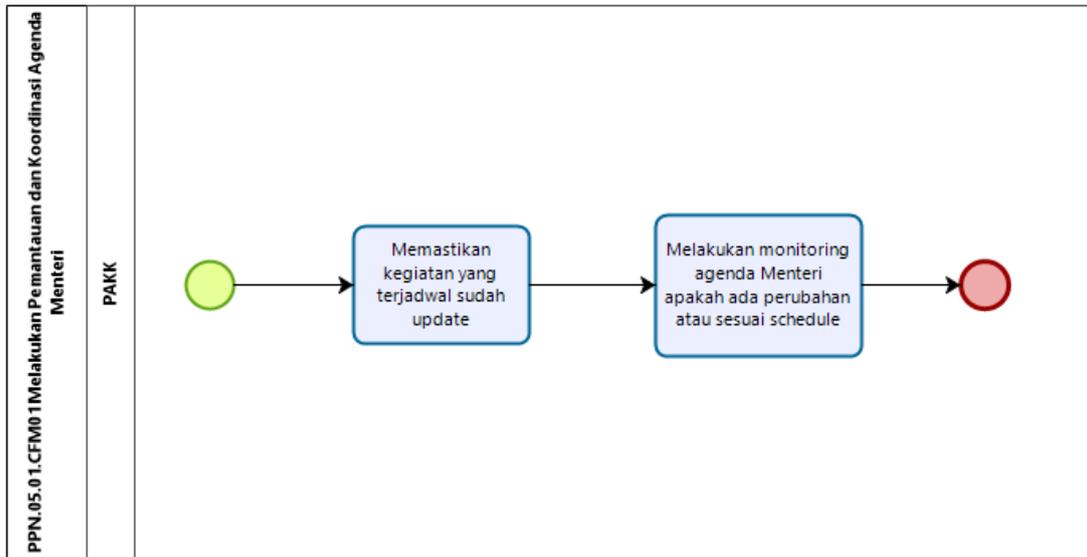
w. Peta Lintas Fungsi Menjalankan Peran Clearing House internat Dalam Monitoring dan Evaluasi Major Project



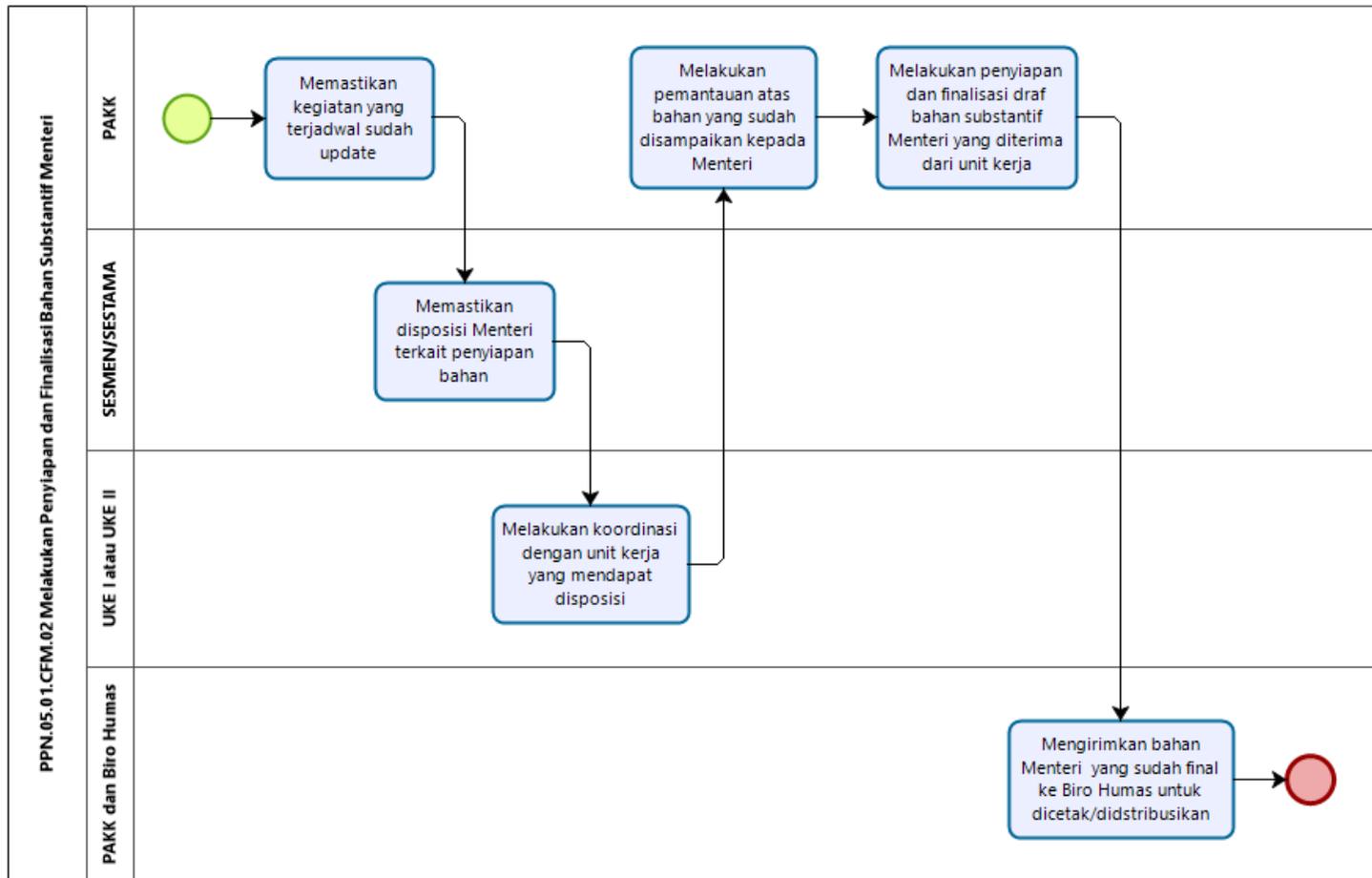
x. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Program Pelatihan Bagi Para Perencana Pusat dan Daerah



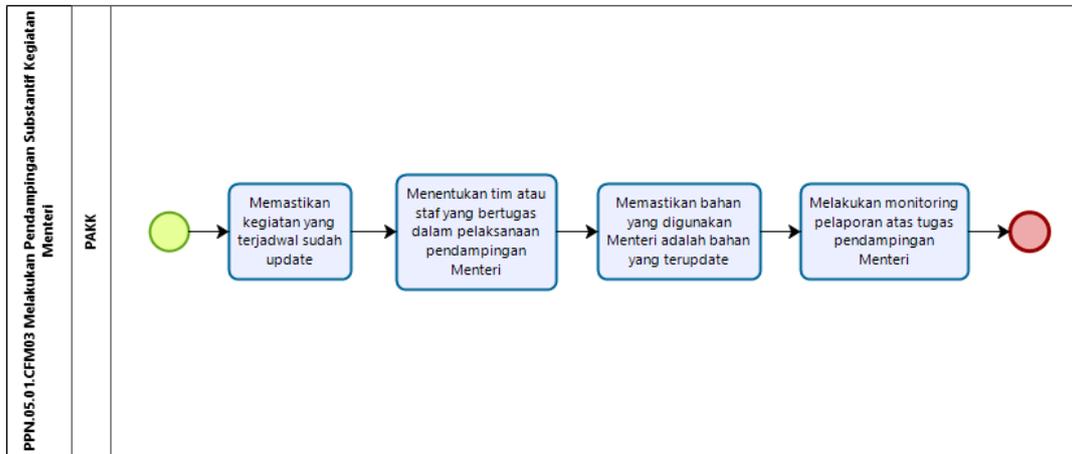
- y. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pemantauan dan Koordinasi Agenda Menteri



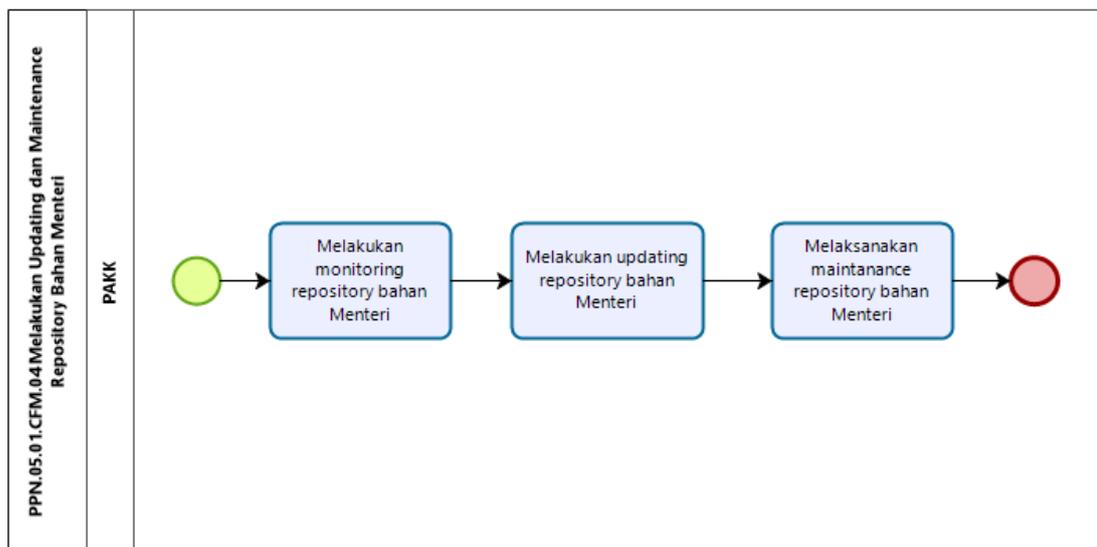
z. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penyiapan dan Finalisasi Bahan Substantif Menteri



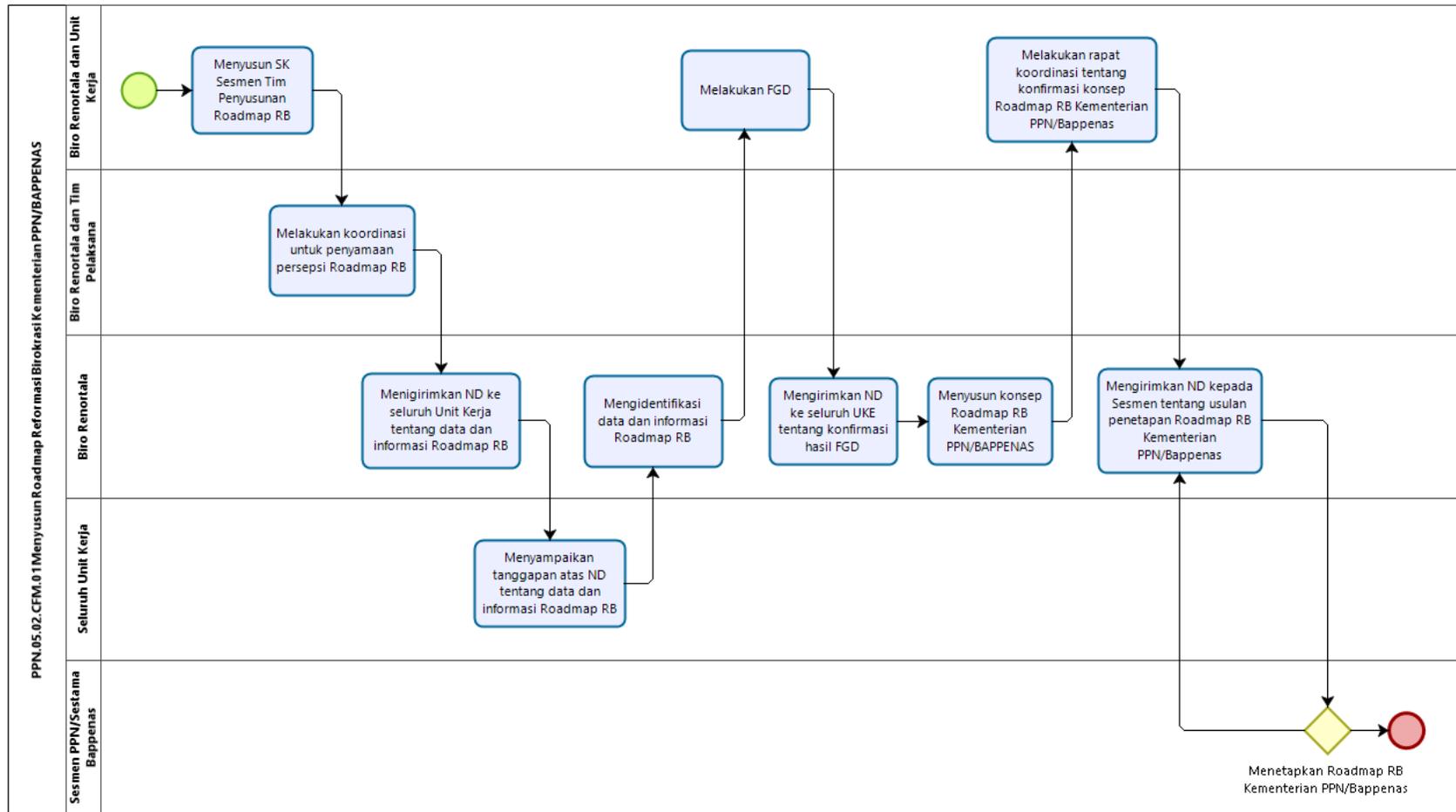
aa. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pendampingan Substantif Kegiatan Menteri



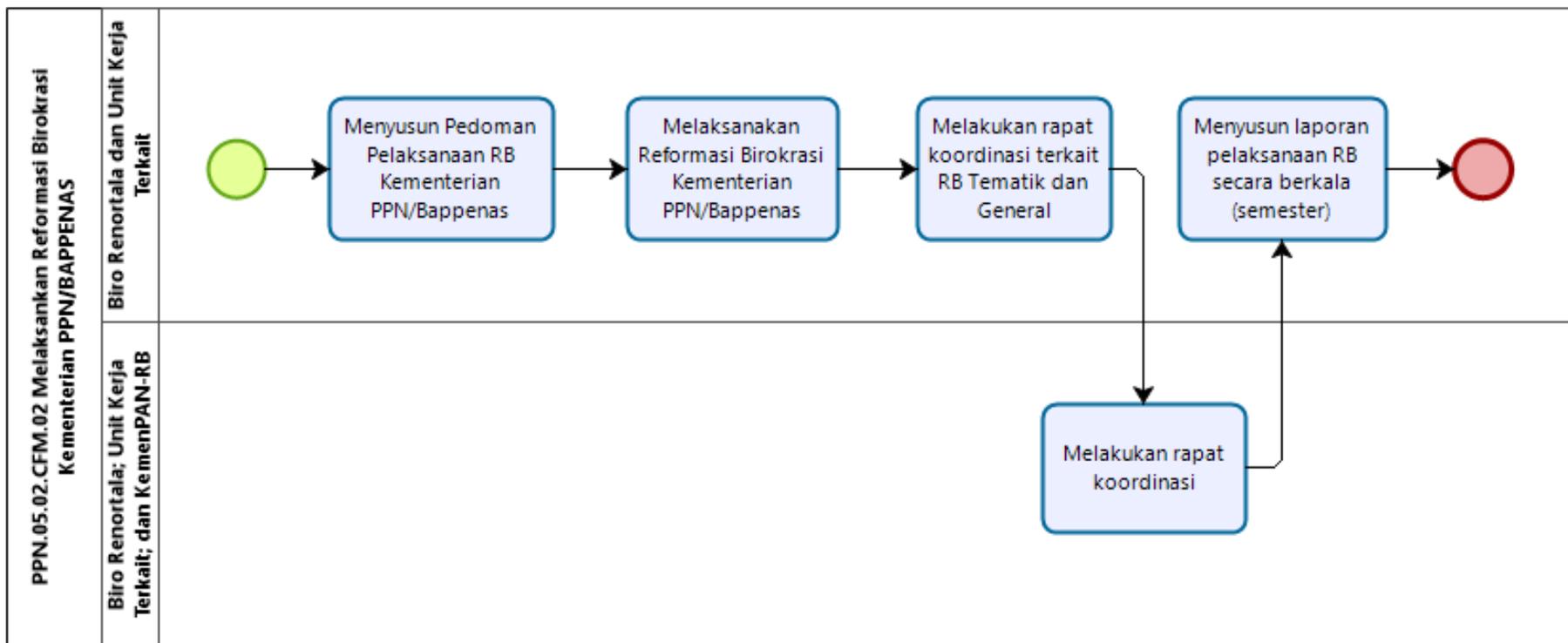
bb. Peta Lintas Fungsi Melakukan Updating dan Maintenance Repository Bahan Menteri



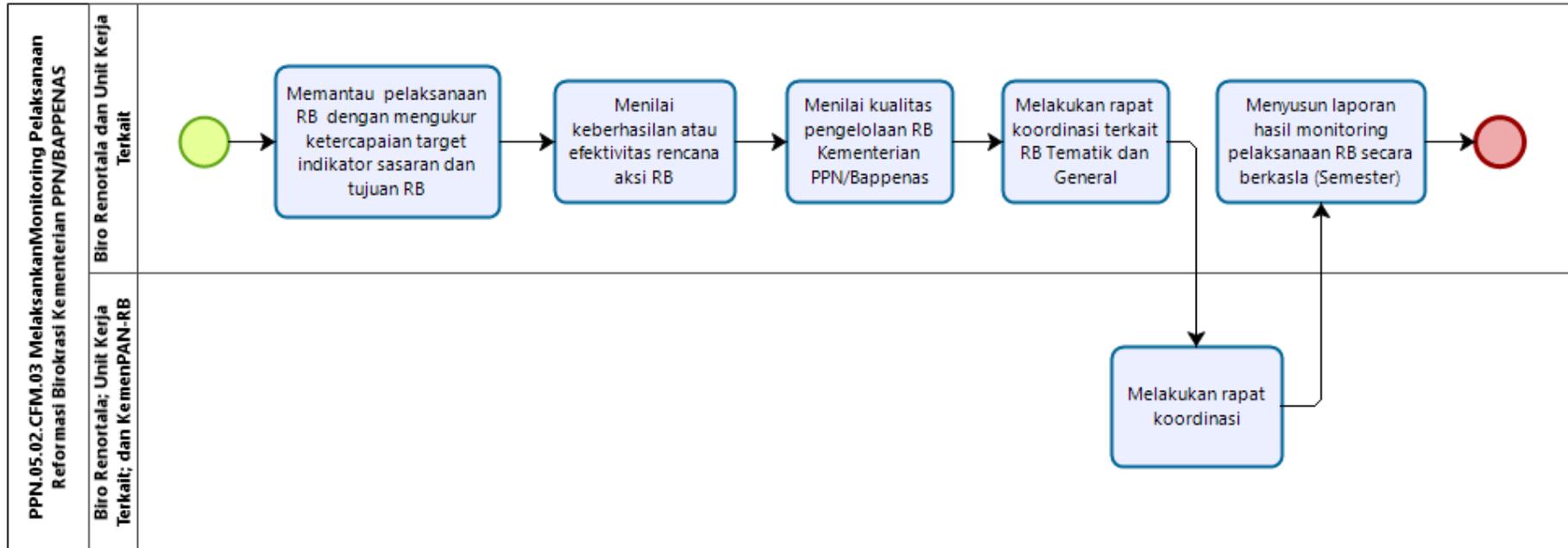
cc. Peta Lintas Fungsi Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/BAPPENAS



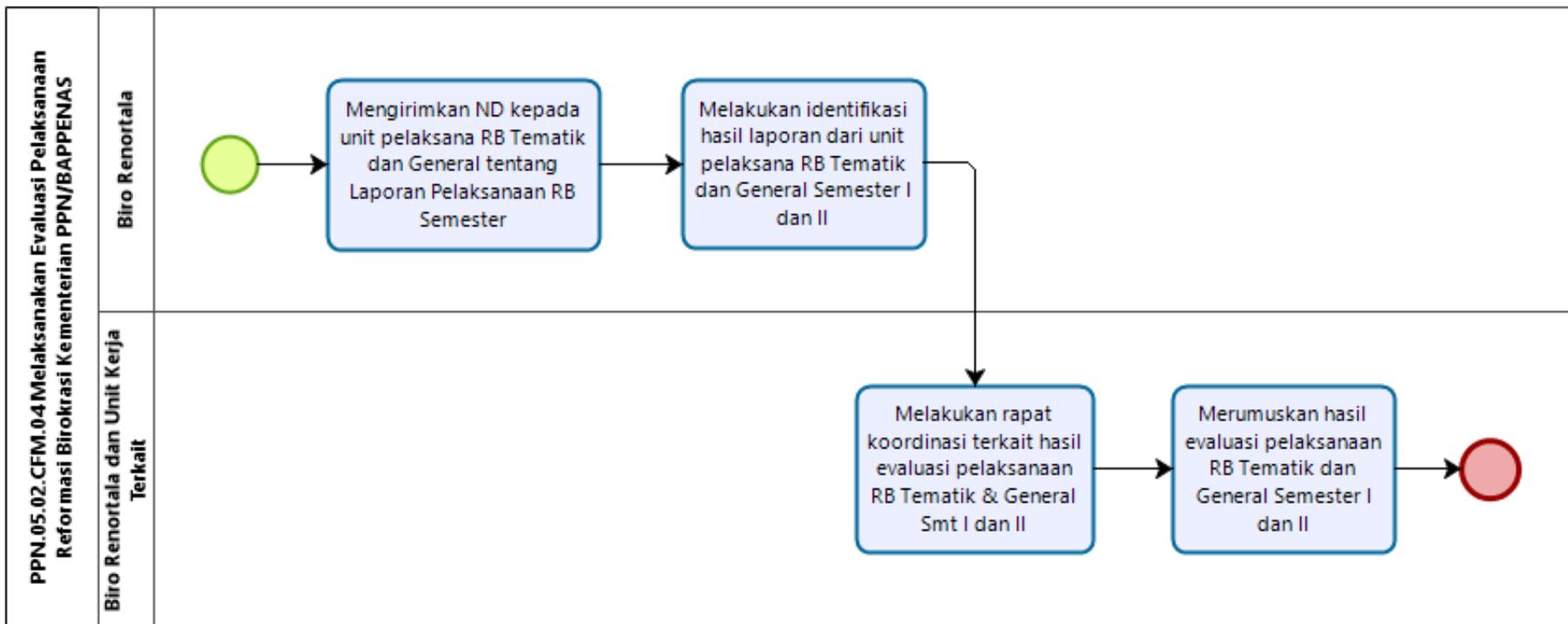
dd. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/BAPPENAS



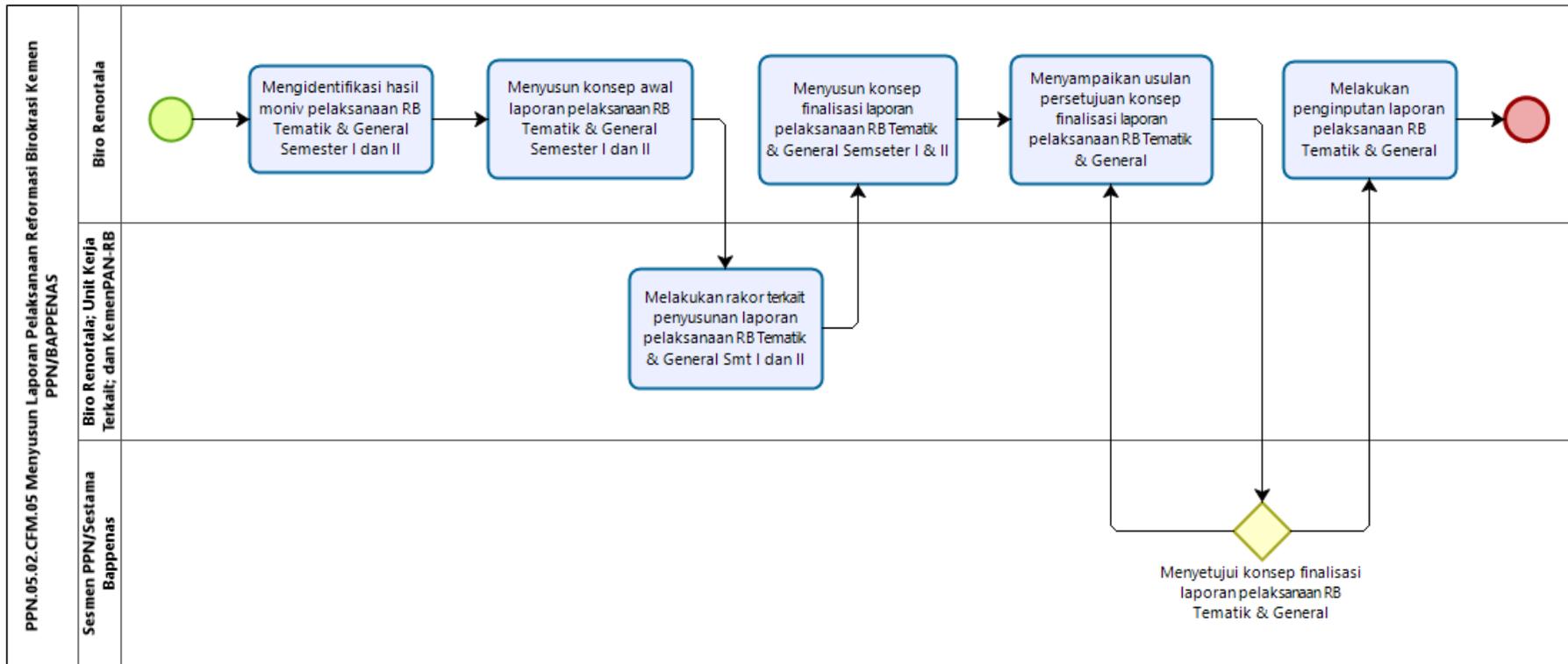
ee. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/BAPPENAS



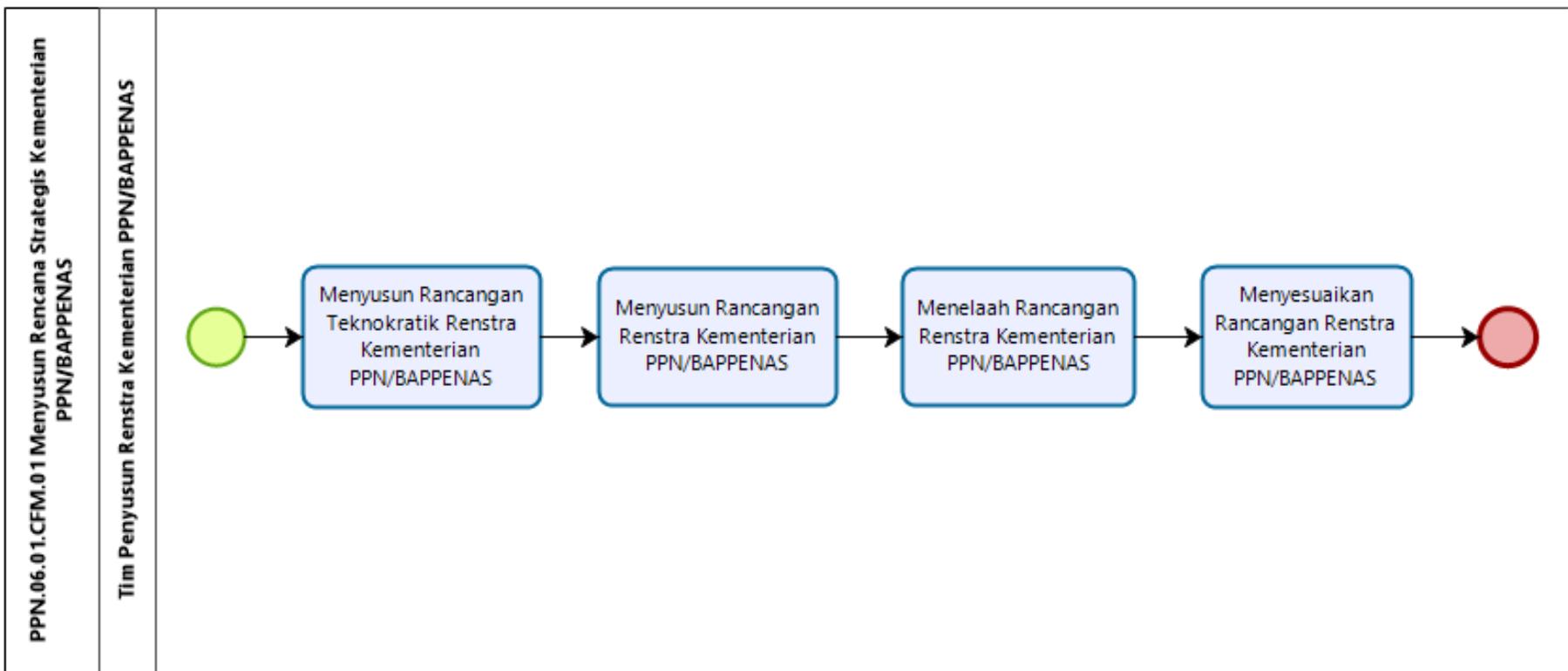
ff. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/BAPPENAS



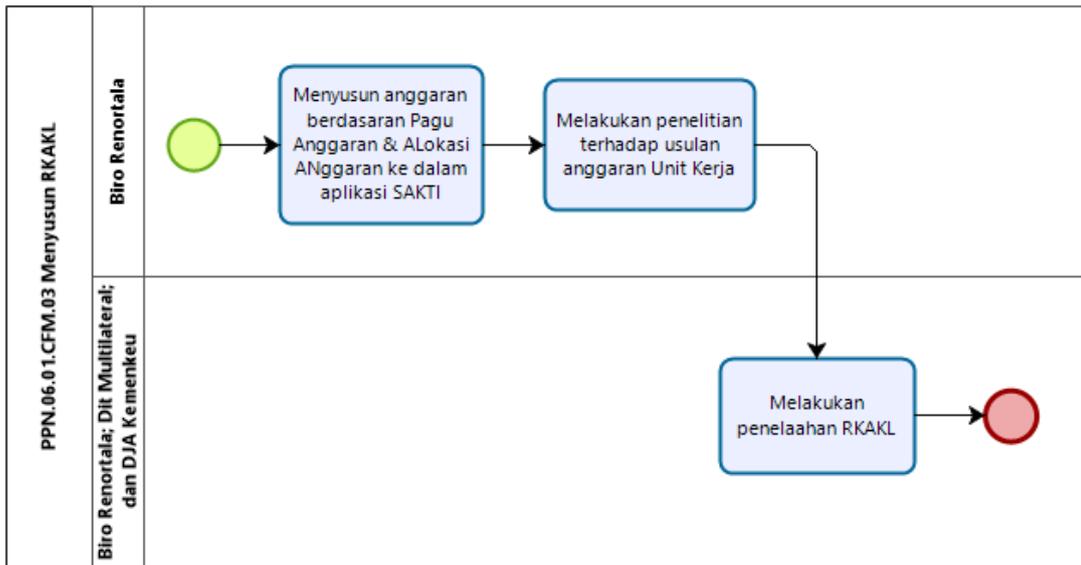
gg. Peta Lintas Fungsi Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



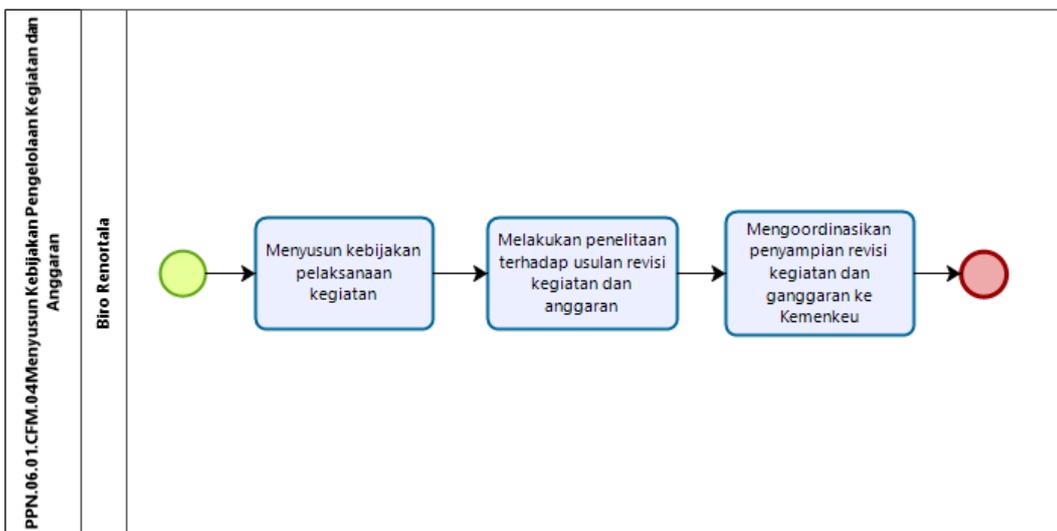
hh. Peta Lintas Fungsi Menyusun Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS



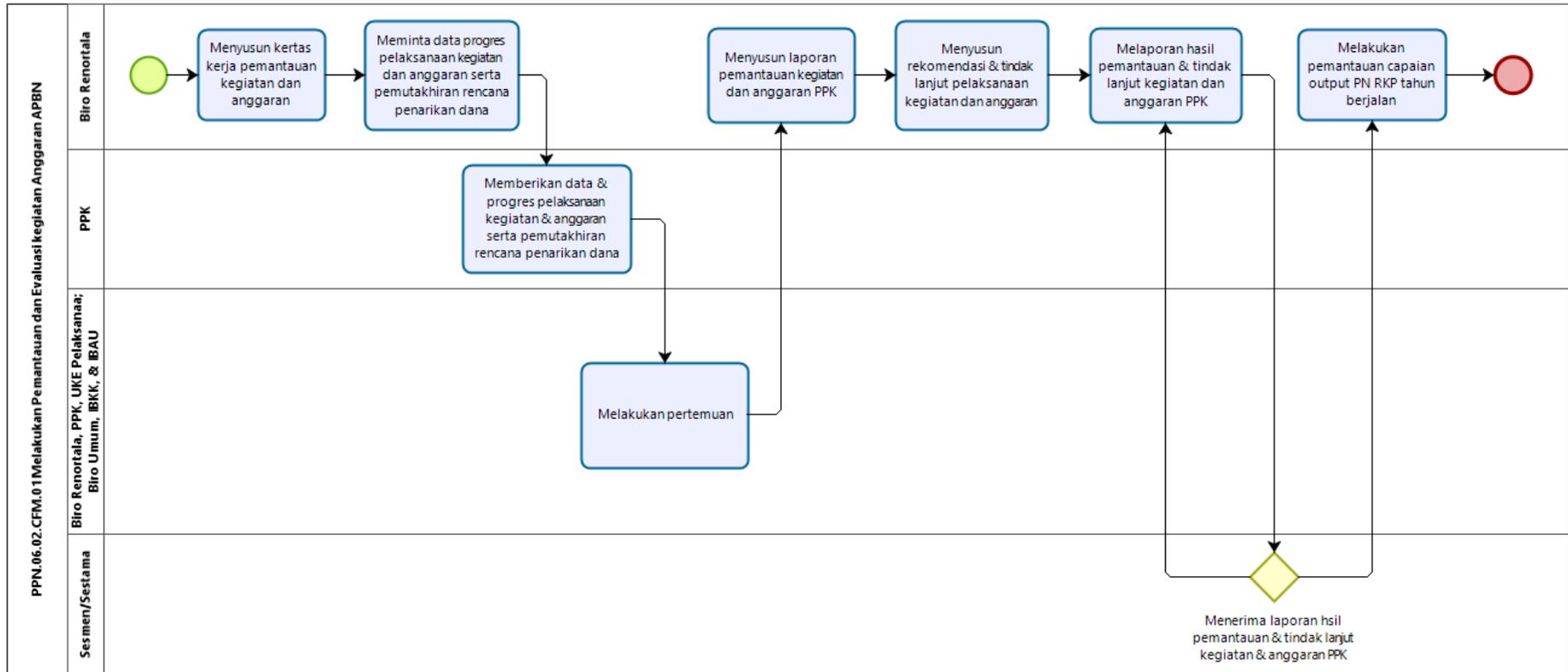
ii. Peta Lintas Fungsi Menyusun RKAKL



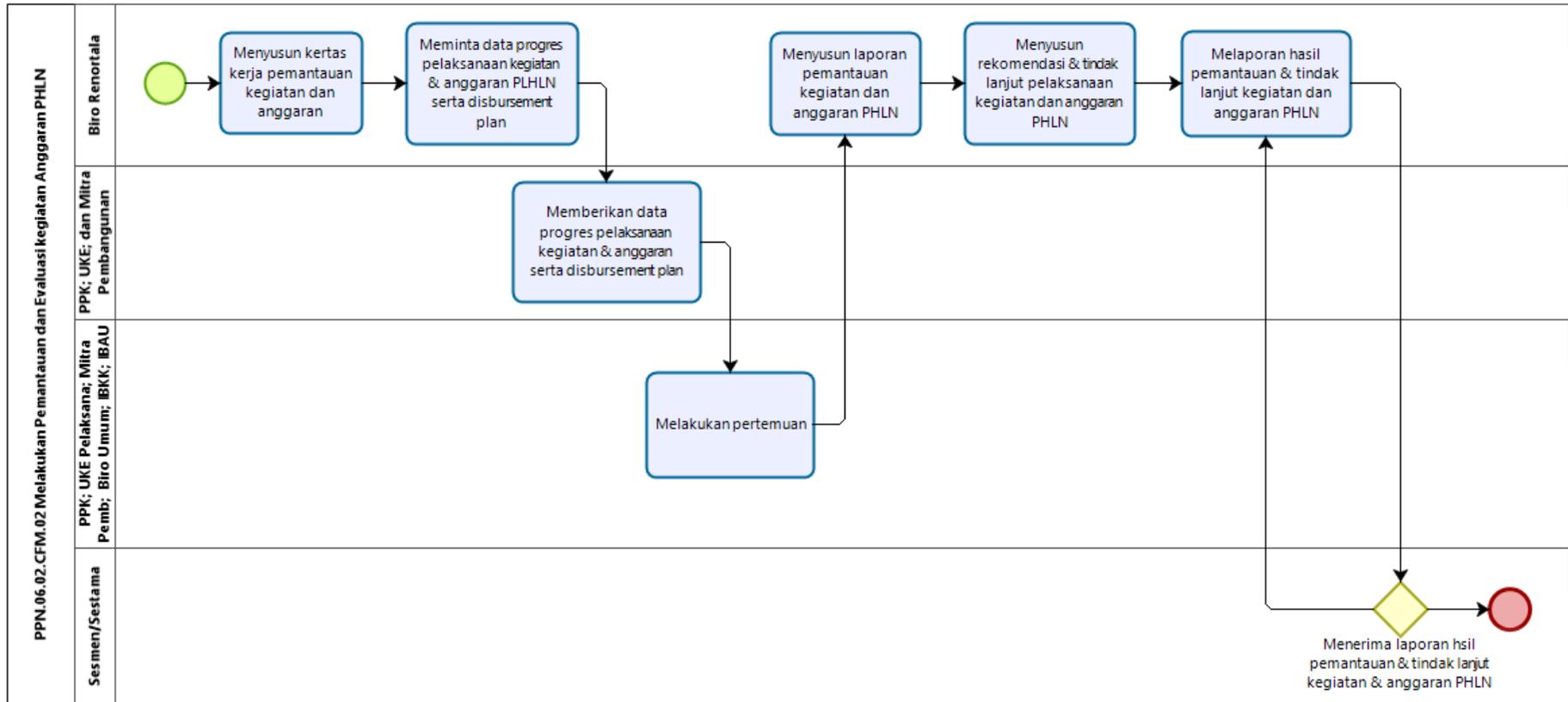
jj. Peta Lintas Fungsi Menyusun Kebijakan Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran



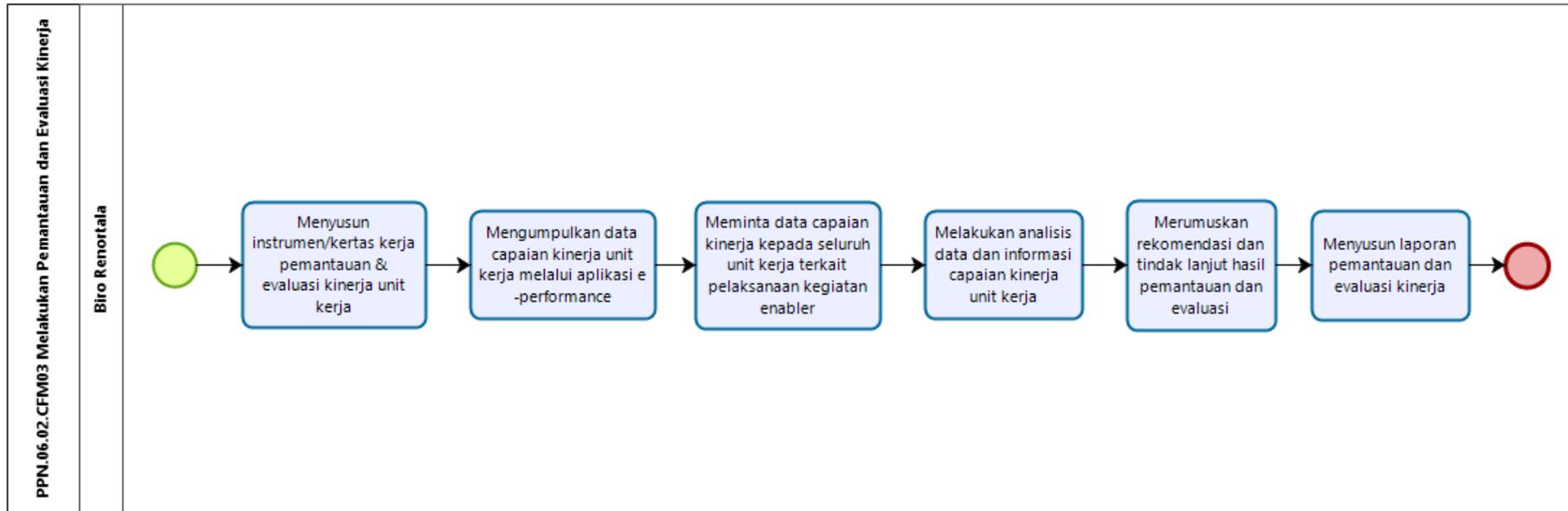
kk. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Anggaran APBN



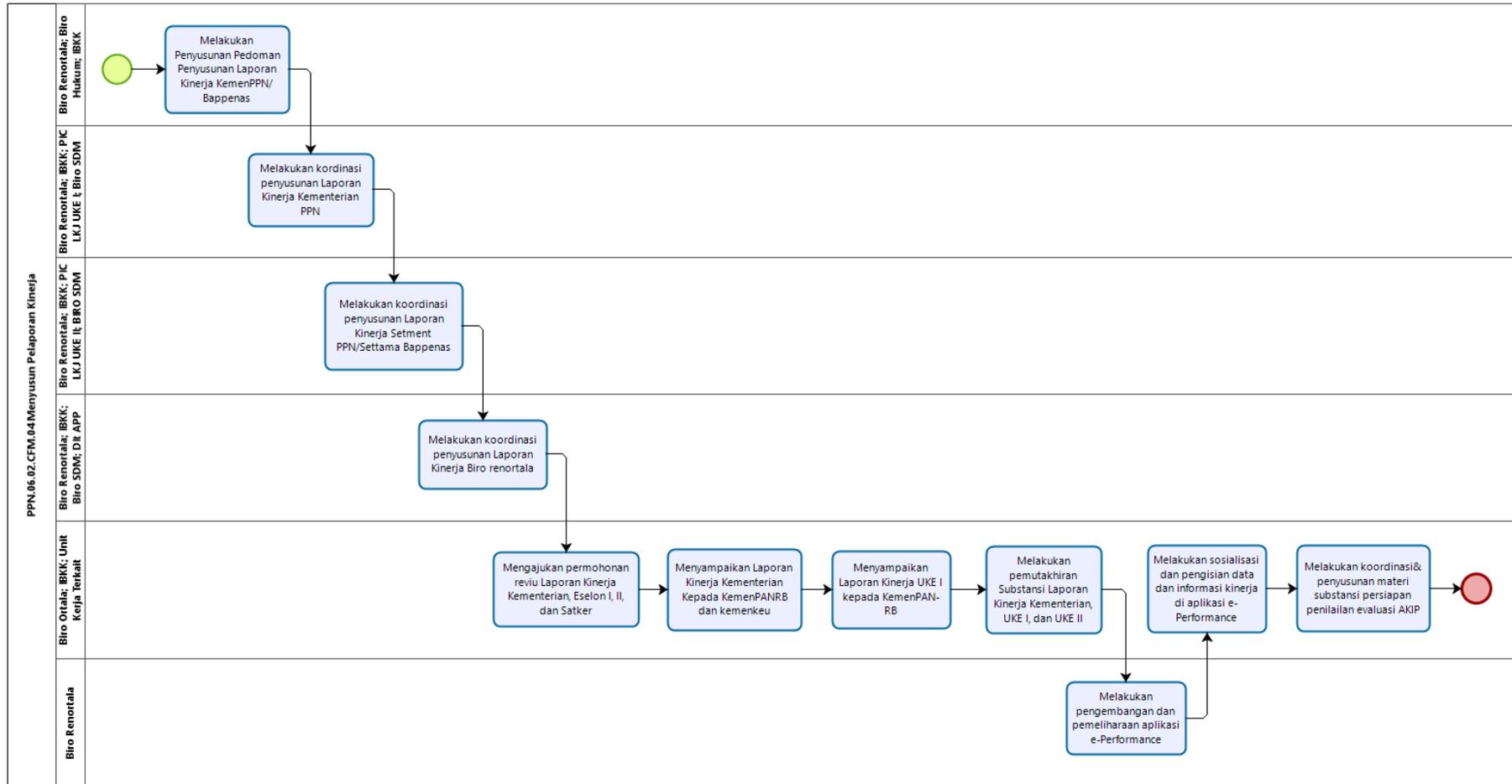
II. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Anggaran PHLN



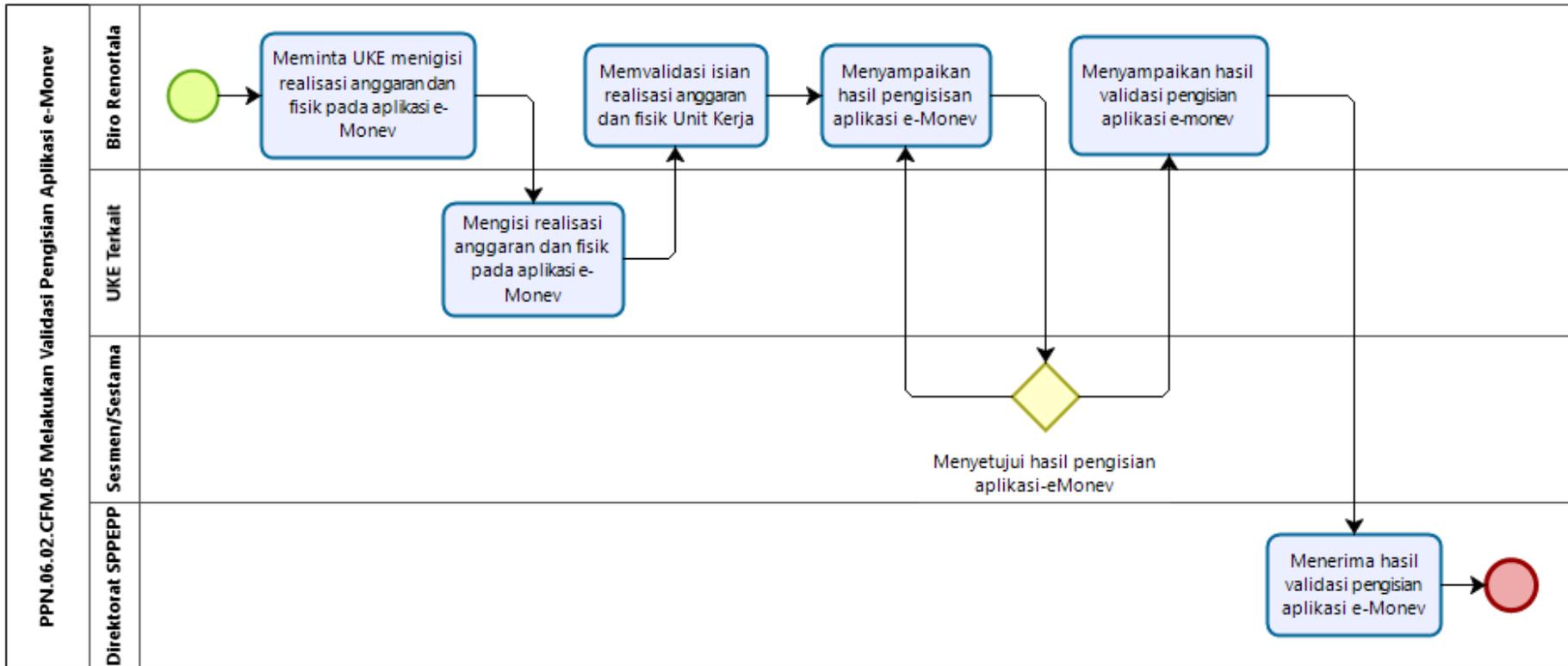
mm. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja



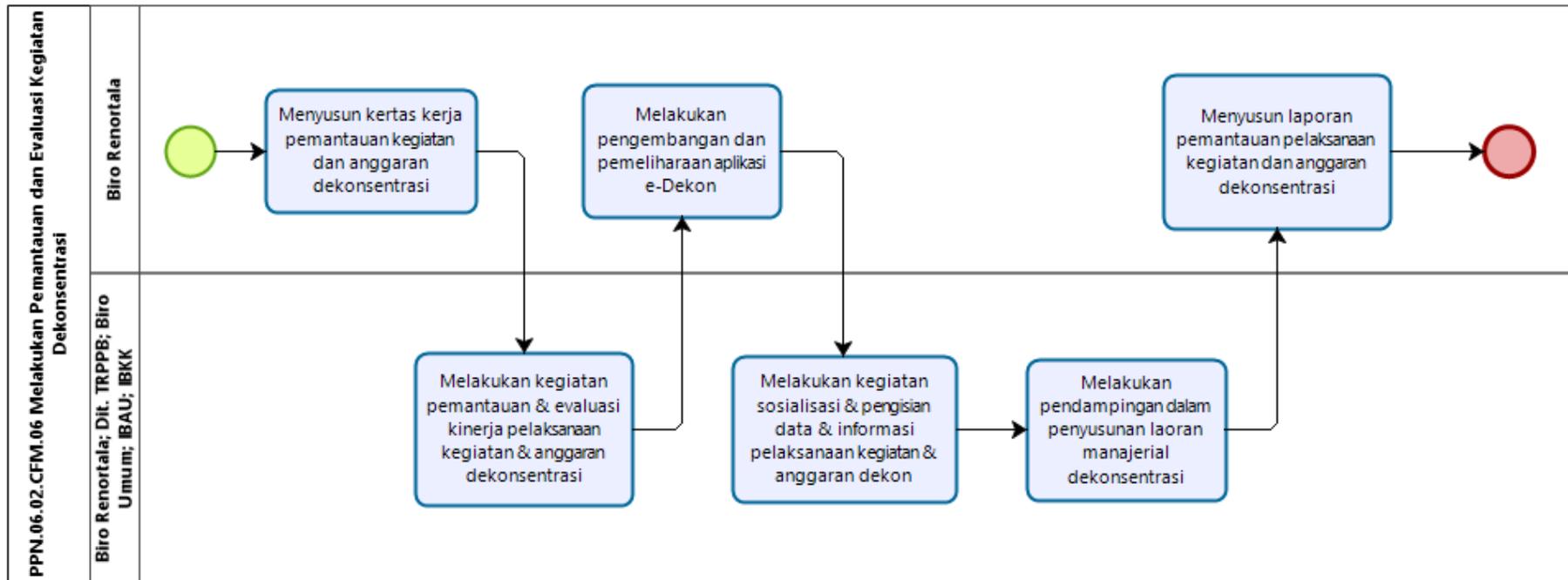
nn. Peta Lintas Fungsi Menyusun Pelaporan Kinerja



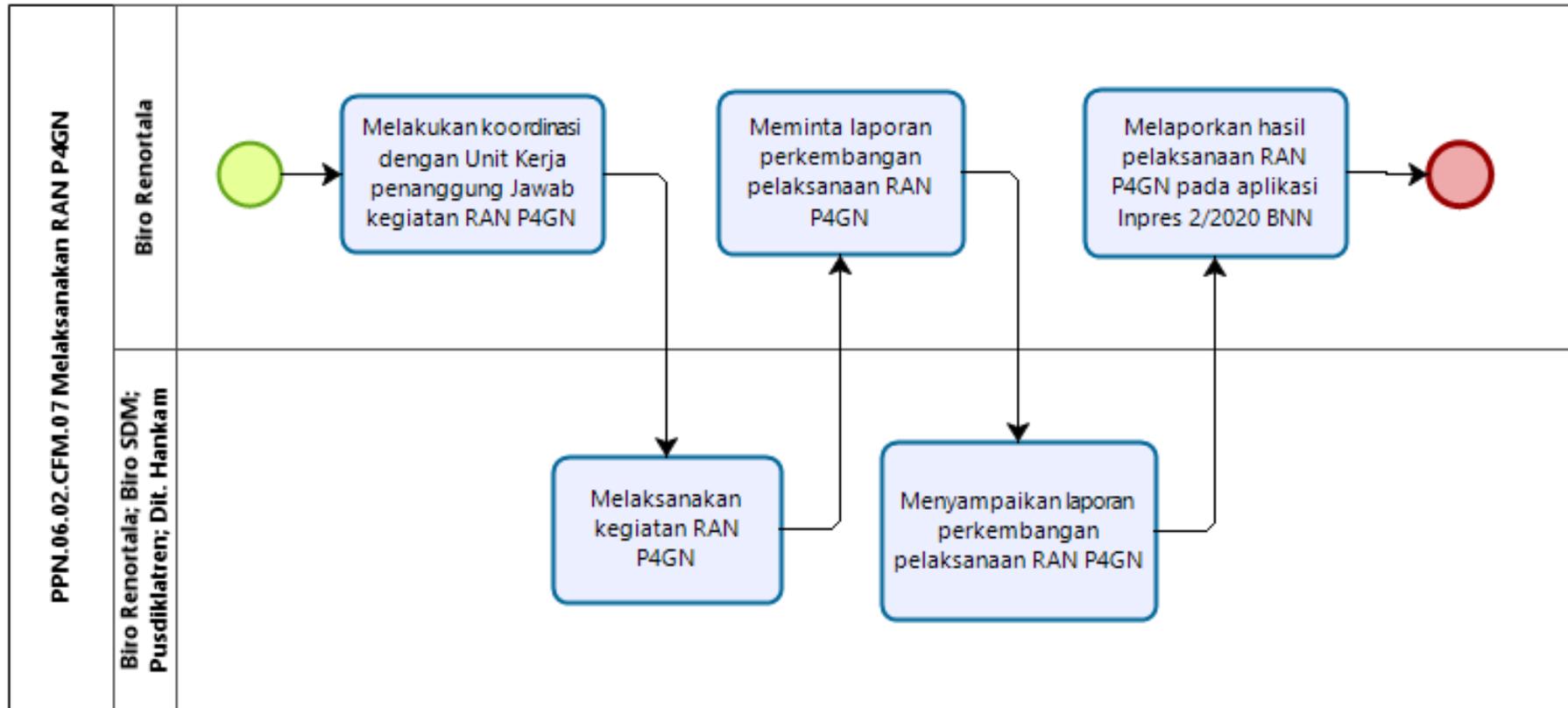
oo. Peta Lintas Fungsi Melakukan Validasi Pengisian Aplikasi e-Monev



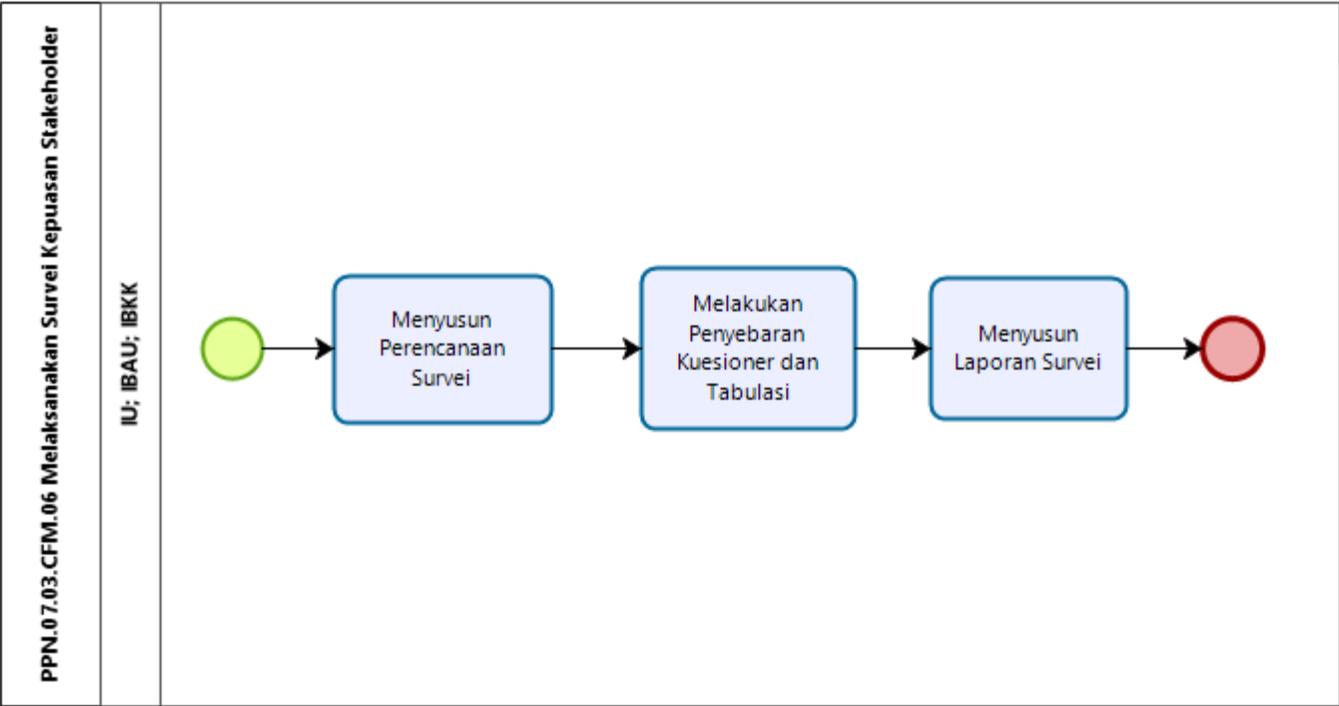
pp. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Dekonsentrasi



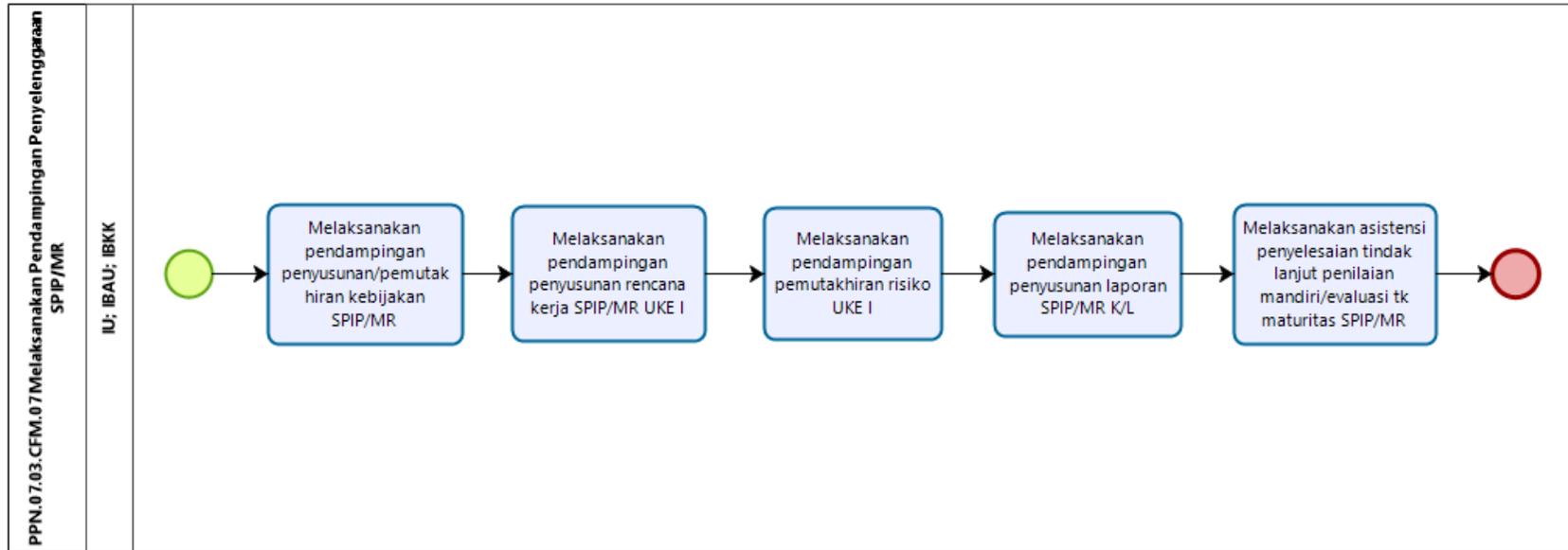
qq. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan RAN P4GN



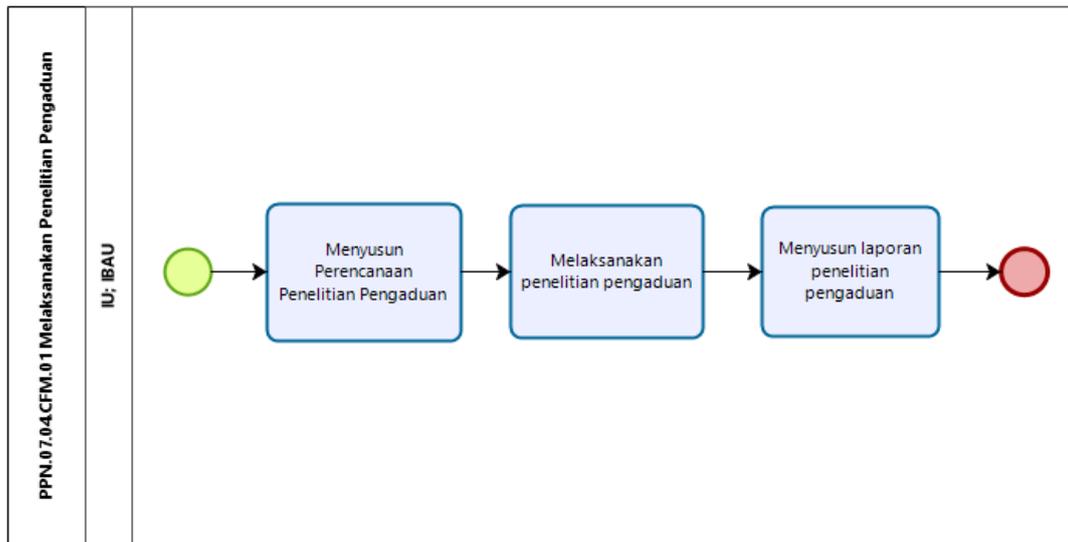
rr. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Survei Kepuasan Stakeholder



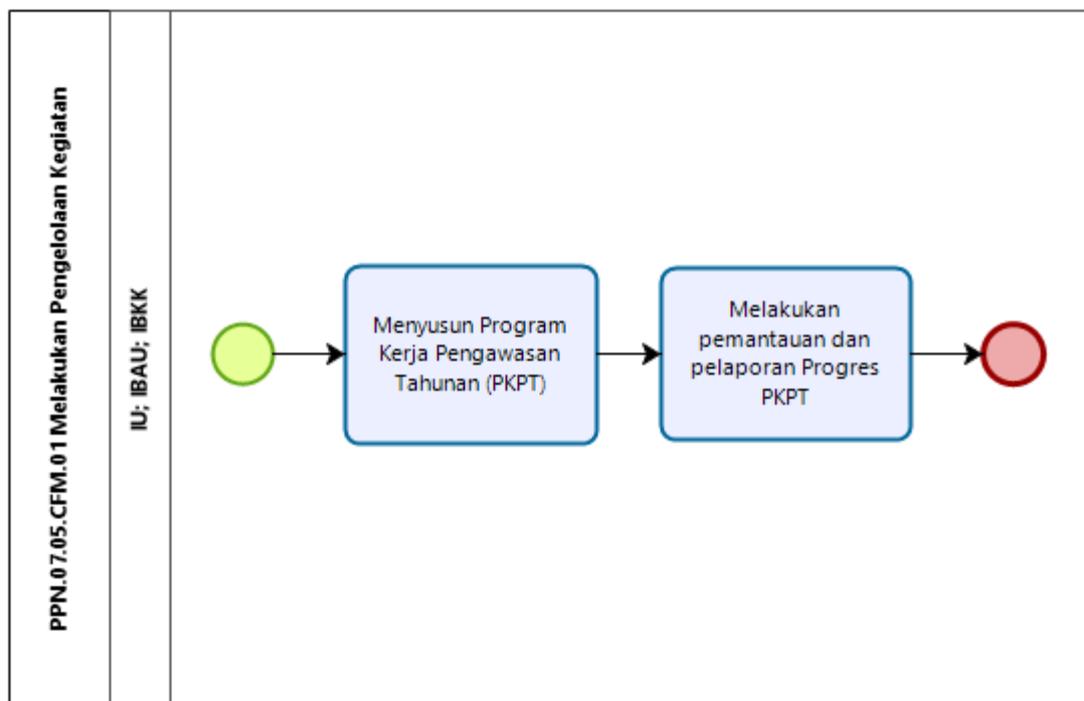
ss. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pendampingan Penyelenggaraan SPIP/MR



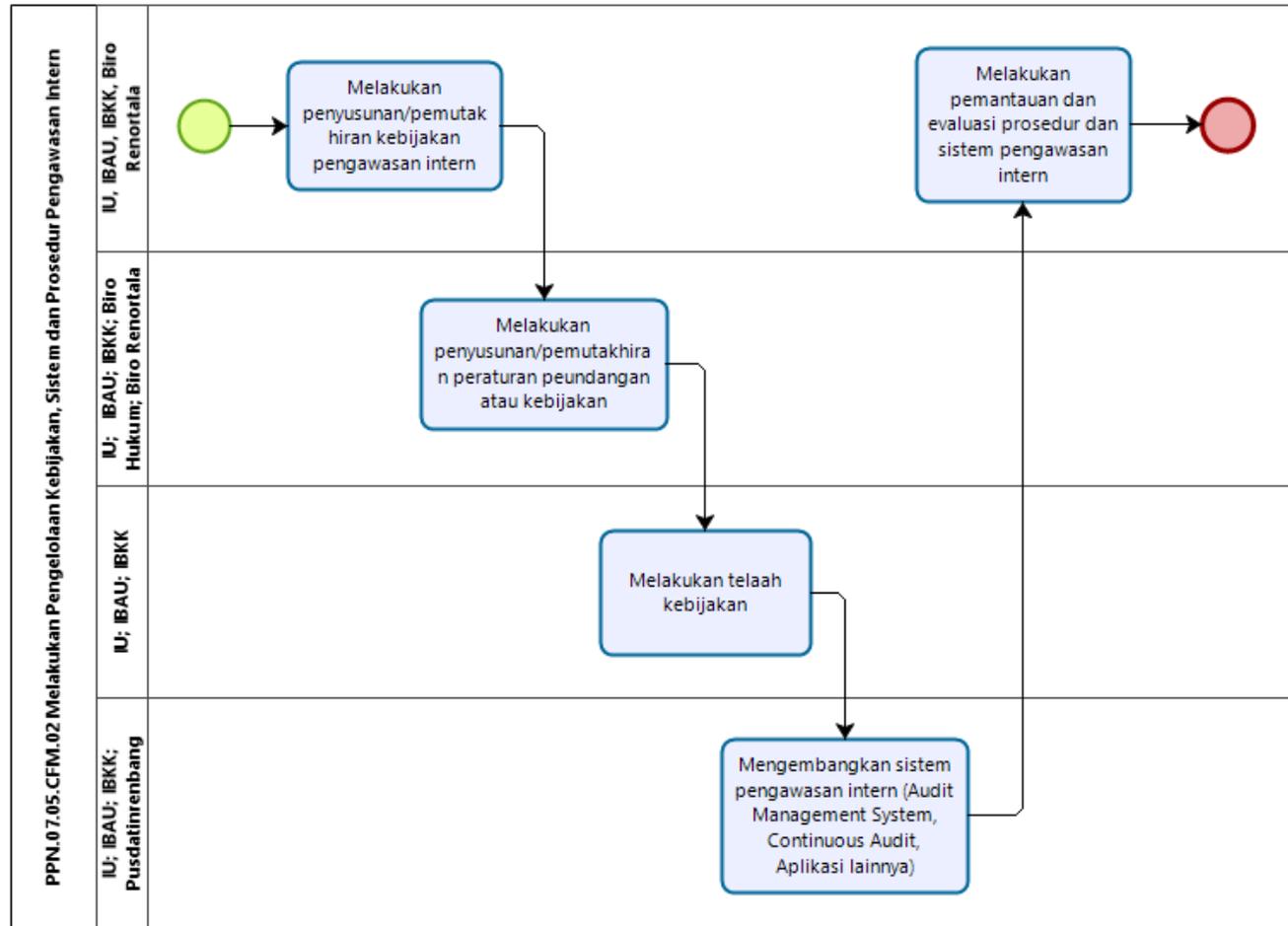
tt. Peta Lintas Fungsi



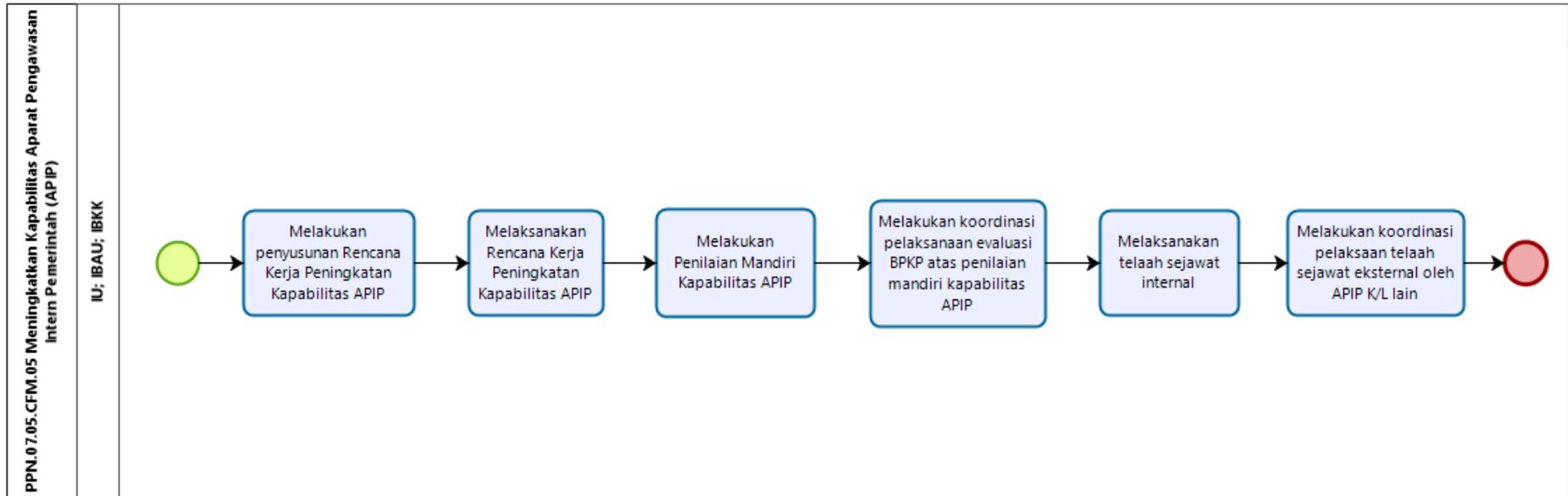
uu. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Kegiatan



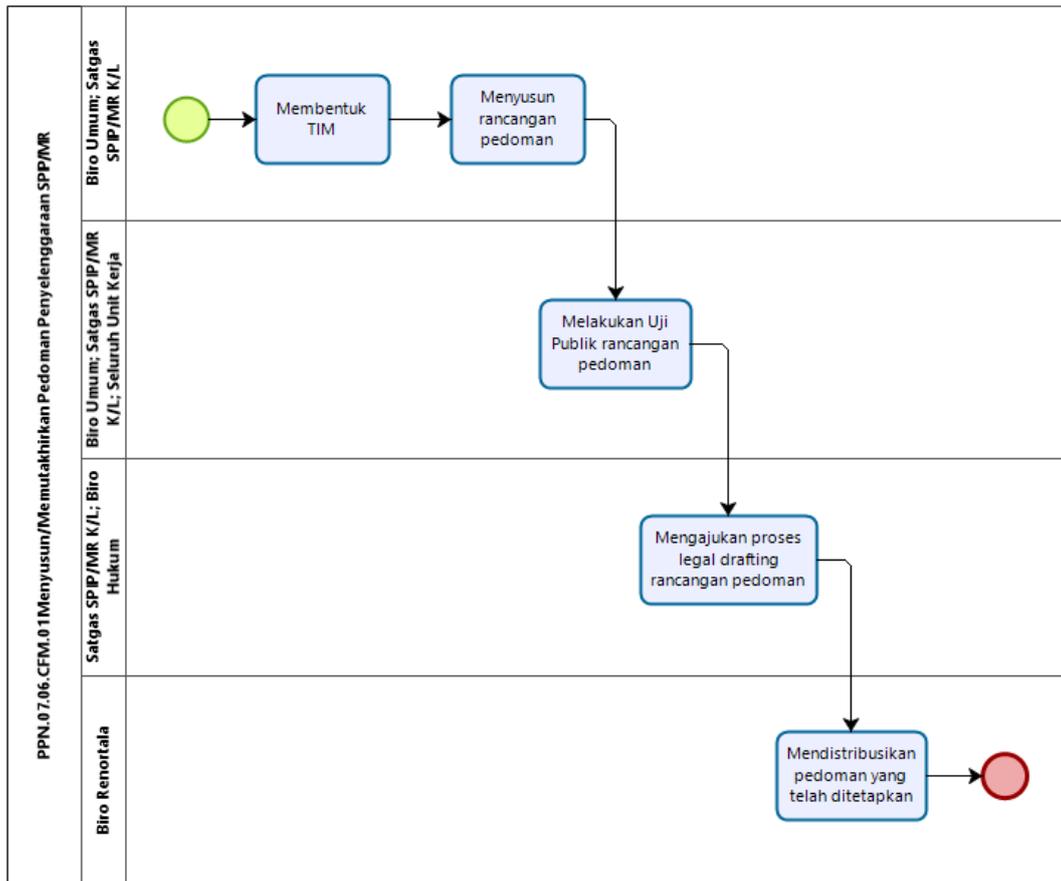
vv. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Intern



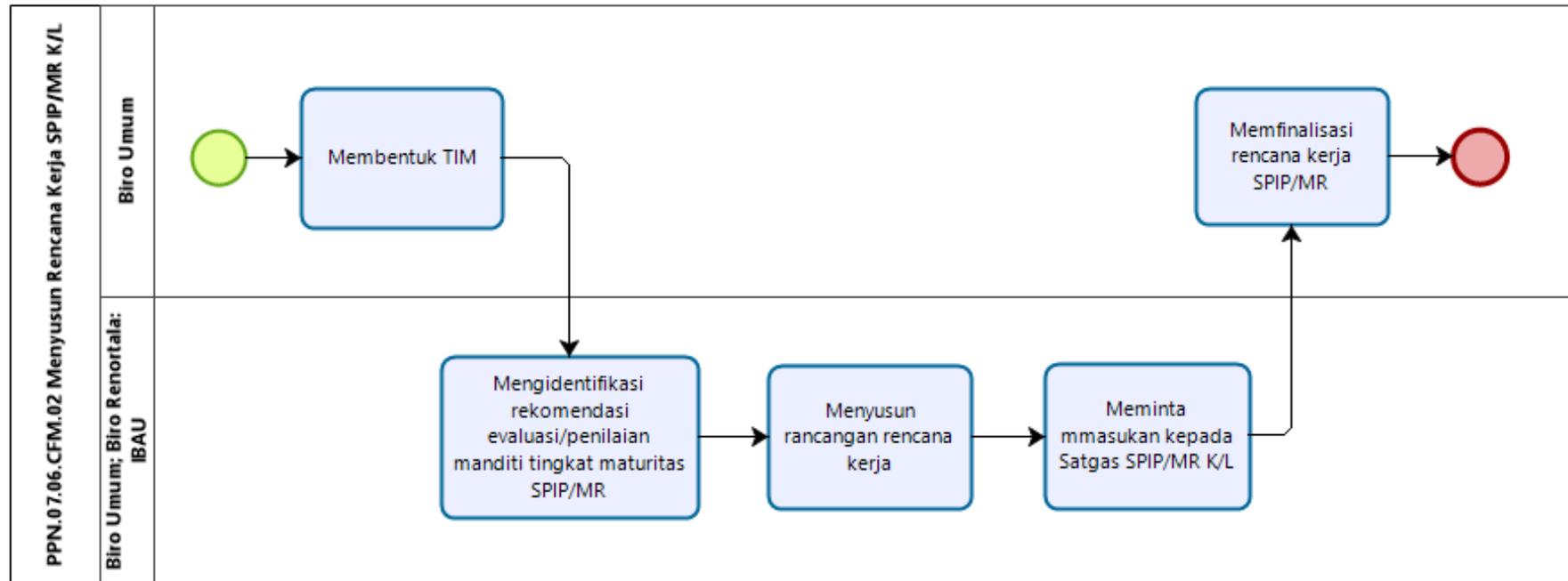
ww. Peta Lintas Fungsi Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



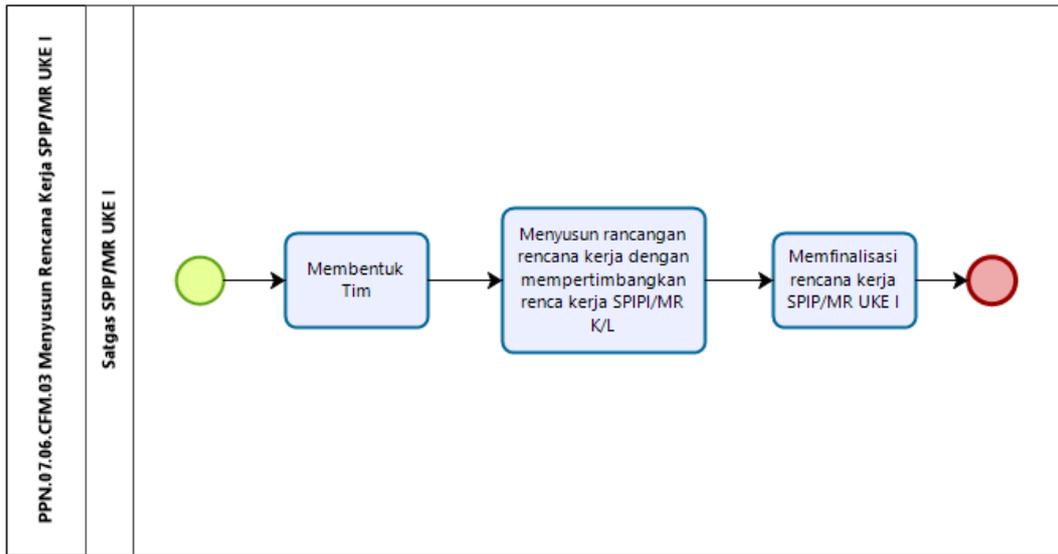
xx. Peta Lintas Fungsi Menyusun/Memutakhirkan Pedoman Penyelenggaraan SPIP/MR



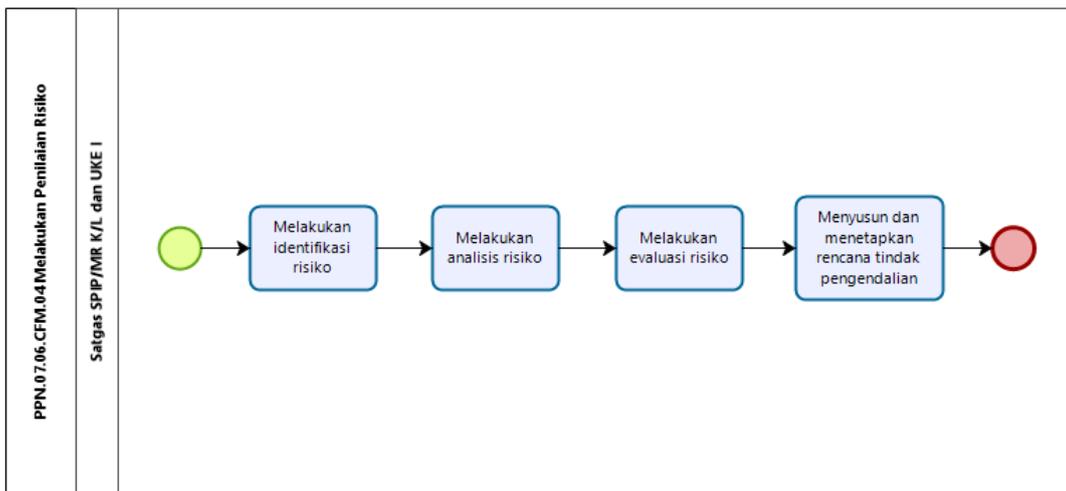
yy. Peta Lintas Fungsi Menyusun Rencana Kerja SPIP/MR K/L



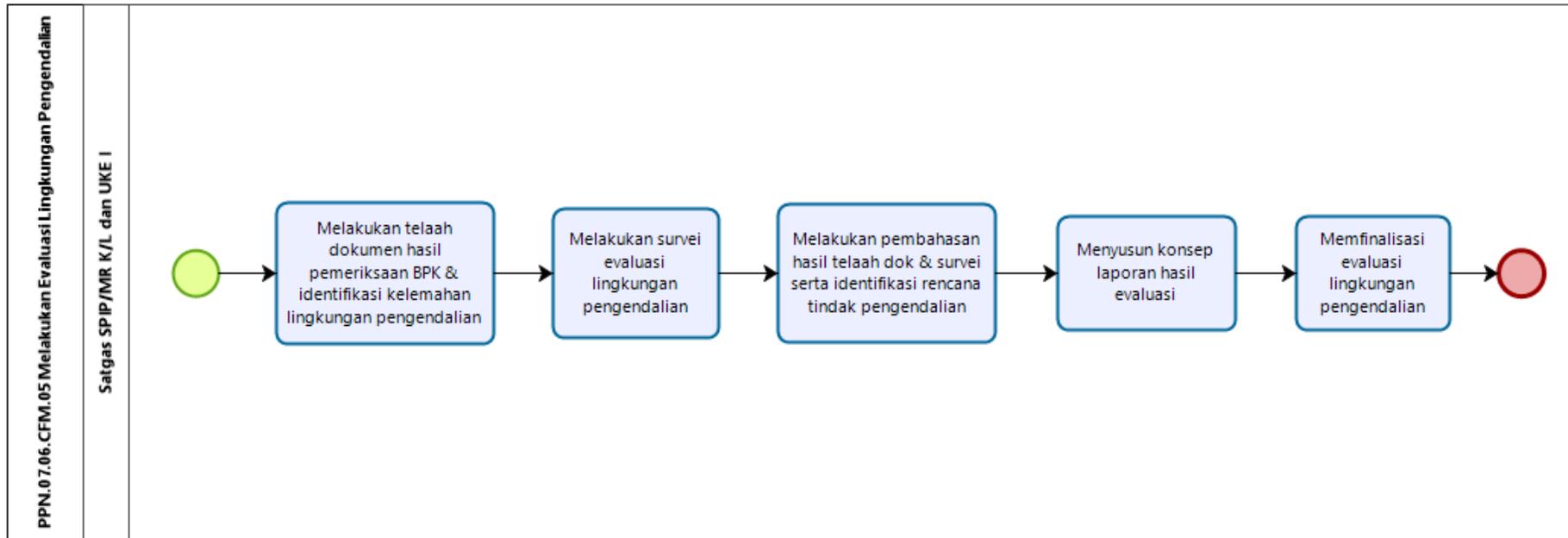
zz. Peta Lintas Fungsi Menyusun Rencana Kerja SPIP/MR UKE I



aaa. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penilaian Risiko



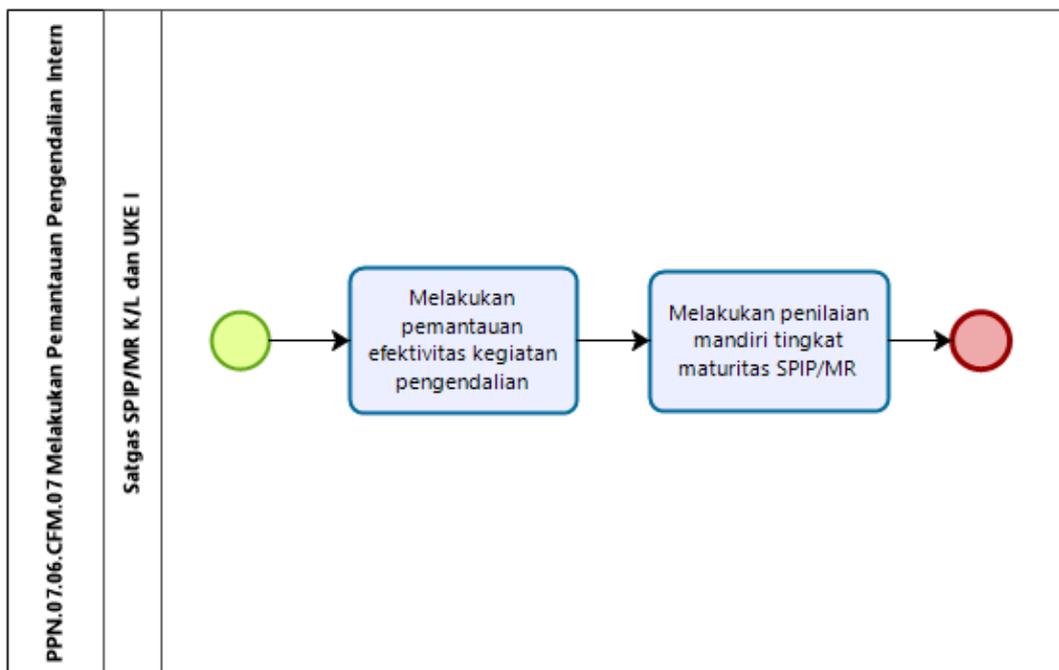
bbb. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Evaluasi Lingkungan Pengendalian



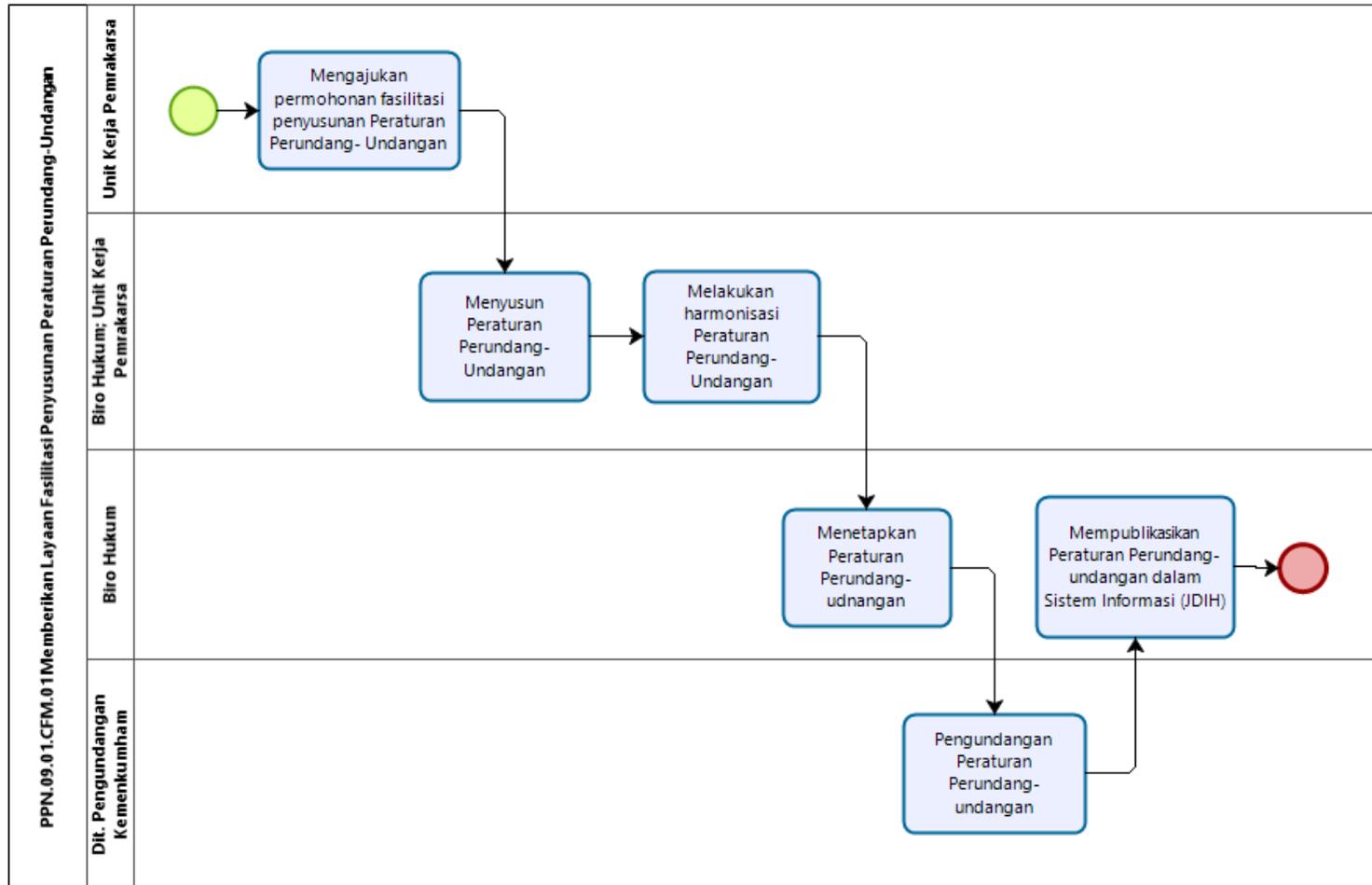
ccc. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian



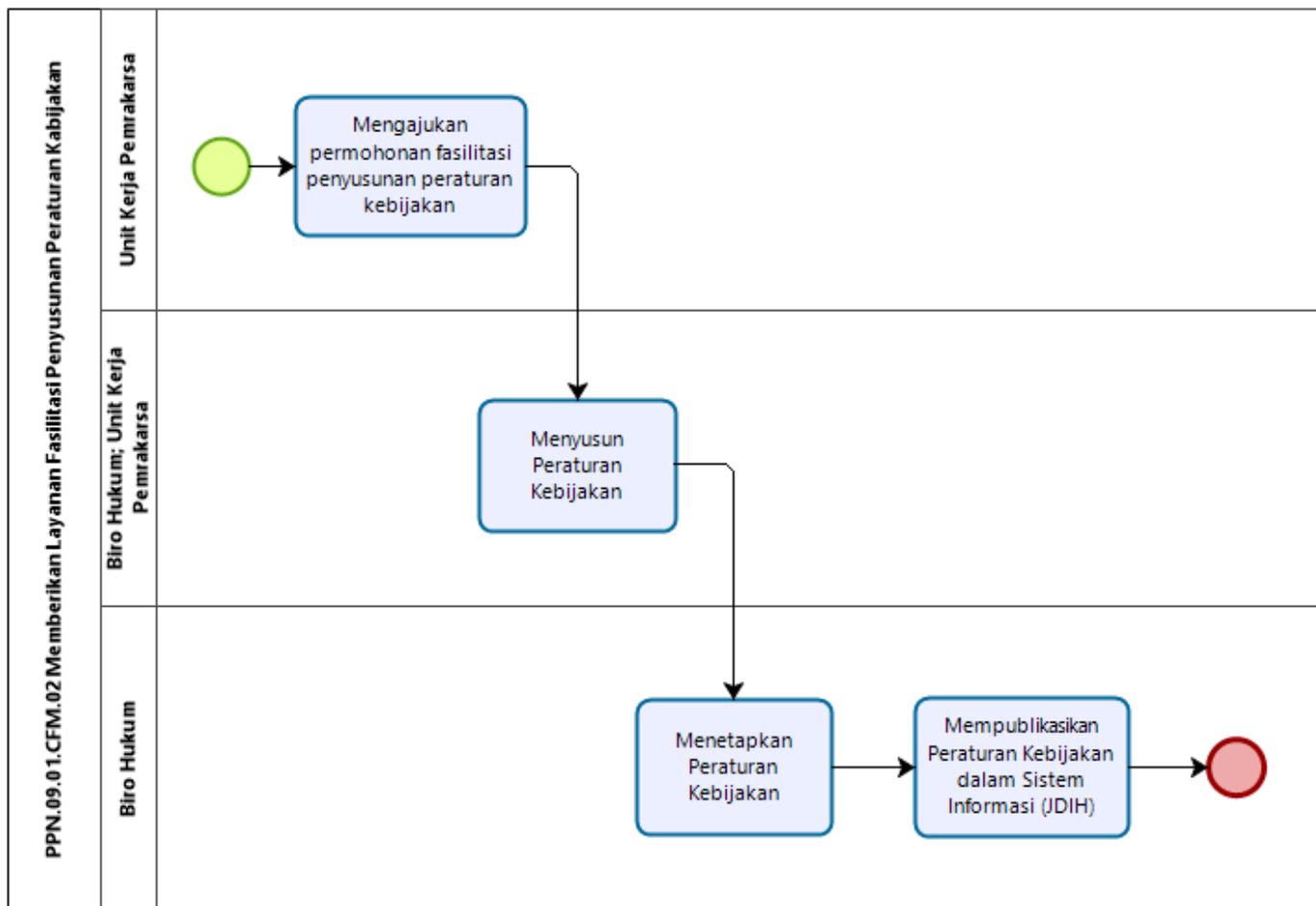
ddd. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pemantauan Pengendalian Intern



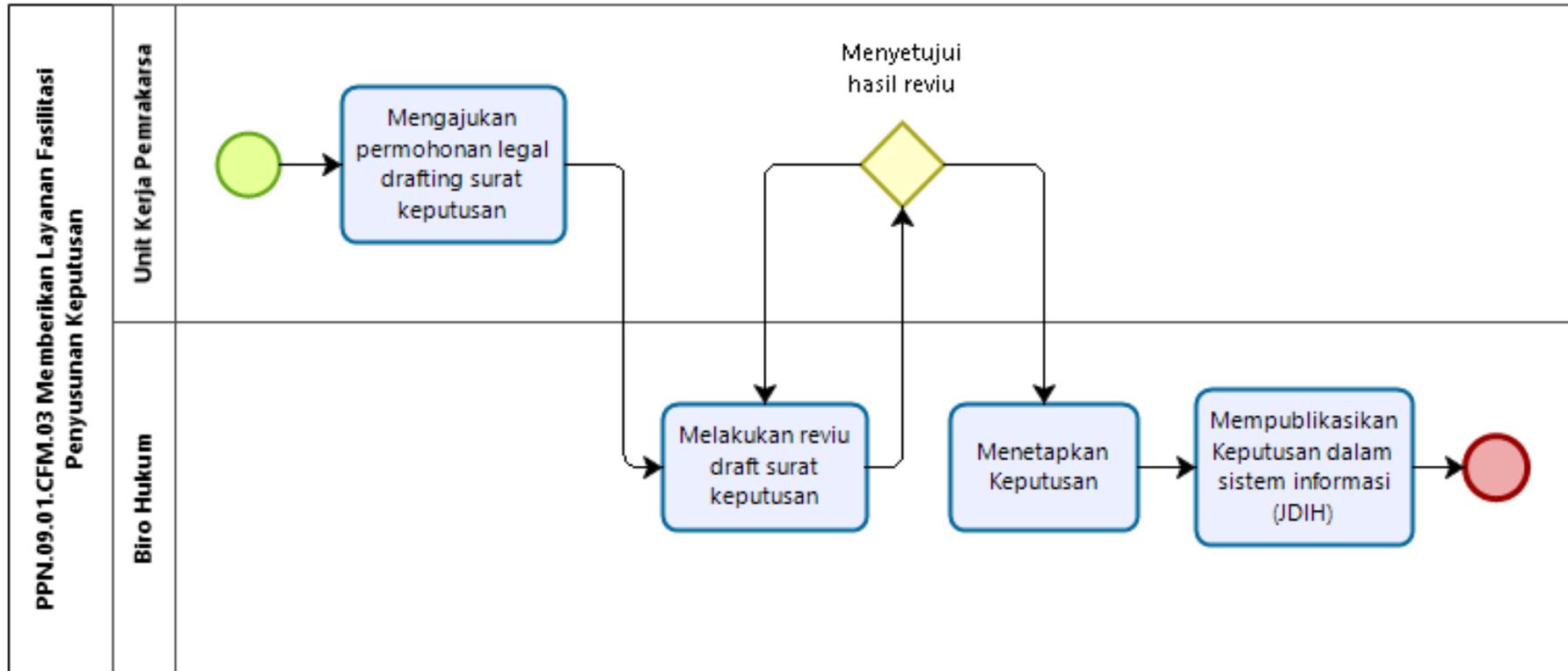
eee. Peta Lintas Fungsi Memberikan Layanan Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



fff. Peta Lintas Fungsi Memberikan Layanan Fasilitas Penyusunan Peraturan Kebijakan



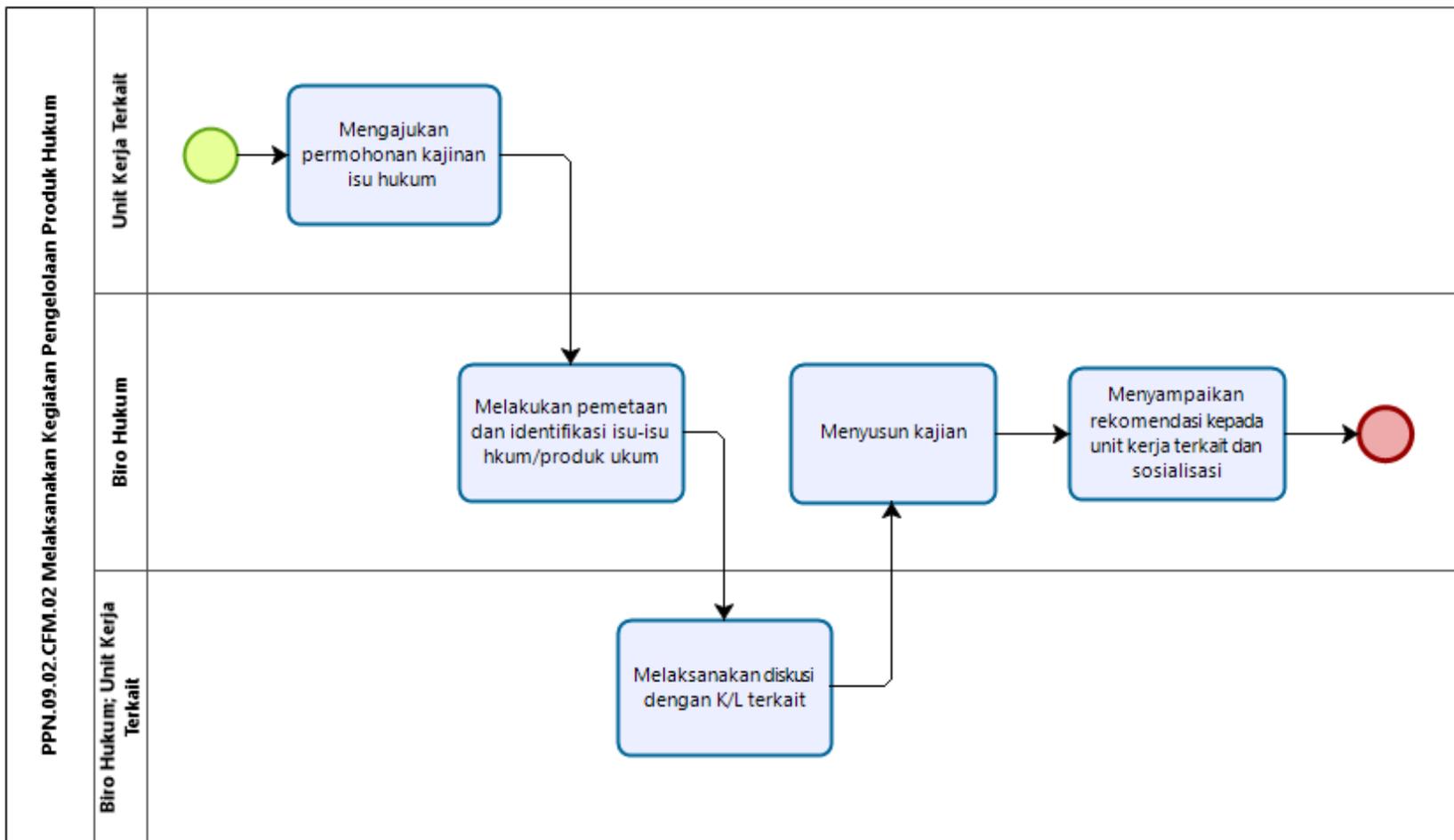
ggg. Peta Lintas Fungsi Memberikan Layanan Fasilitas Penyusunan Keputusan



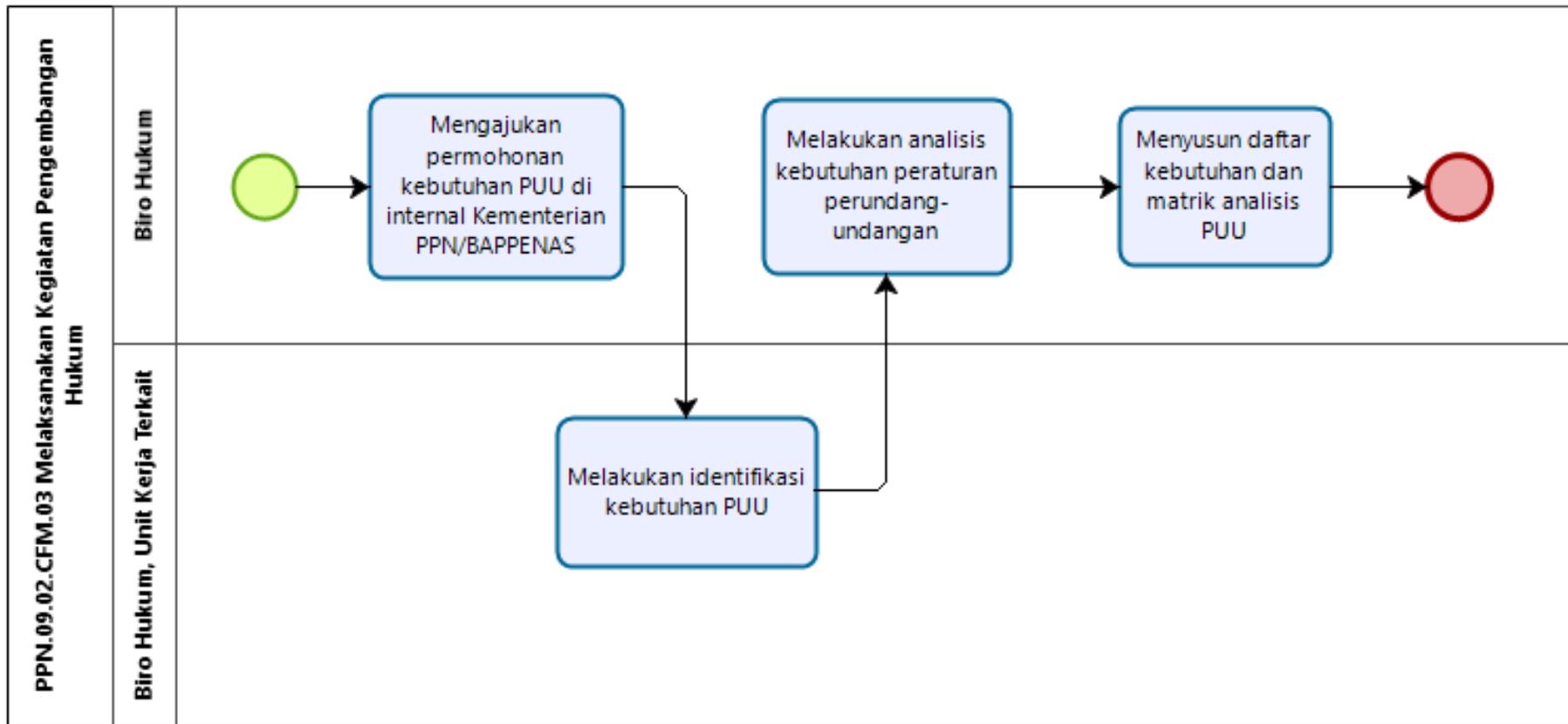
hhh. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Hukum



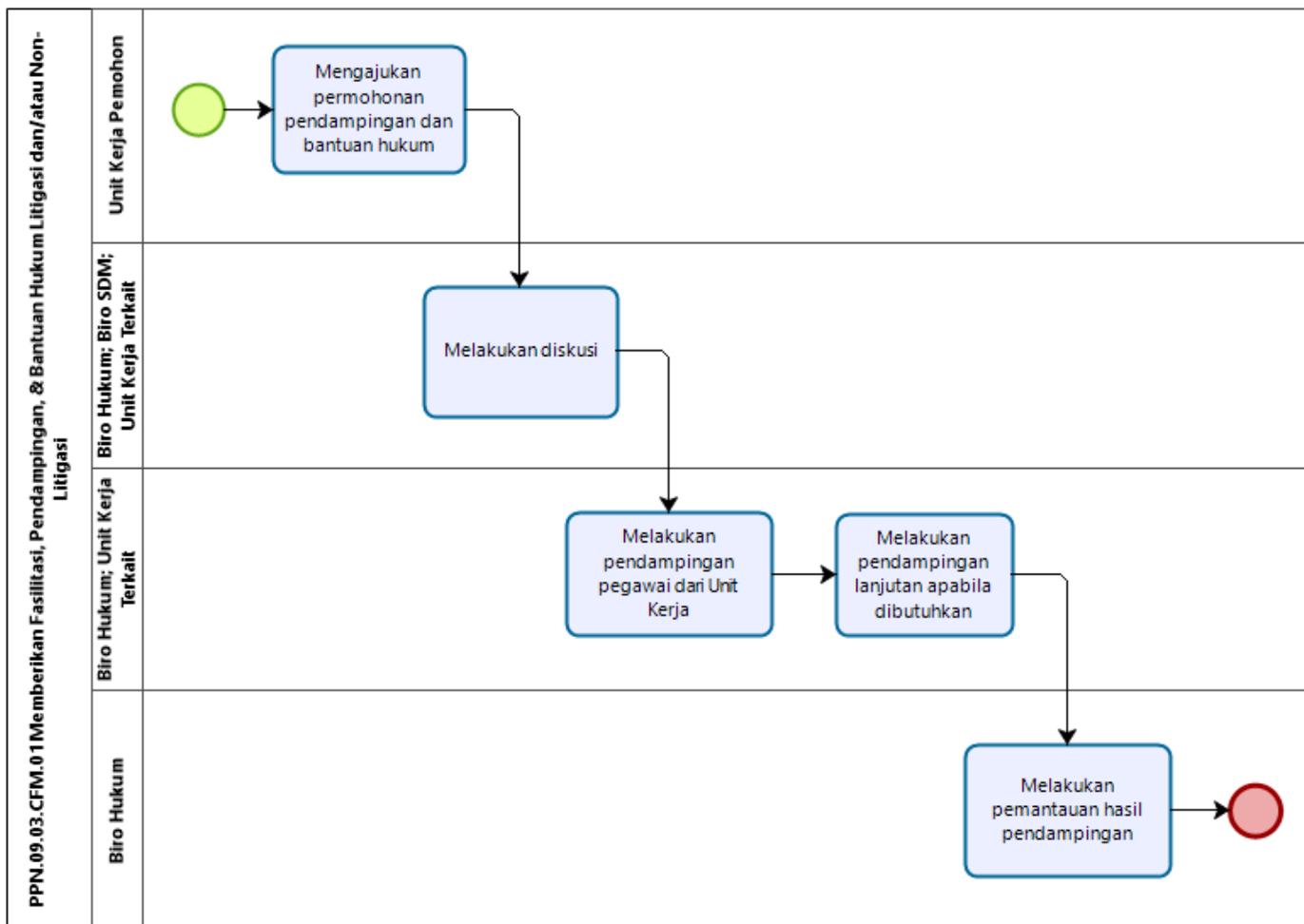
iii. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Produk Hukum



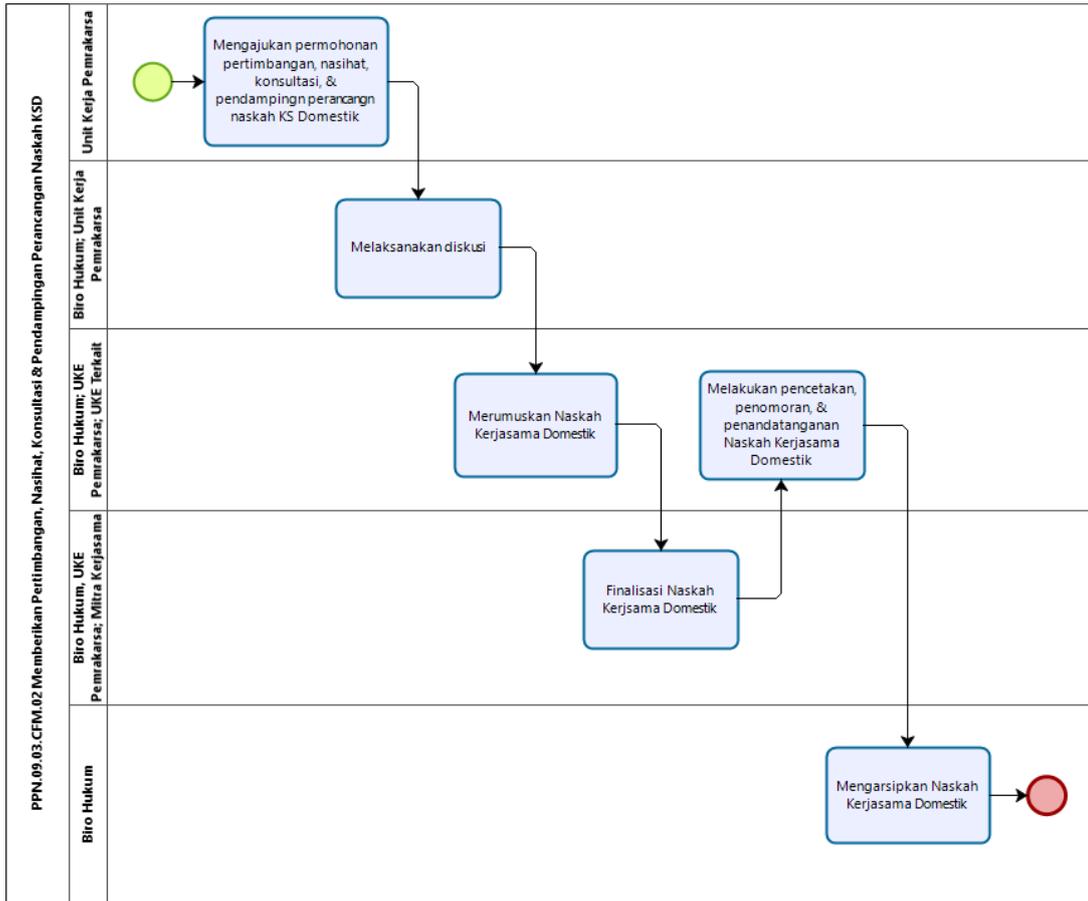
jjj. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Hukum



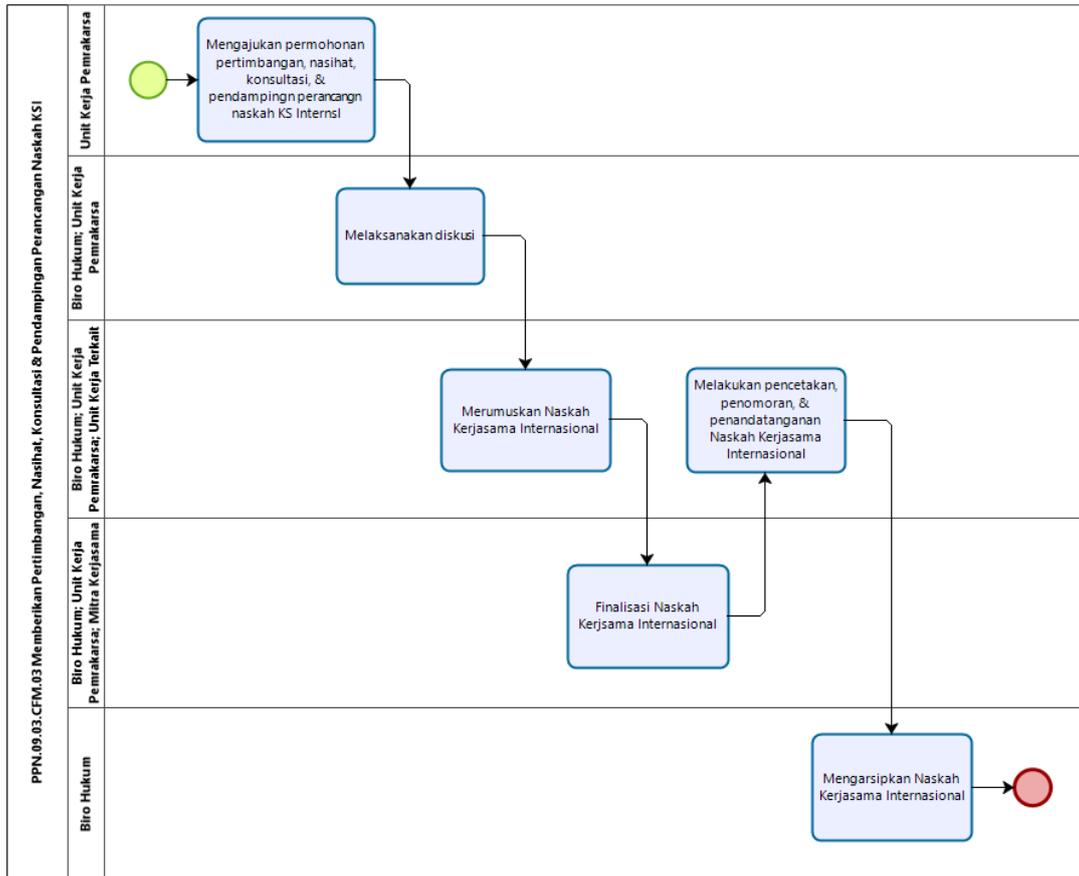
kkk. Peta Lintas Fungsi Memberikan Fasilitas, Pendampingan, dan Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non-Litigasi



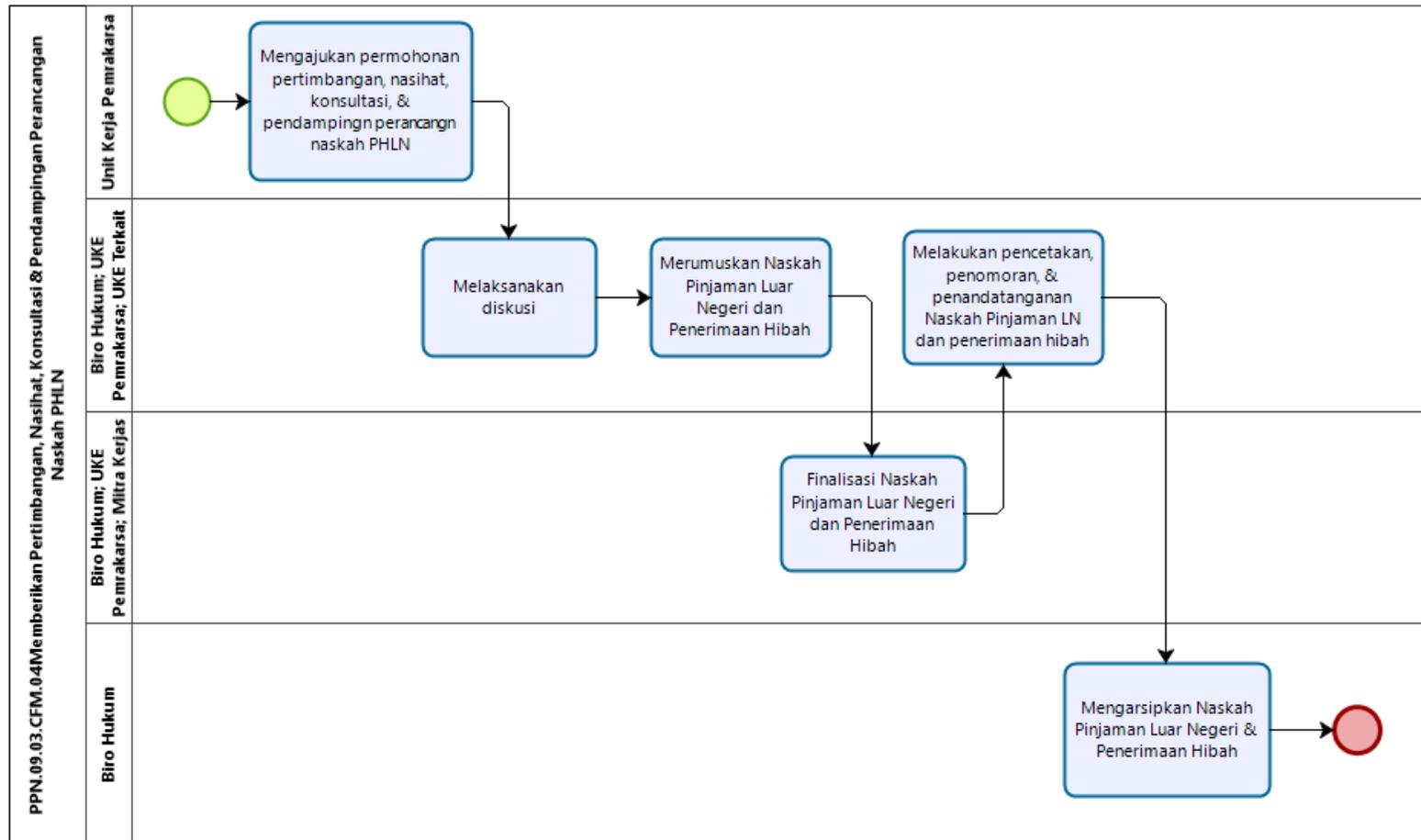
III. Peta Lintas Fungsi Memberikan Pertimbangan, Nasihat, Konsultasi, dan Pendampingan Perancangan Naskah Kerjasama Domestik



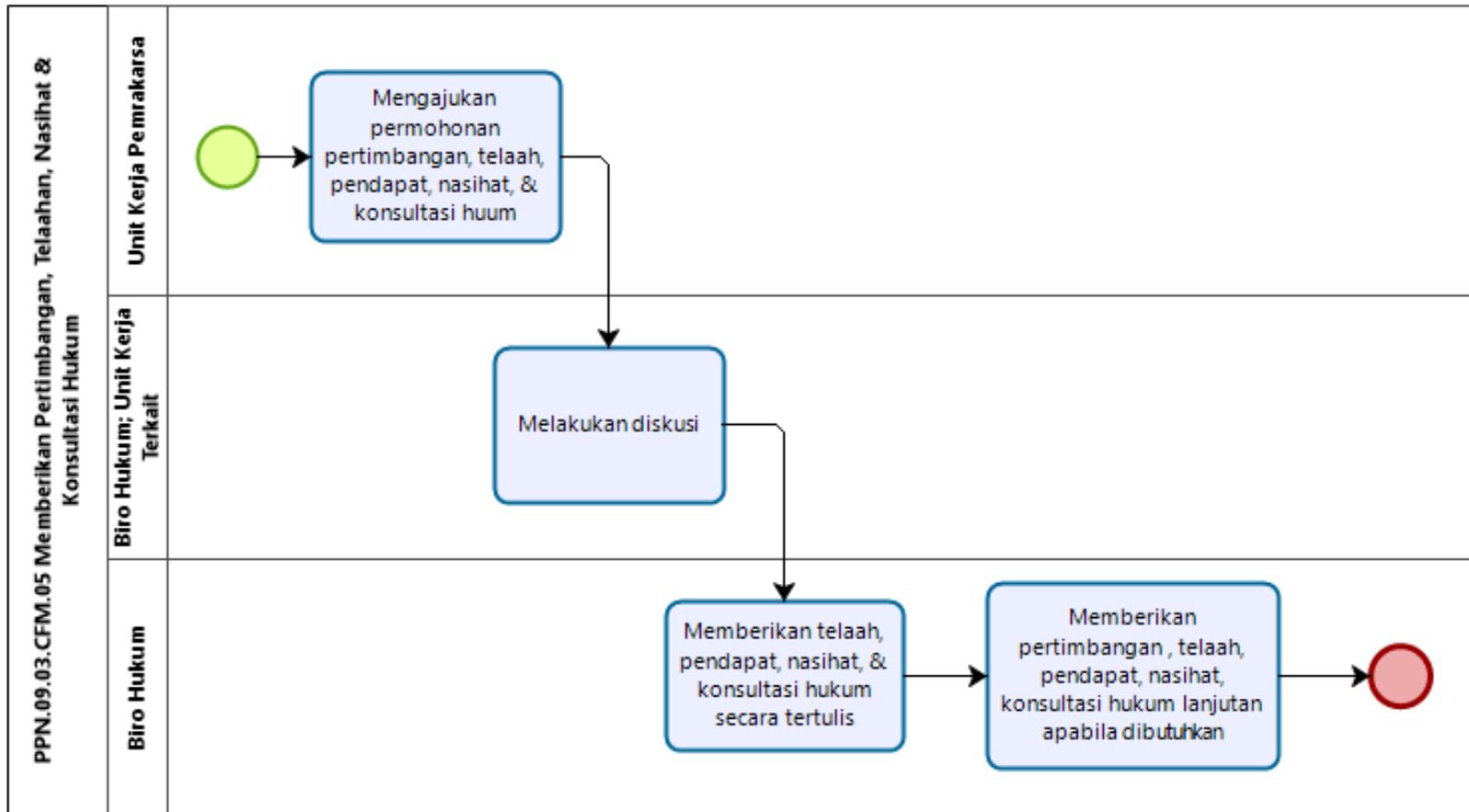
mmm. Peta Lintas Fungsi Memberikan Pertimbangan, Nasihat, Konsultasi dan Pendampingan Perancangan Naskah Kerjasama Internasional



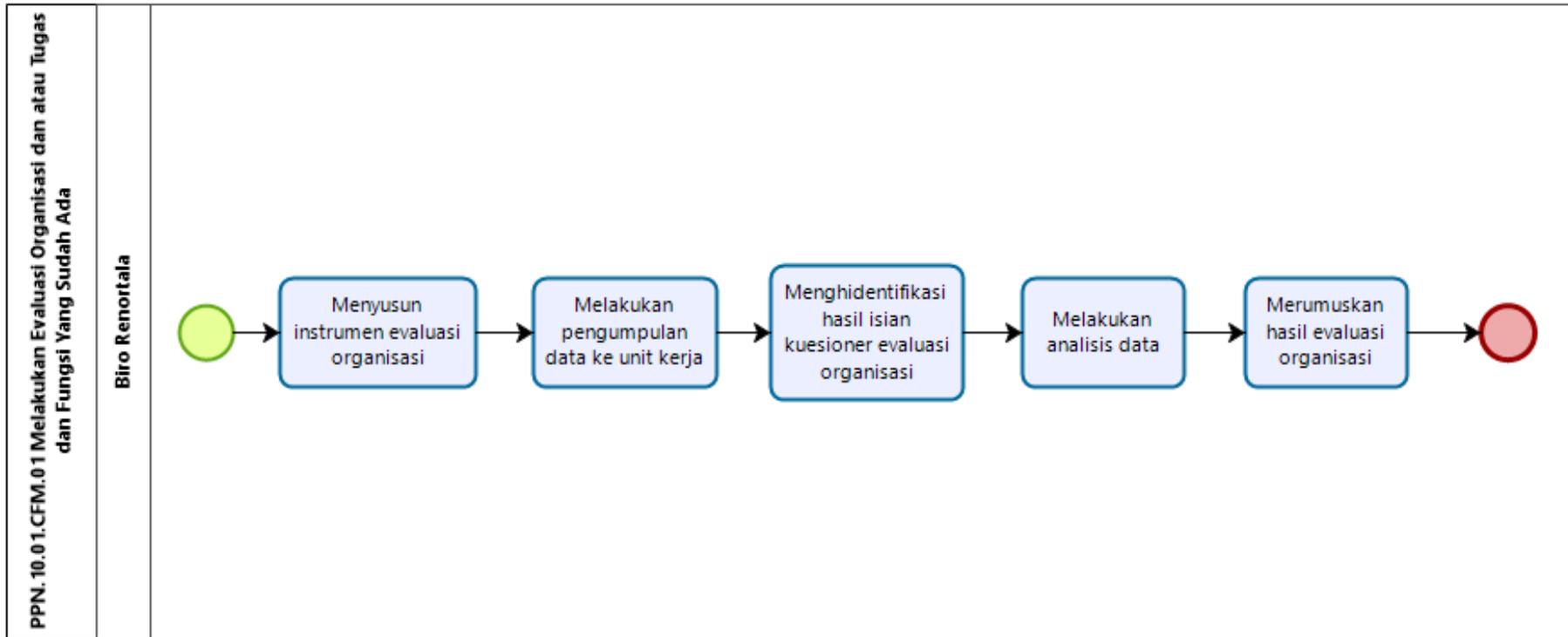
nnn. Peta Lintas Fungsi Memberikan Pertimbangan, Nasihat, Konsultasi & Pendampingan Perancangan Naskah Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah



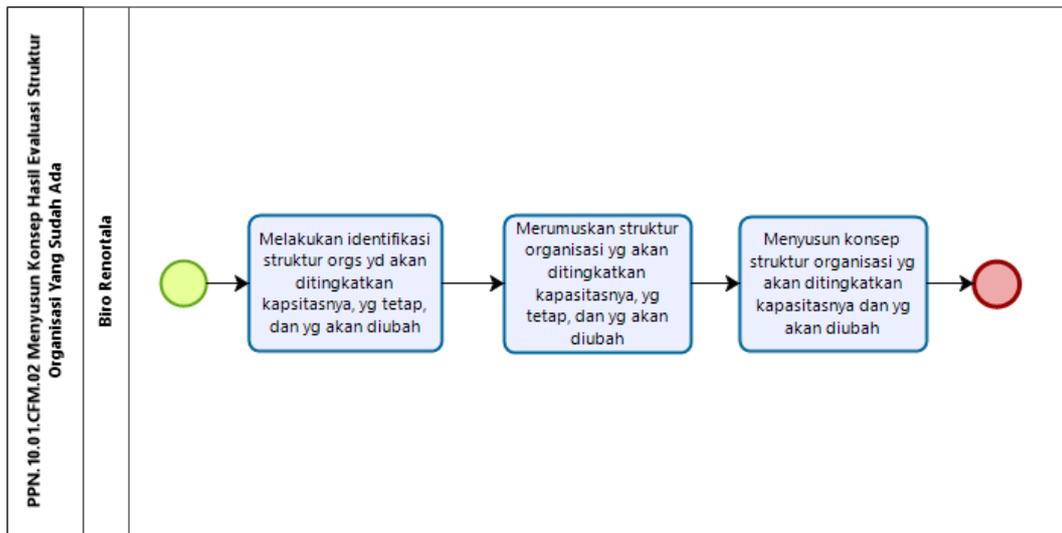
ooo. Peta Lintas Fungsi Memberikan Pertimbangan, Telaahan, Nasihat dan Konsultasi Hukum



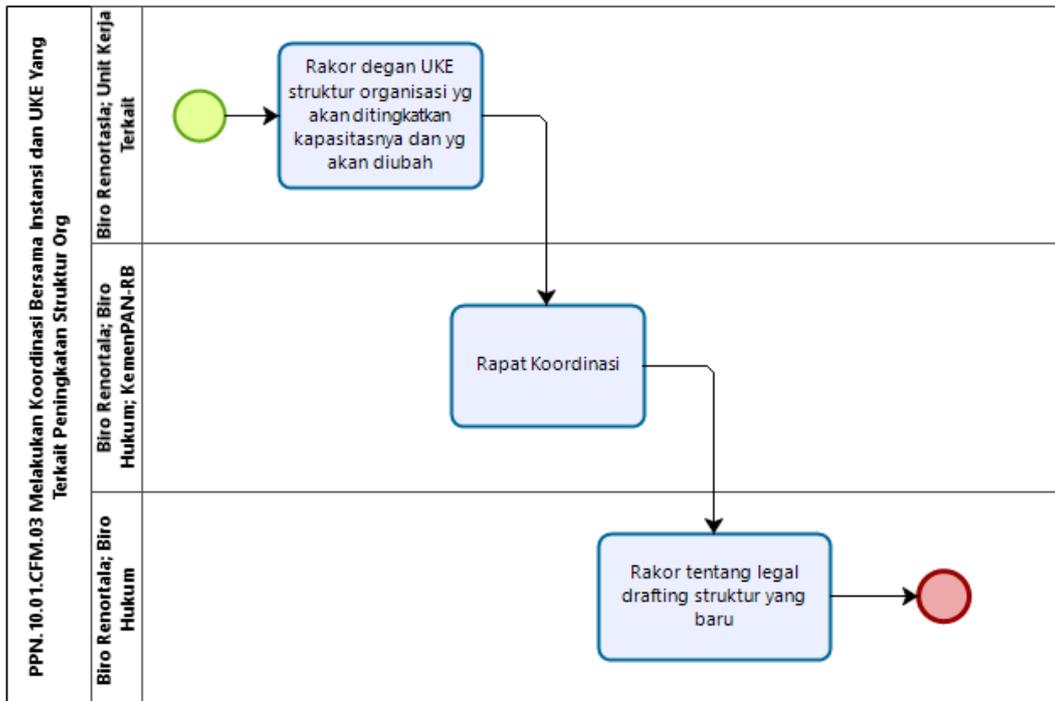
ppp. Peta Lintas Fungsi Melakukan Evaluasi Organisasi dan atau Tugas dan Fungsi Yang Sudah Ada



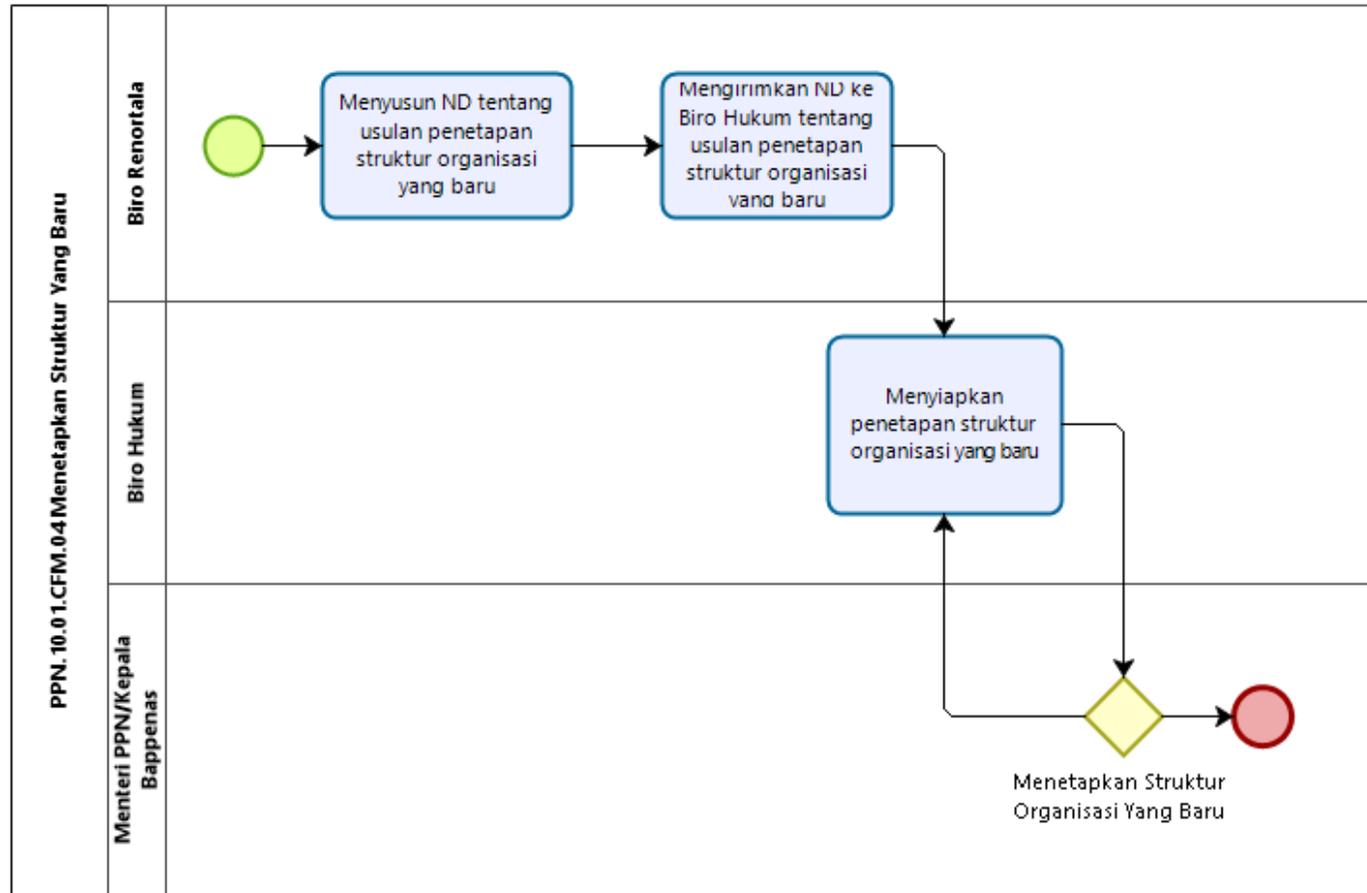
qqq. Peta Lintas Fungsi Menyusun Konsep Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Yang Sudah Ada



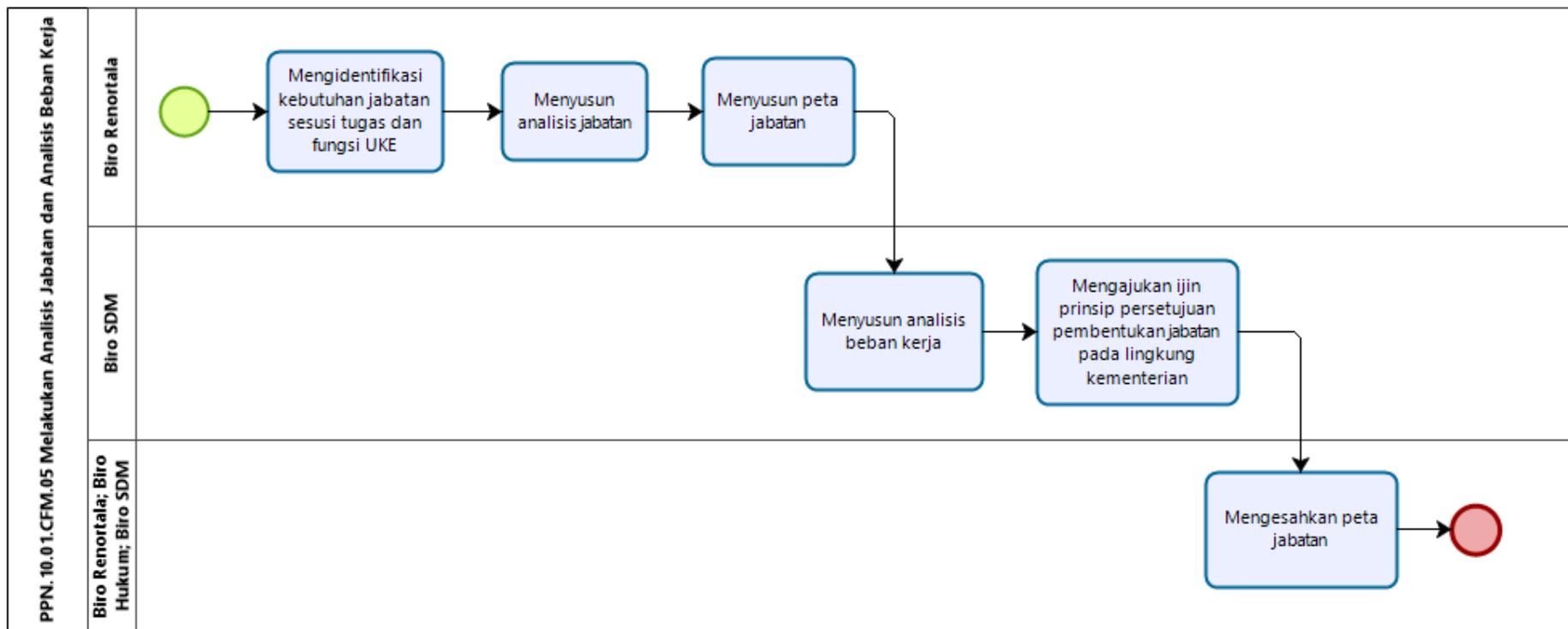
rrr. Peta Lintas Fungsi Melakukan Koordinasi Bersama Instansi dan Unit Kerja Yang Terkait Peningkatan Struktur Organisasi



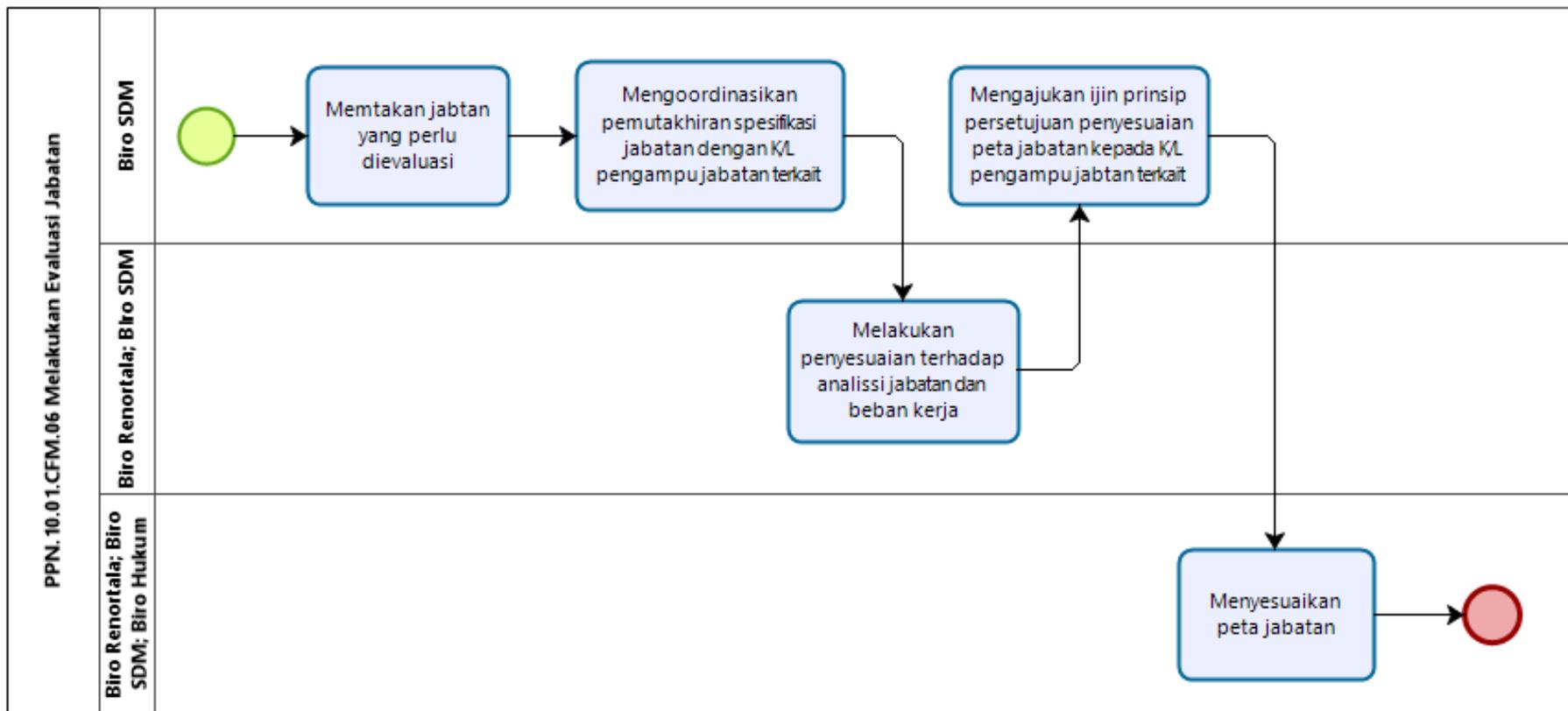
sss. Peta Lintas Fungsi Menetapkan Struktur Yang Baru



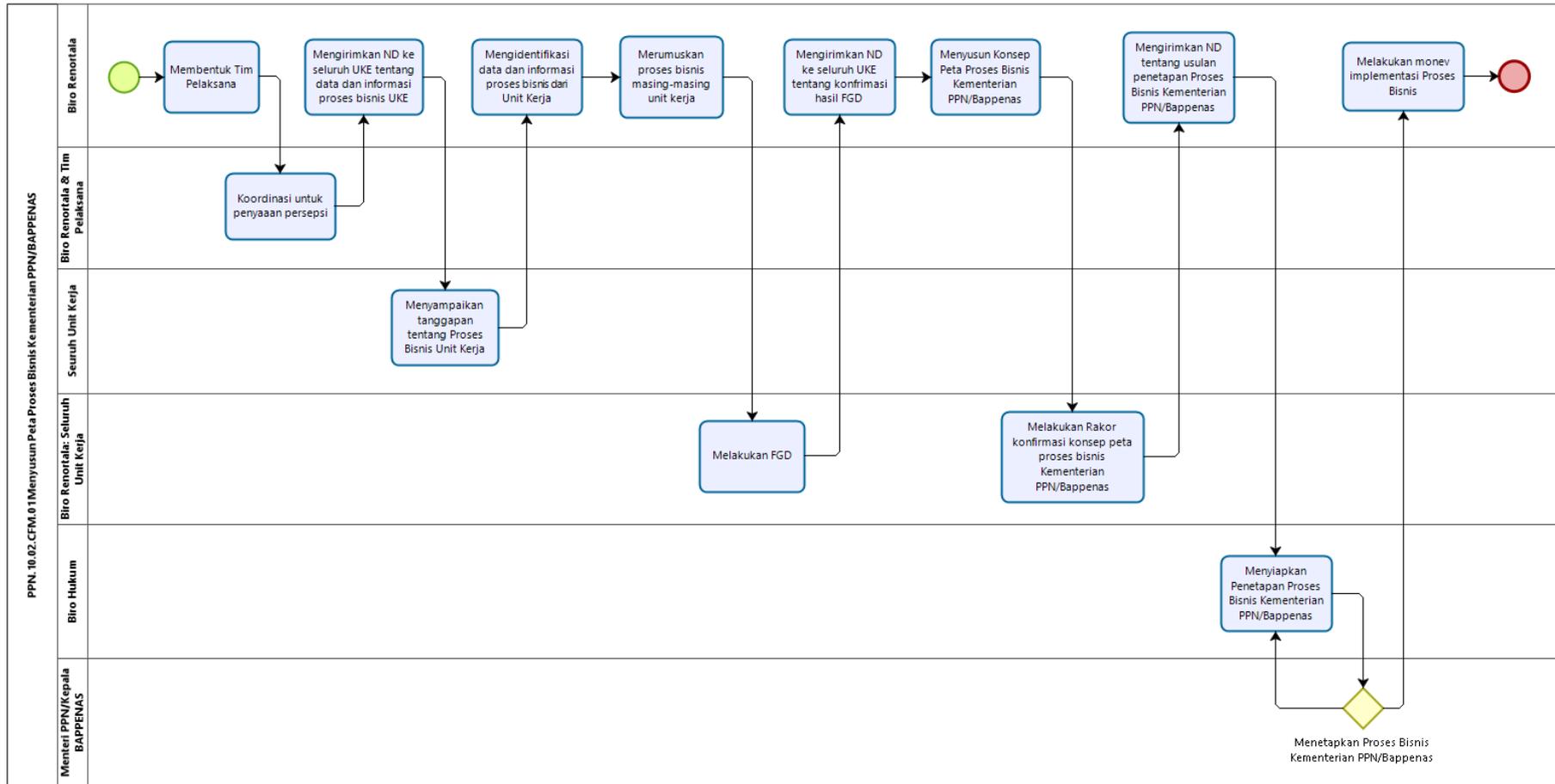
ttt. Peta Lintas Fungsi Melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja



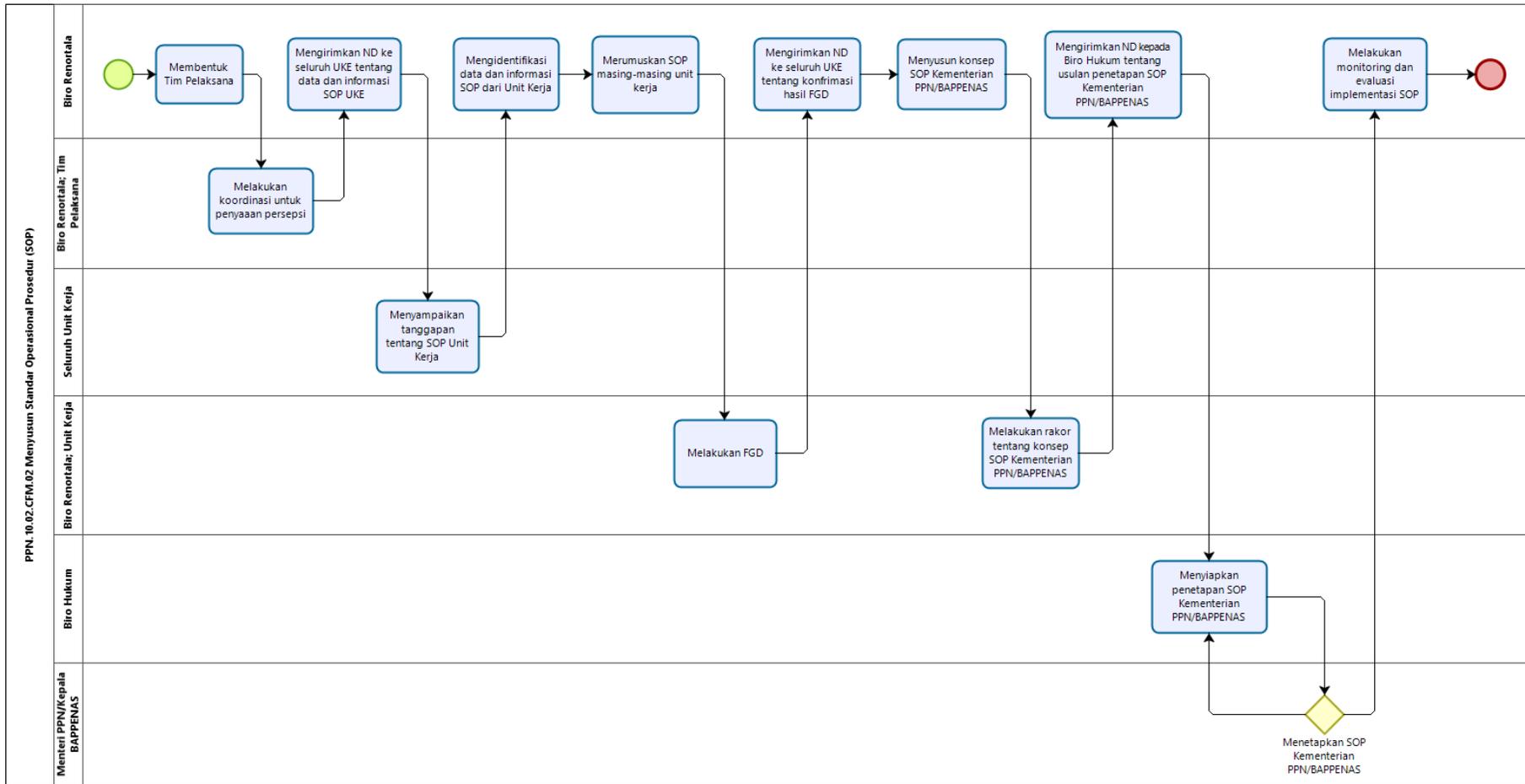
uuu. Peta Lintas Fungsi Melakukan Evaluasi Jabatan



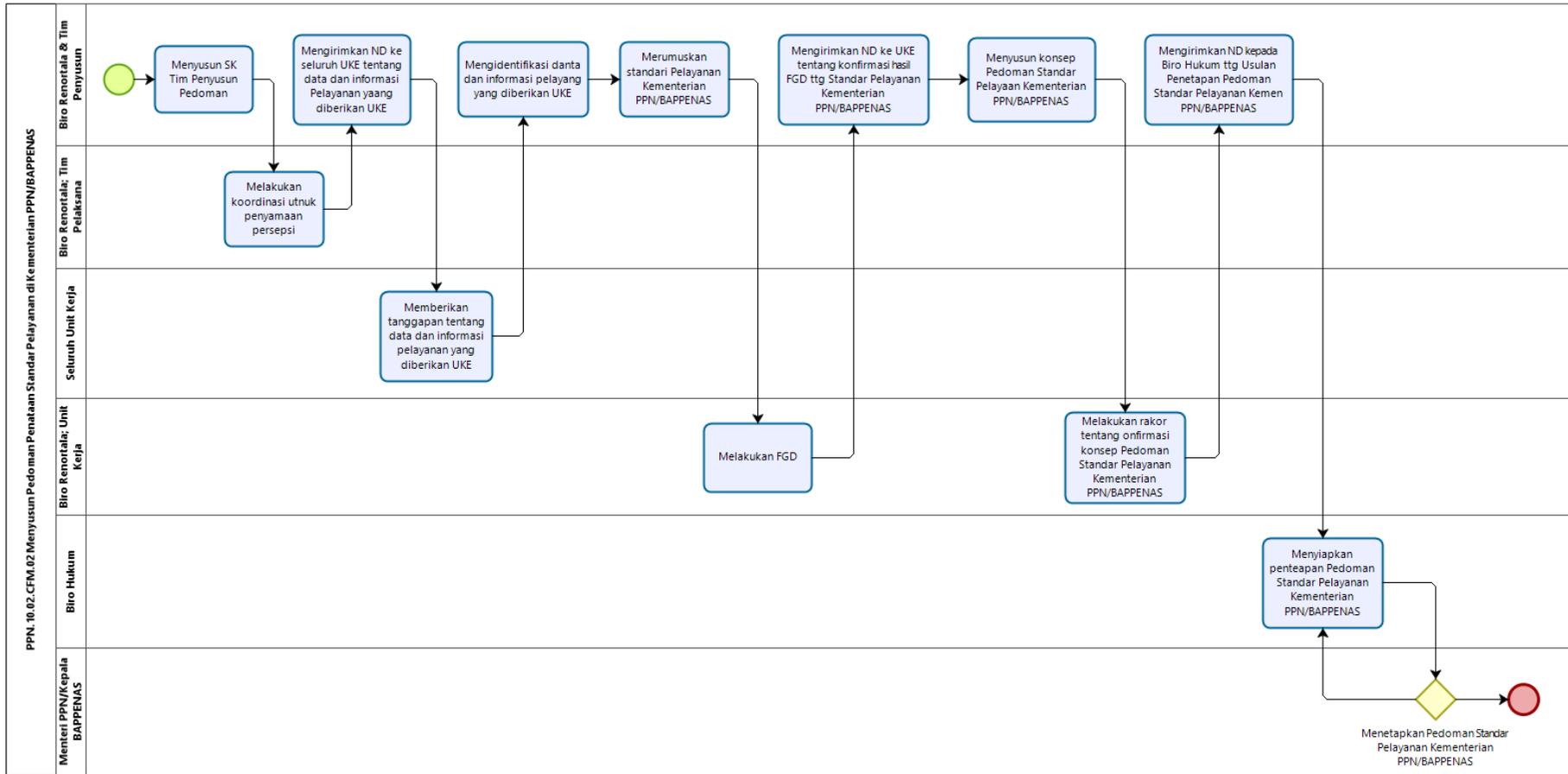
vvv. Peta Lintas Fungsi Menyusun Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/BAPPENAS



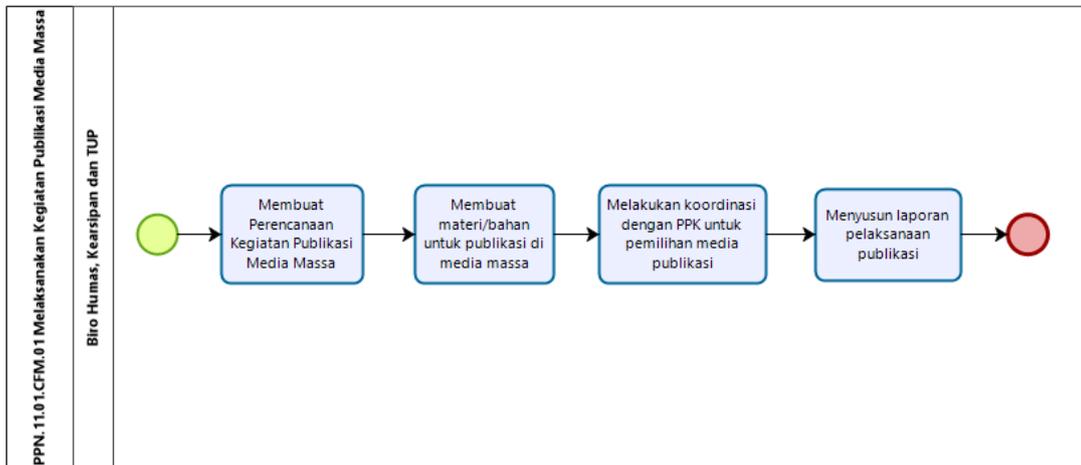
www. Peta Lintas Fungsi Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)



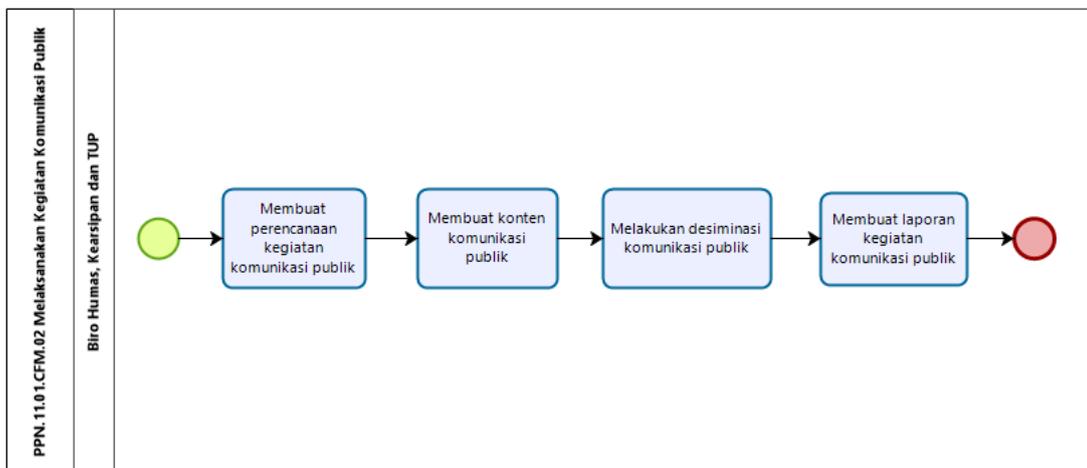
xxx. Peta Lintas Fungsi Menyusun Pedoman Penataan Standar Pelayanan di Kementerian PPN/BAPPENAS



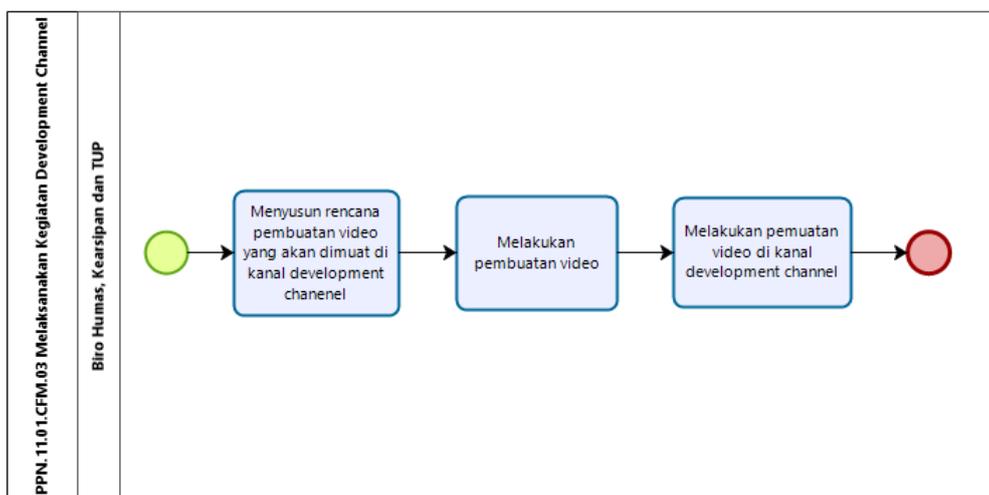
yyy. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Publikasi Media Massa



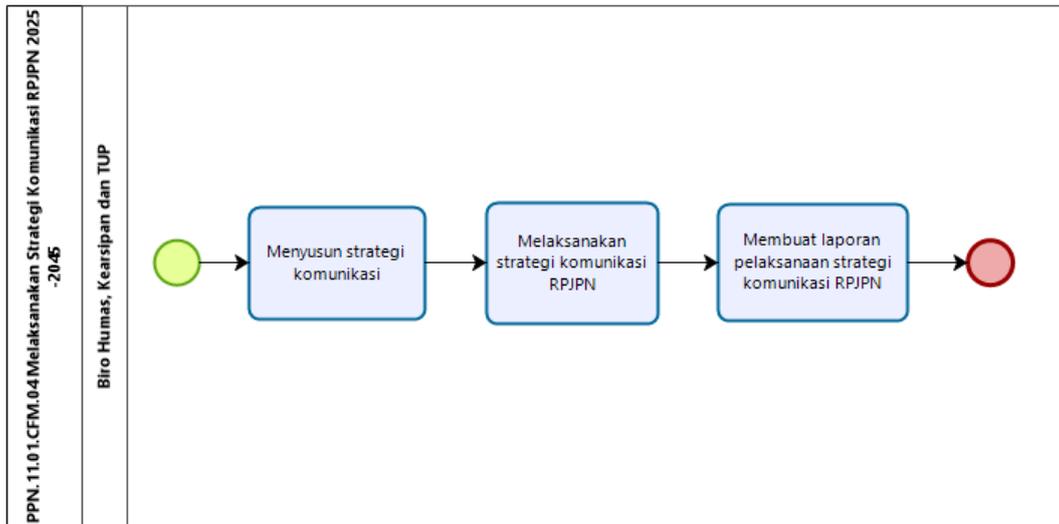
zzz. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Komunikasi Publik



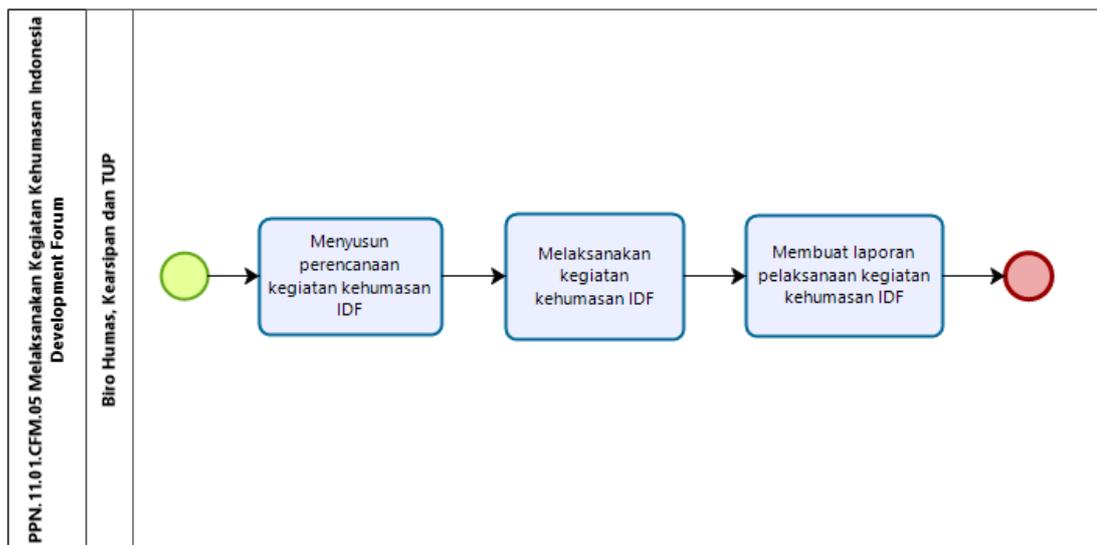
aaaa. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Development Channel



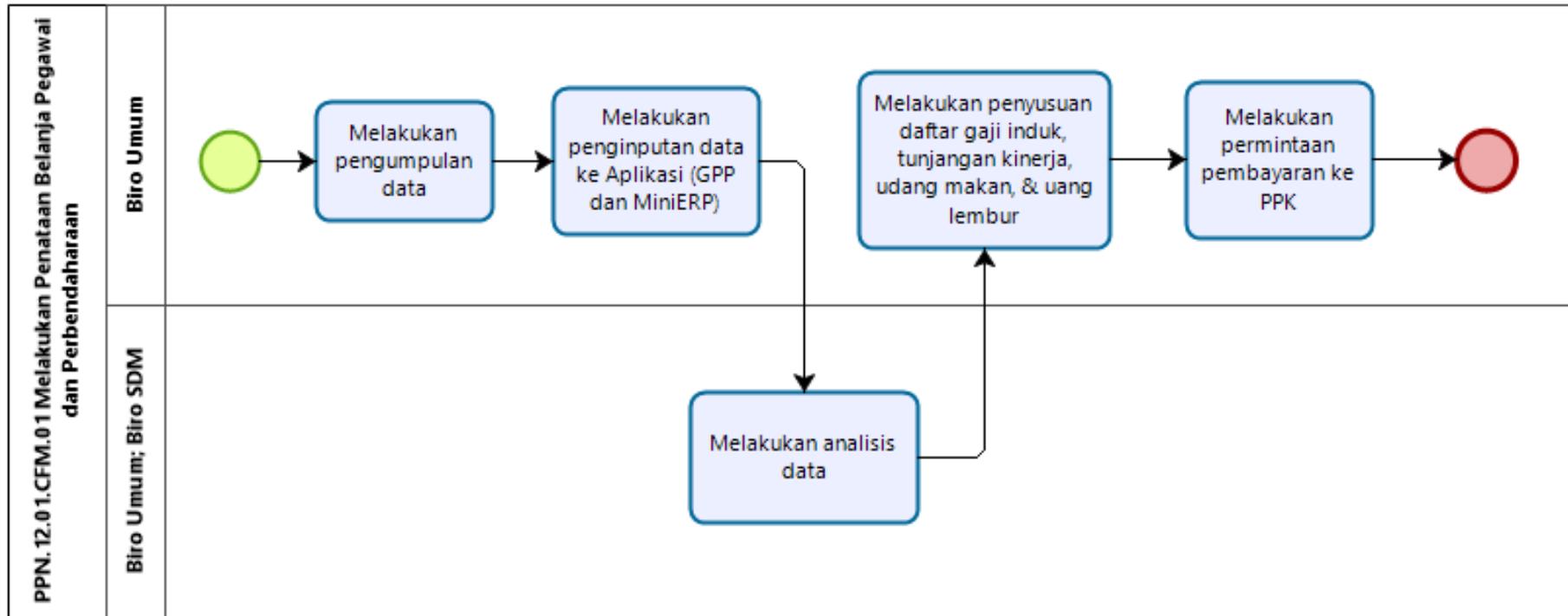
bbbb. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Strategi Komunikasi RPJPN 2025-2045



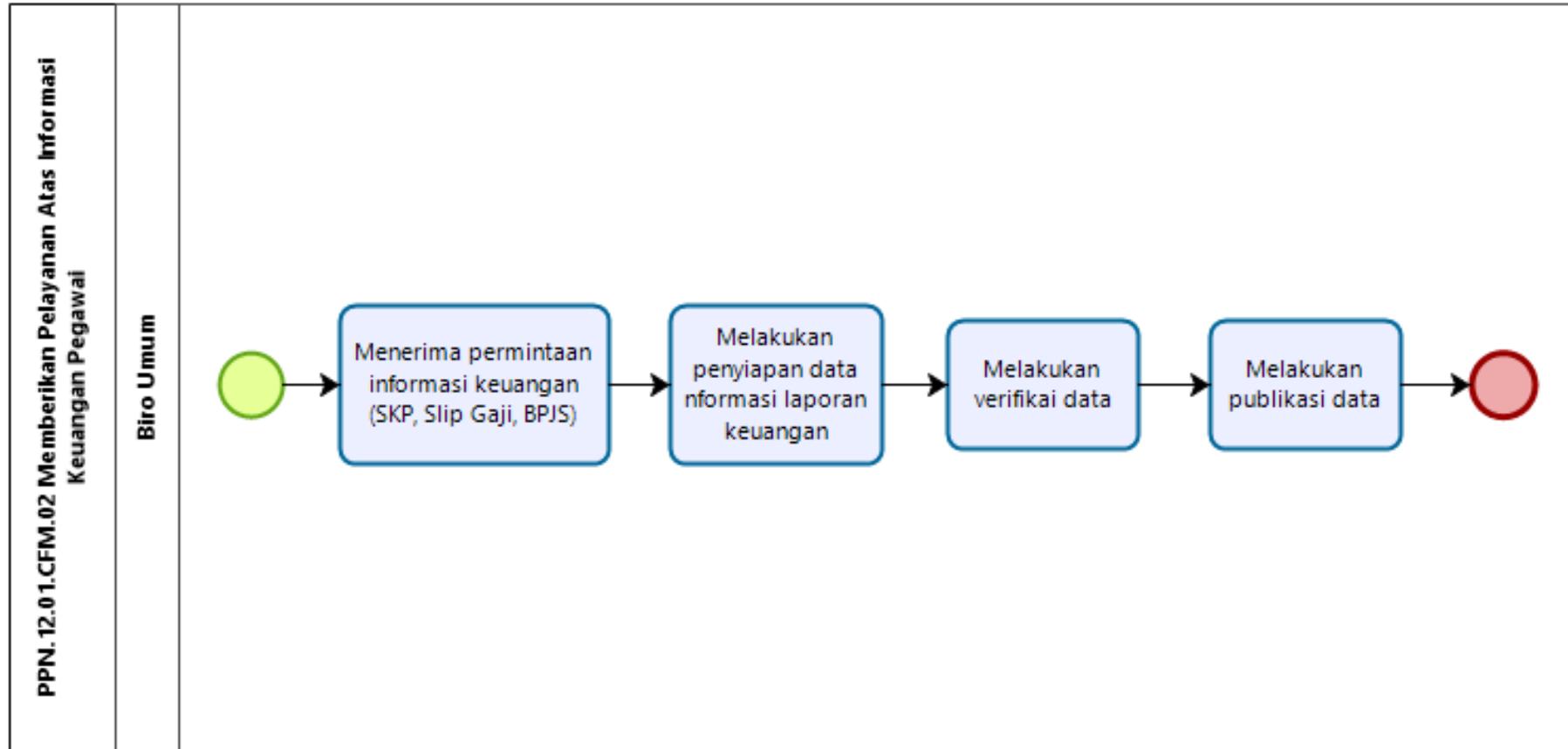
cccc. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Kegiatan Kehumasan Indonesia Development Forum



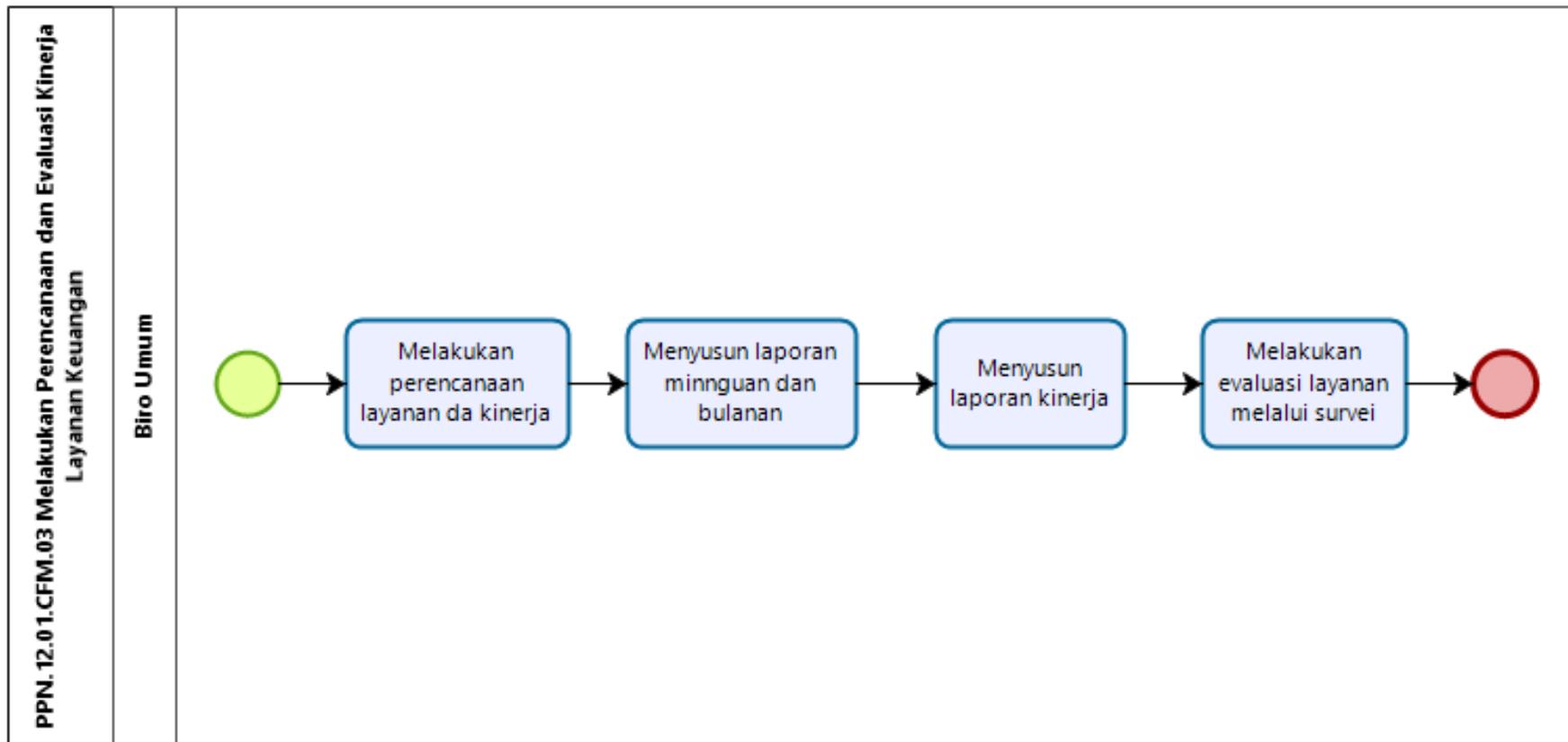
dddd. Peta Lintas Fungsi Melakukan Penataan Belanja Pegawai dan Perbendaharaan



eeee. Peta Lintas Fungsi Memberikan Pelayanan Atas Informasi Keuangan Pegawai



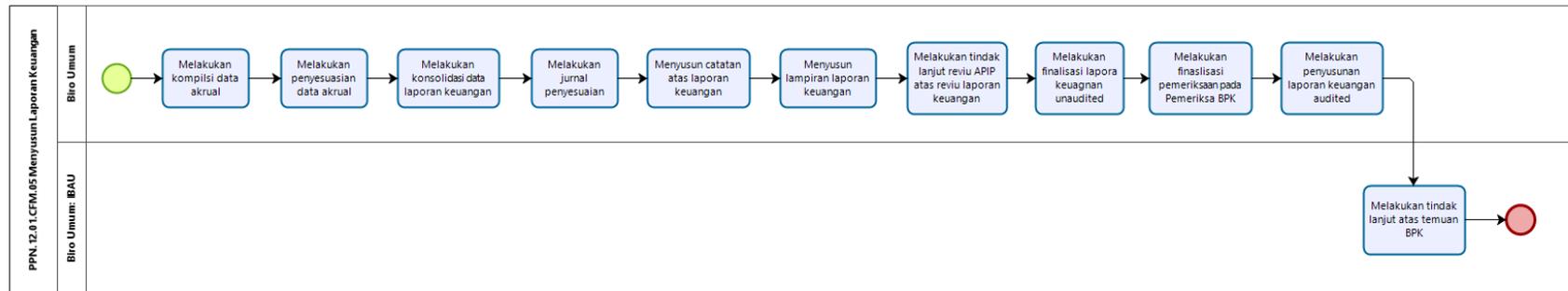
ffff. Peta Lintas Fungsi Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Layanan Keuangan



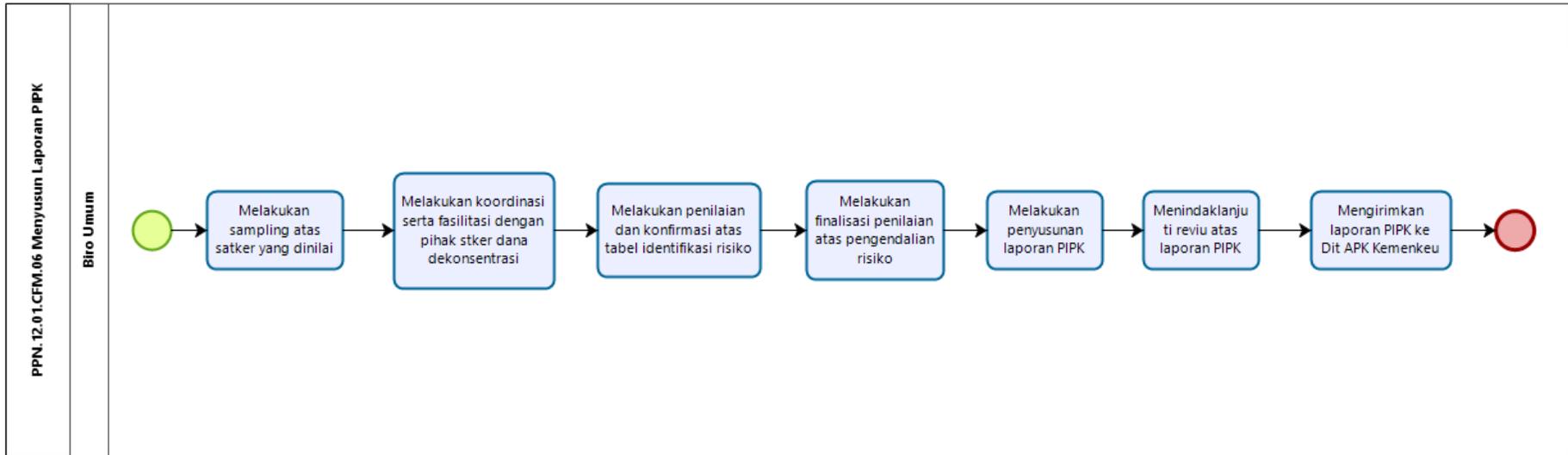
gggg. Peta Lintas Fungsi Melakukan Analisis Atas Penyusunan Laporan Keuangan



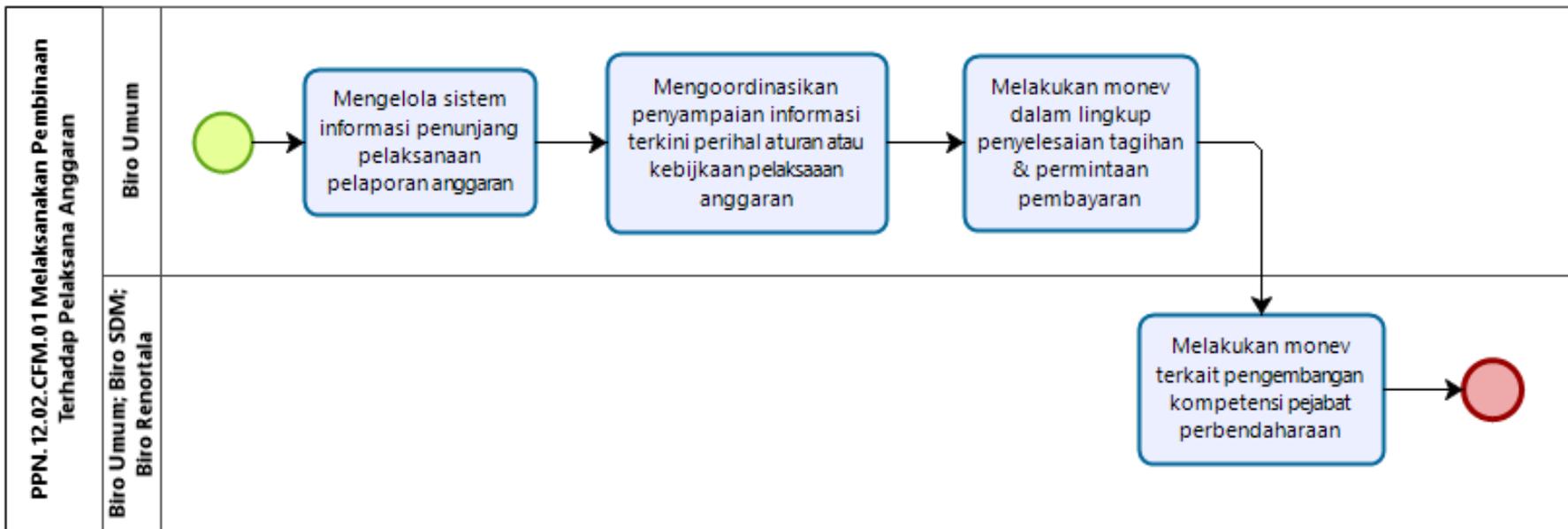
hhhh. Peta Lintas Fungsi Menyusun Laporan Keuangan



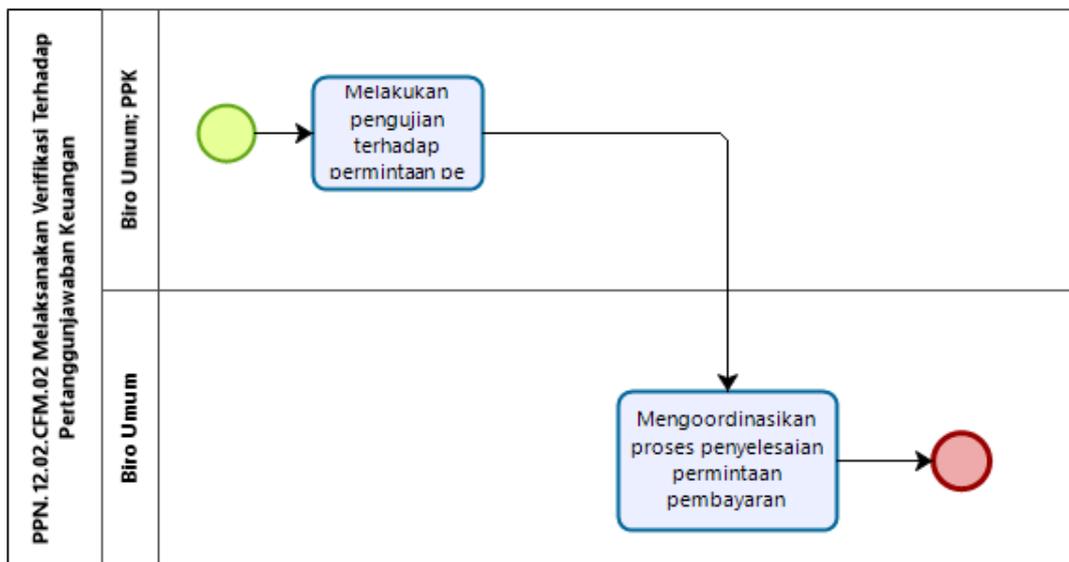
iii. Peta Lintas Fungsi Menyusun Laporan PIPK



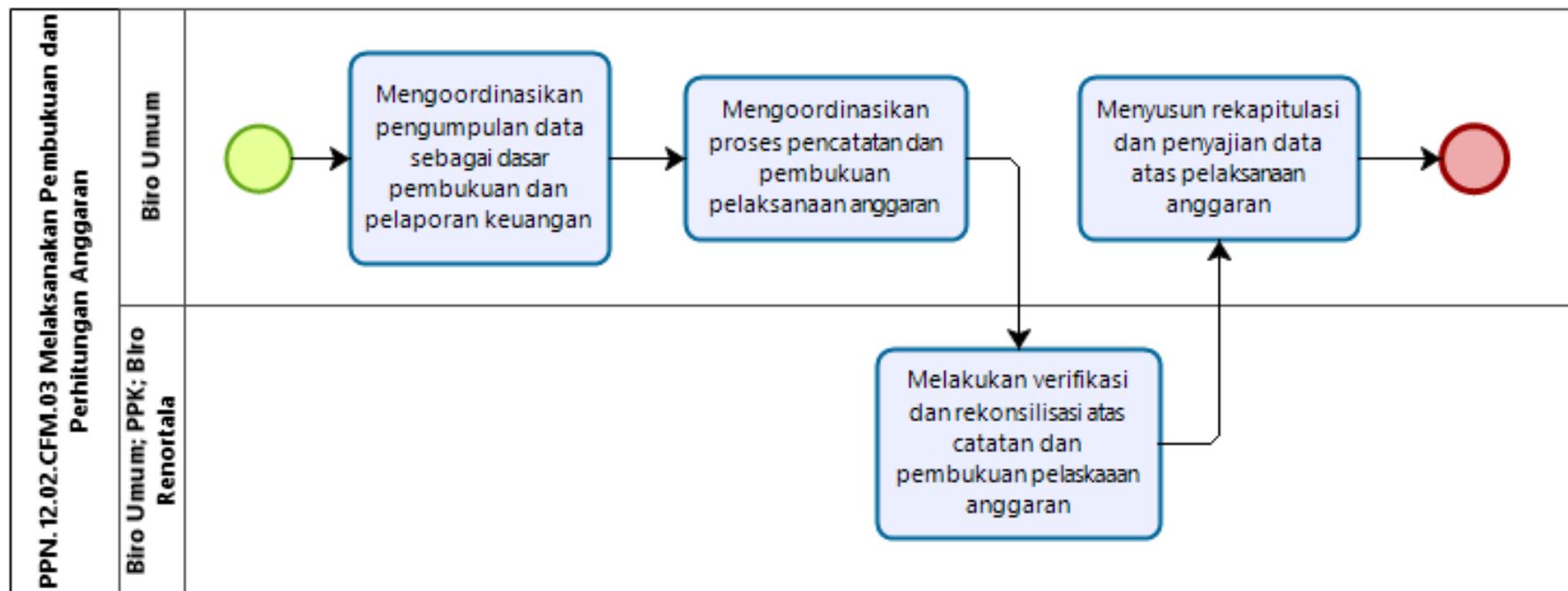
jjjj. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pembinaan Terhadap Pelaksana Anggaran



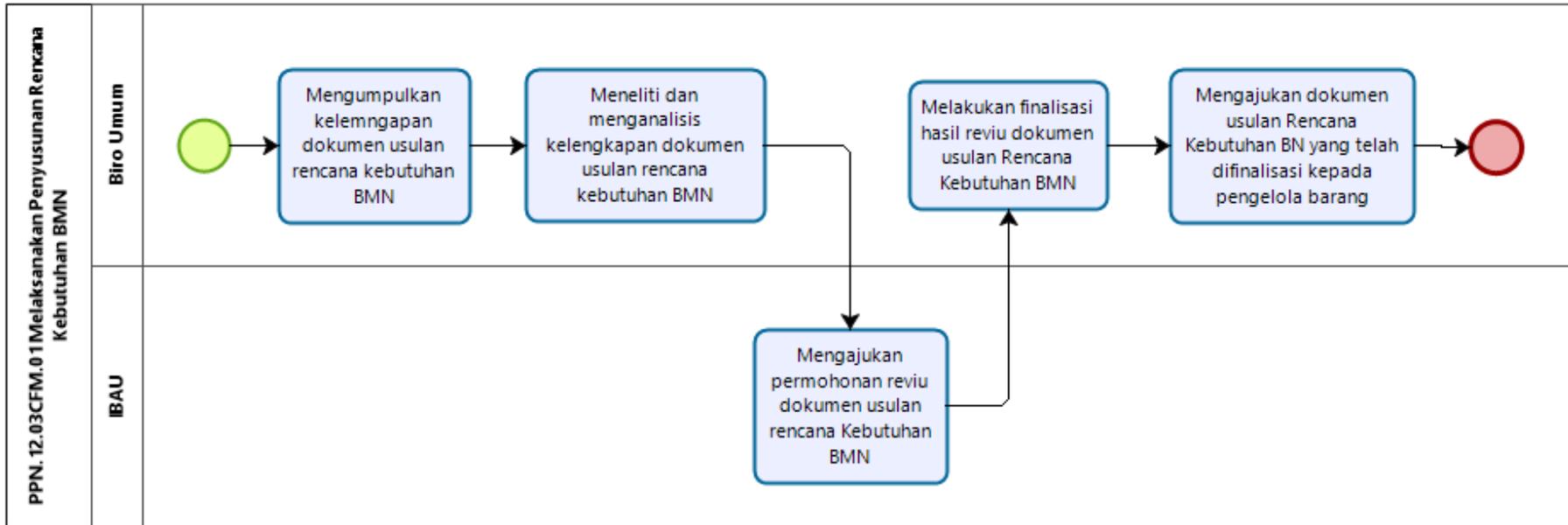
kkkk. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Verifikasi Terhadap Pertanggungjawab Keuangan



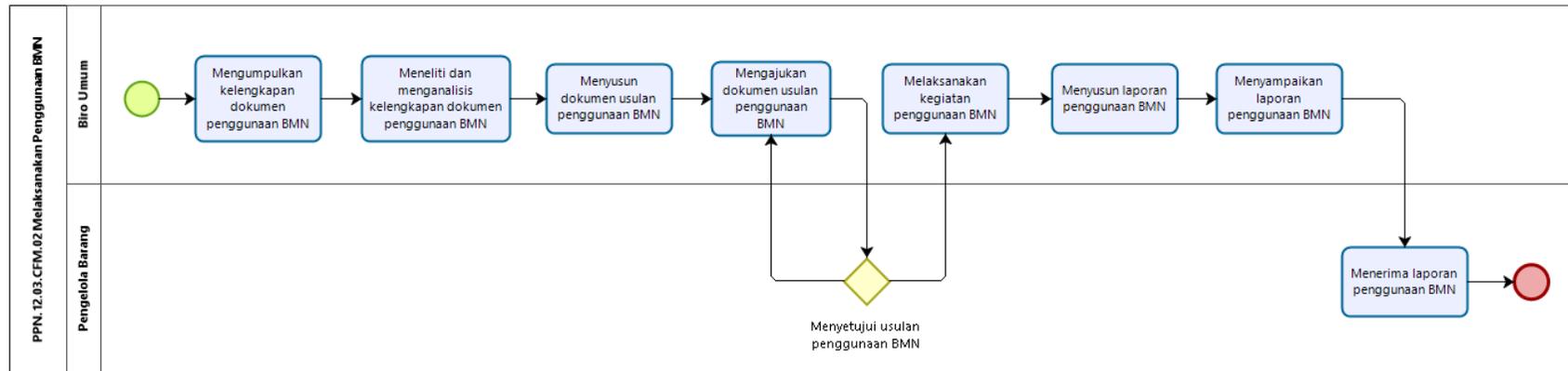
III. Peta Lintas Fungsi



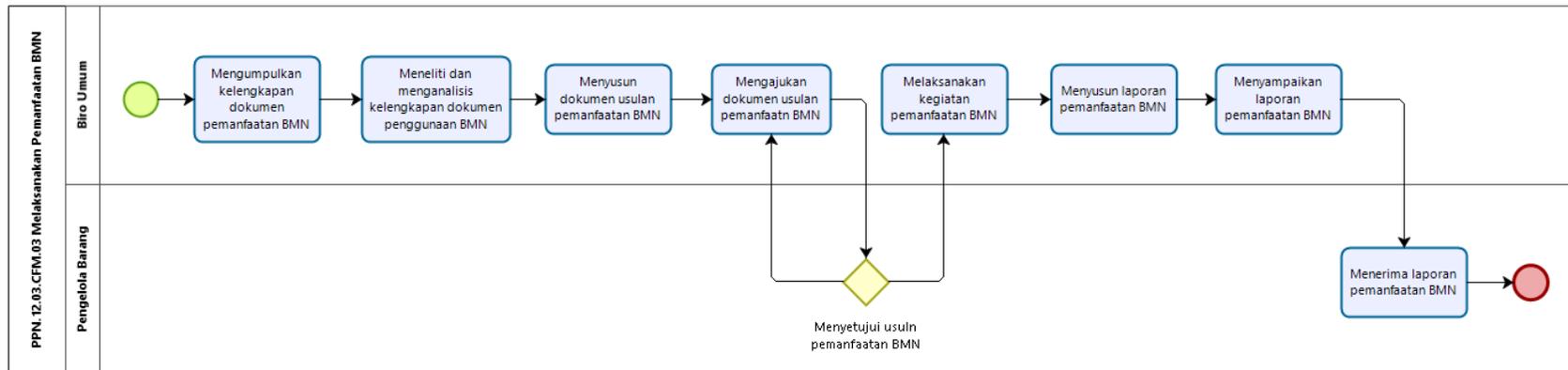
mmmm. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Penyusunan Renstra Kebutuhan Barang Milik Negara



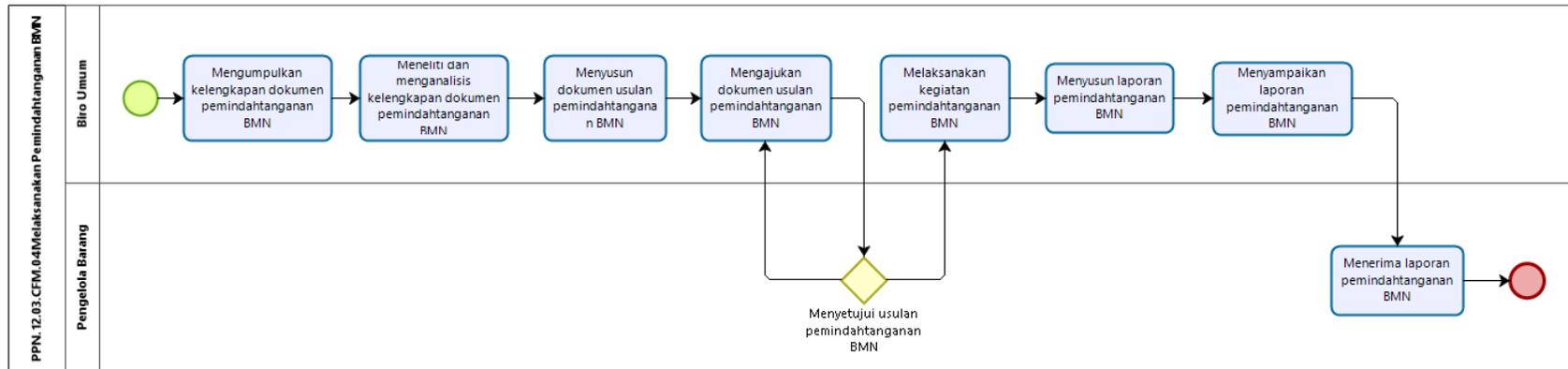
nnnn. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Penggunaan Barang Milik Negara



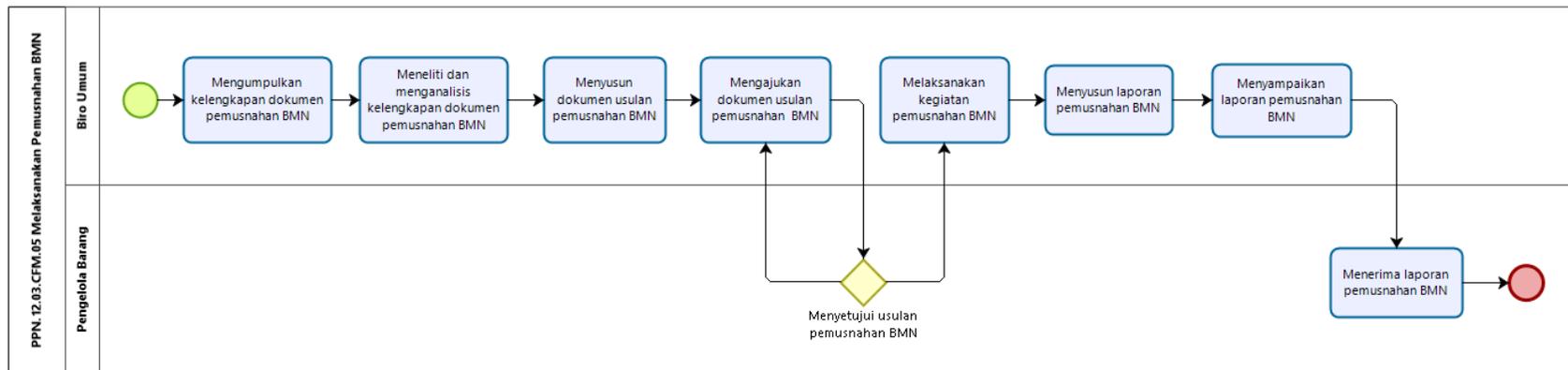
oooo. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pemantauan Barang Milik Negara



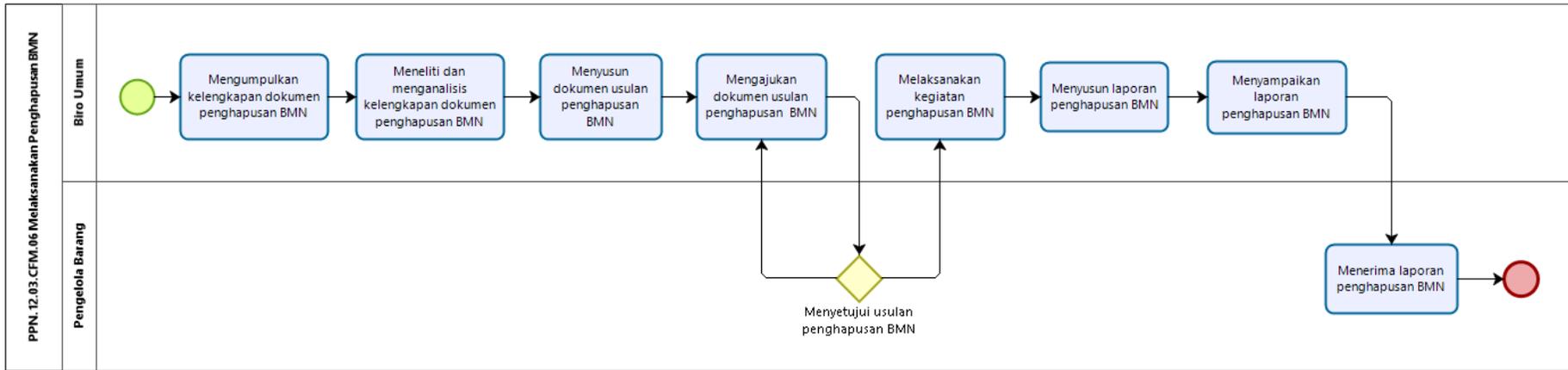
pppp. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pemindahan Barang Milik Negara



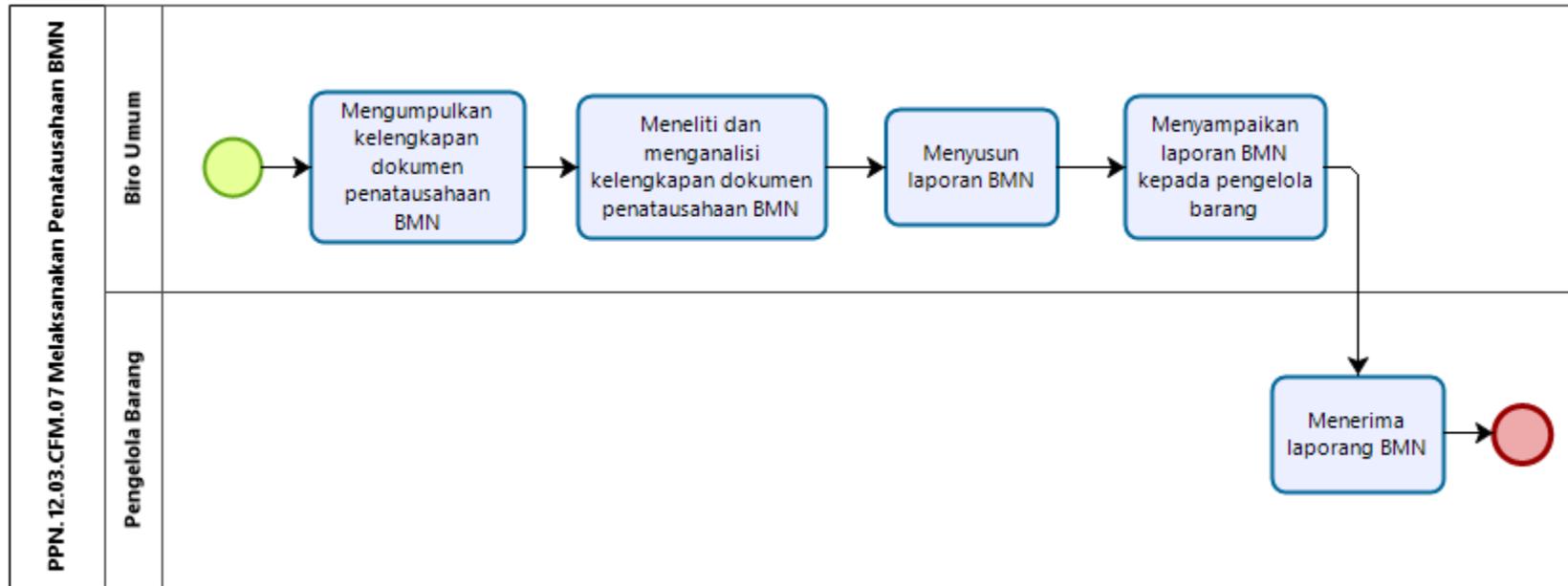
qqqq. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pemusnahan Barang Milik Negara



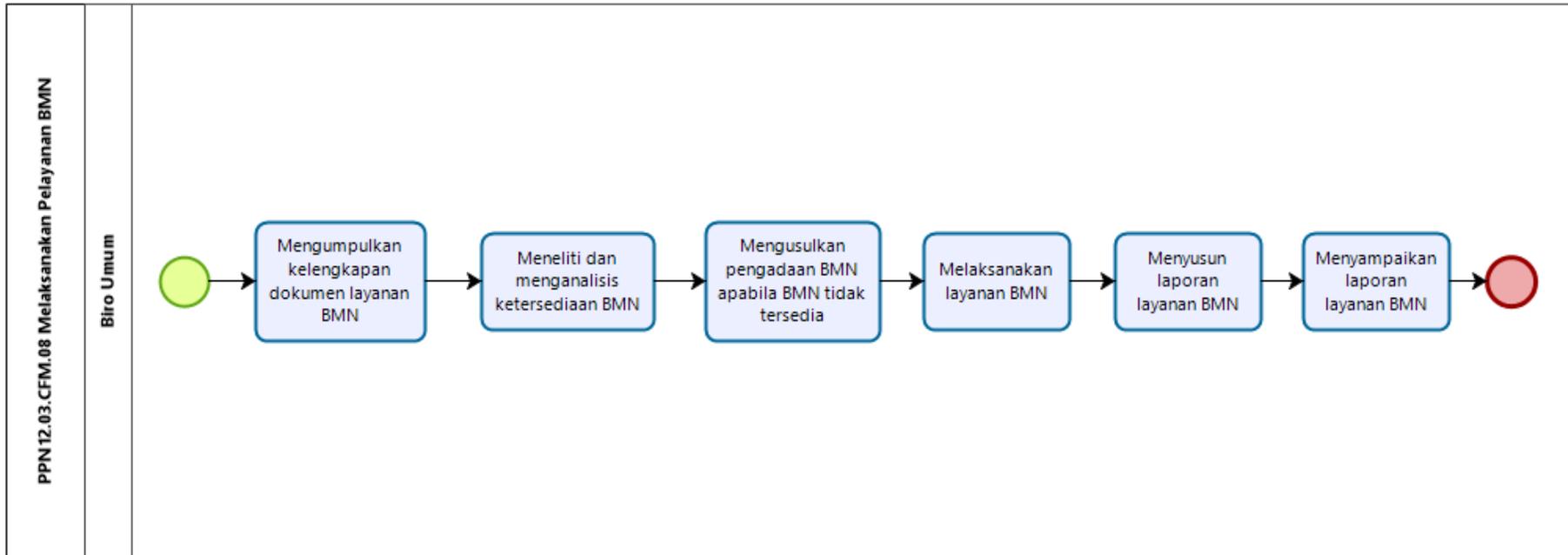
rrrr. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara



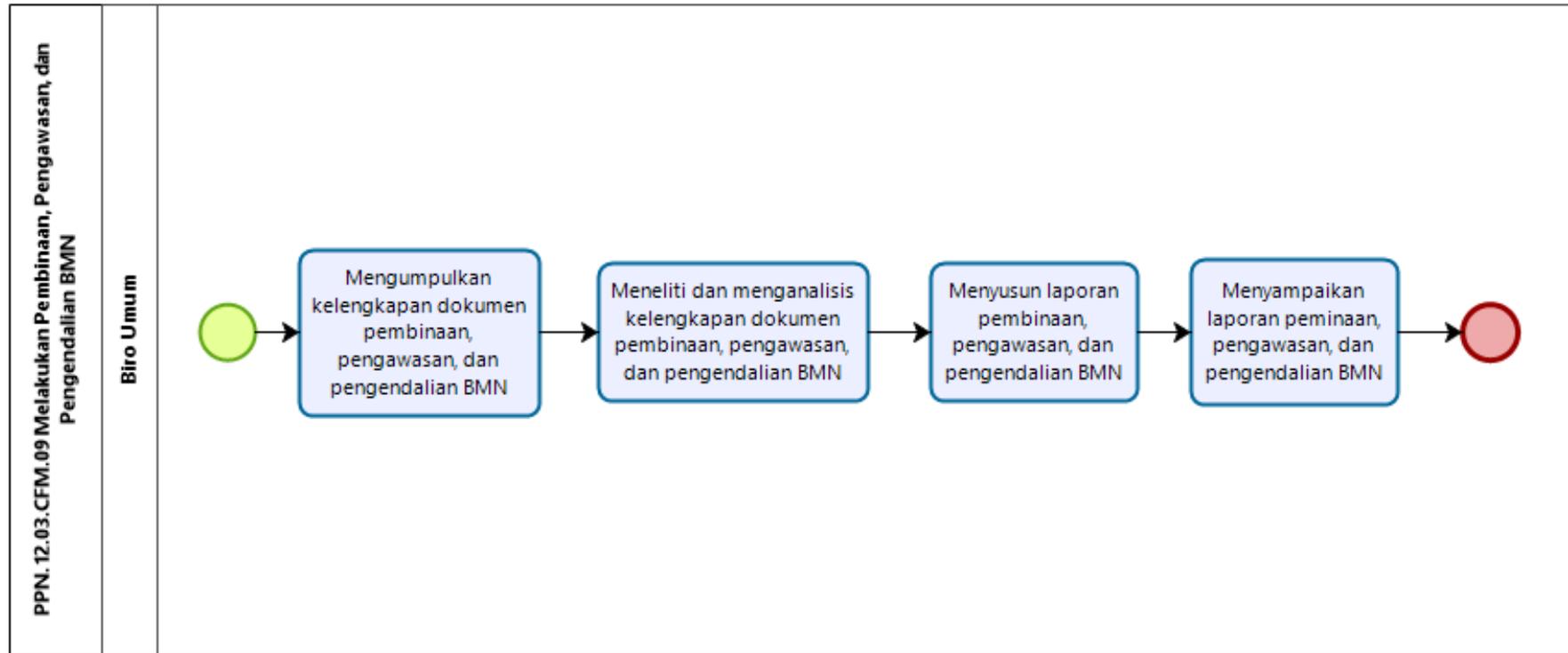
ssss. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara



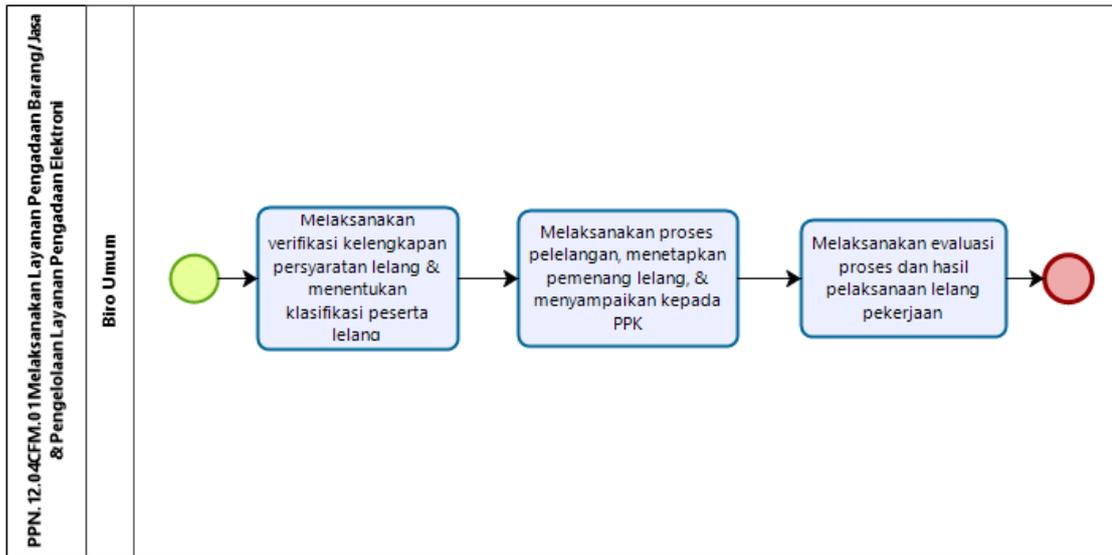
tttt. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Pelayanan Barang Milik Negara



uuuu. Peta Lintas Fungsi Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara



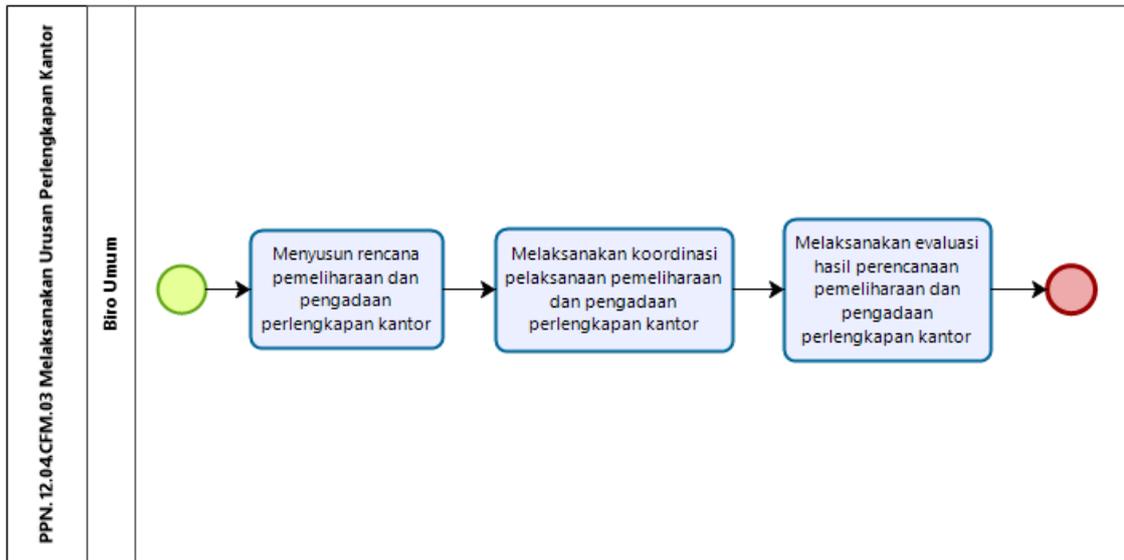
www. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Elektronik



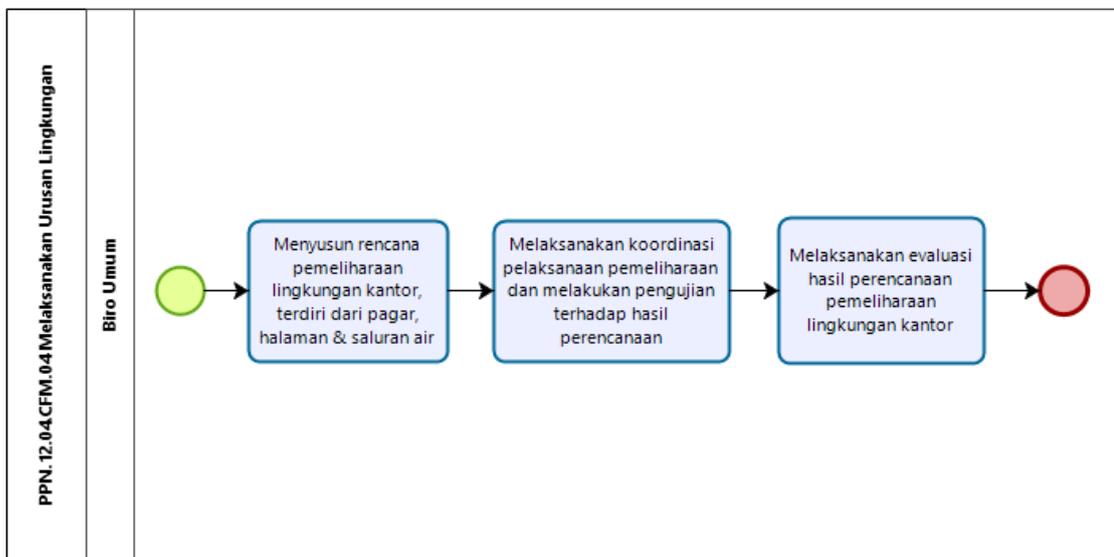
www. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Pemeliharaan Bangunan, Gedung, dan Rumah Tangga



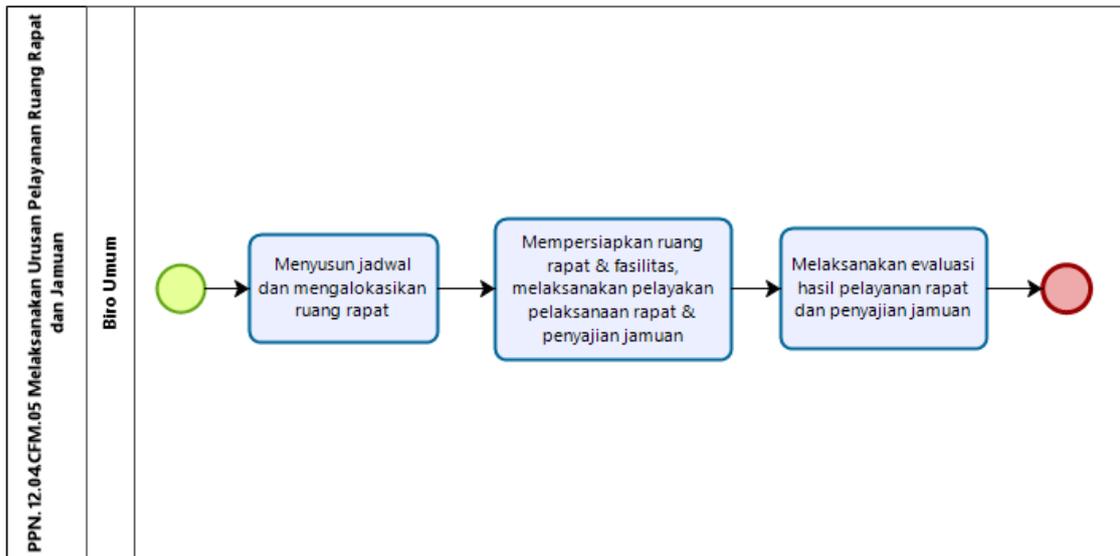
xxxx. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Perlengkapan Kantor



yyyy. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Lingkungan



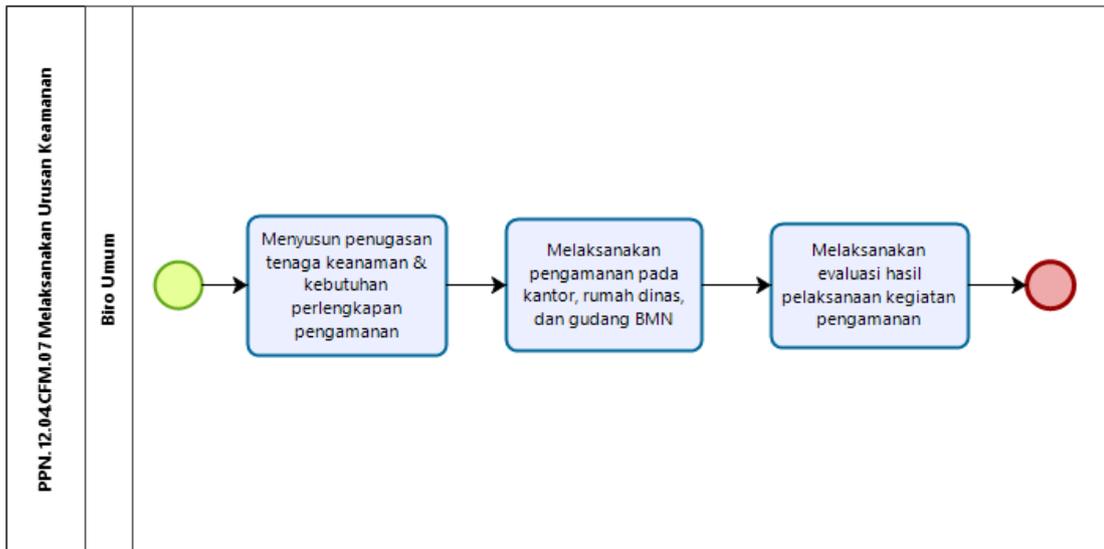
zzzz. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Pelayanan Ruang Rapat



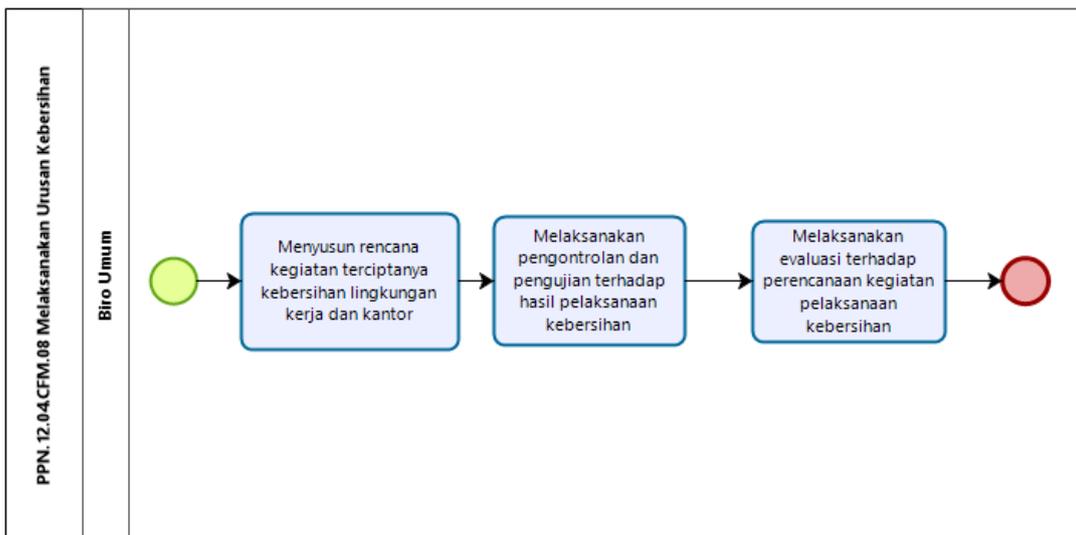
aaaaa. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Penatausahaan Langganan Daya dan Jasa



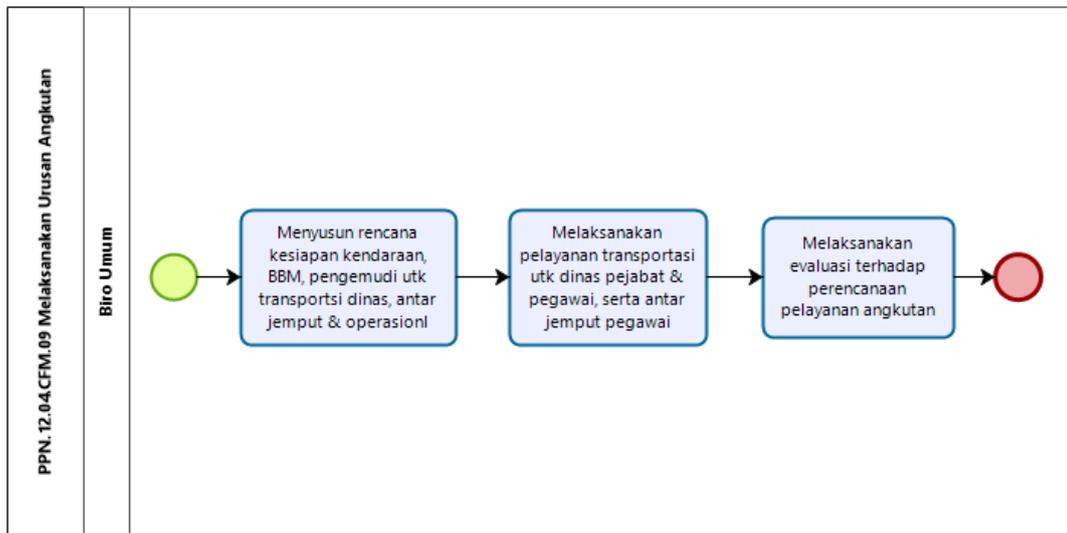
bbbb. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Keamanan



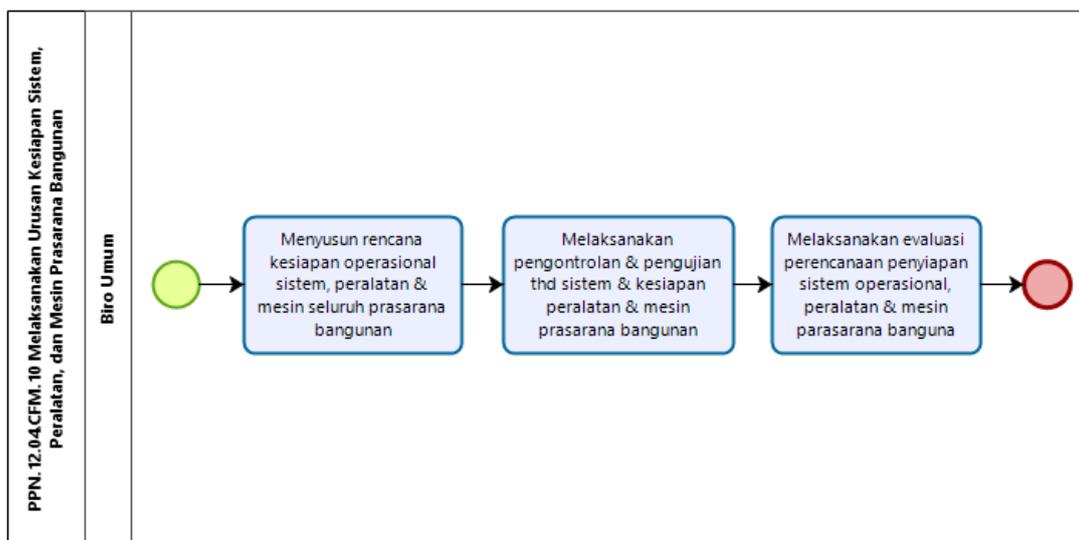
cccc. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Kebersihan



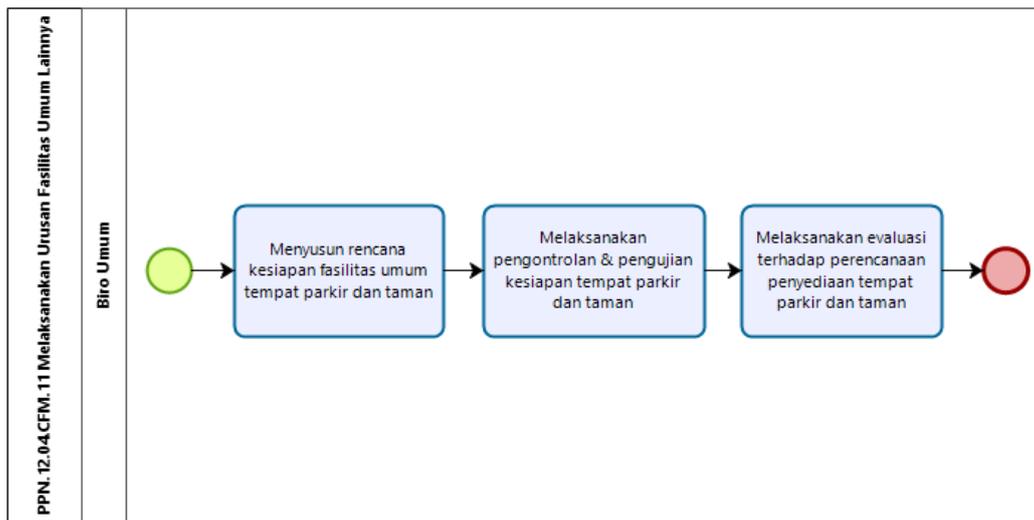
ddddd. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Angkutan



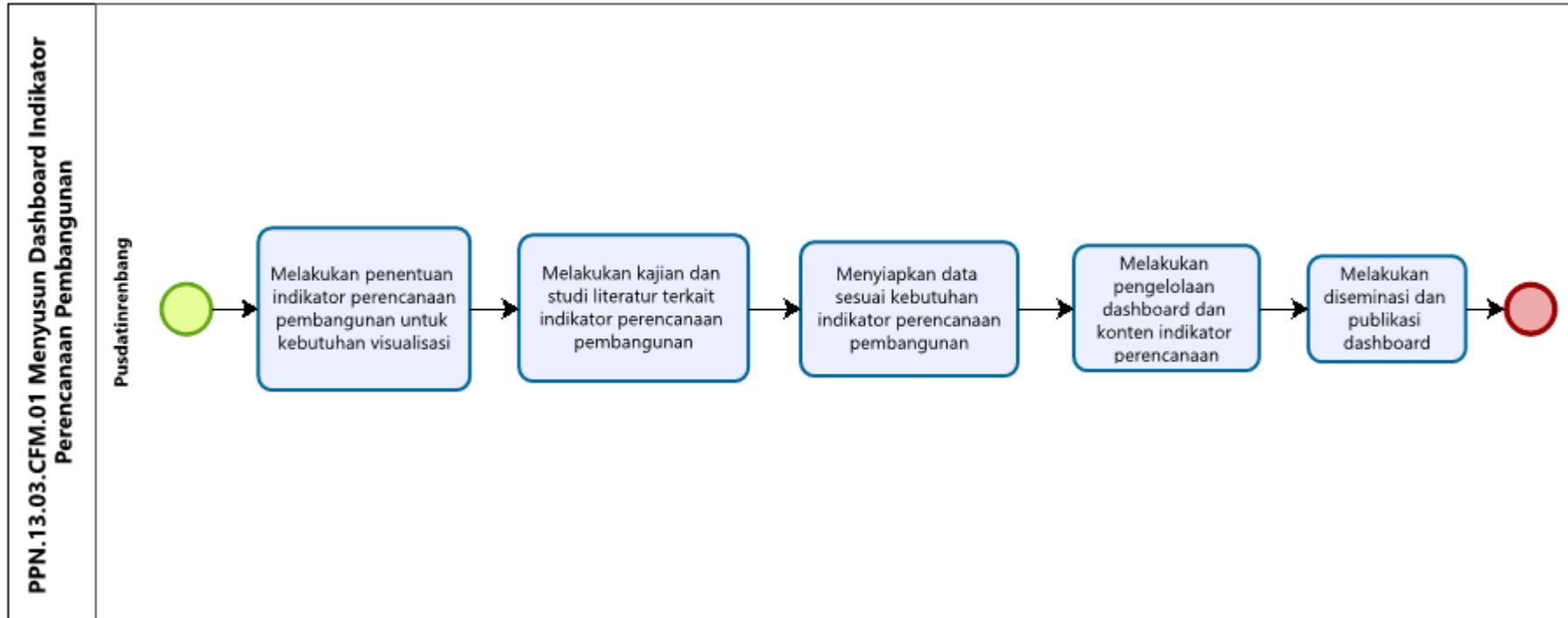
eeeeee. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Kesiapan Sistem, Peralatan, dan Mesin Prasarana Bangunan



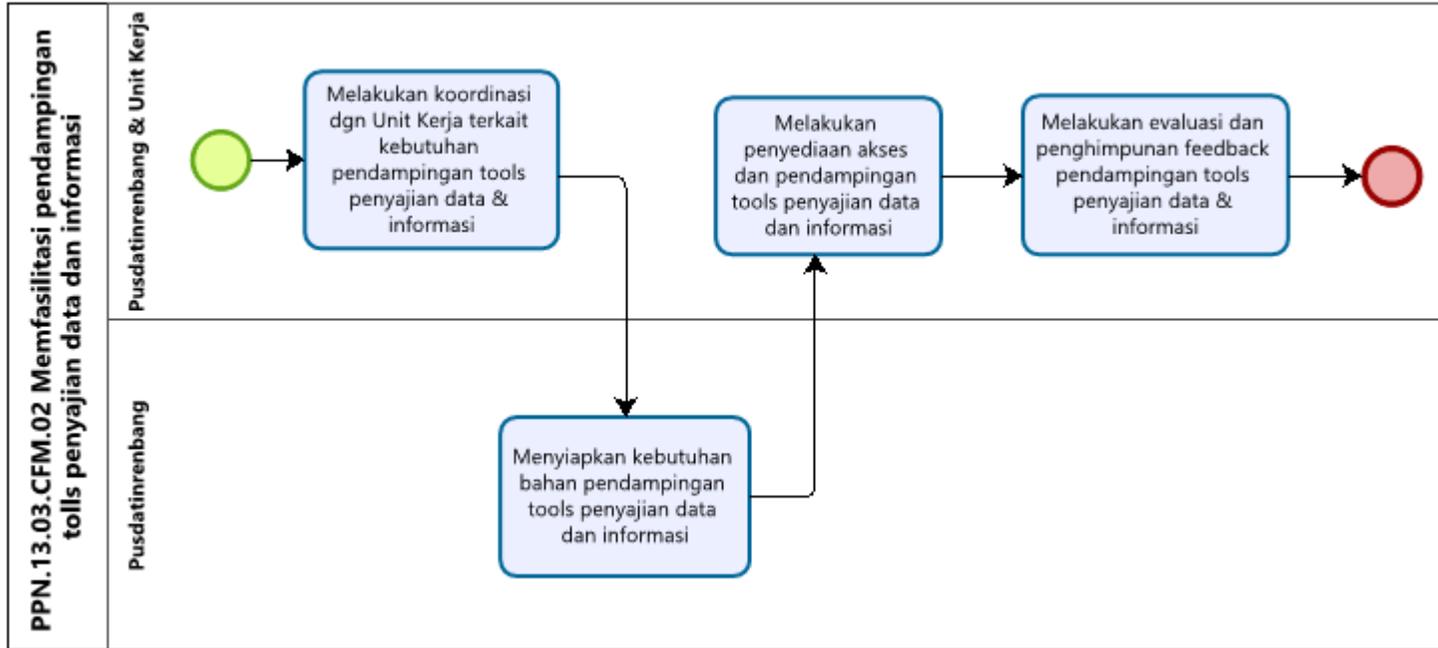
ffff. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan Urusan Fasilitas Umum Lainnya



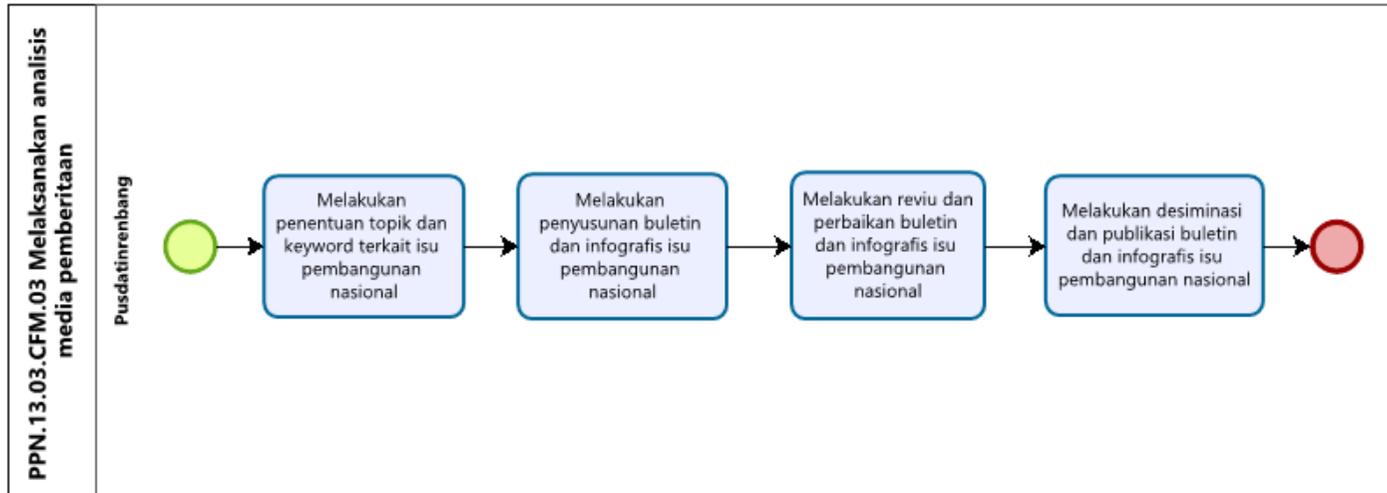
gggg. Peta Lintas Fungsi Menyusun Dashboard Indikator Perencanaan Pembangunan



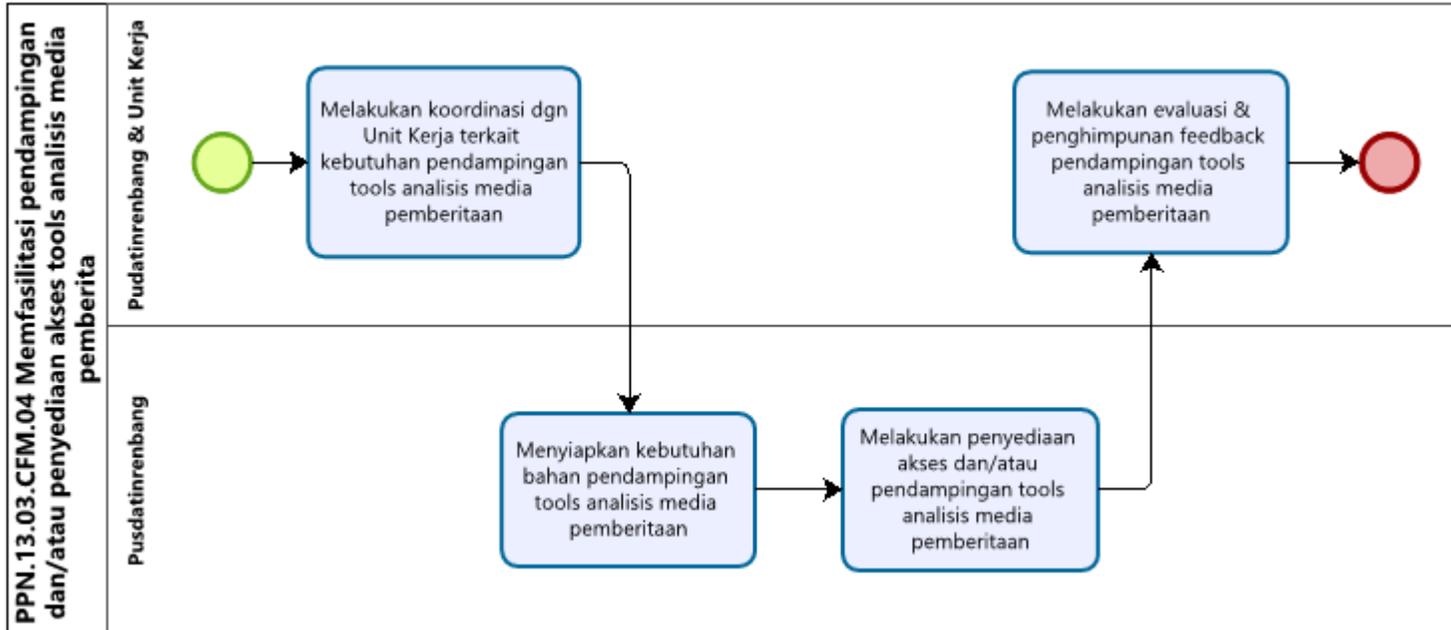
hhhh. Peta Lintas Fungsi Memfasilitasi pendampingan tools penyajian data dan informasi



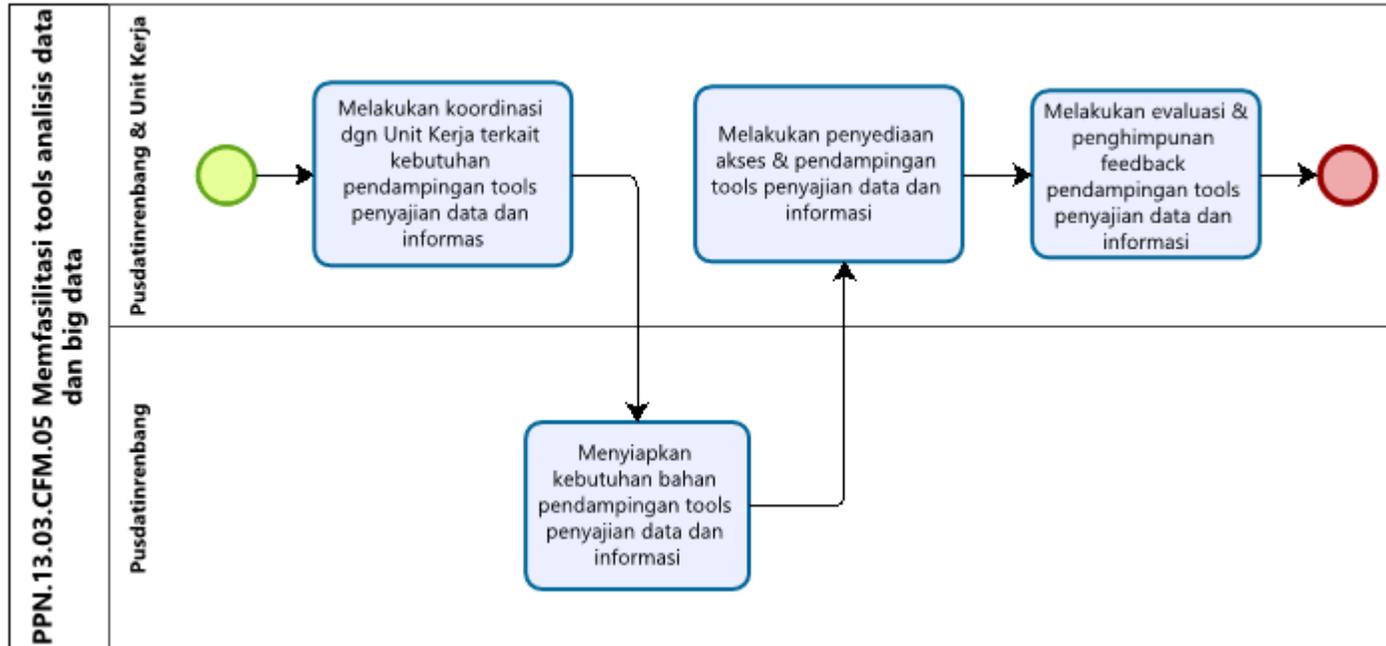
iiii. Peta Lintas Fungsi Melaksanakan analisis media pemberitaan



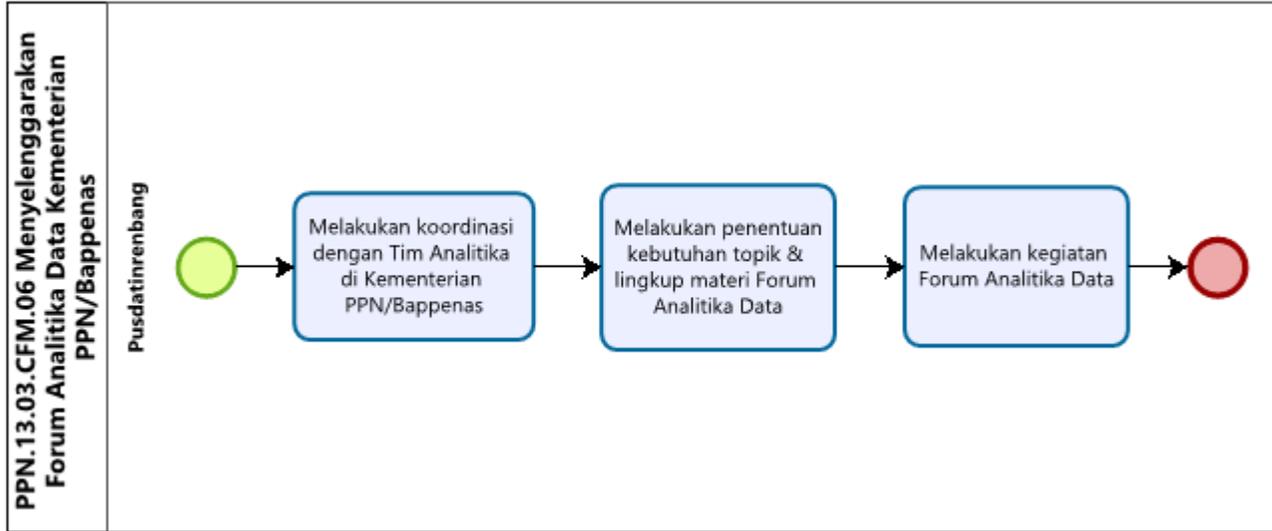
jjjj. Peta Lintas Fungsi Memfasilitasi pendampingan dan/atau penyediaan akses tools analisis media pemberita



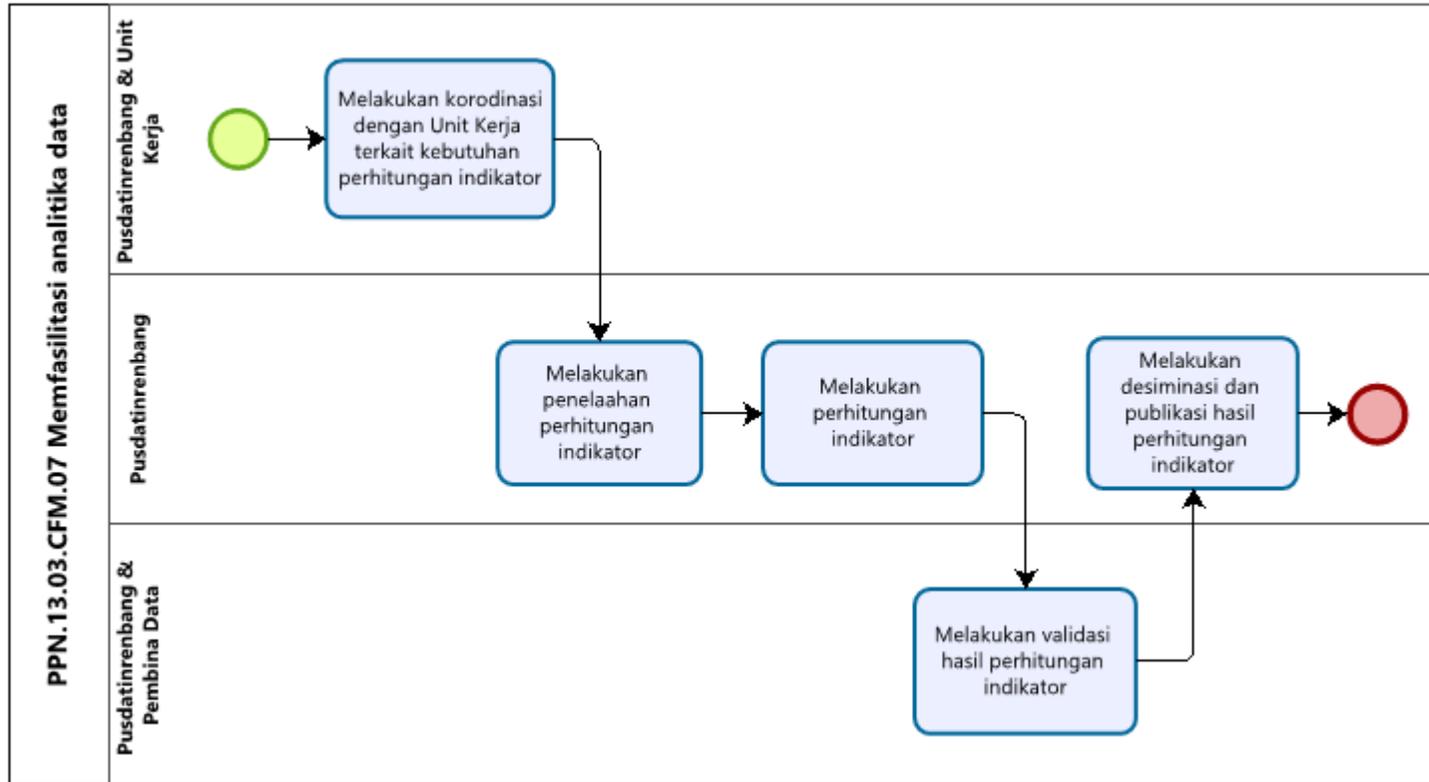
kkkk. Peta Lintas Fungsi Memfasilitasi tools analisis data dan big data



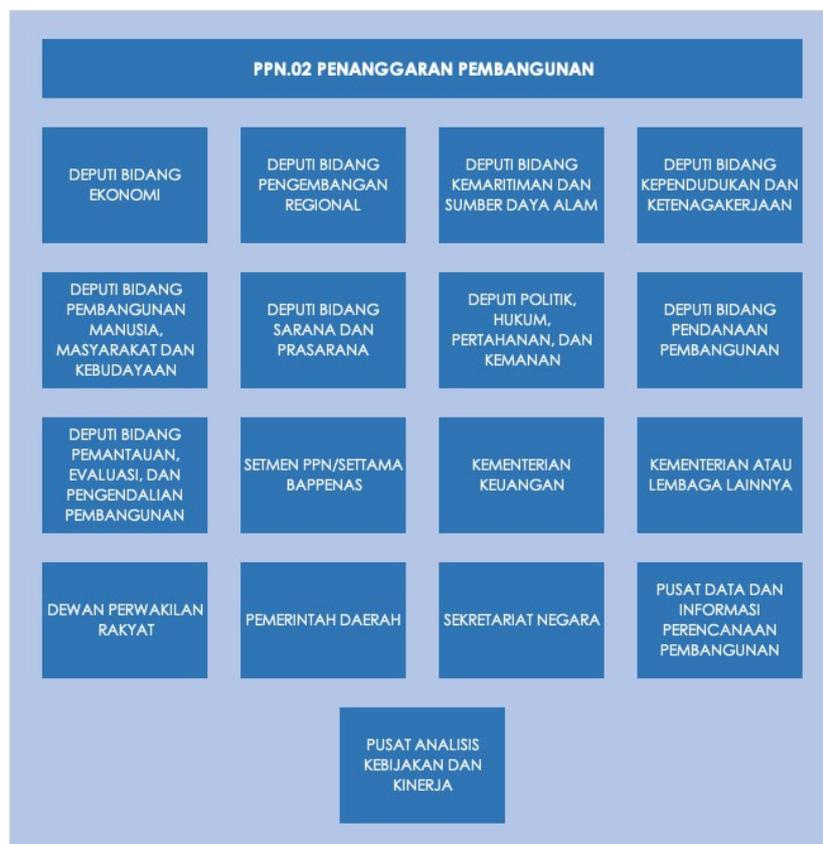
III. Peta Lintas Fungsi Menyelenggarakan Forum Analitika Data Kementerian PPN/Bappenas



mmmm. Peta Lintas Fungsi Memfasilitasi analitika data



D. Bagan Peta Relasi



PPN.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMANAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

KEMENTERIAN ATAU
LEMBAGA LAINNYA

PEMERINTAH DAERAH

PPN.04 ENABLER (PRAKARSA STRATEGIS)

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMANAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

PUSAT-PUSAT

KEMENTERIAN ATAU
LEMBAGA DAN
PEMERINTAH DAERAH

PPN.05 MANAJEMEN KELEMBAGAAN

DEPUTI BIDANG EKONOMI	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEMANAN	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	SETMEN PPN/SETTAMA BAPPENAS	PUSAT-PUSAT	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PPN.06 MANAJEMEN KINERJA

DEPUTI BIDANG EKONOMI	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEMANAN	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	SETMEN PPN/SETTAMA BAPPENAS	PUSAT-PUSAT	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PPN.07 MANAJEMEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERN

DEPUTI BIDANG EKONOMI	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEMANAN	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	SETMEN PPN/SETTAMA BAPPENAS	INSPEKTORAT	PUSAT-PUSAT

PPN.08 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DEPUTI BIDANG EKONOMI	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	DEPUTI POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEMANAN	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	SETMEN PPN/SETTAMA BAPPENAS	PUSAT-PUSAT	BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL

PPN.09 MELAKSANAKAN PELAYANAN LEGISLASI DAN LITIGASI

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMAMAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

PUSAT-PUSAT

KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI
MANUSIA

KEMENTERIAN ATAU
LEMBAGA LAINNYA

PPN.10 MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMAMAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

PUSAT-PUSAT

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI
BIROKRASI

PPN.11 PELAYANAN KEHUMASAN, KEARSIPAN, KEPROTOKOLAN/PERSIDANGAN DAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMANAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

PUSAT-PUSAT

KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI

ARSIP NASIONAL
INDONESIA

SEKRETARIAT NEGARA

PPN.12 MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMANAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

PUSAT-PUSAT

KEMENTERIAN
KEUANGAN

**PPN.13 MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**

DEPUTI BIDANG
EKONOMI

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
REGIONAL

DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DEPUTI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG
SARANA DAN
PRASARANA

DEPUTI POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEMANAN

DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG
PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SETMEN PPN/SETTAMA
BAPPENAS

PUSAT-PUSAT

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI
BIROKRASI

KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI

KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI

BADAN SIBER DAN
SANDI NEGARA

E. Penutup

Peta proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas disusun sebagai gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*core business*) Kementerian PPN/Bappenas. Selain dari *core business*, juga terdapat proses pendukung (*supporting process*). Proses pendukung adalah proses yang menjadi pendukung pelaksanaan urusan utama dari organisasi seperti pengelolaan organisasi dan tata laksana, SDM, TIK dan publikasi, anggaran dan keuangan, ketatausahaan dan BMN, pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi, dan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan dan protokol. Seluruh urusan pendukung ini masuk dalam kategori supporting dalam organisasi.

Peta proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah agar mudah dibaca dan dipahami dengan menjelaskan secara makro hal-hal yang Kementerian PPN/Bappenas kerjakan dan bagaimana proses kerja makronya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas, setiap pimpinan unit kerja harus menindaklanjuti Keputusan Menteri ini dengan menyusun Standar Operasional Prosedur di unit kerjanya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati